

**PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KONSTITUSI**

LAPORAN KEGIATAN
Bimbingan Teknis Hukum
Acara Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Tahun 2024
bagi
Advokat Angkatan VI

Bogor, 27 s.d. 29 November 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para anggota Ikatan Penasehat Hukum Indonesia, Serikat Pengacara Indonesia, Perkumpulan Advocate dan Pengacara Nusantara, Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, Advokat Bangsa Indonesia, Perkumpulan Advocaten Indonesia mengenai konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Kegiatan ini dibuka oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Republik Indonesia, serta dihadiri oleh pimpinan masing-masing organisasi advokat, Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
A. PENDAHULUAN	1
A.1. Umum	1
A.2. Tujuan.....	4
B. PELAKSANAAN KEGIATAN	5
B.1. Nama Kegiatan	5
B.2. Waktu dan Tempat.....	5
B.3. Peserta Kegiatan.....	5
B.4. Akomodasi Peserta	7
B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat	7
B.6. Uraian Kegiatan	7
B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta.....	7
B.6.2. Penjelasan Teknis dan <i>Pre Test</i>.....	7
B.6.3. Acara Pembukaan	8
B.6.4. Penyampaian Materi	8
B.6.5. Acara Penutupan.....	10
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN	11
C.1. Hasil <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i>.....	11
C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner	11
D. HAMBATAN	20
E. PENUTUP	20
F. LAMPIRAN	21

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan
2. Jadwal Kegiatan
3. Booklet Penyelenggaraan Kegiatan
4. Bahan Penjelasan Teknis
5. Panduan Penggunaan SIMULTAN
6. Panduan Moderator
7. Panduan Narasumber
8. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta
9. Kumpulan Materi Narasumber
10. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas
11. Surat Tugas Narasumber
12. Surat Perjanjian Kerjasama
13. Daftar Hadir Peserta
14. Informasi dan ketentuan Tugas Praktek
15. Penilaian Hasil Praktek Peserta
16. Rekap Lembar Evaluasi oleh Narasumber
17. Daftar Pertanyaan Peserta
18. Tata Tertib Peserta
19. Alur Kegiatan *Offline*
20. Laporan Keuangan
21. Surat Tugas Peserta
22. Data Peserta Registrasi

PENDAHULUAN



PELAKSANAAN KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI ADVOKAT ANGKATAN VI

Senin s.d. Rabu, 27 s.d. 29 November 2023

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) pengkhianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 yang akan dilakukan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, MK memiliki tanggungjawab terhadap suksesnya keseluruhan proses pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari kewenangan MK yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Sesuai amanat Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak diselenggarakan di tahun 2024. Pemilu ini akan menjadi pemilihan yang terbesar dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Pemilu ini akan memperebutkan 84 Dapil DPR RI, 272 Dapil DPRD Provinsi, dan 2.206 Dapil DPRD Kabupaten dan Kota di 38 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota diseluruh wilayah Indonesia.

Melihat kondisi obyektif tersebut, berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini (KPU, Bawaslu, Aparatur Penegak Hukum baik MA dan lembaga peradilan di bawahnya, Kepolisian, termasuk para kontestan dan para Advokat/Pengacara) harus mempersiapkan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini dengan lebih matang dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya.

Sebagai lembaga peradilan terkait politik, MK dengan kewenangan yang dimilikinya tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh pelanggaran-pelanggaran Pemilu, terutama yang berupa tindak pidana maupun pelanggaran administratif lainnya, karena pelanggaran ini berada dalam wilayah kewenangan badan peradilan lain. Oleh karenanya, peran MK dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berkeadilan sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi lembaga ataupun dukungan berbagai pihak, khususnya para *stakeholder*, yakni penyelenggara Pemilu, dan peserta Pemilu itu sendiri.

Dalam praktiknya, pengetahuan dan kemampuan para *stakeholder* kelak akan sangat mempengaruhi kualitas dan efektifitas jalannya persidangan. Sebab, seringkali para pihak yang berperkara di MK masih kurang mengetahui, memahami, dan menguasai seluk beluk berperkara di MK. Mulai dari yang bersifat mendasar atau teknis hingga yang sangat berkaitan dengan hal-hal prinsip, seperti kemampuan menyusun dan merumuskan substansi pokok permohonan beserta argumentasinya agar mudah dimengerti dan langsung pada inti persoalan atau sengketa. Hal ini dapat dimaklumi karena memang hukum acara di MK tidak sama persis dengan persidangan pada umumnya, seperti yang berlaku di Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya.



Beberapa hal yang perlu diketahui para pihak adalah berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, khususnya hukum acara MK. Jika para *stakeholder* belum memiliki gambaran ataupun pengetahuan mendasar dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden di MK, akibatnya bisa saja berdampak terhambatnya persidangan yang seharusnya digelar secara cepat (*speedy trial*). Di samping itu, para *stakeholder* juga sangat perlu untuk mengetahui perkembangan putusan-putusan MK yang beberapa di antaranya menjadi rujukan dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan. Hal ini diperlukan agar proses peradilan cepat benar-benar dapat dilaksanakan oleh MK dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Dengan demikian, kebutuhan akan informasi dan pengetahuan akan seluk beluk perkara di MK, khususnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden bagi *stakeholder*, menjadi penting untuk diselenggarakan. Selain demi terwujudnya peradilan yang cepat, juga harapannya akan membuat persidangan di MK akan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga tercipta pemilu yang demokratis dan berkeadilan dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Atas dasar pemikiran ini, Mahkamah Konstitusi melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi Ikatan Penasehat Hukum Indonesia, Serikat Pengacara Indonesia, Perkumpulan Advocate dan Pengacara Nusantara, Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, Advokat Bangsa Indonesia, Perkumpulan Advocaten Indonesia sebagai pihak yang kemungkinan menjadi kuasa hukum para pihak pada sengketa Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Para peserta kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi sahabat MK, *friends of court*, *amicus curiae*, yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap peradilan (*Access to Court*) dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan (*Access to Justice*). Kondisi ini tentu saja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya cita negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*).



A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- e. Meningkatkan keterampilan beracara di Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.



PELAKSANAAN KEGIATAN



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI”.

B.2. Waktu dan Tempat

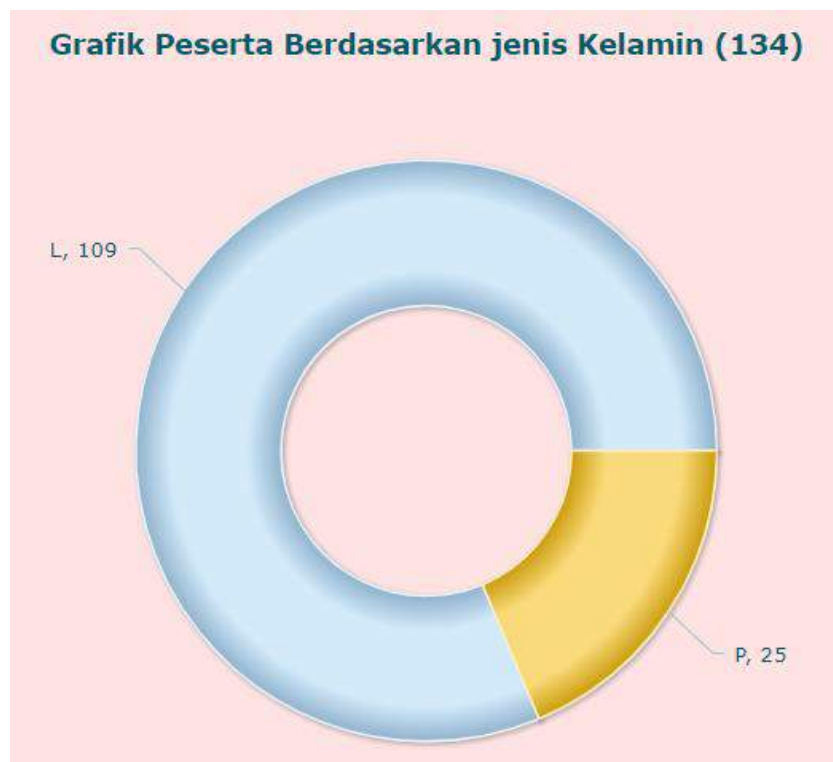
Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin s.d. Rabu, 27 s.d. 29 November 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

B.3. Peserta Kegiatan

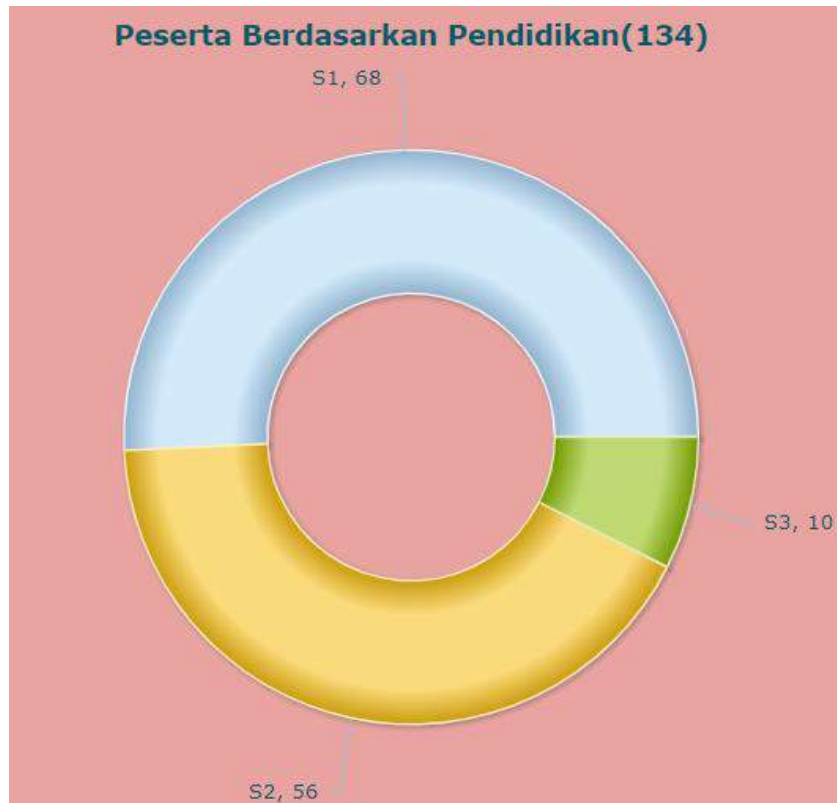
Peserta kegiatan sebanyak 134 orang pengurus dan/atau anggota Ikatan Penasehat Hukum Indonesia, Serikat Pengacara Indonesia, Perkumpulan Advocate dan Pengacara Nusantara, Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, Advokat Bangsa Indonesia, Perkumpulan Advocaten Indonesia. Seluruh peserta mengikuti kegiatan luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI:

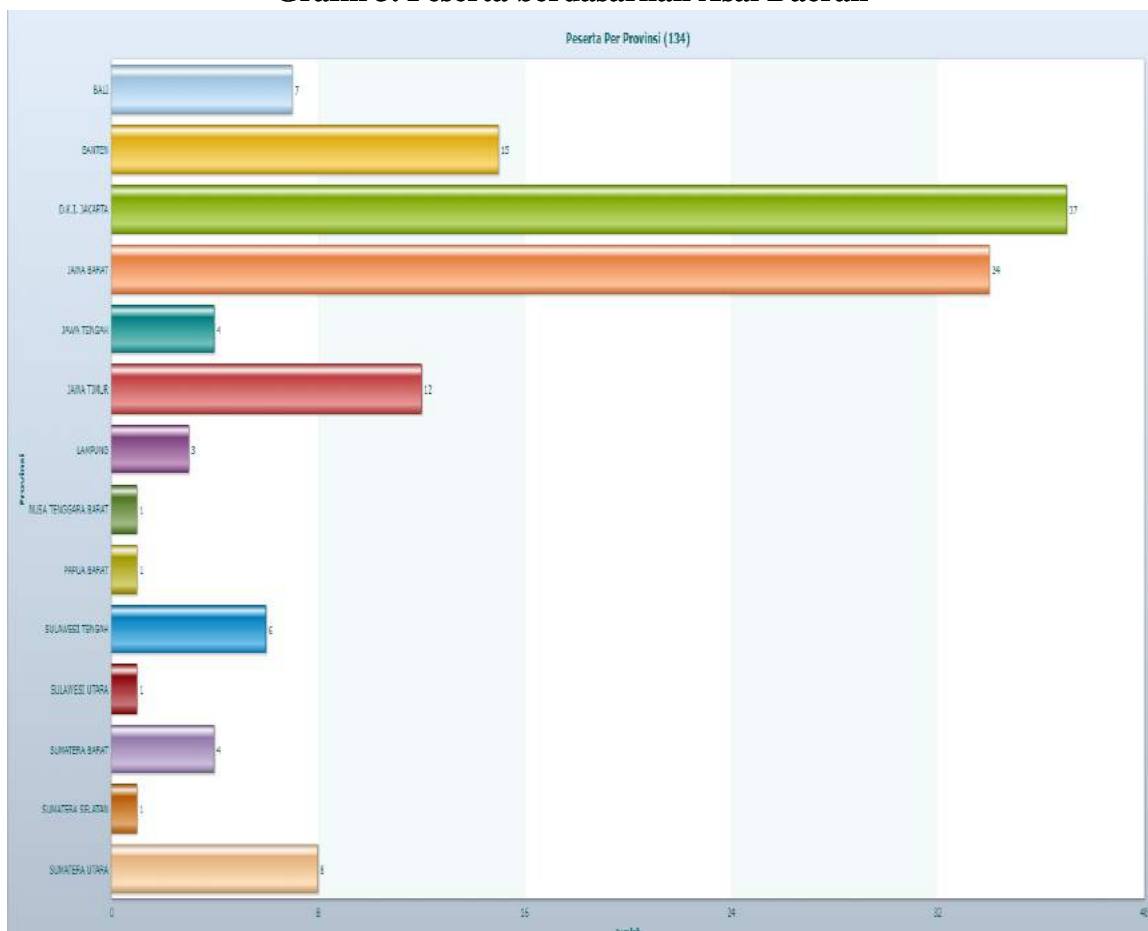
Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan



Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah



B.4. Akomodasi Peserta

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan mendapatkan *seminar kits*, yang meliputi:
 - 1) Tas;
 - 2) *Id card*;
 - 3) Buku saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*soft file*);
 - 4) *Booklet* panduan kegiatan (*soft file*);
 - 5) *Block Note* dan pulpen;
 - 6) Modul/makalah/*hand out* materi dari narasumber (*soft file*);
 - 7) Baju/kaos.
- b. E- Sertifikat
 - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan;
 - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh panitia.

B.6. Uraian Kegiatan

B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Senin, 27 November 2023 pukul 10.00 – 12.00 WIB. Ketika para peserta melakukan registrasi, peserta juga akan langsung diberikan kunci kamar dan seminar kits oleh panitia.

B.6.2. Penjelasan Teknis dan *Pre Test*

Penjelasan teknis disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan, Bapak Nanang Subekti pada hari Senin, 27 November 2023 pukul



15.00 s.d. 16.30 WIB. Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test* melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta.

B.6.3. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Republik Indonesia, Ibu Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum. pada Senin, 27 November 2023 pukul 19.00 WIB di aula Grha Konstitusi 3 Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Sebelum acara resmi dibuka, Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bapak Nanang Subekti, menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan. Susunan acara yaitu terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan Naskah Pancasila, Mars Mahkamah Konstitusi, Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Republik Indonesia, menyanyikan Hymne Mahkamah Konstitusi, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

B.6.4. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas Hakim Konstitusi, Panitera Muda MK, Panitera Pengganti MK, Asisten Ahli Hakim Konstitusi, serta Tim IT MK dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi dan Narasumber

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	1. YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum. 2. YM Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum.
2.	Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.
3.	Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.
4.	Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Rizki Amalia, S.H., M.H.



NO.	MATERI	NARASUMBER
5.	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. 2. Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H. 3. Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M. 4. Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.
6.	Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I. 2. Rudi Kurniawan
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H. 2. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H. 3. Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M. 4. Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator yang mengatur lalu lintas sesi diskusi. Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint*, diupload oleh panitia ke laman *microsite pusdik.mkri.id* sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait dalam perkara PHPU di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan narasumber praktik dan moderator. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam menyusun permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait. Dalam mengerjakan praktek ini, peserta didampingi oleh narasumber dari Panitia Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang berpengalaman di bidangnya.

Praktik ini menghasilkan dokumen permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait dari peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil kerjanya



di hadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

B.6.5. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 13.30 WIB pada hari Rabu, 29 November 2023 oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



HASIL EVALUASI KEGIATAN



C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 10 (sepuluh) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal yang telah disiapkan oleh panitia dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 6,16 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95% pada df 109 menunjukkan nilai sebesar 1,65895. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (*post test* – *pre test*) diperoleh skor **1,05**. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range* sebagai berikut (0-0,24: kurang); (0,25-0,74: cukup); (0,75-1,24: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta termasuk dalam kategori **baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan **berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta**.

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal *pre test* dan *post test*, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas materi, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan



keuangan. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Untuk menilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi menyusun 2 instrumen penilaian yaitu kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, peserta diminta dengan sukarela memberikan penilaian terhadap kualitas narasumber yang dihadirkan di setiap sesi dengan cara mengisi kuesioner evaluasi narasumber setelah suatu sesi materi berakhir. Kualitas setiap narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Hasil kuesioner evaluasi kegiatan ini yang nantinya akan memunculkan nilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada dua kategori yang dijadikan basis untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan serta layanan keuangan.

C.2.1. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan

Nilai tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan didapatkan dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

- 1) Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar

Variabel ini menilai penyajian materi yang diberikan oleh narasumber dengan berbagai media dan teknik penyajian. Peserta menilai kemudahan memahami materi yang diberikan, manfaat informasi yang ada dalam materi, dan kualitas bahan ajar yang disajikan. **Nilai persepsi atas kualitas materi/bahan ajar mendapatkan nilai 3,67 yang tergolong kategori Baik.**



2) Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator

Menilai kualitas penyampaian materi oleh narasumber dan kualitas moderator dalam memandu jalannya sesi materi. Peserta menilai penguasaan narasumber terhadap materi pembelajaran dan penyampaian materi secara komunikatif, serta kemampuan moderator dalam memandu setiap sesi. Pada variabel ini peserta juga memilih narasumber dan moderator yang paling menarik. Penilaian ini digunakan sebagai salah satu dasar evaluasi kualitas narasumber. **Nilai persepsi atas kualitas narasumber dan moderator mendapatkan nilai 3,71 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan

Menilai kualitas metode penyelenggaraan pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai terkait menariknya penyelenggaraan kegiatan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. **Nilai persepsi atas kualitas metode penyelenggaraan yaitu 3,64 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara

Variabel ini menilai performa petugas penyelenggara selama kegiatan pendidikan berlangsung. Peserta menilai terkait sikap petugas dalam memberikan pelayanan apakah petugas informatif dan komunikatif, cepat dan tepat, serta ramah dan rapi penampilannya. **Nilai persepsi atas kualitas petugas penyelenggara yaitu 3,69 yang tergolong kategori Baik.**

Hasil penilaian dari 4 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan nilai 3,68 dengan kategori Baik.** Hal ini berarti bahwa mayoritas peserta setuju bahwa kualitas materi yang disampaikan, narasumber dan moderator yang dihadirkan, menariknya metode penyelenggaraan, dan sikap petugas penyelenggara telah memberikan pelayanan penyelenggaraan dengan baik sehingga pembelajaran yang diberikan dapat dipahami oleh para peserta.

C.2.2. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan

Nilai tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan diperoleh dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:



- 1) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi
Pada variabel ini peserta menilai kualitas kebersihan kamar dan kelengkapan fasilitas kamar yang tersedia. **Nilai persepsi atas kualitas layanan akomodasi mendapatkan nilai 3,58 yang tergolong kategori Baik.**
- 2) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi
Peserta pendidikan juga menilai terkait kualitas layanan konsumsi selama mengikuti pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai variasi menu pada makanan yang dihidangkan dan ketepatan waktu dalam menghidangkan makanan dan *snack*. **Nilai persepsi atas kualitas layanan konsumsi mendapatkan nilai 3,53 yang tergolong kategori Baik.**
- 3) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan
Peserta menilai kebersihan ruang aula dan kelas serta sarana penunjang proses pembelajaran. Sarana penunjang tersebut juga termasuk videotron yang digunakan di aula Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas kualitas layanan sarana pendidikan yaitu 3,67 yang tergolong kategori Baik.**
- 4) Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan
Pusdik Pancasila dan Konstitusi selalu berupaya untuk menjaga lingkungan agar selalu aman. Pada variabel ini peserta menilai kualitas keamanan selama berada di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta sikap dan perilaku petugas keamanan. **Nilai persepsi atas layanan keamanan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,72 yang tergolong kategori Baik.**
- 5) Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan
Variabel ini menilai kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan dan kecepatan akses jaringan Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas sistem informasi pendidikan yaitu 3,68 yang tergolong kategori Baik.**
- 6) Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan
Pada variabel ini peserta memberikan penilaian administrasi terkait layanan keuangan yang diberikan oleh penyelenggara. Namun pada kegiatan ini, peserta tidak memberikan nilai atas layanan keuangan karena tidak ada mekanisme penggantian uang transport.

Hasil penilaian dari 6 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan dengan nilai 3,64 dengan kategori Baik.** Ini berarti mayoritas peserta setuju bahwa layanan



akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan keuangan telah mampu diberikan dengan baik kepada peserta.

Hasil dari seluruh pengukuran Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan, digabungkan menjadi **nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan skor 3,66 yang tergolong kategori Baik.**

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Materi/Bahan Ajar			
1	Materi yang diberikan mudah dipahami	3.65	Baik
2	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	3.70	Baik
3	Kualitas bahan ajar yang disajikan menggunakan bahasa yang komunikatif dan lengkap	3.66	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar		3.67	Baik
Kualitas Narasumber dan Moderator			
4	Narasumber menguasai materi pembelajaran	3.71	Baik
5	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif	3.73	Baik
6	Moderator mampu memandu setiap sesinya	3.68	Baik
	Narasumber yang paling menarik	1. Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D. 2. YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	
	Moderator yang paling menarik	1. Edwin Aditya Irawan 2. Angga Putri Gardina	
Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator		3.71	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Metode Penyelenggaraan			
7	Penyelenggaraan kegiatan bimtek menarik	3.66	Baik
8	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tepat waktu	3.63	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan		3.64	Baik
Kualitas Petugas Penyelenggara			
9	Penyelenggara informatif dan komunikatif	3.69	Baik
10	Penyelenggara memberikan pelayanan dengan yang cepat dan tepat	3.69	Baik
11	Penyelenggara ramah dan berpenampilan rapi	3.69	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara		3.69	Baik
Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan		3.68	Baik
Kualitas Layanan Akomodasi			
12	Kebersihan kamar terjaga	3.59	Baik
13	Kelengkapan fasilitas kamar tersedia	3.57	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi		3.58	Baik
Kualitas Layanan Konsumsi			
14	Hidangan makanan memiliki variasi menu	3.49	Baik
15	Hidangan makanan dan <i>snack</i> tersedia tepat waktu	3.57	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi		3.53	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Layanan Sarana Pendidikan			
16	Kebersihan ruang aula dan kelas	3.67	Baik
17	Sarana penunjang proses pembelajaran (termasuk videotron)	3.67	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan		3.67	Baik
Layanan Keamanan			
18	Keamanan selama berada di Pusdik	3.71	Baik
19	Sikap dan perilaku petugas keamanan	3.73	Baik
Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan		3.72	Baik
Sistem Informasi Pendidikan			
20	Kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan	3.67	Baik
21	Kecepatan akses jaringan internet Pusdik	3.68	Baik
Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan		3.68	Baik
Layanan Keuangan			
Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan		-	-
Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan		3.64	Baik
Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi		3.66	Baik



Dari hasil kedua penilaian di atas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Bimtek PPHU bagi Advokat Angkatan VI. Indeks ini diukur dengan menggunakan “*Kirckpatrick four levels evaluation model*” yaitu level pertama *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*.

Dari **keempat** level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*. Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan} + \text{Tingkat Pemahaman})}{n}$$

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 1,05 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 menjadi 2,1. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,66 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu $(3,66+2,1)/2 = 2,88$.

Hasil dari penghitungan **Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 2,88**; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0); artinya bahwa penyelenggaraan kegiatan ini berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Kurang Baik**.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, dan sistem informasi tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**
 - a) Panitia agar lebih memperhatikan peserta PPHU 2023 angkatan ke VI agar sama dengan peserta lembaga lainya mulai dari akomodasi, jadwal, dan lain sebagainya sehingga tidak ada kesan keanak tirikan;
 - b) Dalam sesi tanya jawab setiap selesai pemberian materi oleh narasumber sangat terbatas dan terkesan cepat-cepat;
 - c) Waktu penyelenggaraan sangat singkat sehingga tidak maksimal;
 - d) Kegiatan serupa perlu berkesinambungan dan terus dilaksanakan;
 - e) Durasi pemberian informasi keikutsertaan kegiatan perlu ditambah;



- f) Durasi sesi praktik perlu ditambah;
 - g) Peserta dapat diberikan uang transport;
 - h) Perlu dilaksanakan bimtek PUU;
 - i) Bimtek dapat diselenggarakan kembali dengan menggunakan metode *focus group discussion*;
 - j) Perlu ada olahraga pagi;
 - k) Panitia perlu menerima saran pendapat peserta dalam acara;
 - l) Waktu sholat tidak terdengar;
 - m) Materi sebaiknya sudah diterima oleh peserta secara *hardcopy* ketika proses registrasi;
 - n) Durasi sesi hukum acara kurang panjang;
 - o) Seluruh narasumber dapat lebih interaktif dengan peserta.
- **Terkait Sarana dan Pelayanan**
 - a) Menu makanan kurang menantang;
 - b) Menu daging terasa keras dan banyak lemak;
 - c) Kemasan air mineral dapat lebih besar;
 - d) Peserta perlu mendapatkan uang saku;
 - e) Kurang bantuan tim IT;
 - f) Di dalam kamar 108 GK 5 tidak terdapat gantungan baju dan tisu;
 - g) Halaman perlu diperluas;
 - h) Sarana olahraga perlu ditambah;
 - i) Kalau bisa makanannya jangan daging saja karena peserta dengan riwayat asam urat tidak bisa memakannya.

Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. E-sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 121 orang dari 134 orang peserta yang melakukan registrasi pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.



D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

- a) Peserta belum sepenuhnya tertib mengikuti kegiatan sesuai waktu yang tertera di jadwal kegiatan;
- b) Terdapat beberapa peserta yang tidak mengumpulkan tugas praktik.

E. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Mengetahui,
Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Teguh Wahyudi
NIP. 19640415 198502 1 001

Bogor, 21 Desember 2023

Kepala Bidang Program dan
Penyelenggaraan

Nanang Subekti
NIP. 19741118 200604 1 002



DOKUMENTASI KEGIATAN



Peserta melakukan registrasi dan pengambilan kunci kamar serta seminar kit.



Penjelasan teknis yang disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



Kegiatan dibuka secara resmi oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Republik Indonesia, serta dihadiri oleh pimpinan masing-masing organisasi advokat, Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.



Foto bersama yang dilakukan setelah acara pembukaan kegiatan.



Penyampaian materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum. dan YM Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum.



Penyampaian materi Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum oleh Bapak Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.



Penyampaian materi Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Bapak Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.



Penyampaian materi Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 oleh Ibu Rizki Amalia, S.H., M.H.



Materi Praktik dan Evaluasi Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 oleh 4 narasumber yang dibagi dalam 4 kelas kecil.



Penyampaian materi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik oleh tim IT Mahkamah Konstitusi.



Penyampaian evaluasi jawaban termohon dan keterangan pihak terkait secara umum yang disampaikan oleh Bapak Triyono Edy Budhiarto, S.H.



Kegiatan ditutup secara resmi oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Organisasi Advokat Angkatan VI

Hari, Tanggal : **Senin s.d. Rabu, 27 s.d. 29 November 2023**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Peradan, Perhakhi, DPP ABI, dan BPP PAI

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 27 November 2023	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Pusdik
	12.00 – 14.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	15.00 – 16.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	16.30 – 17.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	17.00 – 19.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	19.00 – 20.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Kabid Program dan Penyelenggaraan 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Hakim Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	Kabid Program dan Penyelenggaraan YM Hakim Konstitusi	Pusdik
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik

	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	21.00 WIB	Istirahat		Pusdik
KEDUA				
Selasa, 28 November 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik
	13.00 – 14.00 WIB	Sesi IV: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	14.00 – 16.00 WIB	Sesi V: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	16.30 – 18.00 WIB	Sesi VI: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik

	18.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik
	19.00 - 21.00 WIB	Hiburan		
KETIGA				
Rabu, 29 November 2023	06.00 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi VII: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Pusdik
	13.00 – 13.30 WIB	<i>Post-Test</i> dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	13.30 – 14.30 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Penutupan Kabid Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi 3. Pembacaan Doa	Kabid Program dan Penyelenggaraan	Pusdik
	14.30 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI ADVOKAT ANGKATAN VI

Bogor, 27 s.d. 29 November 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI dapat diselenggarakan.

Panduan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI ini memuat informasi tentang latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, kurikulum, pembiayaan, ketentuan penyelenggaraan, sistem informasi peserta serta hal-hal lain yang menyangkut teknis penyelenggaraan kegiatan. Kegiatan ini diselenggarakan bagi pengurus dan/atau anggota Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Pimpinan Nasional Perkumpulan Advocate dan Pengacara Nusantara (PERADAN), Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia (PERHAKHI), Advocat Bangsa Indonesia (ABI) dan Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advocaten Indonesia (BPP-PAI).

Panduan ini berfungsi sebagai acuan bagi peserta, panitia, dan pihak lain yang berkepentingan. Semoga kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan VI ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta dapat mewujudkan misi Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.

Bogor, November 2023

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Teguh Wahyudi



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	1
I SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI	2
1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	2
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	3
3. Visi dan Misi	3
4. Profil Hakim Konstitusi	4
5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal	8
II PANDUAN KEGIATAN.....	9
1. Latar Belakang	9
2. Tujuan Kegiatan	10
3. Nama Kegiatan	10
4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan	10
5. Peserta Kegiatan	12
6. Materi dan Garis Besar Kurikulum	12
7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat	14
8. Akomodasi	14
9. Konsumsi	14
10. Pembiayaan	14
11. Lain-lain	15
12. Kontak	15
III TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI, DAN ZONA INTEGRITAS	16
IV HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI	26
V INFORMASI MENGENAI PUSDIK.....	28
1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....	28
2. Sarana dan Prasarana.....	30
3. Fasilitas Ramah Disabilitas.....	33

BAB I

SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
 - 3) Memutus pembubaran partai politik;
 - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi “Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya”. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi.
- b. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara.
- c. Meningkatkan Kualitas Putusan.

4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota hakim konstitusi. Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

a. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.



- Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Sleman, 15 November 1959
- Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia
S2 – Universitas Tarumanegara
S3 – Universitas Jayabaya
- Karir :
 - Hakim Pengadilan Negeri Bekasi
 - Ketua Pengadilan Negeri Pontianak
 - Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
 - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

b. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.



- Jabatan : Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Paninggahan, 20 Agustus 1968
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas
S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research
Universitas Malaya, Malaysia
S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Karir :
 - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas
 - Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas
 - Komisaris Utama PT Semen Padang

c. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Universitas Airlangga
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro
- Karir : • Anggota Tim Assesor Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI
• Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
• Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Diponegoro
• Guru Besar Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro

d. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962
- Pendidikan : • S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta (1981)
• S-2 Hukum Tata Negara Program Pascasarjana
Universitas Padjadjaran Bandung (1995)
• S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas
Hukum Universitas Gadjah Mada (2005)
- Karir : • Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah Mada
• Kepala Badan Pembinaan Hukum, Kementerian
Hukum dan HAM.

e. Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Bima, 31 Desember 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta
S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM
S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada
- Karir : • Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA
• Kepala Biro Kepegawaian MA
• Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

f. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Palembang, 17 Januari 1954
- Pendidikan : S1 – Ilmu Peradilan Islam Fakultas Syariah
IAIN Syarif Hidayatullah
S1 – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
S2 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
S3 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- Karir : • Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
• Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta
• Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM

g. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Tarutung, 8 Desember 1953
- Pendidikan : S1 – Universitas Sumatera Utara
S2 – Universitas Sumatera Utara
S3 – Universitas Sumatera Utara
- Karir : • Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan
• Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
• Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

h. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Kupang, 15 Desember 1964
- Pendidikan : S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990)
S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995)
S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)
- Karir : • Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
• Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

i. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
S2 – Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran
S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga
- Karir : • Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
• Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
• Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).
• Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

a. Heru Setiawan, S.E., M.Si.



Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : 9 Juni 1969
Karir :

- Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
- Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

b. Muhidin, S.H., M.Hum.



Jabatan : Panitera Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Sukabumi, 18 Agustus 1961
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum
Universitas Jakarta
S2 – Program Pasca Sarjana Hukum
Bisnis
Karir :

- Kementerian Hukum dan HAM
- Dosen Sekolah Tinggi Litigasi
- Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

BAB II PANDUAN KEGIATAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum.

Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan suatu perhelatan pesta demokrasi yang serentak. Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini rencananya akan digabung dengan pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara serentak di 541 wilayah, baik itu provinsi, kota dan kabupaten. Dalam perhelatan ini tentu diperlukan suatu perencanaan yang baik, terukur dan sistematis. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal demokrasi ikut memiliki tanggung jawab terhadap suksesnya proses pemilihan tersebut. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Dalam rangka pelaksanaan tugas menyelesaikan perselisihan perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024 diperlukan dukungan konkret dari berbagai kalangan kepada Mahkamah Konstitusi, pemahaman terhadap hukum acara secara utuh sangat diperlukan bagi pemangku kepentingan. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan cepat (*speedy trial*) benar-benar dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Salah satu *target group* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2023 adalah organisasi advokat. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, khususnya proses penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. *Output* dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi dan juga membantu para pihak dalam menyusun permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu. Dengan adanya permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu yang baik, secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusi, sistem penyelenggaraan negara, hak konstitusional, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
- Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Meningkatkan kemampuan penyusunan permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

3. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI”.

4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin s.d. Rabu, 27 s.d. 29 November 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. Adapun jadwal kegiatan sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
PERTAMA		
Senin, 27 November 2023	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check In</i>
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Tranparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan : <ol style="list-style-type: none"> Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Pembacaan Teks Pancasila Mars Mahkamah Konstitusi Laporan Sekretaris Jenderal MK Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi Hymne Mahkamah Konstitusi Pembacaan Doa
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA

	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
KEDUA		
Selasa, 28 November 2023	06.00 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 14.00 WIB	Sesi IV: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	14.00 – 16.00 WIB	Sesi V: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 – 18.00 WIB	Sesi VI: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
KETIGA		
Rabu, 29 November 2023	06.00 – 08.00 WIB	Makan Pagi
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VII: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
	10.00 – 11.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	15.30 – 16.00 WIB	Evaluasi Kegiatan dan <i>Post-Test</i>

	16.00 – 18.00 WIB	Penutupan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 2. Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Sambutan Penutupan Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 4. Pembacaan Doa
--	-------------------	---

5. Peserta Kegiatan

Peserta sebanyak kurang lebih 162 orang terdiri atas 27 peserta dari Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), 27 peserta dari Serikat Pengacara Indonesia (SPI), 27 peserta dari Pimpinan Nasional Perkumpulan Advocate dan Pengacara Nusantara (PERADAN), 27 peserta dari Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia (PERHAKHI), 27 peserta dari Advocat Bangsa Indonesia (ABI) dan 27 peserta dari Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advocaten Indonesia (BPP-PAI).

6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI :

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> a. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD b. Para Pihak c. Objek Permohonan d. Pengajuan Permohonan e. Permohonan f. Alur Penarikan Kembali Permohonan g. Jawaban Termohon h. Keterangan Pihak Terkait i. Keterangan Bawaslu j. Jenis Alat Bukti k. Manajemen Penanganan Perkara dan Persidangan l. Putusan m. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi 	120 menit
2.	Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi	<ol style="list-style-type: none"> a. Fungsi dan Kewenangan MK b. Struktur dan Mekanisme Kerja MK c. Asas-Asas Hukum Acara MK d. Perkembangan dan Dinamika Penanganan PHPU di MK 	120 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
3.	Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan PHPU 2024 b. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya secara Langsung dan daring c. Mekanisme Penanganan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya, termasuk Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan d. Registrasi Saksi dan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait e. Penjadwalan Sidang dan Persidangan Jarak Jauh f. Pengucapan Putusan dan Tindaklanjut Pasca Putusan 	120 menit
4.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> a. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik b. <i>Case Tracking</i> (Penelusuran Perkara) c. Persidangan Jarak Jauh, Streaming, dan <i>Video Conference</i> g. Fitur-Fitur lainnya (<i>Website, Click MK, Media Sosial, dll</i>) 	120 menit
5.	Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	<ul style="list-style-type: none"> a. Dasar Hukum; b. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD; c. Termohon, Pihak Terkait dan Pemberi Keterangan; d. Objek Perkara; e. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu; f. Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon; g. Permohonan Pemohon; h. Penyusunan Permohonan Pemohon dalam Penyelesaian PHPU DPR dan DPRD; i. Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait; j. Penyusunan Keterangan Pihak Terkait dalam Penyelesaian PHPU DPR dan DPRD. 	90 menit
6.	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Setiap Peserta Melakukan Praktek Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD.	240 menit
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Perwakilan Peserta Memaparkan Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait untuk Mendapat Tanggapan dan Koreksi dari Narasumber/Fasilitator.	120 menit

Proses Pembelajaran

1. Tahap Pencairan

Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

2. Tahap Pembekalan Materi

Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, games, studi kasus, *sharing*, dll.

3. Tahap Konsolidasi

Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- b. Ketentuan e-sertifikat:
Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan.

8. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut).
 - Sandal kamar.
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

9. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta *snack* selama kegiatan berlangsung.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

10. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan/materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing peserta.

- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

11. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

12. Kontak

- a. Nomor telepon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.

BAB III

TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS

1. Tata Tertib

- a. Peserta wajib melapor pada petugas keamanan di pos keamanan Pusdik.
- b. Peserta wajib melakukan registrasi di ruang registrasi peserta.
- c. Peserta wajib menjaga kebersihan dan kerapihan seluruh lingkungan Pusdik.
- d. Peserta wajib menjaga semua fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- e. Apabila peserta akan meninggalkan lingkungan Pusdik, diharapkan melapor ke bagian keamanan.
- f. Menghilangkan kunci kamar akan dikenakan denda pengandaan kunci sebesar Rp. 150.000.
- g. Peserta dilarang membawa tamu ke kamar asrama, menerima tamu hanya diperbolehkan di ruang tamu setiap loby asrama.
- h. Jam kunjungan tamu maksimal pukul 22.00 WIB.
- i. Peserta dilarang keluar lingkungan Pusdik di atas pukul 22.00 WIB.
- j. Peserta dilarang merusak dan/atau membawa fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- k. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara di lingkungan Pusdik.
- l. Peserta wajib melapor pada petugas pada waktu *check out*.

2. Sistem Informasi

a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)

- 1) Pengisian daftar hadir (presensi) peserta dalam bentuk digital;
- 2) *Pre-test* dan *Post-test* secara *online*;
- 3) Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (di akhir kegiatan) secara *online*;
- 4) Panduan kegiatan (*Booklet*) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk *softfile*;
- 5) Mengunduh e-sertifikat setelah kegiatan berakhir.

b. Pedoman Penggunaan

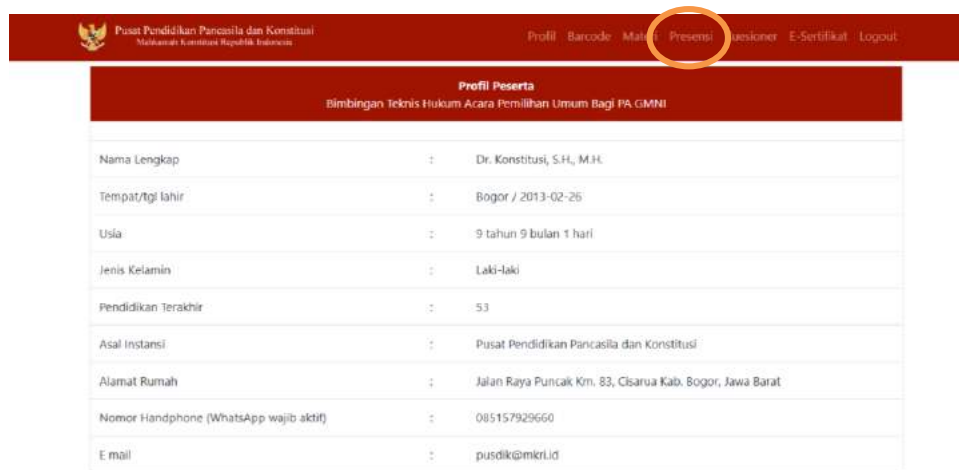
1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).



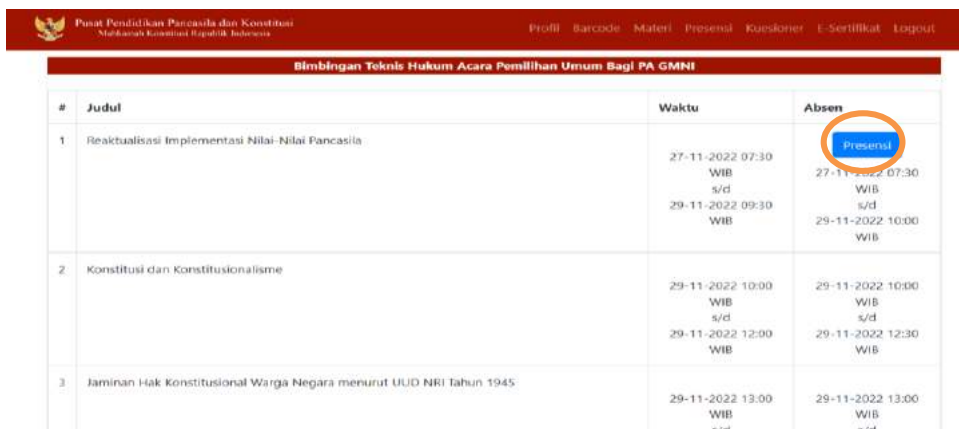
2. Login menggunakan *Username* dan *Password* yang telah diberikan oleh panitia.



3. Pada halaman profil peserta, klik menu Presensi untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.



4. Klik Presensi pada sesi materi berjalan (sesuai jadwal) untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.



5. Klik menu *Kuesioner* untuk mengisi *Pre-test*, *Post-test*, dan Evaluasi Kegiatan.



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Absensi **Kuesioner** E-Sertifikat Logout

Bimbingan Teknis Pilkada


SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
Nilai Pre Test				: 6
Nilai Post Test				: 0

6. Pada halaman *Pre-test* dan *Post-test*, pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre-test* dan *Post-test* masing-masing sebanyak 10 nomor. Waktu mengerjakan *Pre-test* dan *Post-test* maksimal 15 menit.



Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali...

Badan Pengawas Pemilu

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

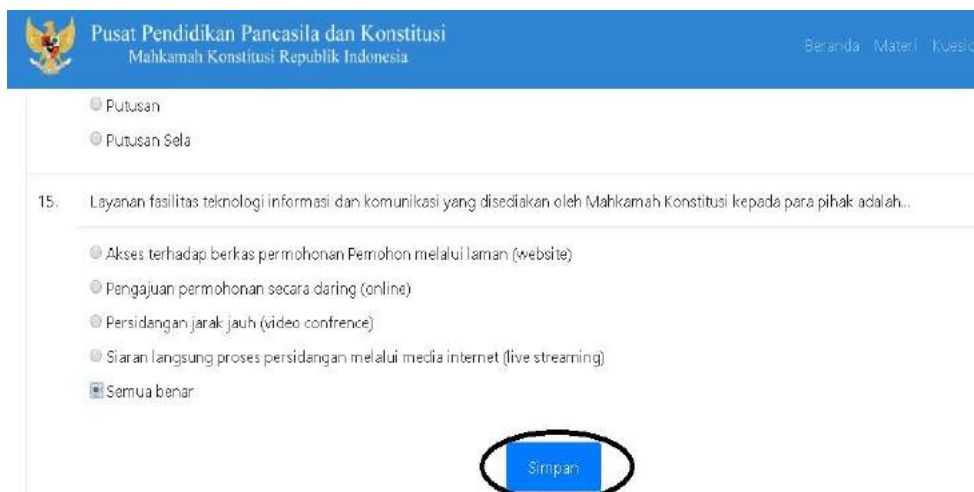
Komisi Pemilihan Umum

Mahkamah Konstitusi

Pemantau Pemilu

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

7. Setelah mengisi *Pre-test* dan *Post-test*, klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Kuesioner

Putusan

Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)

Pengajuan permohonan secara daring (online)

Persidangan jarak jauh (video conference)

Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)

Semua benar

Simpan

8. Mengisi evaluasi kegiatan

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

9. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	Isi Kuesioner
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	Isi Kuesioner
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	Isi Kuesioner

10. Klik menu *Materi* untuk mengunduh panduan kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)

#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	File
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	File
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	File

3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

- *Media Offline:*
 1. Meja pengaduan
 2. Pohon saran
 3. Kotak saran dan pengaduan
- *Media Online (pusdik.mkri.id)*
 1. Pengaduan masyarakat
 2. Benturan kepentingan
 3. Gratifikasi
 4. *Whistle Blowing System*
 5. Saran/masukan

4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1

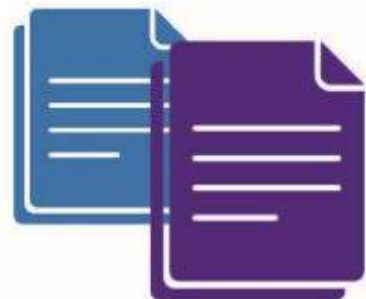
Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
 - Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



BAB IV**HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI****Hymne Mahkamah Konstitusi**

Syair : Taufiq Ismail

Lagu : Dwiki Dharmawan

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

---Music---

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

Mars Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail

Lagu : Dwiki Dharmawan

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

---Music---

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

BAB V

INFORMASI MENGENAI PUSDIK

1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 16 (enam belas) pegawai dimana terdiri dari 6 (enam) pejabat struktural, 1 (satu) pejabat fungsional, dan 10 (sepuluh) pelaksana. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:



Teguh Wahyudi, S.Sos.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi



Nanang Subekti, S.E., M.S.E.

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana



Melati Kusuma Wardani, S.IP., M.A.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusdik



Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



Santhy Kustrihardiani, S.Psi.

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan

*Contact Center Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660**

2. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 7 unit gedung yang masing-masing dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun ketujuh gedung tersebut adalah sebagai berikut:



a. Grha Konstitusi 1



Grha Konstitusi 1 dimanfaatkan sebagai rumah istirahat bagi para hakim dan narasumber. Terdiri dari 12 rumah dimana di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi, ruang tamu, ruang makan dan dapur. Selain untuk narasumber dan hakim, gedung ini juga dipergunakan sebagai rumah istirahat bagi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. Grha Konstitusi 2

Gedung ini memiliki 2 lantai dimana lantai 2 adalah ruangan kantor untuk pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Di lantai 1 terdapat ruang poliklinik.

c. Grha Konstitusi 3

Merupakan gedung utama yang dipergunakan untuk kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Terdiri dari 2 lantai yang masing-masing dapat difungsikan sebagai ruang pendidikan. Pada lantai 1 terdapat 8 (delapan) kelas kecil yang dapat menampung peserta sebanyak 24 orang. Kelas-kelas kecil tersebut dapat dialihkan menjadi 4 kelas besar yang dapat menampung sebanyak 48 peserta. Di lantai 2 adalah aula utama gedung yang bisa menampung peserta hingga 160 orang.

d. Grha Konstitusi 4 dan Grha Konstitusi 5

Dua gedung di atas dimanfaatkan sebagai kamar bagi para peserta selama kegiatan berlangsung. Masing-masing gedung terdiri dari 2 (dua) lantai. Tiap gedung terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kamar. Setiap kamar dapat ditempati oleh 2 (dua) orang peserta.

e. Grha Konstitusi 6

Gedung yang dipergunakan untuk rumah jabatan eselon 3 hingga eselon 4 ini terdiri dari 2 (dua) lantai. Terdiri dari 2 (dua) rumah untuk eselon 3 dan 4 (empat) rumah untuk eselon 4.

f. Grha Konstitusi 7 dan Musholla

Gedung ini memiliki 1 (satu) ruang besar yang digunakan sebagai ruang makan bagi peserta. Terdapat pula musholla di bagian belakang gedung ini.

g. Fasilitas Wifi

Semua area Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan fasilitas *free wifi*. Adapun pemanfaatan fasilitas *wifi* dengan menggunakan *username* dan *password* sebagai berikut:

1. *Username: Pusdiklat_MKRI, password: pusdikmk;*
2. *Username: Pusdik_MK, password: pusdikmkri9,* untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3.

3. Fasilitas Ramah Disabilitas

Pusat Pendidikan Pancasila juga meningkatkan fasilitas pendukung yang ramah dengan kaum disabilitas sebagai berikut:

1. Parkir Prioritas Disabilitas;
2. *Elevator (Lift);*
3. Kamar Prioritas Disabilitas; dan
4. Jalur Ramah Disabilitas.



PENJELASAN TEKNIS

Bimbingan Teknis Hukum Acara
Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Tahun 2024 bagi Advokat
Angkatan VI

Senin, 27 November 2023



SELAMAT DATANG DI

ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA & KONSTITUSI

**MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)**

“ MEWUJUDKAN PERUBAHAN
UNTUK PELAYANAN YANG
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS ”



www.mkri.id



[mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[@officialMKRI](https://twitter.com/officialMKRI)



[@mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)

www.mkri.id



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih,
Bantu Kami
Menjaga Integritas
dengan
tidak memberi Uang
atau
pemberian apapun



**Integritas Kami
Tak akan Anda Bisa Beli.**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
upg@mkri.id



UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

NO
Gratifikasi





MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA.

MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.

BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

M. GUNTUR HAMZAH

PAKTA INTEGRITAS



Pusdik Pancasila dan Konstitusi:

- ❖ Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, dan narasumber.
- ❖ Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.



Peserta:

- ❖ Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
- ❖ Tidak memberikan tip dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



Narasumber:

- ❖ Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Tidak menerima tip dalam bentuk apapun.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan,
Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



4

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



5

Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !



**Kuesioner
Online**



**Masukan dan Saran
di Microsite
pusdik.mkri.id**



Kotak Saran



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Mitigasi Bencana

“Jika terjadi bencana gempa bumi, secepatnya masuk ke kolong meja. Setelah gempa bumi selesai, secara tertib menuju titik kumpul.”



Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Teguh Wahyudi
Kepala Pusdik
Pancasila dan
Konstitusi



Nanang Subekti
Kabid Program
dan
Penyelenggaraan



Nanang Subekti
Plt. Kabag Umum



Nanda Adityansyah
Jabatan Fungsional
(Pranata Komputer)



**Ardiansyah
Salim**
Kasubid
Program dan
Evaluasi



**Santhy
Kustrihardiani**
Kasubid
Penyelenggaraan



**Melati Kusuma
W**
Kasubag Tata
Usaha



**Bambang
Sukmadi**
Kasubag
Sarana dan
Prasarana



Tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Bangkit Panji Anarogo



Edwin Aditya Irawan



Fazlur Rahman El Islamy



Suhardi



Muhlis Nova



Angga Putri Gardina



Hadian Taofik Rohman



Chafid Sugianto



Yahya Amarullah Taufik



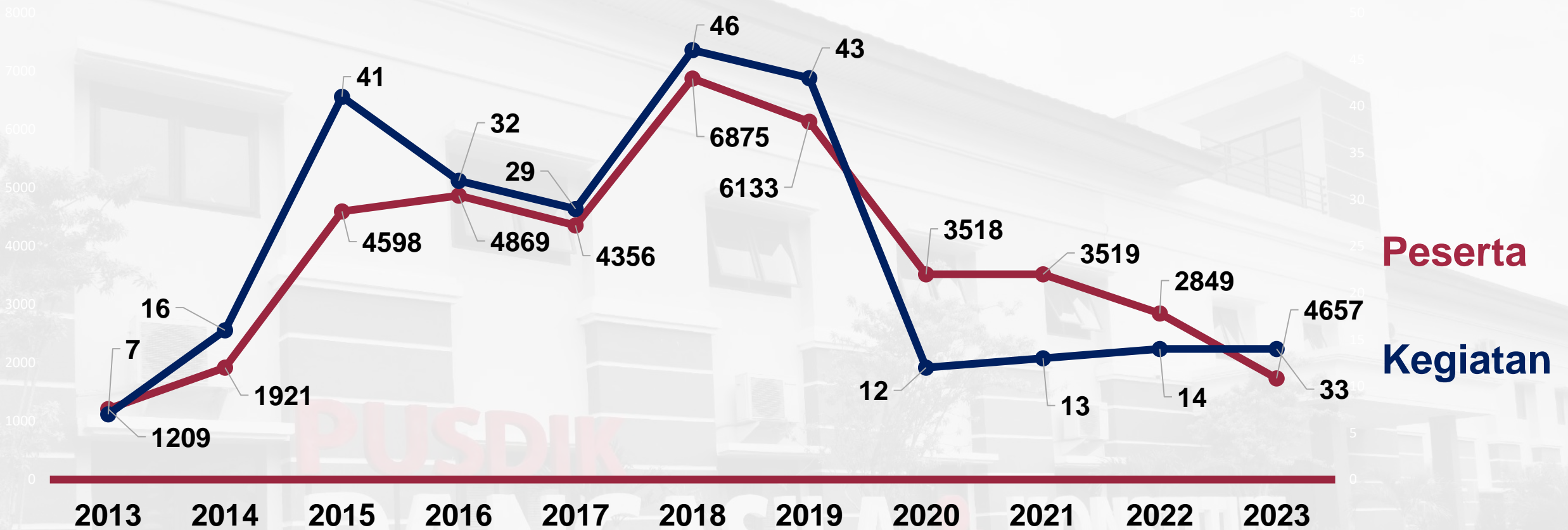
Edwin Rivano



KURIKULUM KEGIATAN

1. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi
3. Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
4. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
5. Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
6. Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
7. Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

KEGIATAN DAN ALUMNI



Total alumni Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebanyak **31.936** orang

Total alumni kegiatan sebanyak **39.512** orang

PELAKSANAAN KEGIATAN

- **Waktu** : Senin s.d. Rabu
27 s.d. 29 November 2023
- **Tempat** :
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jalan Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor,
Jawa Barat

JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Senin, 27 November 2023	10.00 – 14.30 WIB	Registrasi Peserta
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Pre-Test
	16.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 20.00 WIB	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh Hakim Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa
	20.00 – 22.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Narasumber: YM Hakim Konstitusi Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum. & Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Selasa, 28 November 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi Narasumber: Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Narasumber: Panitera Muda II – Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 14.00 WIB	Sesi IV: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024 Narasumber: Rizki Amalia, S.H., M.H.

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Selasa, 28 November 2023	14.00 – 16.00 WIB	Sesi V: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 – 18.00 WIB	Sesi VI: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait PPHU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	18.00 WIB	Istirahat

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Rabu, 29 November 2023	06.00 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi VII: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 13.30 WIB	Evaluasi Kegiatan dan Post-Test
	13.30 – 14.30 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan dan Penutupan Kegiatan oleh Kapusdik Pancasila dan Konstitusi 3. Pembacaan Doa



PESERTA KEGIATAN

- ✓ Peserta sebanyak 162 orang terdiri dari 27 peserta dari Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), 27 peserta dari Serikat Pengacara Indonesia (SPI), 27 peserta dari Pimpinan Nasional Perkumpulan Advocate dan Pengacara Nusantara (PERADAN), 27 peserta dari Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia (PERHAKHI), 27 peserta dari Advocat Bangsa Indonesia (ABI) dan 27 peserta dari Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advocaten Indonesia (BPP-PAI).
- ✓ Membawa Surat Tugas dari Organisasi Advokat untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- ✓ Peserta wajib membawa laptop untuk keperluan kegiatan selama di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- ✓ Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

KETENTUAN UMUM

- ❖ Acara dilaksanakan selama 4 hari 3 malam.
- ❖ Peserta wajib hadir tepat waktu di tiap sesi dan melakukan presensi.
- ❖ Daftar hadir disediakan pada tiap sesi materi dan diakses secara *online*.
- ❖ Peserta diwajibkan mengisi kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan melalui sistem informasi.
- ❖ Peserta akan melakukan Pre-Test dan Post-Test secara *online* untuk mengukur kemampuan umum peserta pada alamat **pusdik.mkri.id**
- ❖ Peserta wajib membawa laptop untuk digunakan dalam sesi praktik.
- ❖ Peserta dihimbau membawa kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Asuransi Kesehatan lainnya.

KONSTITUSI



BAHAN MATERI DAN E-SERTIFIKAT

❖ Peserta akan mendapatkan seminar kits, yang meliputi:

- ✓ Tas
- ✓ Buku Saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*Soft File*)
- ✓ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 dalam Bentuk *Soft File*.
- ✓ Block Note dan Pulpen
- ✓ Modul/Makalah/Hand out Materi dari Narasumber (*Soft File*)
- ✓ Panduan Kegiatan

❖ e-Sertifikat

- ✓ Peserta akan diberikan e-sertifikat (digital) keikutsertaan kegiatan
- ✓ Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) serta mengerjakan dan mengumpulkan tugas praktik yang diberikan
- ✓ Apabila peserta tidak bisa mengikuti kegiatan karena sakit, maka wajib ke Poliklinik untuk dicatat dan ditangani
- ✓ Apabila peserta ada kepentingan lain sehingga harus meninggalkan kegiatan sebelum acara penutupan, peserta yang bersangkutan wajib mendapat persetujuan dari panitia masing-masing organisasi advokat



AKOMODASI

- ❖ Peserta wajib tinggal di mess Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- ❖ Fasilitas dalam kamar peserta, meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut;
 - Sandal kamar; serta
 - Gula, kopi, teh dan air mineral.

KONSUMSI

- ❖ Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam serta *snack* selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.



PEMBIAYAAN

- ❖ Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi.
- ❖ Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing peserta.
- ❖ Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- ❖ Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.



SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PESERTA LANGSUNG DAN TRANSPARAN (SIMULTAN)

pusdik.mkri.id

- ❖ Registrasi dan Absensi
- ❖ *Pre Test* dan *Post Test*
- ❖ Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- ❖ *Softcopy* materi kegiatan
- ❖ e-Sertifikat



LAYANAN WI-FI

Nama Wi-Fi : *Pusdik_MK*

Password : *pusdikmk9*

Nama Wi-Fi : *GK3_PUSDIKLAT*

Password : *pusdikmkri*





**FASILITAS
DI PUSAT
PENDIDIKAN
PANCASILA
DAN
KONSTITUSI**

Grha Konstitusi 1



- Rumah Istirahat bagi para Hakim, Narasumber, dan Tamu VIP
- Terdiri dari 12 Ruangan

Grha Konstitusi 2



- Gedung Kantor Administrasi
- Poliklinik
- Kantin Kejujuran
- Souvenir



Grha Konstitusi 3

- Gedung Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran yang terdiri dari 2 Lantai
- Terdapat *Roof Top* di Atas Gedung

KONSTITUSI

Grha Konstitusi 3



- Aula Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran dengan Kapasitas 150 Peserta dan Dilengkapi dengan Videotron



- 4 Ruang Kelas Besar dengan Kapasitas 40 Orang per Kelas
- Dapat Dibagi Menjadi 8 Kelas Kecil dengan Kapasitas 20 Orang



Grha Konstitusi 4



Grha Konstitusi 5



Gedung yang digunakan sebagai tempat istirahat para peserta kegiatan

Kamar Peserta di Grha Konstitusi 4 dan 5



Grha Konstitusi 7



Tempat Makan Peserta

Mushola



Di Samping Grha Konstitusi 7

Fasilitas di Dalam Grha Konstitusi 7



Fasilitas Lainnya



Ruang Registrasi dan Ruang Tunggu Peserta di Grha Konstitusi 2

Fasilitas Lainnya



Parkir Khusus Disabilitas
di Depan Grha Konstitusi 4



Lift
di Lobby Grha Konstitusi 2



Ruang Laktasi
di Grha Konstitusi 4



Fasilitas Lainnya



Poliklinik
di Grha Konstitusi 2



Pojok Digital
di Grha Konstitusi 2



**T
E
R
I
M
A**

**K
A
S
I
H**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

SIMULTAN
(Sistem Informasi Manajemen Peserta
Langsung dan Transparan)



LAYANAN WI-FI

Nama Wi-Fi : *Pusdik_MK*

Password : *pusdikmk9*

Nama Wi-Fi : *GK3_PUSDIKLAT*

Password : *pusdikmkri*



FUNGSI SIMULTAN



Pre & Post Test

Mengerjakan *Pre Test* dan *Post Test* secara *online* dengan login sesuai ID peserta



Evaluasi Narasumber dan Kegiatan

Mengisi *Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan* (di akhir kegiatan) secara *online*



Booklet & Materi

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan narasumber



Daftar Hadir

Daftar hadir/presensi kami sediakan dalam bentuk digital

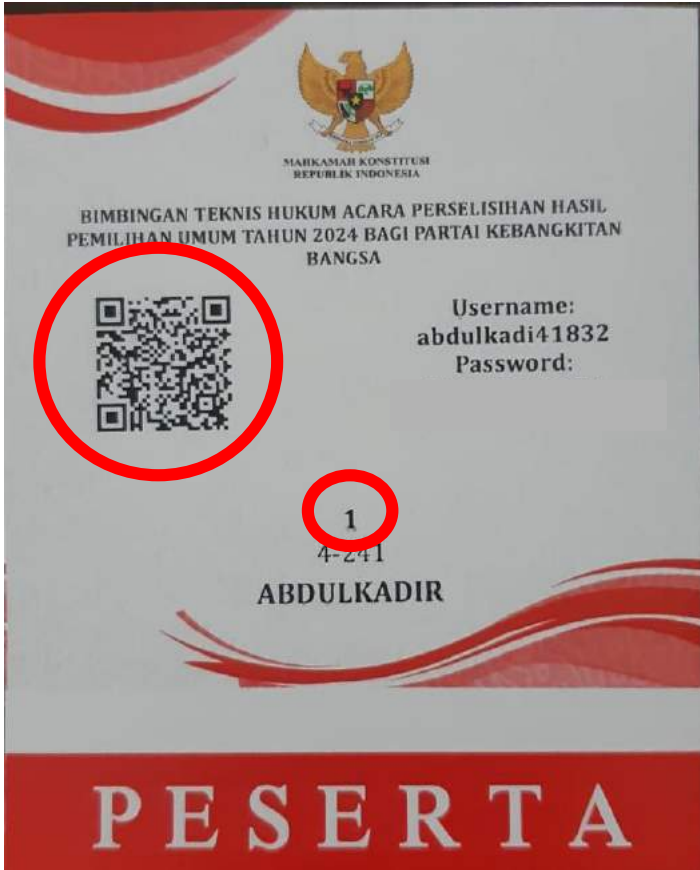


E-Sertifikat

Mengunduh e-Sertifikat setelah kegiatan berakhir



Login ke dalam Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN)



**Untuk Login ke dalam
Akun Sistem Informasi
Peserta (SIMULTAN),
Peserta Scan QR Code
yang Ada pada Tanda
Peserta (ID Card
Peserta)**

Akses laman pusdik.mkri.id pada *browser*

The screenshot shows a web browser displaying the homepage of PusdikMK. The browser's address bar shows the URL 'pusdik.mkri.id'. The website features a dark blue header with the PusdikMK logo on the left and a navigation menu on the right. The main content area has a blue background with a large white text block and a circular image of the building. A green button is visible on the left side of the main content.

PusdikMK

[Beranda](#) [Tentang Pusdik](#) [Simultan](#) [Kegiatan](#) [Alumni](#) [Zona Integritas](#) [Informasi Publik](#) [Kontak](#)

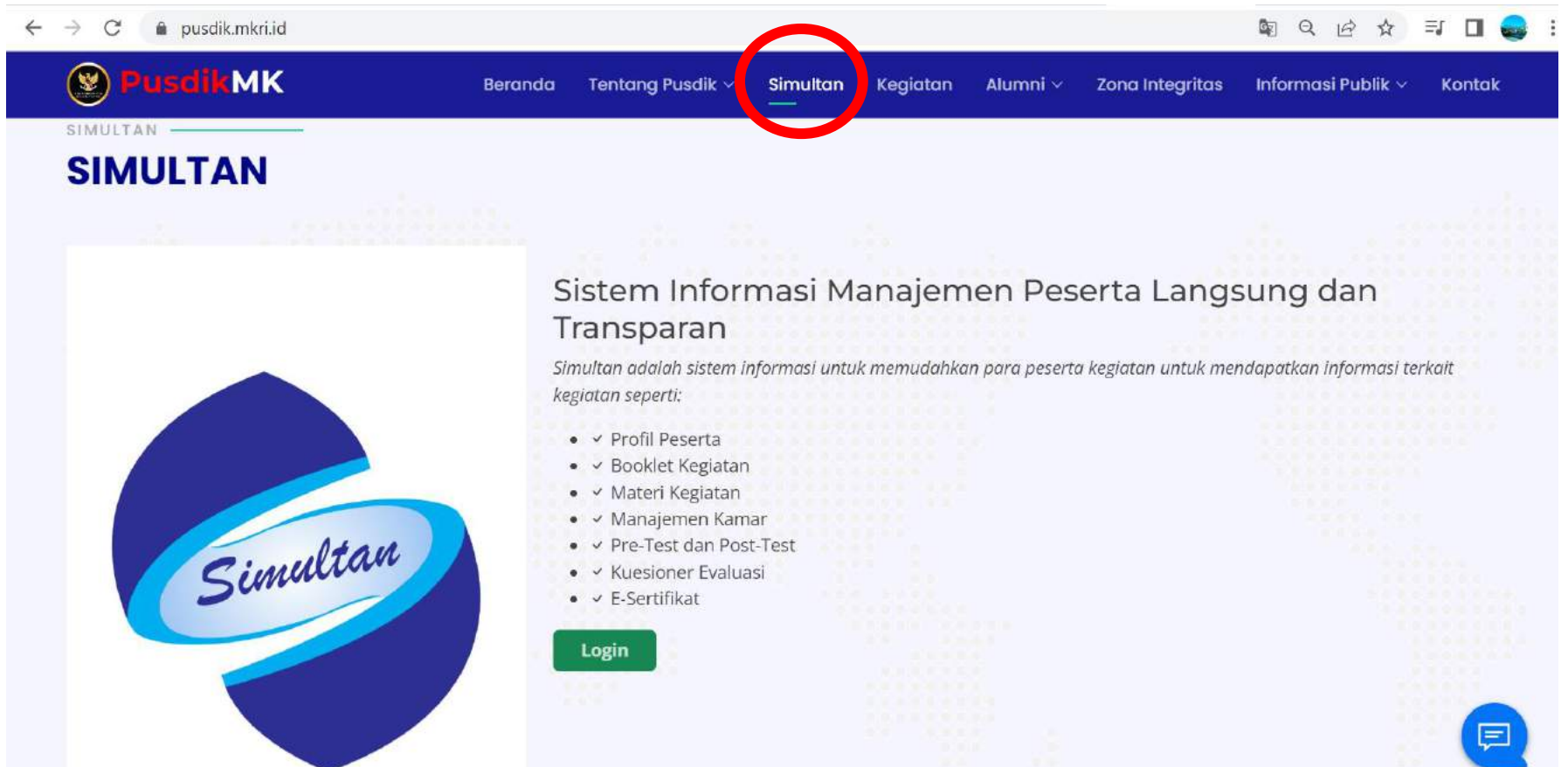
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Sejarah Singkat](#)

**PUSDIK
PANCASILA & KONSTITUSI**

Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN



The screenshot shows the website interface for PusdikMK. The browser address bar displays 'pusdik.mkri.id'. The navigation menu includes 'Beranda', 'Tentang Pusdik', 'Simultan', 'Kegiatan', 'Alumni', 'Zona Integritas', 'Informasi Publik', and 'Kontak'. The 'Simultan' menu item is highlighted with a red circle. Below the navigation bar, the page title 'SIMULTAN' is displayed. The main content area features a large graphic of the 'Simultan' logo on the left and a text block on the right. The text block describes the system as a direct and transparent participant management information system, listing various features such as participant profiles, activity booklets, materials, room management, pre-test and post-test, evaluation questionnaires, and e-certificates. A green 'Login' button is positioned below the list.

PusdikMK

Beranda Tentang Pusdik **Simultan** Kegiatan Alumni Zona Integritas Informasi Publik Kontak

SIMULTAN

SIMULTAN

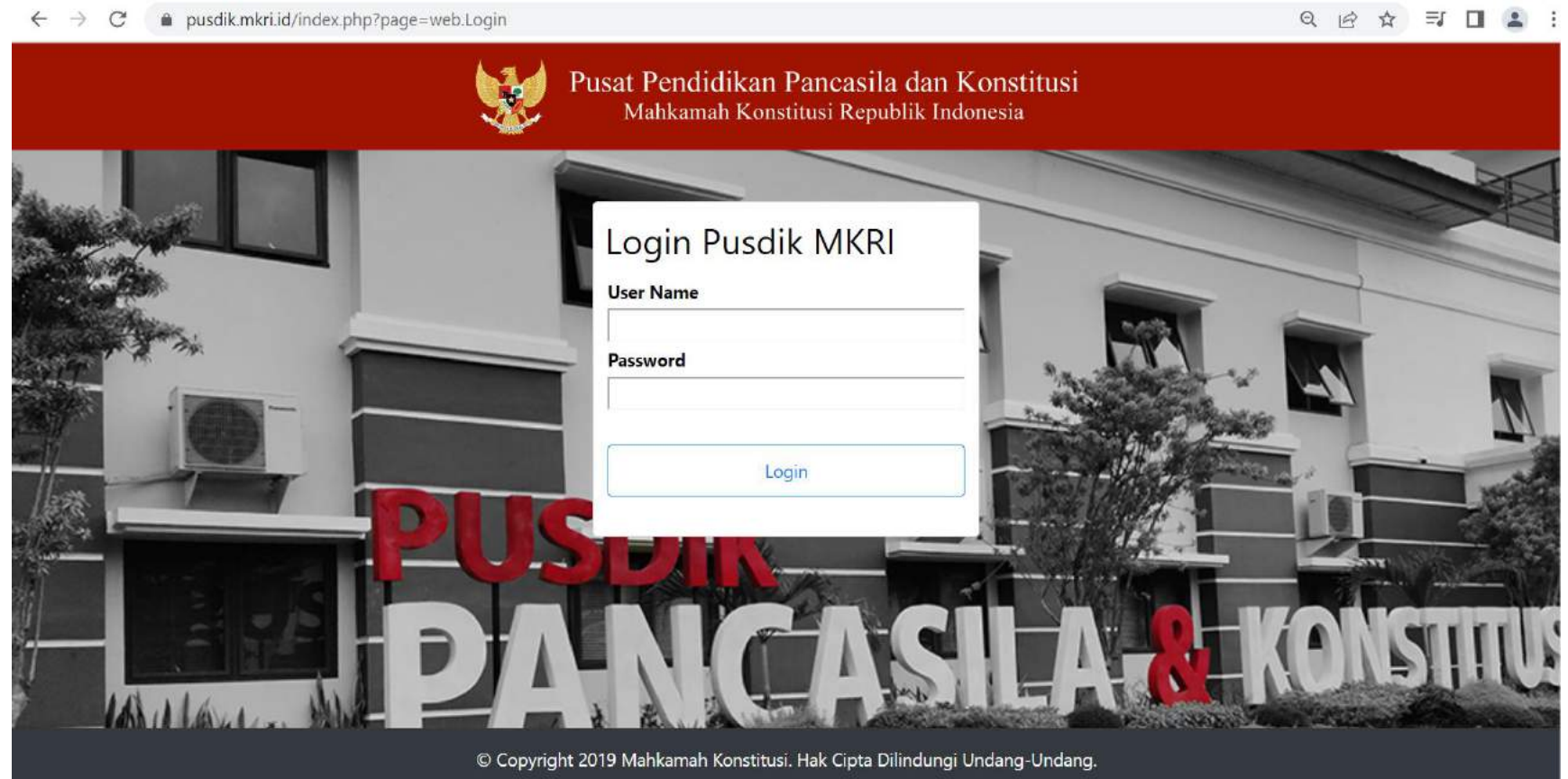
Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan

Simultan adalah sistem informasi untuk memudahkan para peserta kegiatan untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan seperti:


- ✓ Profil Peserta
- ✓ Booklet Kegiatan
- ✓ Materi Kegiatan
- ✓ Manajemen Kamar
- ✓ Pre-Test dan Post-Test
- ✓ Kuesioner Evaluasi
- ✓ E-Sertifikat

Login

Masukan Username dan Password



← → ↻ pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Login 🔍 📄 ☆ ☰ 👤 ⋮

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Login Pusdik MKRI

User Name

Password

[Login](#)

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.



Profil Peserta

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Nama Lengkap	:	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	:	Bogor / 2013-02-26
Usia	:	9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	S3
Asal Instansi	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	:	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	085157929660
E mail	:	pusdik@mkri.id

Profil Peserta

Meng-edit Profil Peserta



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Profil](#) [Barcode](#) [Materi](#) [Presensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-26
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

Edit Profile

Klik “Edit Profile”

Catatan:

Nama Lengkap dan Gelar yg tercantum pada Profil Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN) yg akan Dicetak pada e-Sertifikat

Edit Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya

NIK * :

Gelar Depan * :

Nama Lengkap * : Safira Putri Purnama
Usulkan Perbaikan Nama :
Usulan Perbaikan Nama (Isiah Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.

Gelar Belakang * : S.Kim

Tempat/Tanggal Lahir * : Jakarta | 1985-09-26

Jenis Kelamin * : Perempuan

Pendidikan * : S2

Instansi * : Mahkamah Konstitusi RI

Jabatan * : Programmer Utama

Alamat * :

Desa/Kelurahan * : Desa Satriamekar

Provinsi * : D.K.I. JAKARTA

Kabupaten/Kota * : KOTA JAKARTA TIMUR

HP * :

Email * :

[Update Data](#)

Meng-edit Profil Peserta


Peserta Dapat:

1. Revisi Nama Lengkap (Perlu Persetujuan Pusdik MK melalui Sistem);
2. Tambahkan Gelar; dan
3. Lengkapi Data yg Masih Kosong.

Selanjutnya, klik “Update Data” pada Bagian Bawah Laman.

Meng-edit Profil Peserta

Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom <small>(Usulan Perbaikan Nama (Ishak Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.)</small>
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-20
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

[Edit Profile](#)

Setelah peserta Klik “Update Data” pada Laman sebelumnya, maka Peserta akan kembali ke Laman Profil Peserta.

Apabila peserta merevisi Nama Lengkap, akan ada notifikasi “Usulan Perbaikan Nama menunggu persetujuan panitia. Terima kasih.”



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Pemateri	File
1	Eksistensi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	Mahkamah Konstitusi	File
2	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
3	Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Mahkamah Konstitusi	File
4	BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM	MAHKAMAH KONSTITUSI	File

Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Presensi 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

Klik tombol “Presensi” yang berwarna biru

*Tombol “Presensi” berwarna biru hanya akan muncul ketika materi dimulai sesuai jadwal hingga 30 menit setelah materi selesai sesuai jadwal.

*Presensi dilakukan pada setiap sesi Materi



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Sudah Absen 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d





Bimbingan Teknik atau PPHKWN

[E-Sertifikat](#)

Mengunduh e-Sertifikat



622ae73b0c0f7.pdf

1 / 2



54%



Klik Tanda Panah Bawah untuk Mengunduh (*Download*)

Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------



Nilai Pre Test	-	11
Nilai Post Test	:	14

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila		29-11-2022 07:30 s/d 29-11-2022 09:30	Isi Kuesioner
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme		29-11-2022 10:00 s/d 29-11-2022 12:00	Isi Kuesioner
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945		29-11-2022 13:00 s/d 29-11-2022 15:00	Isi Kuesioner

Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber



Kuesioner Evaluasi Narasumber Oleh Peserta

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Penilaian oleh Peserta

NO	Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	Sangat Buruk	Buruk	Baik	Sangat Baik
1.	Kemampuan Menyajikan Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Sistematika Penyajian Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Interaksi Dengan Peserta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Penggunaan Bahasa Lisan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Halaman

“Kuesioner Evaluasi Narasumber”

***Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**



Saran dan Perbaikan

1.

2.

Simpan

Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik “**simpan**”

* **Seluruh penilaian wajib diisi**, kecuali kolom saran dan perbaikan

Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0


Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Klik pada tulisan
“**SOAL PRE TEST**”

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

☰

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia

SOAL PRE TEST

No	Judul	Pemateri
1	Penjelasan Teknis Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia	



SOAL PRE TEST BIMTEK PHPU 2019

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali....

- Badan Pengawas Pemilu
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- Komisi Pemilihan Umum
- Mahkamah Konstitusi
- Pemantau Pemilu

Halaman

“Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

*Waktu mengerjakan soal *Pre test* dan *Post test* : **20 menit**



- Putusan
- Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- Pengajuan permohonan secara daring (online)
- Persidangan jarak jauh (video conference)
- Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- Semua benar

Simpan

Isi

Isi lembar kerja **Pre Test** dan **Post Test** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 10 soal** klik “**simpan**”

Hasil *Pre Test* dan *Post Test*



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

11

Nilai Post Test

:

14





Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Mengisi Evaluasi kegiatan



Kuesioner Evaluasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Alokasi waktu masing-masing materi telah sesuai	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Materi yang disajikan merupakan isu yang problematis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Materi meningkatkan keterampilan analisis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Materi yang paling menarik

Pilih Materi





Secara umum berikan pendapat anda mengenai keseluruhan hasil pelayanan kami (skor 1-100)

Saran dan Perbaikan

1.

2.

3.

Simpan

TERIMA KASIH

PANDUAN MODERATOR SESI MATERI

A. Pembukaan/*Greetings*

- a) Mengucapkan Salam;
- b) Menyampaikan selamat datang di Pusdik Pancasila dan Konstitusi dan memberikan pesan kepada peserta tetap menjaga protokol kesehatan.

B. Sesi Materi

- a) Menyapa Narasumber;
- b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
- c) Perkenalan diri sebagai moderator;
- d) Menjelaskan Sesi Materi secara singkat (*outcome* yang ingin dicapai peserta);
- e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
- f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
 - Jumlah total peserta;
 - Asal organisasi peserta;
 - Asal daerah peserta.

C. Alokasi waktu

- a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
- b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab.

D. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui link yang diberikan, mengisi kuesioner dan mengunduh materi.

E. Mempersilakan narasumber untuk memulai paparan materi.

F. Narasumber selesai memaparkan materi

- a) Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
- b) Memandu jalannya tanya jawab.

G. Penutup

- a) Menutup sesi Materi
 - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
 - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
 - Harapan setelah mendapatkan materi ini.
- b) Memberikan informasi untuk sesi berikutnya
 - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
 - Materi apa dan siapa pematernya;
 - Mengingatkan untuk *ontime* dalam sesi berikutnya.

**PANDUAN NARASUMBER SESI PRAKTEK
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SESI PRAKTEK

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait pada akhir Sesi Teknik Penyusunan.
- b) Soal dan *template* penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait telah diunggah ke *microsite*, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun draf tugas praktek sesuai *template* dimaksud.

2. Mekanisme/Alur Sesi Praktek

- a) Di awal, narasumber menjelaskan secara singkat terkait struktur Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait sesuai *template*, mulai dari identitas sampai dengan petitum; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-*highlight* dari *template*.
- b) Selanjutnya, narasumber mengajak para peserta untuk mereviu draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait yang telah disusun oleh peserta secara bergantian.
- c) Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat mereviu dan menerima pertanyaan/konsultasi dari peserta: mengatur lalu lintas pertanyaan/konsultasi dari peserta; mengondisikan peserta yang sedang konsultasi dalam menampilkan draf tugas praktek yang disusun (*slide show*) apabila diperlukan.

**PANDUAN NARASUMBER SESI EVALUASI
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SESI EVALUASI & PRESENTASI

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Melakukan reviu sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas praktek para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi form evaluasi dan form penilaian.
- b) Narasumber akan diberikan akses kepada alamat *e-mail* pengiriman tugas peserta beserta *password*-nya.
- c) Narasumber menentukan 2 (dua) peserta untuk mempresentasikan hasil tugas prakteknya dan 2 (dua) peserta sebagai cadangan, apabila dari 2 (dua) peserta pertama tidak bersedia untuk mamaparkan hasil pengerjaan tugas praktek.
- d) Narasumber disilahkan menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan peserta yang presentasi, narasumber dapat memilih tugas praktek yang paling bagus ataupun yang paling banyak catatan, sehingga dapat diberikan evaluasi.

2. Mekanisme/Alur Sesi Evaluasi & Presentasi

- a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan presentasi hasil tugas prakteknya secara bergantian.
- b) Masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas prakteknya.
- c) Moderator akan membantu dalam mengondisikan peserta yang presentasi dengan menampilkan hasil tugas praktek (*slide show*).
- d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil tugas praktek kedua peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil reviu keseluruhan atas tugas praktek para peserta.
- e) Kemudian, sesi tanya jawab. Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat Tanya jawab berlangsung: mengatur lalu lintas pertanyaan dari peserta.
- f) Setelah sesi evaluasi berakhir, narasumber kami harapkan memastikan peserta yang mengirimkan tugas prakteknya ke email, serta diharapkan pada hari yang sama sudah mengirimkan form penilaian dan form evaluasi kepada Pusdik MK melalui email masing-masing, untuk kami proses sebagai dasar pemberian sertifikat bagi peserta.

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Advokat Angkatan 6
Senin s.d. Kamis, 6 s.d. 9 November 2023

YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. & YM Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Perhatian terhadap masyarakat utk memajukan potensi potensi menjadi sangat baik Adanya sosialisasi terhadap masyarakat akan memberikan edukasi baik bagi masyarakat
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	61	3,81	Perhatian terhadap masyarakat utk memajukan potensi - potensi menjadi sangat baik. Adanya sosialisasi terhadap masyarakat akan memberikan edukasi baik bagi masyarakat.
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	Akan lebih sangat baik lagi apa bila waktu bimtek nya diperpanjang lagi Kami sangat berterima kasih sudah diberikan waktu untuk dapat bimtek dimahkamah mkri ini
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
5	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	8	58	3,63	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. sudah cukup bagus hanya jangan terlalu cepat saja penyampaianya.. secara umum sudah bagus.. YM Hakim Konstitusi - Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H udah cukup bagus hanya jangan terlalu cepat dan bagusnya disampaikan point-pointnya saja. mksh.
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	- -
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
10	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	4	9	56	3,50	Saran 1. kegiatannya cukup bagus namun baiknya belajarnya jangan sampai malam hari pada pertemuan pertama kama kondisi para peserta yang masih belum fiks. 2. bagusnya pendidikan PHPU 2023 ini perlu di tambahkan waktunya dari tiga hari menjadi 4 hari sehingga para peserta bisa lebih belajar dan tidak terburu-buru 3. dalam melangsungkan kegiatan perlu adanya kebersamaan dari peserta sebelumnya yang dimana mereka dapat pembiayaan. 4. adanya pembentukan komunitas alumni PHPU sehingga informasinya bisa lebuah terbuka lagi. Perbaikan 1. Adanya kegiatan atau game yang membuat peserta saling kerja sama.
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	waktu pemaparan perlu ditambah
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	0	63	3,94	Baiknya penyelenggara atau panitia untuk menertibkan peserta yang kurang tertib, seperti menggunakan hp saat narasumber sedang berbicara.
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat baik dalam membawa materi karena sangat jelas dan cepat dimengerti
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	8	60	3,75	
19	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	agar dapat dilakukan pelatihan lanjutannya
20	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	Disayangkan tidak ada tanya jawab dengan Narasumber Yang Mulia Hakim MK
21	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	9	56	3,50	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
24	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	Secara umumnya, penyampaian yang dilakukan oleh Pak Manahan dan Bu Sri sudah sangat baik dan sudah dilaksanakan dengan komprehensif, namun penjelasannya agak sedikit bertele-tele
25	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	8	50	3,13	mohon diperhatikan waktu memberikan materi
26	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	0	52	3,25	pemberian materi jangan terlalu larut malam
27	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	9	58	3,63	waktu materi yang panjang
28	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	Tidak ada Tidak ada
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tidak ada Tidak ada
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tidak ada Tidak ada
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	61	3,81	Tidak ada semuanya baik
32	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	8	59	3,69	Waktu penyampaian materi kurang
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Pertahankan
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah sangat baik Tidak ada perbaikan
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	Tingkatkan kualitas
36	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	60	3,75	Sebaiknya diadakan sesi tanya jawab
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat Baik Sangat Baik
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	kabel charger /colokan diperbanyak agar memudahkan
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
40	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
41	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
44	3	3	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
45	4	4	3	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	8	57	3,56	Sudah sangat baik, tidak ada yang perlu diperbaiki
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Bagus
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
49	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	9	59	3,69	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
51	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	9	55	3,44	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
54	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	9	56	3,50	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
56	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
57	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	9	54	3,38	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	62	3,88	materinya sangat sesuai bisa terus digunakan untuk peserta berikutnya sukses terus prof
59	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	8	54	3,38	
60	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	8	52	3,25	Lebih ada tambahan waktu saat sesi tanya jawab
61	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	9	56	3,50	sangat bagus dilanjut sangat bagus lanjut
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Lanjutkan Mantap Oke
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Agar dipertahankan dan ditingkatkan
65	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	0	60	3,75	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	bagus bagus
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	Saran. MK tetap memberikan hal Bimtel begini 2 Tahun sekali agar Pengacara dapat di boboti MK sebaiknya meneluarkan PMK soal setiap masalah PHPU pengacara wajib yang bersertifikat Bimtek PHPU
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	48	3,00	
71	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	7	54	3,38	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Tidak ada Tidak ada
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Dimohon peserta bimtek dari advokat agar lebih di perhatikan terutama masalah akomodasi termasuk keberangkatan dan kepulangnya dari domisili Masalah jadwal jangan terlalu padat kama anggota advokat banyak yang lanjut usia Gasss polll
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tetap di pertahankan yang sudah baik
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Waktu terlalu pendek, terutama untuk praktik membuat permohonan atau keterangan pihak terkait
84	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	58	3,63	- -
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Pertahankan Pemateri mantap
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
87	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
88	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
89	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
90	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	8	59	3,69	Lebih interaktif Baik
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Lebih di perbanyak lagi pematerinya Mohon dibrevitaisasi gedung
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
93	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	8	53	3,31	
94	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	tingkatkan Mutu terus pada masa akan datang.
	3,80	3,74	3,64	3,70	3,68	3,68	3,77	3,69	3,74	3,67	3,76	3,69	3,67	3,66	3,74	3,73			3,71	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Advokat Angkatan 6
Senin s.d. Kamis, 27 s.d. 29 November 2023

Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
2	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	8	53	3,31	
3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
5	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	9	61	3,81	Mantap,.....sangat jelas dalam penjelasan lanjutan dan sukses selalu
6	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	8	59	3,69	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	tidak ada Tidak ada
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Adanya bintang ini menjadikan kami lebih luas dan membantu kami untuk lebih baik lagi, Selalu sosialisasi dengan masyarakat yang membukakan,	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
12	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	Mohon agar memperhatikan awal dan akhir (on time)	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	Pembicara atau narasumber dalam memberikan penyampaian materi sangat baik dengan menyertakan juga contoh kasus, serta menanggapi pertanyaan peserta. Hanya saja narasumber sedikit terlambat datang.	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Pembawaan materi dan korespondensi dengan peserta Bimtek sangat baik, cepat dimengerti waktu perlu ditambah	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
17	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	8	53	3,31		
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	bagus dapat diterima	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tidak ada display contoh kasus sengketa PHPU	
20	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	9	53	3,31		
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Cukup	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	-	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tidak Ada Tidak Ada	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tidak ada Tidak ada	
29	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94		
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Pak Pan Muhammad Faiz, menyampaikan materi dengan sangat jelas dan sangat terperinci, serta bisa menjawab pertanyaan dengan sangat-sangat baik	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00		
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00		
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	9	63	3,94		
38	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	51	3,19		
39	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	9	51	3,19		
40	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	9	61	3,81	Saran 1. peserta harus dibantu seperti akomodasi untuk biaya balik ke daerah daerah seperti peserta sebelumnya. MK jaya selalu	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	9	51	3,19		
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
43	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	59	3,69		
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	penyampaian materi luar biasa, semakin ke depan harus lebih bagus sukses selalu tuk segera ke prof	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00		
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	lanjutkan mabtaaab	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
49	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	9	58	3,63	Saran nya Bagus sekali	
50	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	3	8	58	3,63		
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	-	
52	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	60	3,75		
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Dipertahankan & Ditingkatkan	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
56	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	8	59	3,69	DIMOHON UNTUK DIBERIKAN PELATIHAN KHUSUS UNTUK MEMBUAT PERMOHONAN SUPAYA MENGETRI DALAM PEMBUATAN PERMOHONAN PEMOHON	
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Tidak ada Tidak ada	
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
62	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	9	56	3,50	Semangat
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
64	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	9	57	3,56	OK
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	Semoga 2 tahun sekali agar yang lain juga bisa
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	tetap pertahankan yang sudah baik
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
69	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	8	51	3,19	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
77	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	61	3,81	Sudah cukup Sudah cukup
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Lebih baik Tambahkan sarana prasarana olahraga
79	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	8	59	3,69	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
81	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	9	59	3,69	Tingkatkan Mutu dengan penyajianMateri yg berkuaitas Sukseslalu agar bisa mengajar di Universitas Indonesia
	3,79	3,77	3,75	3,77	3,74	3,69	3,80	3,77	3,75	3,68	3,80	3,75	3,72	3,74	3,79	3,77			3,75	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Advokat Angkatan 6
Senin s.d. Kamis, 27 s.d. 29 November 2023

Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
6	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	8	57	3,56	
7	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	7	51	3,19		
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	7	61	3,81	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
11	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	59	3,69	- -
12	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	8	60	3,75	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	9	62	3,88	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
20	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	8	60	3,75	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tidak ada Tidak ada
22	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	8	55	3,44	Kurangnya waktu presentasi dan diskusi,....terimakasih
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
25	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	Tidak ada Tidak ada
26	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	51	3,19	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	perbanyak contoh
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	8	63	3,94	
29	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	Dr. Wiryanto menjelaskan secara jelas dan menarik, namun terkadang ada beberapa materi yang disampaikan terlalu cepat seperti E-BRPK dan BRPK. namun sisanya diajarkan cukup jelas.
30	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
32	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	agar bisa tepat waktu
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	8	51	3,19	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Very Good dan bangun suasana dinamis
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
38	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	62	3,88	bapak hebat mengajarnya full bisa berdiri dan bisa langsung diskusi dengan peserta tetap semangat bapak kerennn
40	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	9	60	3,75	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tidak ada Tidak ada
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sudah bagus
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat baik lanjut baik sekali
46	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	8	53	3,31	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	4	3	8	59	3,69	
48	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	50	3,13	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
50	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Dipertahankan & Ditingkatkan
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
57	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Tidak ada Tidak ada
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat baik Sangat baik
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Dalam tim angkatan ke VI advokat di buat satu grup agar saling mengenal dan komunikasi satu sama lain
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
65	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	9	60	3,75	OK BANGET
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	tetap pertahankan yang sudah baik
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
71	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	8	58	3,63	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
76	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	Sudah cukup Sudah cukup
77	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	8	59	3,69	
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
79	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	9	59	3,69	Tingkatkan mutu dan ters belaiar materi2 yg baru Sukses selalu dan terus berkarya di Mahkahma Konstitusi.
	3,76	3,68	3,77	3,75	3,67	3,68	3,77	3,76	3,72	3,76	3,80	3,75	3,68	3,73	3,77	3,75			3,74	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Advokat Angkatan 6
Senin s.d. Kamis, 27 s.d. 29 November 2023

Rizki Amalia, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tidak ada Tidak ada
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantap oke Mantap oke lanjutkan
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
11	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	8	53	3,31	
12	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	9	52	3,25	
13	4	3	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	8	54	3,38	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
15	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	7	55	3,44	
16	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	Mantap jelas dan dapat dimengerti,....👍👍👍
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	mantab lanjutkan mantab lanjutkan
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	waktunya diperbanyak
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	TElalu ceppat memberi materi dan tidak ada diskusi
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	waktu penyajian kurang
28	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	waktu kurang
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
30	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	60	3,75	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
33	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	8	58	3,63	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
36	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	9	59	3,69	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
38	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	9	54	3,38	BAGUS
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tidak Ada Tidak Ada
40	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	8	60	3,75	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	, - -
42	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	60	3,75	
43	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	8	51	3,19	t t
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tingkatkan terus
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tingkatkan terus
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Dipertahankan & Ditingkatkan
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Tidak ada Tidak ada
55	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
57	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	9	59	3,69	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	tetap lanjutkan program ini tetap semangat kerennnn
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	tetap pertahankan yang sudah baik
63	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	Secara Teknis, Ibu Rizki Amalia ini sangat pintar, penjelasannya juga berbobot, namun intonasinya lebih datar daripada lantai.
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Sangat baik Sangat baik

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
74	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	8	56	3,50	Cukup Cukup
75	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	8	60	3,75	
76	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	8	52	3,25	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
78	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	3	8	56	3,50	Tingkatkan terus mutu dan kualitas mengajar. Sukses selalu dalam menjalankan tugas di Mahkamah Konstitusi.
	3,74	3,69	3,64	3,74	3,68	3,69	3,71	3,65	3,71	3,73	3,76	3,69	3,65	3,69	3,76	3,73			3,70	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Advokat Angkatan 6
Senin s.d. Kamis, 27 s.d. 29 November 2023

Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H., Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H., Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M., Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik sekali untuk menambah wawasan kami Cukup baik
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantab luar biasa Mantap oke
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tidak Ada Tidak ada
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat baik sekali sangat baik sekali
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
11	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	8	53	3,31	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
14	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	9	61	3,81	Mantap,...dijalankan,...👍👍👍
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
16	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	8	56	3,50	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	BAGUS
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	waktunya perlu ditambah
22	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	9	56	3,50	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	8	60	3,75	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
25	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	8	61	3,81	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
27	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	8	54	3,38	
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Materi soal bagus Kelompok 2 tapi seharusnya juga sebagai TERMOHON maupun PIHAK TERKAIT, 3 sesi pelatihan bukan hanya sebagai PEMOHON saja,
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	59	3,69	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Dipertahankan & Ditingkatkan
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	48	3,00	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	9	50	3,13	
41	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	9	59	3,69	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Pendekatan nya kepada peserta harus ditingkatkan lagi. Uang tiket rata" Peserta tidak ada diharapkan dengan segala homat kepada bapak" Panitia agar membantu kami pun tidak semua terimakasih
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Tidak ada Tidak ada
45	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	54	3,38	
46	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tidak ada Tidak ada
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
53	4	3	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	9	56	3,50	OK
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	lanjutkn programnya semua narasumber kerennn
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	ibunya sangat bersahabat dan mau mengajar dengan baik
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	tetap pertahankan yang sudah baik
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat memuaskan
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Sangat baik Sangat baik
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4,00	
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Lebih lama lagi waktu Diklat nya Fasilitas di dalam kamar
75	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	Sudah cukup Sudah cukup
76	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	8	60	3,75	
77	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	8	52	3,25	
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
81	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	8	57	3,56	Teruskan dan tingkatkan mutu pengajaran sesuai perkembangan perundang undangan yg baru di MK. Sukses selalu dalam tugas di Mahkamah Konstitusi menjadi harapan pencari keadilan dan kebenaran
	3,78	3,72	3,79	3,72	3,69	3,73	3,74	3,78	3,73	3,73	3,75	3,74	3,70	3,73	3,74	3,77			3,74	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
75	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	3	8	57	3,56	Terus tingkatkan mutu pengajaran dan terus belajar dalam dunia Hukum Sukses selalu dalam tugas di Mahkamah Konstitusi untuk membantu Pencari Keadilan dan kebenaran.
	3,76	3,75	3,77	3,72	3,71	3,73	3,69	3,71	3,75	3,76	3,81	3,71	3,68	3,67	3,68	3,68			3,72	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Advokat Angkatan 6
Senin s.d. Kamis, 27 s.d. 29 November 2023

Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H., I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H., Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M., Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Lanjutkan mantap Oke mantap
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat baik sangat baik
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
5	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	60	3,75	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
14	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	8	60	3,75	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
16	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	7	53	3,31		
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Bapak Adityawan yang Gemoy, ini sangat pandai menyampaikan penjelasan, pelajaran disampaikan dengan menarik, sehingga kita mengetahui mekanisme pendaftaran melalui elektronik	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tidak ada Tidak ada	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
21	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	8	53	3,31		
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	tetap pertahankan yang sudah baik	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tetap dipertahankan	
24	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94		
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
27	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	Mantaplanjutkan 🙌🙌🙌	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	materi sangat penting lanjutkan	
29	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	8	52	3,25		
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Tidak ada Tidak ada	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	8	51	3,19		
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	presentasi paktek ditambah	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	Sangat bagus	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	bagus bagus	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
43	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	54	3,38		
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	0	50	3,13	Lanjutkn	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Bagus	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -	
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Sangat baik Sangat baik	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
55	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	9	56	3,50	LUAR BIASA	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00		
57	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94		
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	50	3,13		
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00		
64	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94		
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
66	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	59	3,69	Cukup Cukup	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Ruang kelas di perbanyak Kelas di tambah fasilitas nya	
68	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81		
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tidak ada Tidak ada	
70	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	3	8	56	3,50	Tidak ada semuanya memuaskan	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
71	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	8	47	2,94	
73	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	7	54	3,38	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	9	50	3,13	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
79	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	8	58	3,63	Tingkatkan terus mutu proses belajar mengajar berinovasi dalam bahan yang baru sukses terus melayani di Mahkamah Konstitusi utk pencari keadilan dan kebenaran
	3,72	3,70	3,75	3,70	3,66	3,67	3,70	3,68	3,67	3,72	3,75	3,70	3,67	3,70	3,77	3,73			3,70	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Advokat Angkatan 6
Senin s.d. Kamis, 27 s.d. 29 November 2023

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
1	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Sangat memuaskan
2	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bangkit Panji Anarogo	2	2	4	3	3	3	9	4	3	7	2	3	5	3	3	6	3	3	6	4	3	7	62	2,95	Dimohon kepada panitia agar lebih memperhatikan peserta PHPU 2023 angkatan ke VI agar sama dengan peserta lembaga lainya mulai dari akomodasi dan lain sebagainya sehingga tidak ada keanakan tirikan. terimakasih perbaikan tentang jadwal semoga panitia bisa memperhatikan saran dan permintaan kami
3	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Dalam sesi tanya jawab setiap selesai pemberian materi oleh Narasumber sangat-sangat terbatas dan terkesan cepat-cepat Dalam kegiatan Bimtek yang dilaksanakan oleh MK sebaiknya semua utusan peserta baik dari Parpol, Advocate dan sebagainya harusnya sama dalam hal fasilitas dan akomodasinya. Hal ini terjadi perbedaan sehingga kurang adil Waktu penyelenggaraan sangat singkat sehingga tidak maksimal. Kedepannya mudah-mudahan jauh lebih baik. Terimakasih
4	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	
5	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
6	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Sangat memuaskan
7	4	4	4	12	4	4	4	12	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
8	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
9	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Hadian Taofik Rochman	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
10	4	4	4	12	4	4	4	12	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	lebih sering lagi dilakukan kegiatan pelatihan seperti ini
11	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Sangat memuaskan
12	4	4	4	12	4	4	4	12	Nanda Adyriansyah, S.Kom., M.T.I.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	3	4	7	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	
13	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
14	3	3	3	9	3	3	3	9	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H.	Suhardi	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
15	3	4	3	10	4	4	3	11	Nanda Adyriansyah, S.Kom., M.T.I.	Angga Putri Gardina	3	3	6	4	3	3	10	4	3	7	3	4	7	3	3	6	4	4	8	3	4	7	72	3,43	
16	4	4	4	12	4	4	4	12	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	lanjutkan dengan kegiatan yang lain terus bersinambungan semangat pantang mundur
17	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Bimteknya sangat baik untuk masa depan Penegakan Hukum
18	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Saran untuk pelaksanaan Bimtek agar lebih sering, karena dari bimtek mendapatkan pmgetahuan
19	4	4	4	12	4	4	4	12	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	77	3,67	
20	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Makanannya kurang menantang...
21	4	4	4	12	4	4	4	12	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
22	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
23	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	3	3	6	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	78	3,71	
24	3	4	3	10	3	4	3	10	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Suhardi	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	3	7	76	3,62	
25	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
26	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	1	2	3	1	3	4	3	3	6	3	3	6	3	3	6	58	2,76	
27	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
28	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Bisaryadi, S.H., LL.M.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Tidak Ada Tidak ada Tidak ada
29	3	4	3	10	4	3	3	10	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Ardiansyah Salim	4	3	7	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	3	4	7	3	4	7	4	4	8	73	3,48	semoga kegiatan bimtek selalu dilakukan untuk menambah ilmu konstitusi kepada kami
30	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	semoga pusdik MK setiap tahun bisa mengadakan bimtek
31	3	3	3	9	3	4	3	10	Dr. Bisaryadi, S.H., LL.M.	Angga Putri Gardina	4	4	8	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	72	3,43	Mantap, terimakasih
32	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
33	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	sudah sangat baik dan harus dipertahankan
34	3	4	4	11	4	4	4	12	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Suhardi	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	3	3	6	80	3,81	Sudah sangat bagus Mantap Semoga semakin lebih baik
35	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
36	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Menu makanan dagingnya keras dan banyak lemak
37	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Menu makanan dagingnya keras dan banyak lemak
38	3	3	3	9	3	3	3	9	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.		3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
39	4	4	4	12	4	4	4	12	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	
40	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Bisaryadi, S.H., LL.M.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Tidak Ada Tidak ada Tidak ada
41	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Di pertahankan terus karena sudah baik.
42	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Bisaryadi, S.H., LL.M.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Mantap Luar Biasa Lanjutkan oke lanjutkan mantap
43	4	4	4	12	4	4	3	11	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	2	4	6	3	3	3	9	3	3	6	2	2	4	3	3	6	4	3	7	3	4	7	68	3,24	WAKTU DITAMBAH INFORMASI UNTUK PESERTA ADVOKAT, KHUSUSNYA KEPADA ORGANISASI DPC PERADI DI KOTA BANDUNG SAYA SIAP MENGIKUTI PROGRAM MENARIK DARI MAHKAMAH KONSTITUSI
44	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
45	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	sudah bagus

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
46	3	4	4	11	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	3	3	3	9	2	2	4	2	4	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	74	3,52	cukup dan mohon di tingkatkan lebih baik lagi :)
47	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	jam praktek lebih banyak ada pemberian uang transpor bagi peserta ada program bimtek lanjutan.
48	3	3	3	9	4	4	4	12	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	3	7	4	4	3	11	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	77	3,67	
49	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Udah mantap Mantap sudah Mantap kali
50	4	3	4	11	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	79	3,76	
51	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
52	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Program ini sangat menarik dan banyak ilmunya bahkan, yang terbaik itu ada prakteknya gak cuma teori. The Best For MK you are the best. Sabar yah menghadapi peserta yang gak paham tapi ngotot, semoga diberikan ketabahan dan kesabaran serta hikmat juga Pahala dari Yang Maha Kuasa yahhh Harapan saya selain PHU kalau boleh juga permohonan PUU, jadi lengkap sekalian sekali. overall sudah ok banget
53	4	4	4	12	4	4	4	12	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Tetap dipertahankan
54	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
55	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	tetap pertahankan yang sudah baik dan terus ditingkatkan
56	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
57	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.		4	4	8	4	3	4	11	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	3	4	7	82	3,90	Saya sangat senang dalam mengikuti pelatihan Sengketa Pemilu, banyak sekali yang saya dapatkan, namun saya harapkan agar, pelatihan ini bisa dipisah menjadi 4 hari agar materi yang padat tersebut bisa lebih mudah dicerna
58	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.		3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
59	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	0	3	3	3	6	60	2,86	
60	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	3	3	6	69	3,29	
61	4	4	4	12	4	4	4	12	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	2	2	4	3	3	6	3	3	6	3	3	6	67	3,19	
62	4	4	4	12	4	4	4	12	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	4	4	11	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	4	7	3	4	7	73	3,48	
63	3	3	3	9	3	3	3	9	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	3	3	6	69	3,29	kemasan air mineral kalau bisa lebih besar diadakan kembali dengan metode lebih ke focus group discussions
64	4	3	3	10	4	3	4	11	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	UANG SAKU, TEAM IT
65	3	3	3	9	4	4	4	12	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	71	3,38	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
66	3	3	3	9	3	3	4	10	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	76	3,62	1. uang saku 2. kurang bantuan team IT
67	3	4	3	10	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	2	3	5	3	3	6	3	3	6	3	3	6	66	3,14	Di kamar GK 5 kamar 108 tidak ada gantungan baju dan tisu kamar Tim IT ditambah agar membantu peserta Agar kepada peserta dr OA juga diberikan uang ttransport/ saku tidak hanya dari Papol
68	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	mengadopsi dismisal proses dari PTUN biara ada keadilan bagi para pencari keadilan menerima saran pendapat peserta dalam acara demi perbaikan MK ke depan ada waktu untuk olah raga biar semuanya
69	3	4	3	10	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	4	7	73	3,48	Baik Cukup baik Cukup baik
70	4	4	4	12	4	4	4	12	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	pertahankan yang sudah baik....mksh atas undangannya kepada Serikat Pengacara Indonesia
71	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Waktu sholat yg tdk terdengar Materi baiknya sdh diterima peserta secara tertulis saat registrasi Waktu yg kurang terutama bimbingan beracara di MK
72	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Lebih di maksimalkan lagi salam hal lamanya waktu untuk pelatihan dan pendidikan Perluas halaman dan tambahkan sarana olahraga Perbaikan gedung
73	4	4	3	11	3	3	3	9	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	3	3	6	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	3	7	75	3,57	Mantap Mantap Mantap
74	4	3	4	11	3	4	3	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Edwin Aditya Irawan	3	4	7	3	4	3	10	3	4	7	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	3	7	75	3,57	
75	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
76	4	4	4	12	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H	Fazlur Rahman El Islamy	4	3	7	3	3	4	10	3	3	6	4	4	8	3	3	6	3	3	6	3	3	6	70	3,33	Kalau bisa menu makanannya diubah, jangan daging saja. Ada pilihan ikan lebih bagus. Karena saya tidak bisa makan daging karena riwayat asam urat. Menu selanjutnya ikan, dan sayur mayur. Agar tidak terserang asam urat.
77	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	supaya diselenggarakan kembali program-program yang dapat membantu advokat untuk memiliki kemahiran beracara di mahkamah konstitusi Tidak ada Tidak ada
78	3	4	4	11	4	4	3	11	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	3	3	6	76	3,62	
79	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Seluruh narasumber sebaiknya interaktif dengan peserta.
80	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Bisanyadi, S.H., LL.M.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Tidak ada Tidak ada Tidak ada
81	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Bisanyadi, S.H., LL.M.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Tidak ada Tidak ada Tidak ada
82	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
83	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
84	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Baik
85	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Baik
86	4	4	4	12	4	4	4	12	Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Adanya bintek ini menjadikan bimbingan ilmu Sangat baik Sangat bermanfaat

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
87	3	3	3	9	3	3	3	9	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
88	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
89	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
90	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	---
91	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Sangat terkesan
	3,65	3,70	3,66	3,67	3,71	3,73	3,68	3,71			3,66	3,63	3,64	3,69	3,69	3,69	3,69	3,59	3,57	3,58	3,49	3,57	3,53	3,67	3,67	3,67	3,71	3,73	3,72	3,67	3,68	3,68	80,54	3,66	



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, dan DPRD TAHUN 2024

**Oleh:
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023**

DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020** tentang **PERUBAHAN KETIGA** atas **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** tentang **MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022** tentang **PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
- ❑ **PMK NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD



PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD

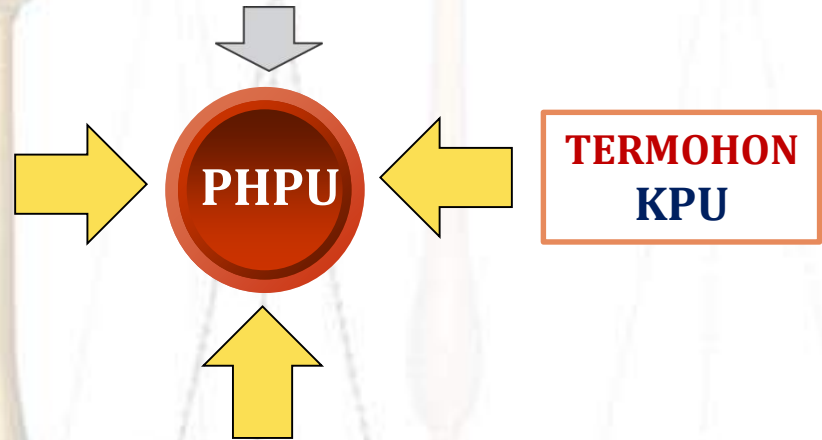


PARA PIHAK (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

PEMOHON

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK.
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya

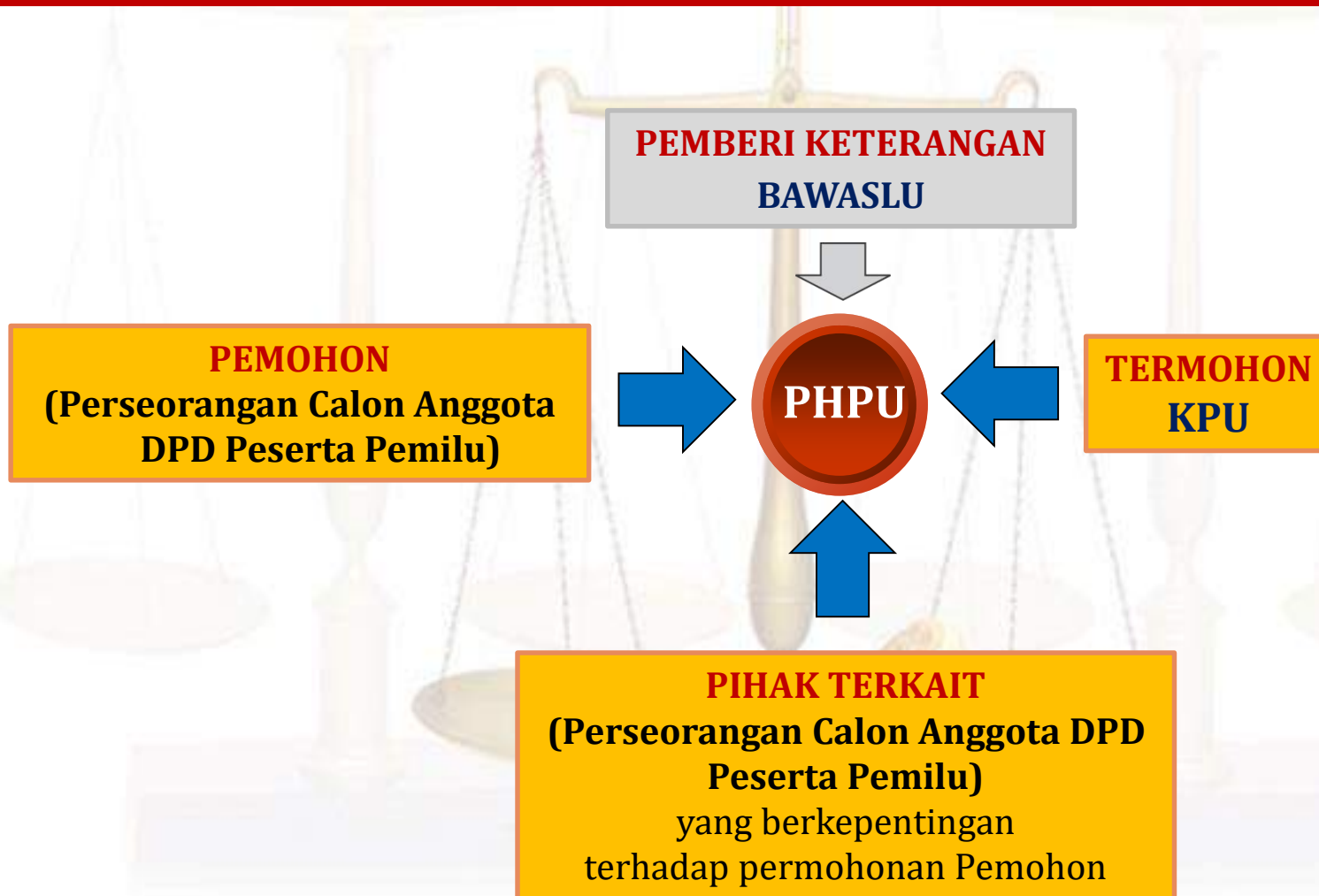
PEMBERI KETERANGAN BAWASLU



PIHAK TERKAIT

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan;
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;

PARA PIHAK (PHPU ANGGOTA DPD)



OBJEK PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

**Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu Anggota
DPR dan DPRD secara
nasional oleh KPU**

yang memengaruhi

**Perolehan kursi
Pemohon dan/atau
terpilihnya
anggota
DPR dan/atau DPRD
di suatu daerah
pemilihan**

OBJEK PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPD)

**Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu Anggota
DPD secara
nasional oleh KPU**

yang memengaruhi

**terpilihnya Pemohon
sebagai anggota DPD**

PENGAJUAN PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

1. Pengajuan Permohonan:
 - a. paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon
 - b. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
2. Pengajuan Permohonan secara daring (*online*), berkas Permohonan asli diserahkan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan
3. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. permohonan;
 - b. dalam hal permohonan diajukan oleh perseorangan, harus melampirkan surat persetujuan secara tertulis yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol atau Parpol Lokal yang bersangkutan;
 - c. fotokopi Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon;
 - d. fotokopi KTP atau Identitas Pemohon; dan
 - e. Surat kuasa disertai fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.

PENGAJUAN PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPD)

1. Pengajuan Permohonan:
 - a. paling lama **3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak** diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon
 - b. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
2. Pengajuan Permohonan secara daring (*online*), berkas Permohonan asli diserahkan paling lama **3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam** sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan
3. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Permohonan;
 - b. Salinan Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon;
 - c. Salinan KTP atau Identitas Pemohon; dan
 - d. Surat kuasa disertai salinan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.

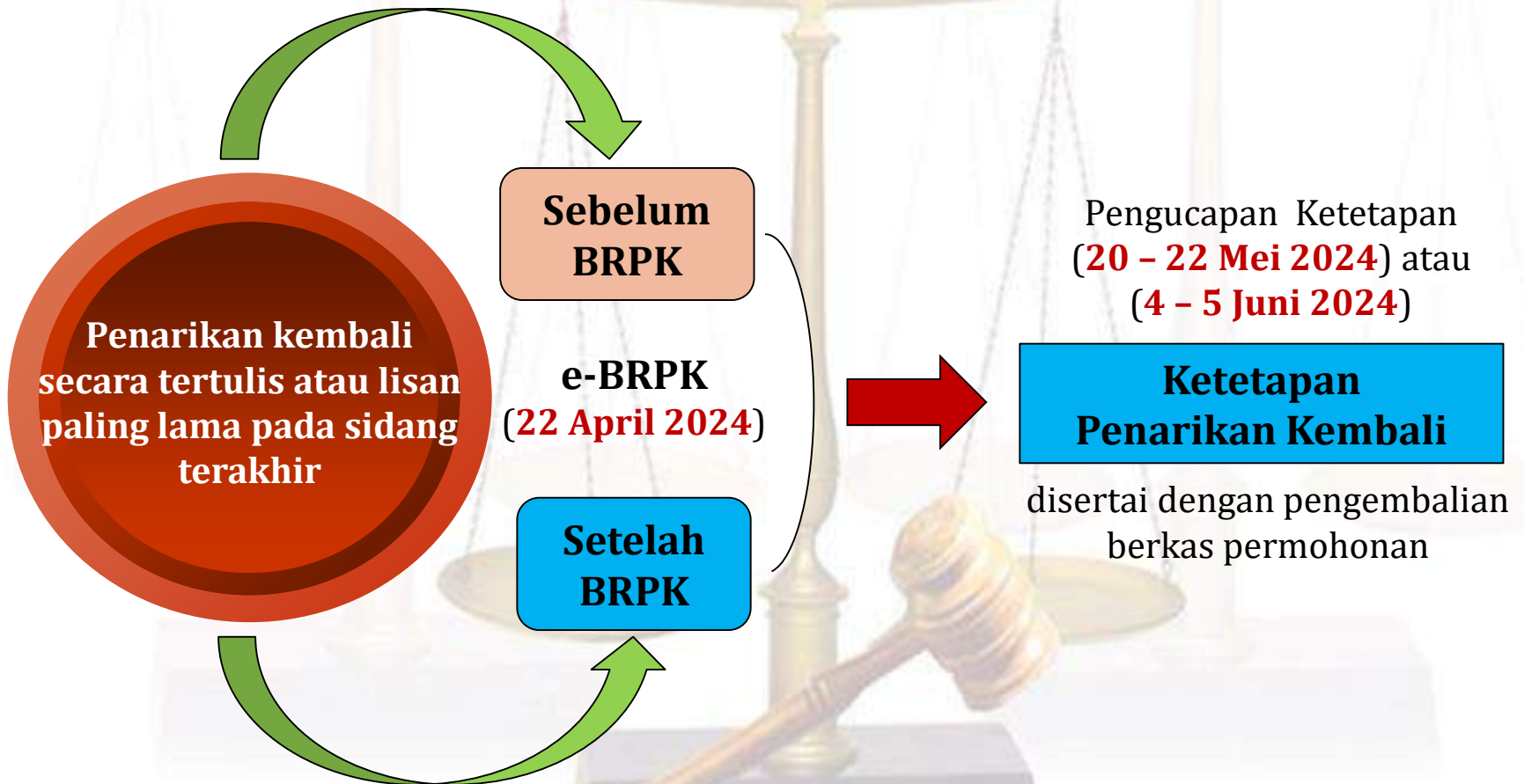
PERMOHONAN

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum sebanyak 4 (empat) rangkap
2. Permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum, ditandatangani oleh kuasa hukum
3. Permohonan memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
 - b. Uraian yang jelas mengenai:
 - b.1 kewenangan Mahkamah
 - b.2 kedudukan hukum Pemohon
 - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan
 - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
 - b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon

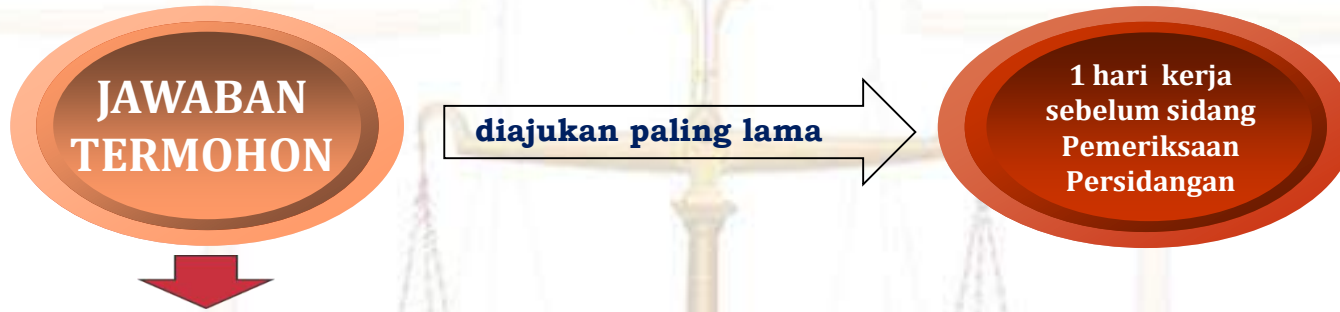
Lanjutan ...

4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
8. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Permohonan Pemohon serta daftar alat bukti dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (.docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.
9. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan salinan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan format word (.docx) dan pdf.
10. Mahkamah menggunakan Permohonan dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PENARIKAN KEMBALI PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD



JAWABAN TERMOHON

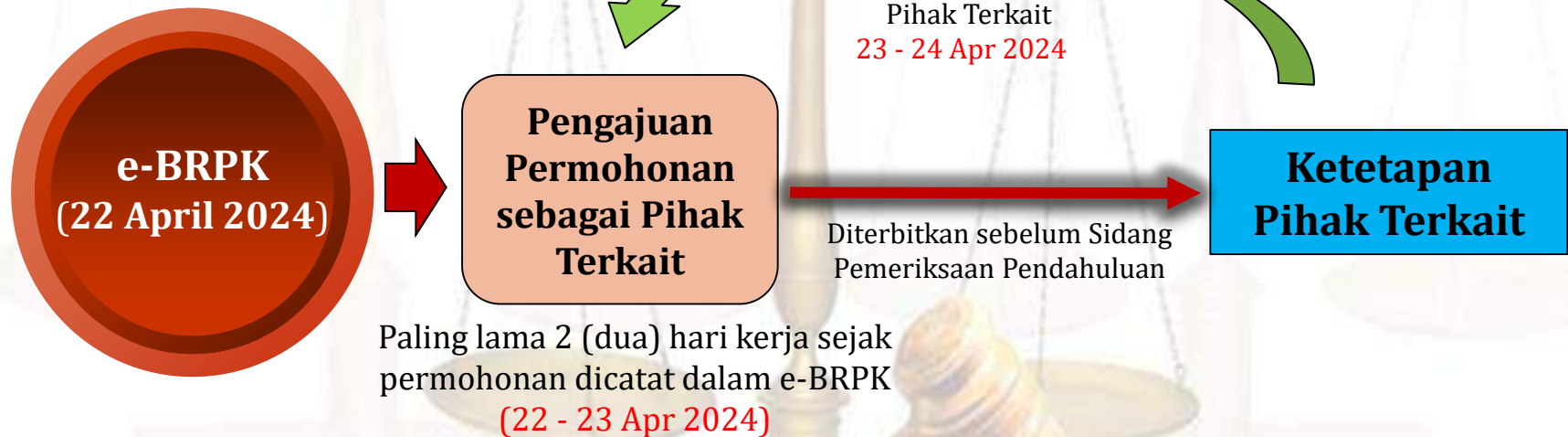


1. Jawaban Termohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Termohon/kuasa hukum
2. Jawaban Termohon diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli,
3. Jawaban Termohon memuat:
 - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:
 1. kewenangan Mahkamah
 2. kedudukan hukum Pemohon
 3. tenggang waktu pengajuan permohonan
 4. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon; dan
 5. *petitum* mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Jawaban Termohon dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.

Lanjutan ...

5. Alat bukti berupa surat atau tulisan, sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Termohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
10. Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Keterangan
Pihak Terkait

diajukan paling lama

1 hari kerja sebelum
Pemeriksaan
Persidangan

1. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli
3. Keterangan Pihak Terkait memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai Pihak Terkait merupakan Partai Politik Peserta Pemilu atau perseorangan Peserta Pemilu dari Partai Politik yang sama;
 - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
 - d. *Petitum*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Keterangan
Pihak Terkait

diajukan paling lama

1 hari kerja sebelum
Sidang Pemeriksaan
Persidangan

1. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satu rangkapnya asli
3. Keterangan Pihak Terkait memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan calon anggota DPD;
 - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
 - d. *Petitum*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 1 rangkap penggandaan)
6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
7. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Pihak Terkait untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan Salinan dan daftar alat bukti diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) dan pdf.
10. Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

KETERANGAN BAWASLU

**Keterangan
Bawaslu**

diajukan paling lama

**1 hari kerja sebelum
Pemeriksaan
Pendahuluan**

1. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu/kuasa hukum
2. Keterangan Bawaslu diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli
3. Keterangan Bawaslu memuat:
 - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai pelaksanaan pengawasan, meliputi:
 1. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan;
 2. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
4. Keterangan Bawaslu dapat dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan dan daftar alat bukti sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Penyerahan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Bawaslu untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Penyerahan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) dan pdf.
10. Mahkamah menggunakan Keterangan Bawaslu dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PERSIDANGAN



- Dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Jadwal hari sidang Mahkamah dapat diketahui dan diakses melalui Laman Mahkamah
- Mahkamah dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference* atau fasilitas media elektronik pada Mahkamah
- Persidangan jarak jauh diselenggarakan atas inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para pihak setelah memperoleh persetujuan dari Mahkamah

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, mengesahkan alat bukti Pemohon.

- Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan **paling cepat 5 (lima) hari kerja** sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
- Pemberitahuan sidang pertama disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu **paling lama 1 (satu) hari kerja** setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK atau **paling lama 3 (tiga) hari kerja** sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Calon Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan gugur**
- Permohonan yang dinyatakan gugur, Mahkamah menerbitkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

Pemeriksaan Persidangan

Sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa permohonan Pemohon, memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu, mengesahkan alat bukti, memeriksa alat bukti tertulis, mendengar keterangan saksi/ahli, memeriksa alat bukti lain, memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan bukti petunjuk.

- Pemeriksaan Persidangan diselenggarakan setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon/kuasa hukum, Pihak Terkait/kuasa hukum, dan Bawaslu, saksi/ahli, serta pemberi keterangan hadir dalam Pemeriksaan Persidangan.
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan tidak dapat diterima**.
- Permohonan yang dinyatakan **tidak dapat diterima**, Mahkamah menjatuhkan putusan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

ALAT BUKTI

1

Surat atau Tulisan

1. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
2. Keputusan Termohon tentang penetapan peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD peserta Pemilu beserta lampirannya
3. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD beserta lampirannya
4. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
 - a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)
 - b. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
 - c. KPU/KIP kabupaten/kota
 - d. KPU/KIP provinsi; dan/atau
 - e. KPU
5. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
6. Dokumen tertulis lainnya.

Lanjutan ...

2 **Alat bukti keterangan para pihak** (jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu) yang disampaikan dalam persidangan

Alat bukti keterangan saksi:

- 3**
- a. keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan PT.
 - b. keterangan saksi yang berasal dari Pemantau Pemilihan yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu; dan
 - c. saksi lain.

Alat bukti keterangan ahli dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan PT.

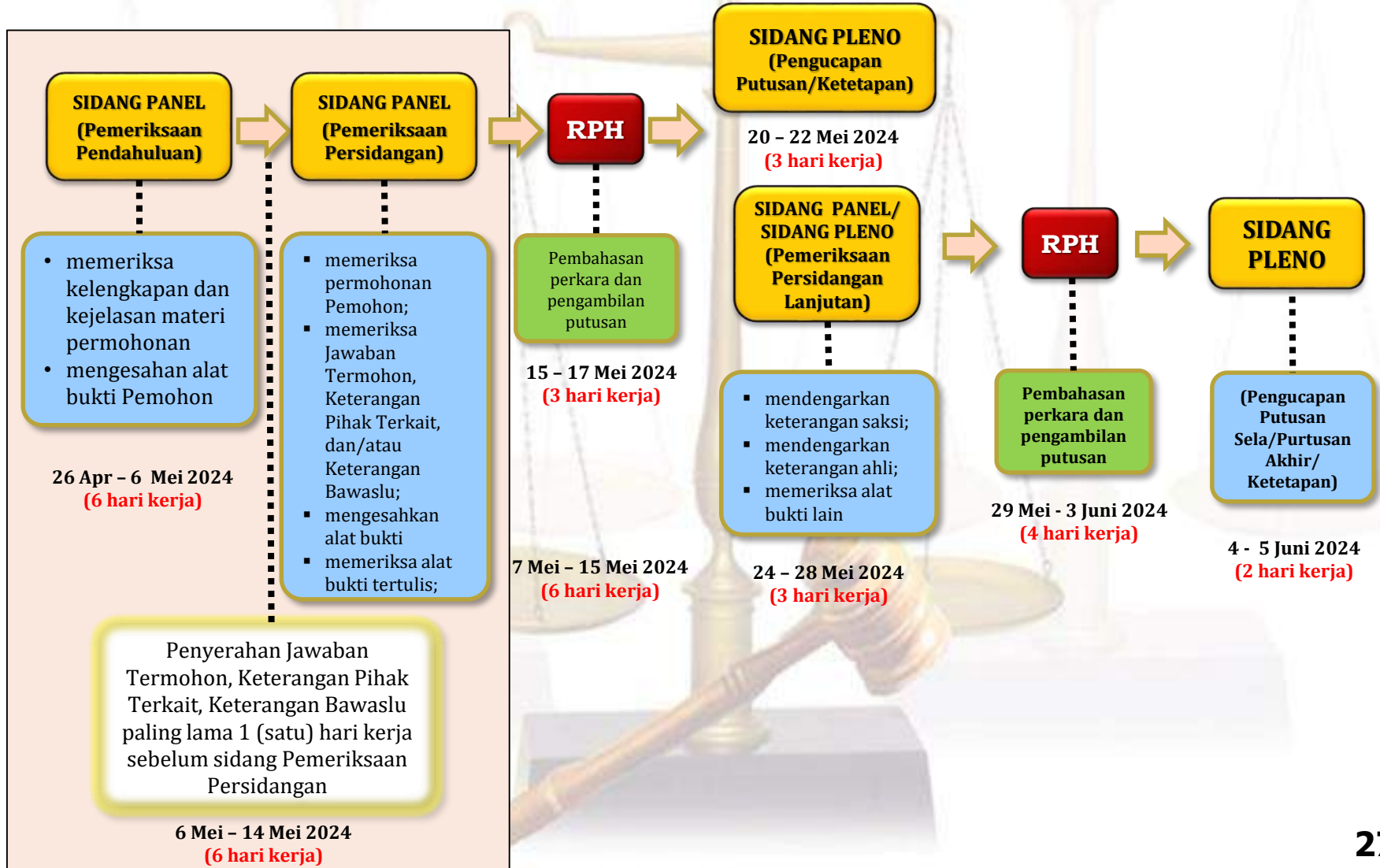
- 4**
- Ahli terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
 - Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya

5 **Alat bukti keterangan pihak lain**, merupakan keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah

6 **Alat bukti lain**, berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu

7 **Alat bukti petunjuk**, merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan Alat bukti lain

PERSIDANGAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR, DPD, dan DPRD



PUTUSAN MAHKAMAH

Perkara PPHU Anggota DPR, DPD, dan DPRD diputus Mahkamah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK

Putusan Sela Mahkamah:

- berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan
- Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan Putusan Sela sebagai dasar dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan

Amar Putusan:

- Permohonan tidak dapat diterima (apabila tidak memenuhi syarat)
- Menolak Permohonan Pemohon (apabila tidak beralasan menurut hukum)
- Mengabulkan Permohonan Pemohon (apabila beralasan menurut hukum)

Ketetapan Mahkamah:

- Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah
- Pemohon menarik kembali Permohonan
- Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan

Amar Ketetapan:

- Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon
- Permohonan Pemohon ditarik kembali
- Permohonan Pemohon gugur

PENGUCAPAN DAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN

- Pengucapan Putusan Mahkamah dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden atau Pemerintah, Bawaslu, dan Partai Politik Peserta Pemilu dalam jangka waktu **paling lama 2 (dua) hari kerja sejak** pengucapan putusan
- Penyampaian salinan Putusan Mahkamah dapat dilakukan secara elektronik
- Putusan Mahkamah dimuat dalam Laman Mahkamah



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**TATA BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024**

**Oleh:
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023**

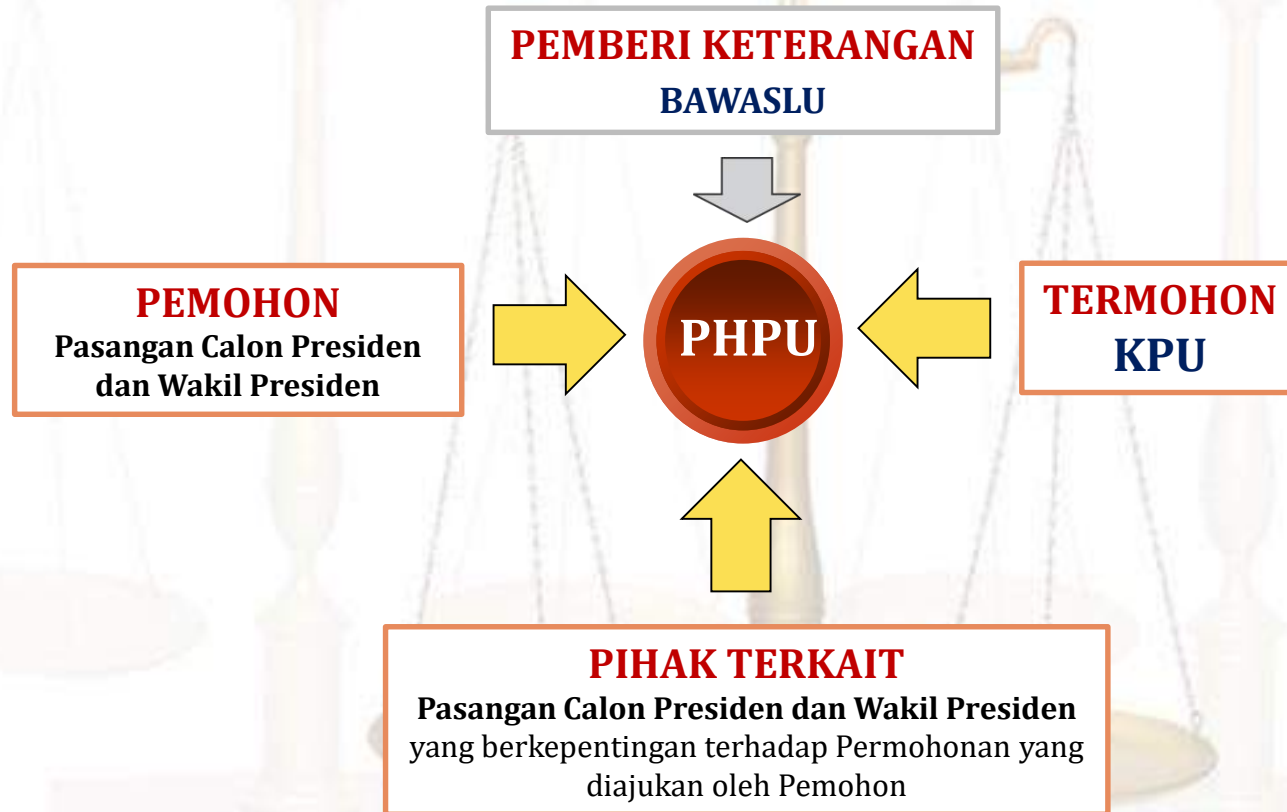
DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020** tentang **PERUBAHAN KETIGA** atas **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** tentang **MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022** tentang **PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 4 TAHUN 2023** TENTANG **TATA BERACARA** DALAM PERKARA **PHPU** **PRESIDEN** DAN **WAKIL PRESIDEN**

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



PARA PIHAK (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)



OBJEK PERMOHONAN (PHPU PRESIDEN dan WAKIL PRESIDEN)

Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden secara
nasional oleh KPU

yang memengaruhi

- a. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- b. terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

PENGUMUMAN HASIL PEMILU TAHUN 2024

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lama **3 hari setelah** pengumuman KPU



Pengumuman Hasil Pilpres Tahun 2024 (Puturan I)
15 Feb - 20 Mar 2024

Pengumuman Hasil Pilpres Tahun 2024 (Puturan II)
27 Jun - 27 Jul 2024

Pengumuman: Kamis 15 Februari 2024, pukul 10.00 WIB

**Kamis 15 Feb 2024,
10.00 WIB**

**Jumat 16 Feb 2024,
24.00 WIB**

**Sabtu 17 Feb 2024,
24.00 WIB**

**Minggu 18 Feb 2024,
24.00 WIB**

Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Rabu 20 Mrt 2024,
10.00 WIB**

**Kamis 21 Mrt 2024,
24.00 WIB**

**Jumat 22 Mrt 2024,
24.00 WIB**

**Sabtu 23 Mrt 2024,
24.00 WIB**

PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Pengajuan Permohonan:
 - a. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
 - b. paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Termohon
2. Permohonan hanya dapat diajukan satu kali selama tenggang waktu pengajuan Permohonan, apabila diajukan lebih dari satu kali maka hanya mendaftarkan permohonan yang pertama.
3. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. permohonan;
 - b. fotokopi Surat Keputusan Termohon tentang Penetapan sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - c. fotokopi KTP atau identitas Pemohon; dan
 - d. fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.

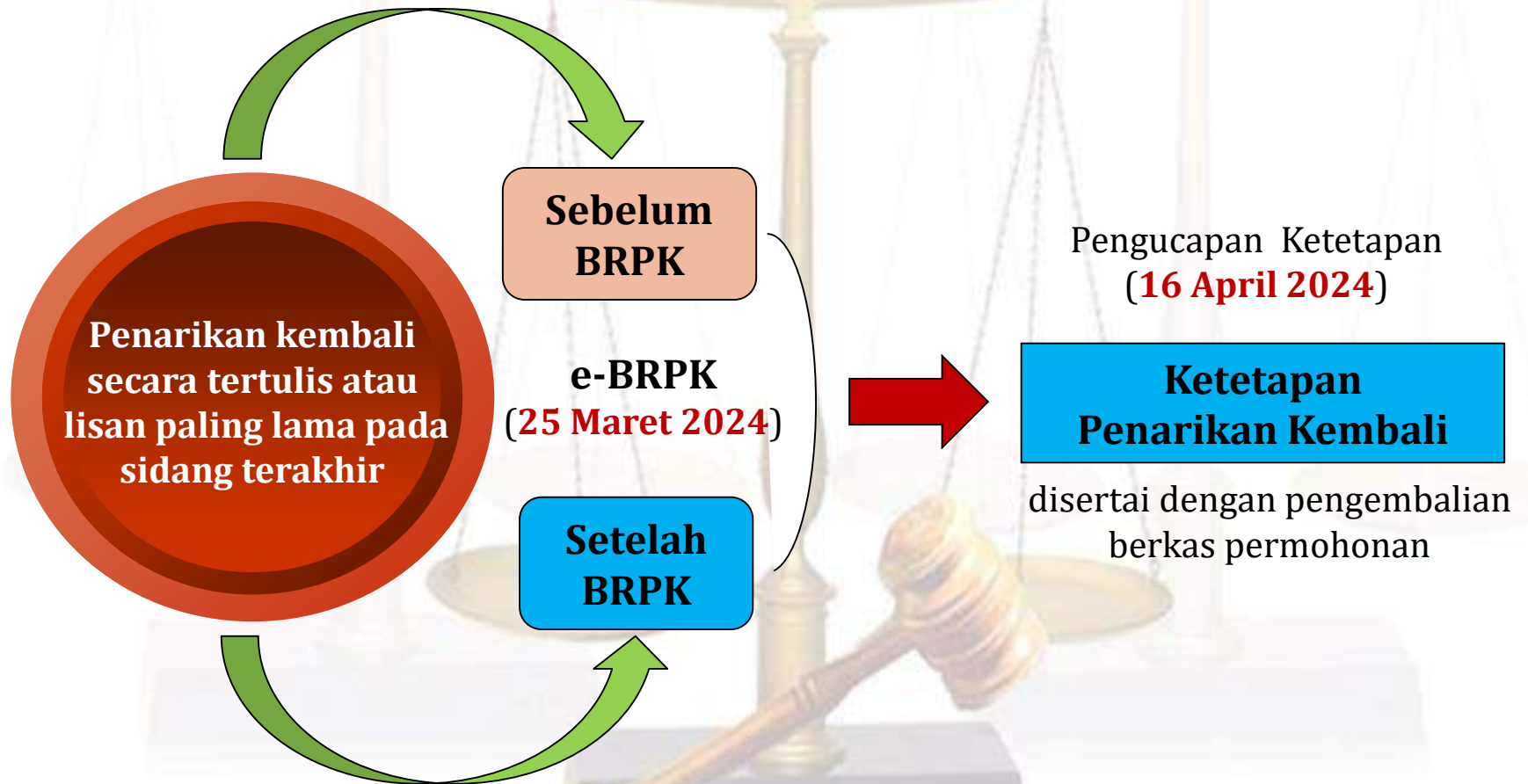
PERMOHONAN

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon/kuasa hukum
2. Permohonan yang diajukan secara luring sebanyak 10 rangkap yang salah satunya asli, secara daring 1 eksemplar asli.
3. Permohonan memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
 - b. Uraian yang jelas mengenai:
 - b.1 kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus.
 - b.2 kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
 - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan permohonan ke Mahkamah
 - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

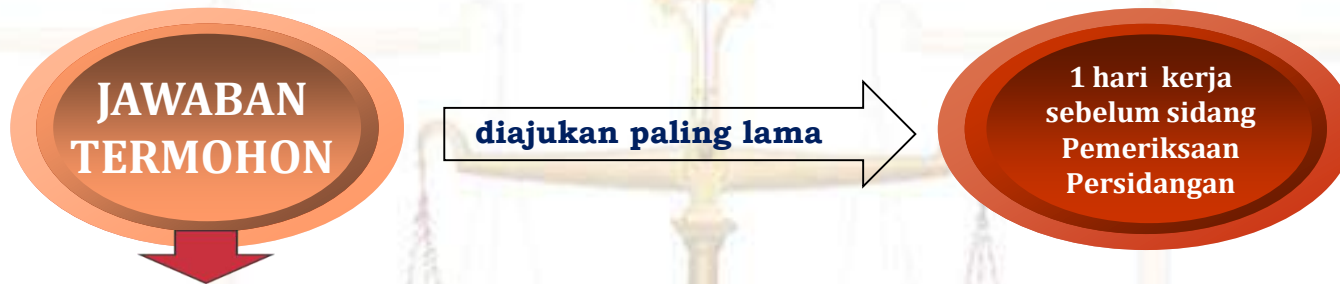
PERMOHONAN

- b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon
- 4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti
- 5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
- 6. Alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
- 7. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
- 8. Permohonan Pemohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (.doc/.docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
- 9. Mahkamah menggunakan Permohonan dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PENARIKAN KEMBALI PERKARA PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



JAWABAN TERMOHON



1. Jawaban Termohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Termohon/kuasa hukum
2. Jawaban Termohon diajukan secara luring sebanyak 10 (sepuluh) rangkap yang salah satunya asli, secara daring sebanyak 1 (satu) eksemplar asli.
3. Jawaban Termohon memuat:
 - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:
 1. kewenangan Mahkamah
 2. kedudukan hukum Pemohon
 3. tenggang waktu pengajuan permohonan
 4. pokok permohonan, antara lain mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diumumkan oleh Termohon; dan
 5. petitum Pemohon
 - c. *petitum* mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Jawaban Termohon disertai dengan alat bukti dan daftar alat bukti.

Lanjutan ...

5. Alat bukti berupa surat atau tulisan, sebanyak 2 (empat) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
9. Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:

- permohonan;
- fotokopi Surat Keputusan Termohon tentang Penetapan sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- fotokopi KTP atau identitas Pihak Terkait; dan
- fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Keterangan
Pihak Terkait

diajukan paling lama

1 hari kerja sebelum
Pemeriksaan
Persidangan

1. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara luring sebanyak 10 (sepuluh) rangkap yang salah satunya asli, secara daring sebanyak 1 (satu) eksemplar asli.
3. Keterangan Pihak Terkait memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap
 - kewenangan Mahkamah
 - kedudukan hukum Pemohon
 - tenggang waktu pengajuan permohonan
 - pokok permohonan, antara lain mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diumumkan oleh Termohon
 - petitum Pemohon
 - c. *Petitum*, mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar atau tidak benar

Lanjutan ...

4. Keterangan Pihak Terkait disertai dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word (.doc/docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc/.docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
9. Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

KETERANGAN BAWASLU



1. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu/kuasa hukum
2. Keterangan Bawaslu diajukan secara luring sebanyak 10 (sepuluh) rangkap yang salah satunya asli, secara daring sebanyak 1 (satu) eksemplar asli.
3. Keterangan Bawaslu memuat:
 - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai pelaksanaan pengawasan, meliputi:
 1. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan;
 2. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
4. Keterangan Bawaslu dapat dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan dan daftar alat bukti sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Keterangan Bawaslu beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word (.doc/docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Keterangan Bawaslu beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc/.docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.
9. Mahkamah menggunakan Keterangan Bawaslu dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PERSIDANGAN



- Dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Jadwal hari sidang Mahkamah dapat diketahui dan diakses melalui Laman Mahkamah
- Mahkamah dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference* atau fasilitas media elektronik pada Mahkamah
- Persidangan jarak jauh diselenggarakan atas inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para pihak setelah memperoleh persetujuan dari Mahkamah

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, mengesahkan alat bukti Pemohon.

- Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan **paling cepat 4 (empat) hari kerja** sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
- Pemberitahuan sidang pertama disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu **paling lama 1 (satu) hari kerja** sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan gugur**
- Permohonan yang dinyatakan gugur, Mahkamah menerbitkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

Pemeriksaan Persidangan

Sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa permohonan Pemohon, memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu, mengesahkan alat bukti, memeriksa alat bukti tertulis, mendengar keterangan saksi/ahli, memeriksa alat bukti lain, memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan bukti petunjuk.

- Pemeriksaan Persidangan diselenggarakan setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon/kuasa hukum, Pihak Terkait/kuasa hukum, dan Bawaslu, saksi/ahli, serta pemberi keterangan hadir dalam Pemeriksaan Persidangan.

ALAT BUKTI

1

Surat atau Tulisan

1. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara
2. Keputusan Termohon tentang penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden beserta lampirannya
3. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden beserta lampirannya
4. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
 - a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)
 - a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
 - b. KPU/KIP kabupaten/kota
 - c. KPU/KIP provinsi; dan/atau
 - d. KPU
5. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
6. Dokumen tertulis lainnya.

Lanjutan ...

2 **Alat bukti keterangan para pihak** (jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu) yang disampaikan dalam persidangan

3 **Alat bukti keterangan saksi:**

- a. keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan PT.
- b. keterangan saksi yang berasal dari Pemantau Pemilihan yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu; dan
- c. saksi lain.

4 **Alat bukti keterangan ahli** dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan PT.

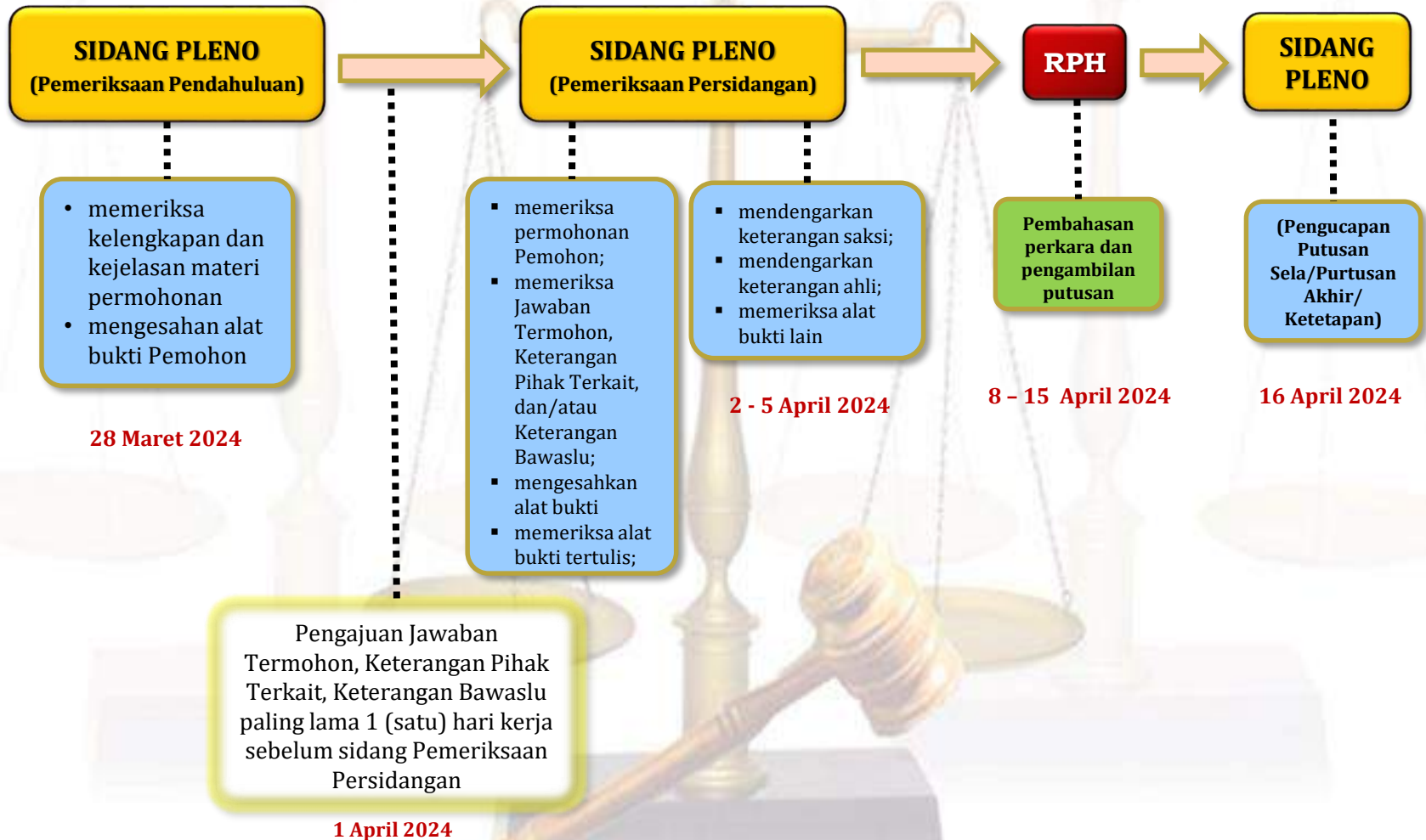
- Ahli terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
- Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya

5 **Alat bukti keterangan pihak lain**, merupakan keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah

6 **Alat bukti lain**, berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu

7 **Alat bukti petunjuk**, merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan Alat bukti lain

MEKANISME PERSIDANGAN



PUTUSAN MAHKAMAH

Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden diputus paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK

Putusan Sela Mahkamah:

- berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan
- Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan Putusan Sela sebagai dasar dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan

Amar Putusan:

- Permohonan tidak dapat diterima (apabila tidak memenuhi syarat)
- Menolak Permohonan Pemohon (apabila tidak beralasan menurut hukum)
- Mengabulkan Permohonan Pemohon (apabila beralasan menurut hukum)

Ketetapan Mahkamah:

- Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah
- Pemohon menarik kembali Permohonan
- Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan

Amar Ketetapan:

- Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon
- Permohonan Pemohon ditarik kembali
- Permohonan Pemohon gugur

PENGUCAPAN DAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN

- Pengucapan Putusan Mahkamah dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden atau Pemerintah, dan Bawaslu dalam jangka waktu **paling lama 2 (dua) hari kerja sejak** pengucapan putusan
- Penyampaian salinan Putusan Mahkamah dapat dilakukan secara elektronik
- Putusan Mahkamah dimuat dalam Laman Mahkamah



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

“DINAMIKA PENANGANAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM”

Oleh:

**Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.
Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara,
dan Pengelolaan Perpustakaan**

**Disampaikan dalam Bimbingan Teknis Hukum Acara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024**

**Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi RI**

Materi Pemaparan

Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Kewenangan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi

Struktur dan Mekanisme Kerja

Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Perkembangan dan Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi

Perkembangan Peradilan Konstitusi



**Mahkamah Agung
Amerika Serikat**
Marbury v Madison
(1803)

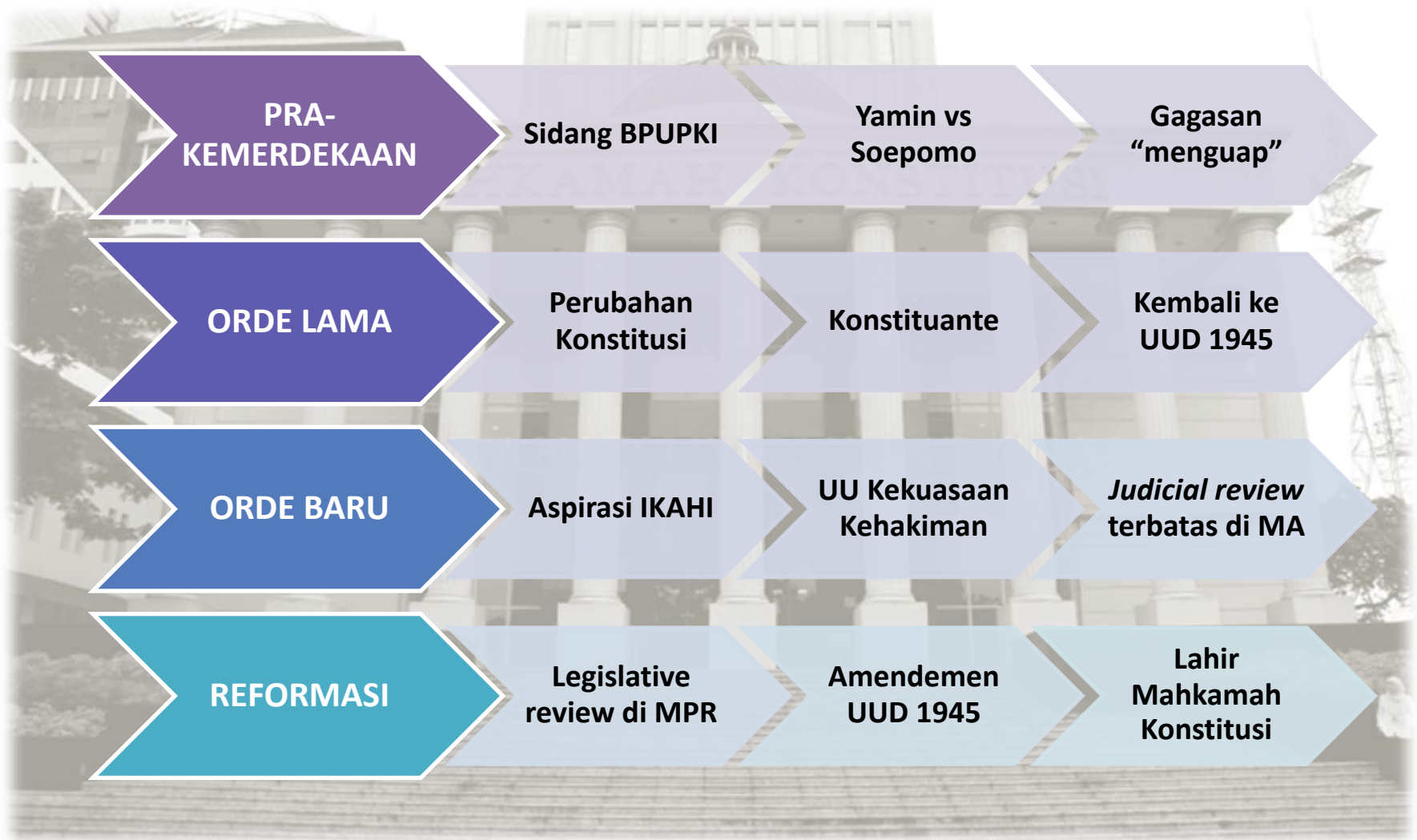


**Mahkamah
Konstitusi Austria**
(1920)

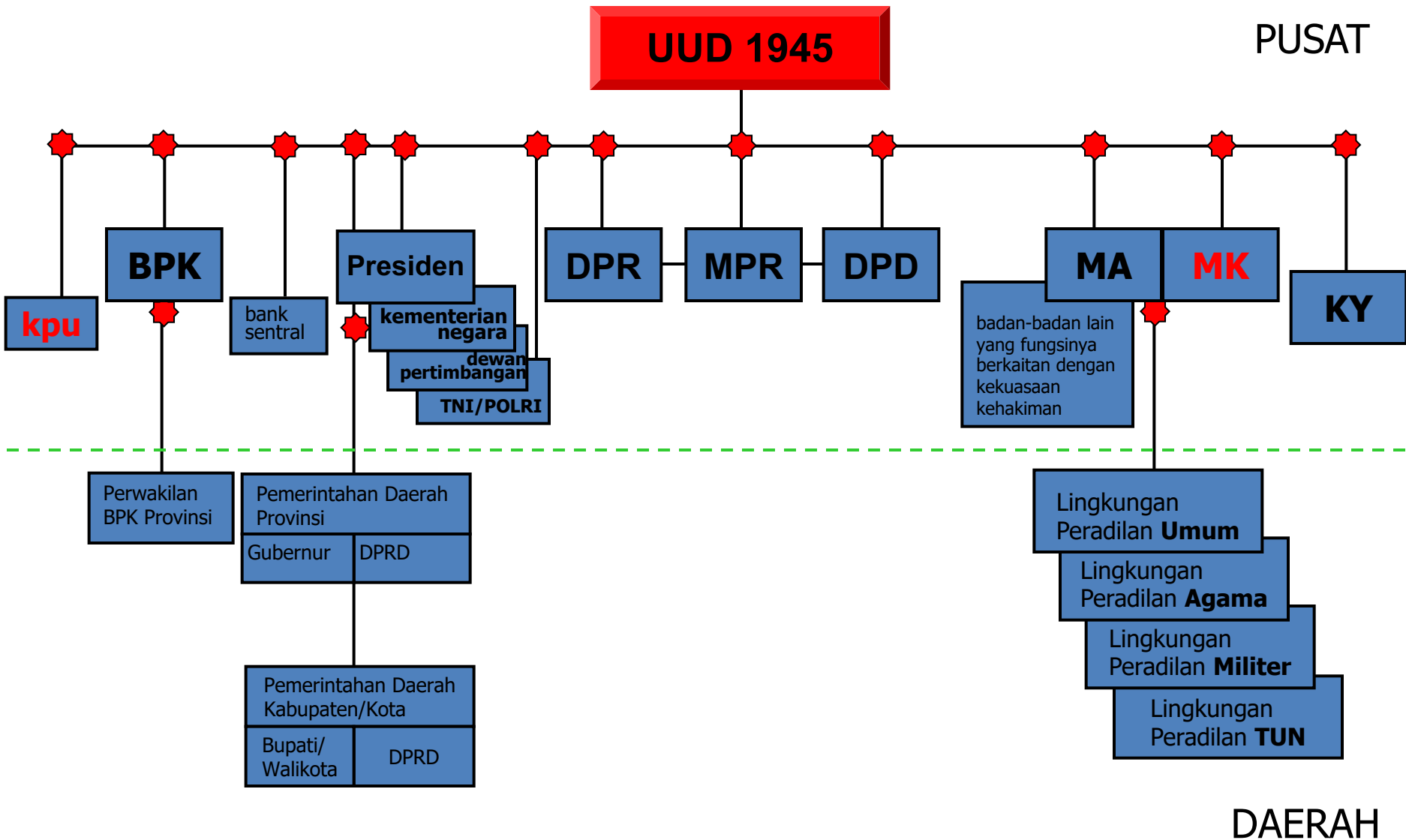


**Mahkamah
Konstitusi Republik
Indonesia**
(2003)

Sejarah Pembentukan MK Indonesia



Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia



Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1

- **Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945**

2

- Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)

3

- Memutus Pembubaran Partai Politik

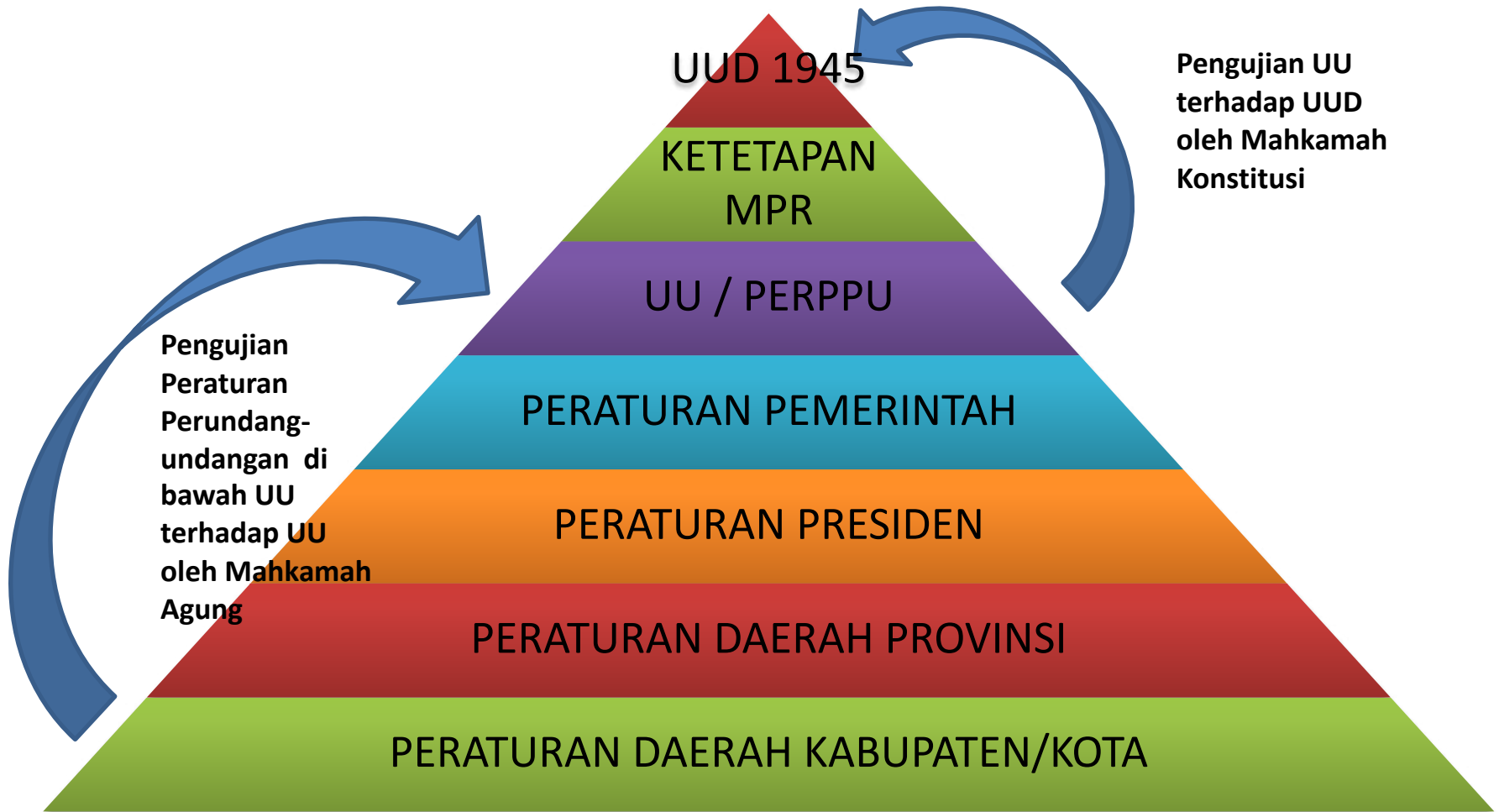
4

- **Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**

5

- Memberikan Putusan atas Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Supremasi Konstitusi di Indonesia



Fungsi Mahkamah Konstitusi



The Guardian of the Constitution, Ideology, and Democracy



The Protector of Human Rights and Constitutional Citizen's Rights



The Final Interpreter of the Constitution

ASAS-ASAS UTAMA

- *Presumption of Constitutionality*
- *Audi et Alteram Partem*
- *Ius Curia Novit*
- *Erga Omnes*
- *Final and Binding*



PRINSIP PERSIDANGAN

- Persidangan Terbuka untuk Umum, kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim
- Peradilan Cepat, Sederhana, dan Tanpa Biaya
- Hakim bersifat Pasif dan Aktif
- Alat Bukti dan Asas Pembuktian



Rekapitulasi Putusan MK

Jenis Putusan	Jumlah Putusan	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur	Tidak Berwenang
PUU	1.720	307	648	537	189	25	14
SKLN	29	1	2	18	7	0	1
Pemilu Legislatif	671	53	423	148	13	34	0
Pemilu Presiden	5	0	5	0	0	0	0
Pemilu Kepala Daerah	1.136	83	495	509	35	7	7

Keterangan: Belum ada perkara terkait dengan pembubaran partai politik dan *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden

Pemohon dalam Pengujian UU

1. Perorangan warga negara Indonesia, atau kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang;
3. Badan hukum publik atau privat;
4. Lembaga negara.



Contoh Putusan PUU di MK

- Putusan-Putusan PUU terkait **PEMILU**:
 - KTP/Paspor untuk memilih bagi yang tidak terdaftar di DPT
 - Sistem Pemilu dari nomor urut menjadi suara terbanyak
 - Ambang Batas Parpol di Parlemen (*Electoral & Parliamentary Threshold*)
 - Pilpres dengan dua Pasangan Calon
 - Syarat menjadi anggota KPU



Contoh Putusan PUU di MK

- **Lanjutan:**
 - Syarat Tidak Pernah Dipidana untuk Calon Legislatif
 - Solusi terhadap Calon Tunggal Kepala Daerah
 - Hak Pilih bagi Penderita Gangguan Jiwa
 - Pelaksanaan Pemilu Serentak
 - Syarat Calon Anggota DPD
 - Ambang Batas pengajuan Capres (*Presidential Threshold*)
 - Pengadilan Khusus Pemilu/Pilkada
 - dsb.



Para Pihak dalam Perselisihan Hasil Pemilu

❑ PEMOHON:

1. **Pemilu Presiden:** Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
2. **Pemilu Legislatif:**
 - DPR/DPRD: Partai Politik Peserta Pemilu. Bagaimana dengan Caleg?
 - DPD: Perseorangan Calon Anggota DPD
3. **Pemilu Kepala Daerah:**
 - Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Pemantau Pemilu Terakreditasi (apabila calon tunggal)

❑ TERMOHON:

1. KPU Pusat
2. KPU Provinsi
3. KPU Kabupaten/Kota

❑ PIHAK TERKAIT DAN BAWASLU



MAHKAMA



Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
(Penyelesaian di MK: 14 hari kerja)



Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD
(Penyelesaian di MK: 30 hari kerja)



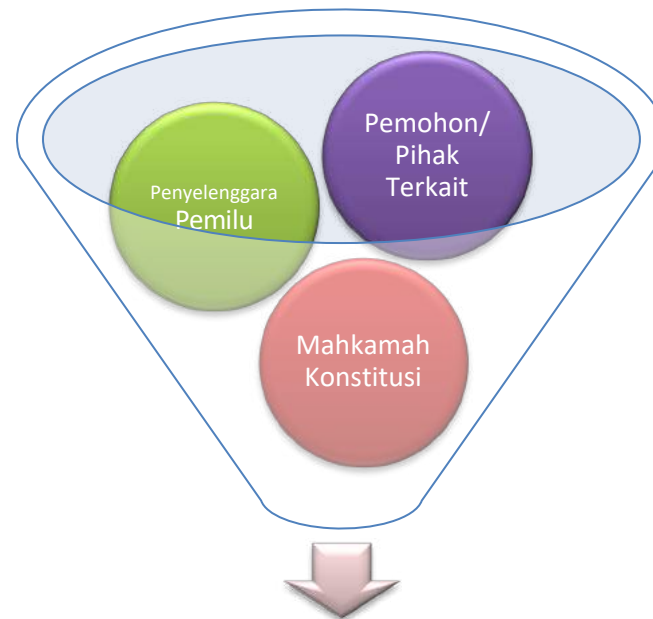
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
(Penyelesaian di MK: 45 hari kerja)

Pemilihan di Indonesia

Adanya Perbedaan Perspektif



Dinamika Penanganan PHPU



**Progresivitas Hukum Acara dan
Putusan MK**

Pergeseran Paradigma Penanganan Sengketa Hasil Pemilu



Keadilan Prosedural

Sesuai dengan ketentuan UU dan terbatas pada hasil rekapitulasi penghitungan suara



Keadilan Substantif

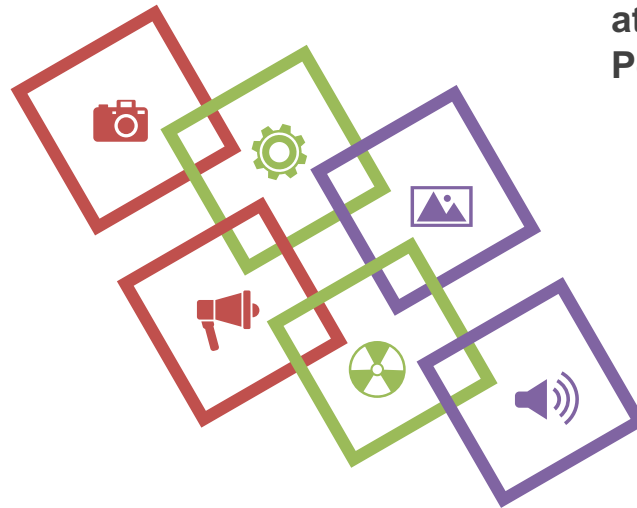
Pendekatan progresif apabila terdapat kebuntuan atau ketiadaan hukum yang mengatur

Contoh Jenis Pelanggaran Pemilu

- **Money Politics (Vote Buying)**

- **Kesalahan Penghitungan dan/atau Rekapitulasi Suara**

- **Pengabaian Perintah KPU atau Rekomendasi Bawaslu**



- **Ketidaknetralan ASN atau Penyelenggara Pemilu**

- **Intimidasi secara Fisik, Sosial, ataupun Politik**

- **Rasionalitas Jumlah Penduduk dan DPT**

- **dan lain sebagainya**

Pelanggaran TSM dan Signifikan

Terstruktur

Pelanggaran melibatkan atau dilakukan aparaturnegara, penyelenggara Pemilu, atau tim pemenangan secara berjenjang

Sistematis

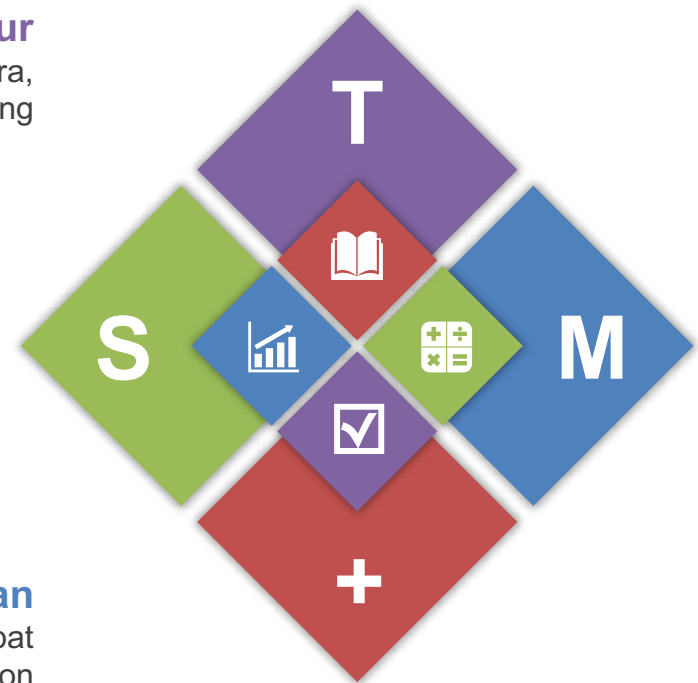
Pelanggaran dilakukan secara terencana dan telah dipersiapkan sebelumnya

Masif

Pelanggaran dilakukan secara meluas, tidak sporadis atau tunggal

Signifikan

Pelanggaran atau kesalahan penghitungan suara dapat mengubah perolehan kursi atau kemenangan pasangan calon



Transformasi Sistem Noken

Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009



Pemilu 2009: Noken di Yahukimo Konstitusional

Putusan Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014



Pemilu 2014: Penerapan Noken pada Wilayah Terbatas

Putusan Nomor 1/PHPU.Pres-XII/2014



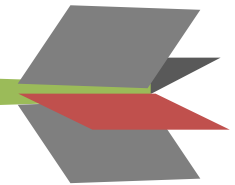
Mendorong terjadinya integrasi sistem Pemilu secara nasional

16 Kabupaten
(< 2018)

14 Kabupaten
(2018)

12 Kabupaten
(2019)

1 Kabupaten
(2020)



Amar Putusan: PSU

Umumnya: Tidak Diterima | Menolak | Mengabulkan

Penghitungan Suara Ulang



Apabila terjadi kesalahan penghitungan suara atau pelanggaran dalam proses rekapitulasi suara maka Mahkamah memerintahkan agar dilakukan Penghitungan Suara ulang pada TPS atau wilayah tertentu

Pemungutan Suara Ulang



Apabila terbukti terjadi pelanggaran yang mengakibatkan tidak dapat digunakannya hasil rekapitulasi yang ada maka Mahkamah memerintahkan agar dilakukannya Pemungutan Suara Ulang

Putusan Sela



Putusan Akhir

Rekapitulasi Putusan Pileg dan Pilkada

▪ Perbandingan Sengketa Hasil Pemilu Legislatif (DPR dan DPRD)

Tahun	Pemohon Parpol	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur/ T.B.
2004	23	44	15	13	16	0	0
2009	42	70	24	37	8	1	0
2014	14	296	1	291	2	2	0
2019	20	261	13	82	122	10	34

▪ Perbandingan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Tahun	Jumlah Pilkada	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur/ T.B.
2016	269	152	3	5	138	6	0
2017	101	60	3	7	50	0	0
2018	171	72	2	6	61	1	2
2020	270	136	19	10	99	6	2



Terima Kasih

faiz@mkri.id | www.panmohamadfaiz.com



Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.

S.H. (University of Indonesia)

M.C.L. (University of Delhi)

Ph.D. (University of Queensland)

International Visitor Leadership Program (IVLP), U.S.A.

Leadership on Court Governance, Singapore Judicial College

Professional Judicial Training Program, the Hague University



faiz@mkri.id



www.panmohamadfaiz.com (Website dan Karya Tulis)



[@panmohamadfaiz](#) (Media Sosial)

- Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan MK RI
- *External Research Fellow* di Center of Public, International and Comparative Law (CPICL), the University of Queensland, Australia
- Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)
- Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan beberapa universitas lainnya
- Pengajar Tetap “Hukum Acara MK” untuk Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)
- Trainer dan Narasumber Bimbingan Teknis Hukum Acara MK di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi
- Editor-in-Chief dari Constitutional Review Journal (Scopus dan Sinta-1)
- Pengurus Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia (APJHI)



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**TEKNIK PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON DAN
KETERANGAN PIHAK TERKAIT , SERTA JAWABAN TERMOHON
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM (PHPU) TAHUN 2024**

**Oleh:
KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM
"BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024"**

PARA PIHAK DALAM PHPU

A. Pemohon

PHPU Anggota DPR dan DPRD:

- 1) Parpol/Parpol lokal peserta Pemilu
- 2) Perseorangan calon anggota DPR & DPRD dalam satu Parpol/Parpol lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol/Parpol lokal yang bersangkutan.

PHPU Anggota DPD

Calon Anggota DPD peserta Pemilu

PHPU Presiden dan Wakil Presiden

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

B. Termohon

Penyelenggara Pemilu: KPU RI

C. Pihak Terkait

Pihak yang berkepentingan terhadap permohonan.

OBJEK PHPU

Objek dalam perkara PHPU adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD/anggota DPD/Presiden dan Wakil Presiden secara nasional yang memengaruhi:

- 1) Perolehan kursi dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- 2) Terpilihnya calon anggota DPD;
- 3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti putaran kedua Pilpres atau terpilihnya pasangan calon Presiden Wakil Presiden.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON & JAWABAN TERMOHON

PERMOHONAN PEMOHON

Permohonan Anggota DPR dan DPRD/ anggota DPD:

diajukan dalam jangka waktu paling lama **3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak** diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD/anggota DPR secara nasional oleh Termohon.

Permohonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden:

diajukan paling lama **3 (tiga) hari setelah** penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

PERMOHONAN & KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- 1) Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- 2) Penyerahan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan.

JAWABAN TERMOHON

- 1) Salinan Permohonan disampaikan kepada Termohon paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK disertai dengan permintaan Jawaban Termohon.
- 2) Penyerahan Jawaban Termohon kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan.

SIMULASI PENGAJUAN PERMOHONAN PHPU

3 x 24 jam sejak ditetapkan
(PHPU anggota DPR dan
DPRD/ DPD)

3 hari setelah ditetapkan
(PHPU Pilpres)



Penetapan Hasil Pemilu
Serentak Tahun 2024
15 Feb - 20 Mar 2024

Penetapan: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Rabu 20 Mrt 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Kamis 21 Mrt 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Jumat 22 Mrt 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Sabtu 23 Mrt 2024,
10.00 WIB**

Penetapan: Rabu 20 Maret 2024

**Hari 1
Kamis, 21 Maret 2024
08.00 - 24.00 WIB**

**Hari 2
Jum'at, 22 Maret 2024
08.00 - 24.00 WIB**

**Hari 3
Sabtu, 23 Maret 2024
08.00 - 24.00 WIB**

SISTEMATIKA PERMOHONAN PEMOHON

A. Identitas Pemohon (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)

B. Identitas Termohon

C. Uraian mengenai:

1. Kewenangan Mahkamah;
2. Kedudukan hukum Pemohon;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
4. Pokok permohonan Pemohon;
5. Petitum Pemohon.

SISTEMATIKA KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- A. Identitas Pihak Terkait (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)
- B. Uraian mengenai:
 - 1) Pihak Terkait merupakan Parpol peserta Pemilu; atau
 - 2) Perseorangan merupakan peserta Pemilu dari Parpol yang sama
- C. Tanggapan terhadap:
 - 1. Kewenangan Mahkamah;
 - 2. Kedudukan hukum Pemohon;
 - 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
 - 4. Pokok permohonan Pemohon;
- D. Petitum

SISTEMATIKA JAWABAN TERMohon

- A. Identitas Termohon (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)
- B. Uraian mengenai tanggapan Termohon terhadap:
 - 1. Kewenangan Mahkamah;
 - 2. Kedudukan hukum Pemohon;
 - 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
- C. Jawaban Termohon terhadap Pokok permohonan Pemohon;
- D. Petitum Termohon.

Identitas Pemohon & Termohon

Identitas Pemohon memuat:

- a. nama dan alamat Pemohon;
 - b. nomor telepon/seluler;
 - c. alamat surat elektronik (*email*); dan
- *) jika Pemohon menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Selain identitas Pemohon, Permohonan Pemohon juga memuat **identitas Termohon** memuat:

- a. nama Termohon;
- b. alamat Termohon.

Teknik Penyusunan Identitas Pemohon (Parpol)

1. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email
-
2. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email

Teknik Penyusunan Identitas Pemohon (Perseorangan)

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email.....

Sebagai perseorangan calon Anggota DPR,
DPRD Provinsi/DPRA, DPRD
Kabupaten/Kota/DPRK dari partai politik ...
Daerah Pemilihan

Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pemohon

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP...
email: ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Teknik Penyusunan Identitas Termohon

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat
di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta
Pusat,
selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Identitas Pihak Terkait

Identitas Pihak Terkait memuat:

a. nama dan alamat Pihak Terkit;

b. nomor telepon/seluler;

c. alamat surat elektronik (*email*);

*) jika Pihak Terkait menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Teknik Penyusunan Identitas Pihak Terkait (Parpol)

1. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email
-
2. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email

Teknik Penyusunan Identitas Pihak Terkait (Perseorangan)

Nama :

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat Kantor :

nomor telepon/HP.....

email.....

Sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRRA,
DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK dari partai politik ...
Daerah Pemilihan ... yang telah memperoleh
persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan
sekretaris jenderal atau sebutan lainnya (terlampir).

Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pihak Terkait

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP...
email: ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Identitas Termohon

Identitas Termohon memuat:

a.nama dan jabatan;

b.alamat kantor;

c.nomor telepon kantor;

d.alamat surat elektronik (*email*);

*) jika Termohon menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Teknik Penyusunan Identitas Termohon

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :... Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor :
nomor telepon kantor.....
email

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP... *email:* ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Uraian Kewenangan Mahkamah

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. dasar hukum kewenangan Mahkamah untuk mengadili perkara PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu:
 - Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;
 - Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tntg Kekuasaan Kehakiman;
 - Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu;
 - Pasal 5 PMK 2/2023
- b. objek permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu surat keputusan KPU mengenai hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional.
- c. pernyataan Pemohon bahwa Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD.

Teknik Penyusunan Kewenangan Mahkamah

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 PMK 2/2023, objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal...2024 [Bukti P-...];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Uraian Kedudukan Hukum Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan hukum Pemohon, yaitu:
 - Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK;
 - Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2023.
- b. penjelasan sebagai parpol/parpol lokal atau perseorangan calon anggota DPR/DPRD peserta Pemilu yang didasarkan keputusan Termohon dan nomor urut parpol/parpol lokal atau perseorangan calon anggota DPR/DPRD.
- c. pernyataan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

Teknik Penyusunan Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal..., Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut... [Bukti P-...];

Jika permohonan diajukan perseorangan:

- b. *Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);*
- c. *Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal...2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Nomor Urut ... dari partai politik ... [Bukti P-...];*
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal... 2024;

Uraian Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur tenggang waktu, yaitu:
 - Pasal 74 ayat (3) UU MK;
 - Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu;
 - Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023;
- b. hari, tanggal, dan jam pengumuman Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
- c. hari, tanggal, dan jam pengajuan permohonan;
- d. pernyataan bahwa pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

Teknik Penyusunan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... pada tanggal...2024, pukul... WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal...2024, pukul ... WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Uraian Pokok Permohonan

Hal-hal yang harus diuraikan:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan
- b. Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Teknik Penyusunan Pokok Permohonan (Parpol)

Pemohon Parpol:

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 2. Penambahan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 3. dst.*

Teknik Penyusunan Pokok Permohonan (Perseorangan)

Pemohon Perseorangan:

Pemohon menyangdingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 2. Penambahan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 3. dst.*

Keterangan Pihak Terkait

Keterangan Pihak Terkait memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur;
- b. tanggapan Pihak Terkait mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon telah benar

Teknik Penyusunan Eksepsi Pihak Terkait

DALAM EKSEPSI (*jika diperlukan dan bersifat alternatif*)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan ...

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan ...

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul..., Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai dengan tanggal..., pukul...,
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul...,
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan ...

V. Eksepsi lainnya (*jika ada*)

Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].*
- 3. dst.*

Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].*
- 3. dst.*

Jawaban Termohon

Keterangan Termohon memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur;
- b. Jawaban Termohon mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon

Teknik Penyusunan Eksepsi Termohon

DALAM EKSEPSI (*jika diperlukan dan bersifat alternatif*)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD/DPD/Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan ...

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD /DPD/Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan ...

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD/DPD/Presiden dan Wakil Presiden secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul..., Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai dengan tanggal..., pukul.../ Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari untuk mengajukan permohonan adalah tanggal .. Sampai dengan tanggal ...
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul...,
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan ...

V. Eksepsi lainnya (*jika ada*)

Teknik Penyusunan Jawaban Termohon

DALAM POKOK PERMOHONAN

Termohon menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Termohon disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik/perseorangan/calon anggota DPD/pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

No.	Partai Politik>Nama Calon Anggota DPR , DPRD/ Nama Calon Anggota DPD/ Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti T-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi partai politik.. / calon .../pasangan ... di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti T-...].*
- 3. dst.*

Uraian Petitum

Hal-hal yang harus disebutkan:

- a. permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;
- b. permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Teknik Penyusunan Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal... 2024 untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ... (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan, sebagai berikut (**Pemohon Parpol**):

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.
2.
3.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ...dari partai politik ..., sebagai berikut (**Pemohon Perseorangan**):

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara
1.
2.
3.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Uraian Petitum Pihak Terkait

Petitum memuat permintaan kepada Mahkamah untuk:

a. menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;

b. menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

Teknik Penyusunan Petitum Pihak Terkait

DALAM EKSEPSI (*jika mengajukan eksepsi*)

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang, bertanggal ...2024.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,
mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Uraian Petitum Termohon

Petitum memuat permintaan kepada Mahkamah untuk:

a. menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;

b. menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

Teknik Penyusunan Petitum Termohon

DALAM EKSEPSI (*jika mengajukan eksepsi*)

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang, bertanggal ...2024.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,
mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

PHPU 2019

Perkara:

- A. 261 perkara (10 perkara DPD, 1 perkara dari kelompok masyarakat, 1 perkara tntg PT).
- B. Jika dilihat dari Dapil: 552 Dapil dengan rincian sbb:
 - 1)DPR: 68 Dapil dari 80 Dapil DPR RI
 - 2)DPRD Provinsi: 107 Dapil dari 272 Dapil DPRD Provinsi
 - 3)DPRD Kabupaten/Kota: 377 Dapil dari 2.206 Dapil DPRD Kab/Kota.

Putusan:

- a) 12 perkara dikabulkan sebagian;
- b) 101 perkara ditolak
- c) 43 perkara gugur/ditarik
- d) 105 perkara tidak dapat diterima;**

Alasan-alasan Permohonan Tidak Jelas

Putusan tidak dapat diterima, salah satunya karena permohonan tidak jelas/kabur antara lain dengan pertimbangan:

1. Adanya ketidaksesuaian posita dan petitum;
2. Dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya;
3. Tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (termasuk hanya mencantumkan tabel persandingan perolehan suara tanpa adanya penjelasan)
4. Petitum kontradiktif karena tidak memberikan alternatif.
5. Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi hanya sepanjang yang didalilkan;
6. Petitum tidak meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon;
7. Salah dalam penulisan (rincian rincian-rincian kehilangan suara, nama desa, dan nama kecamatan).



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

AKSES BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI



1

Dasar Infrastruktur TIK,
Persidangan Jarak Jauh dan
Streaming Persidangan Mahkamah
Konstitusi

2

Sistem Informasi Penanganan
Perkara Elektronik
(simpler.mkri.id)

3

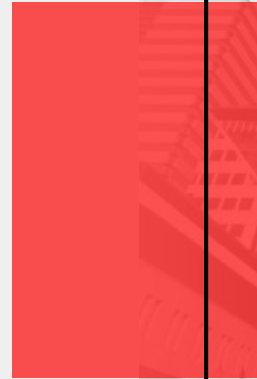
Website Mahkamah Konstitusi,
Case Tracking dan Case Retrieval

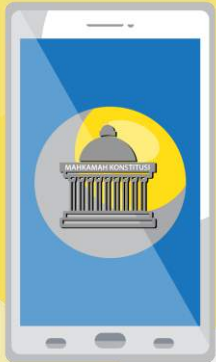
4

Click MK

PENDAHULUAN

“Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang **modern** dan **terpercaya**”.

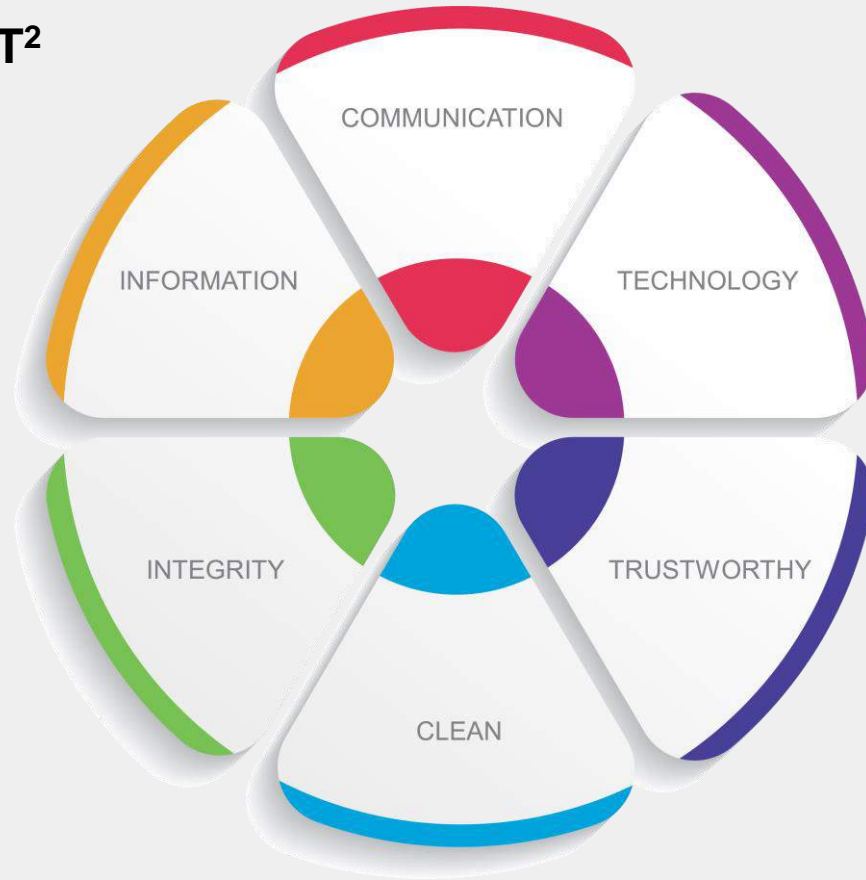




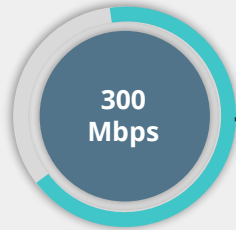
Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis **ICT (*information, communication, and technology*)**, memiliki *mindset* dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada **ICT (*integrity, clean, and trustworthy*)**:

1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
2. Peradilan dengan *mindset* maju; dan
3. Peradilan dengan *cultureset* yang memajukan.

PENGERTIAN ICT²



JARINGAN / KONEKSI INTERNET



300
Mbps

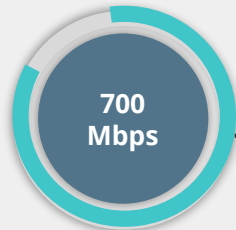
**Bandwith 300 Mbps
untuk jaringan Internasional**



Dukungan 24/7 dari CNI untuk keberlangsungan jaringan dan koneksi di MK



Support instalasi jaringan



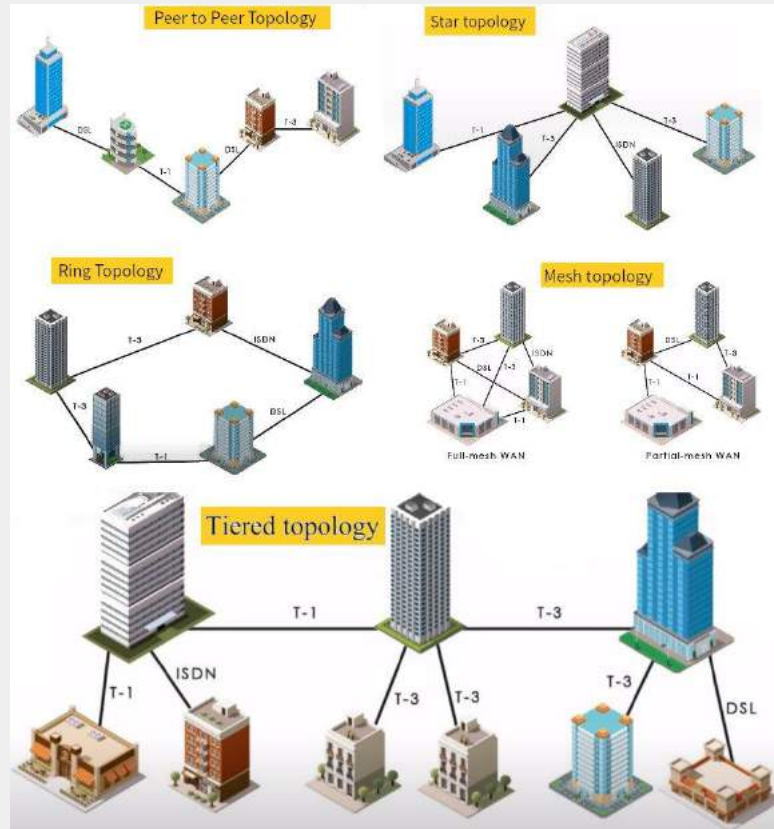
700
Mbps

**Bandwith 700 Mbps
untuk jaringan lokal**



Menggunakan IP Transit agar koneksi Always ON. Memiliki fitur untuk memilih best path sehingga akses website menjadi lebih cepat.

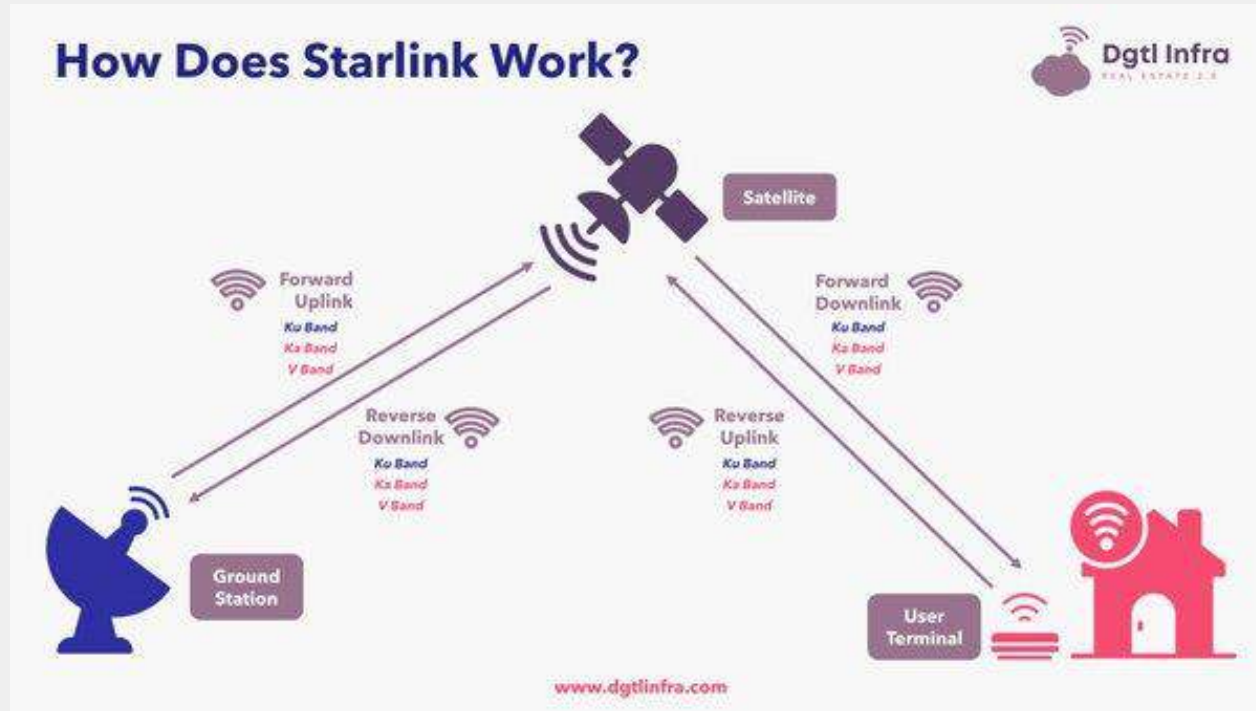
JARINGAN / KONEKSI INTERNET MASA KINI



Sumber :

<https://www.tembolok.id/fundamental-topologi-jaringan-komputer/>

JARINGAN / KONEKSI INTERNET MASA DEPAN



Sumber :

<https://www.quora.com/Would-SpaceXs-Starlink-make-significant-progress-in-providing-broadband-to-everyone>

SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PALOALTO (FIREWALL)

Sebagai pintu pertama pencegahan serangan ke dalam sistem jaringan



ANTI DDOS

Perangkat pencegah serangan DDOS yang menyebabkan *high traffic* pada Bandwidth



IRON PORT (EMAIL SECURITY)

Alat pengecekan dan *filtering email* MK Terhadap Malware, Virus, Spam dll

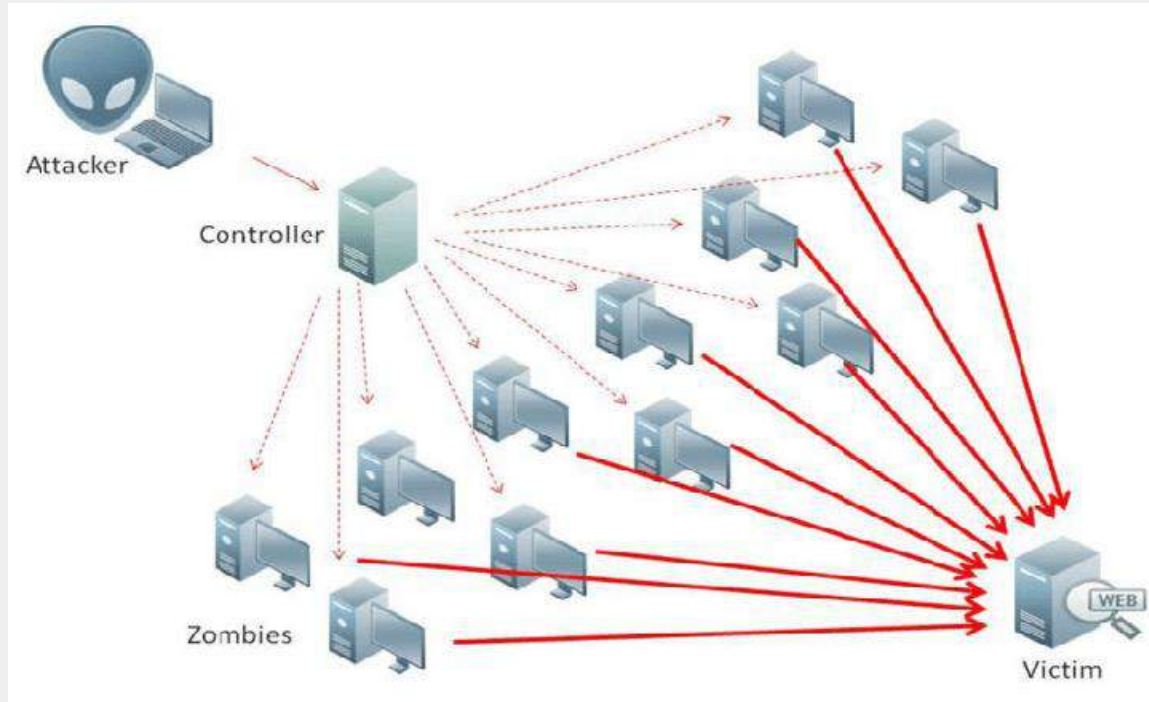


MIRRORING SERVER

Sistem back up server, untukantisipasi apabila Server utama *down* dapat segera digantikan Fungsinya oleh server backup



DDOS (Denial of Service Attack)



Sumber :

https://www.researchgate.net/figure/Denial-of-Service-Attack-ii-Cloud-Malware-Injection-Attack-This-attack-happens-when-a_fig3_317495866

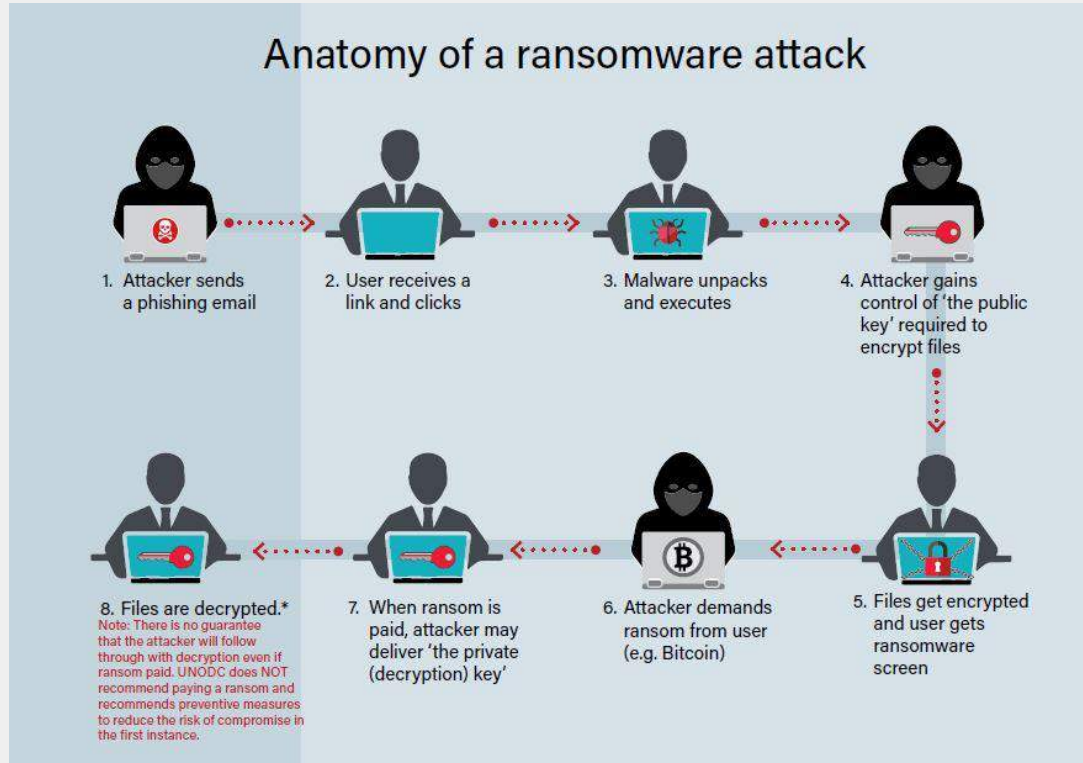
Ransomware Attack



Sumber :

https://en.wikipedia.org/wiki/WannaCry_ransomware_attack

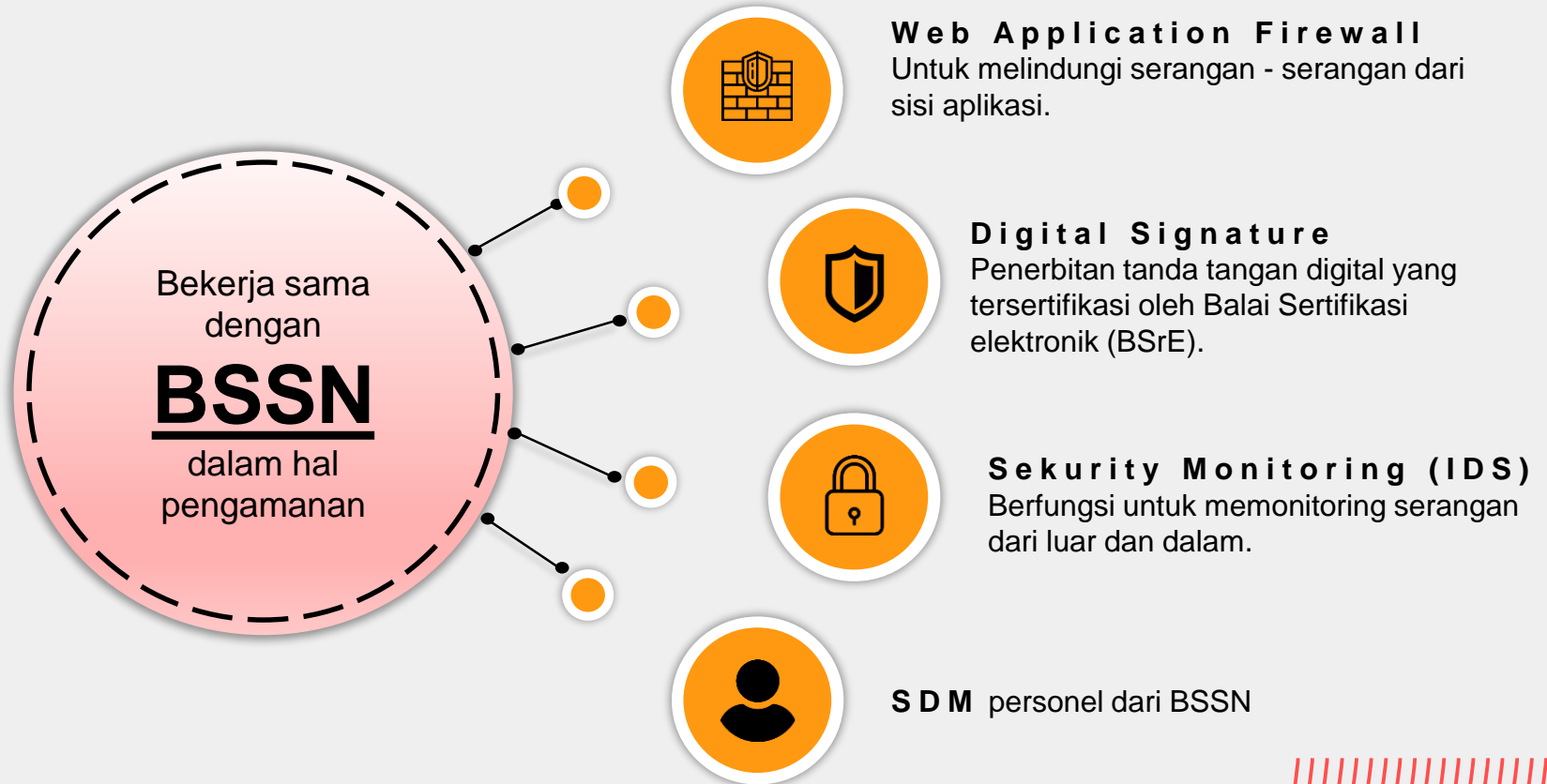
Alur Serangan Ransomware



Sumber :

<https://www.unodc.org/roseap/en/2021/10/cybercrime-ransomware-attacks/story.html>

SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

MODEL PERSIDANGAN:

Persidangan MK dapat dilakukan secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*). Dalam hal persidangan secara luring tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak memungkinkan, MK menetapkan persidangan diselenggarakan secara daring (*online*).

RUANG LINGKUP:

Persidangan Jarak Jauh adalah sidang yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang diajukan kepada MK dalam sidang panel atau sidang pleno dengan menggunakan aplikasi konferensi video (*video conference*) atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan persidangan



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

TUJUAN:

- Kelancaran proses persidangan melalui sidang secara daring (*online*).
- Efisiensi biaya dan waktu bagi para pihak.
- Memenuhi ketentuan pelaksanaan persidangan secara daring (*online*), disebabkan persidangan secara luring (*offline*) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan.
- Memudahkan akses pencari keadilan pada pengadilan dan keadilan.

KEHADIRAN:

Persidangan jarak jauh dilaksanakan secara terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim secara luring (*offline*) dan para pihak secara daring (*online*) dan/atau secara luring (*offline*)



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

KEWAJIBAN PARA PIHAK:

- 1) Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet
- 2) Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/atau media elektronik yang digunakan
- 3) Memastikan berada di dalam ruangan, dan perangkat elektronik berada dalam mode sunyi atau tanpa gangguan suara, kecuali perangkat elektronik yang digunakan untuk kepentingan Persidangan Jarak Jauh
- 4) Menggunakan latar belakang yang sepiantasnya.

SAKSI DAN AHLI:

Saksi dan/atau ahli yang akan didengar keterangannya di Persidangan Jarak Jauh diambil sumpah atau janji yang dipandu oleh Hakim dari Ruang Sidang Mahkamah.



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

ALAT BUKTI:

Dalam hal terdapat keterangan tambahan dan/atau dokumen atau data lainnya yang disampaikan pada saat pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh, keterangan dimaksud harus diperlihatkan atau ditayangkan yang selanjutnya dikirimkan secara daring (*online*) atau media media elektronik lainnya ke MK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah sidang.

PERKEMBANGAN ICT:

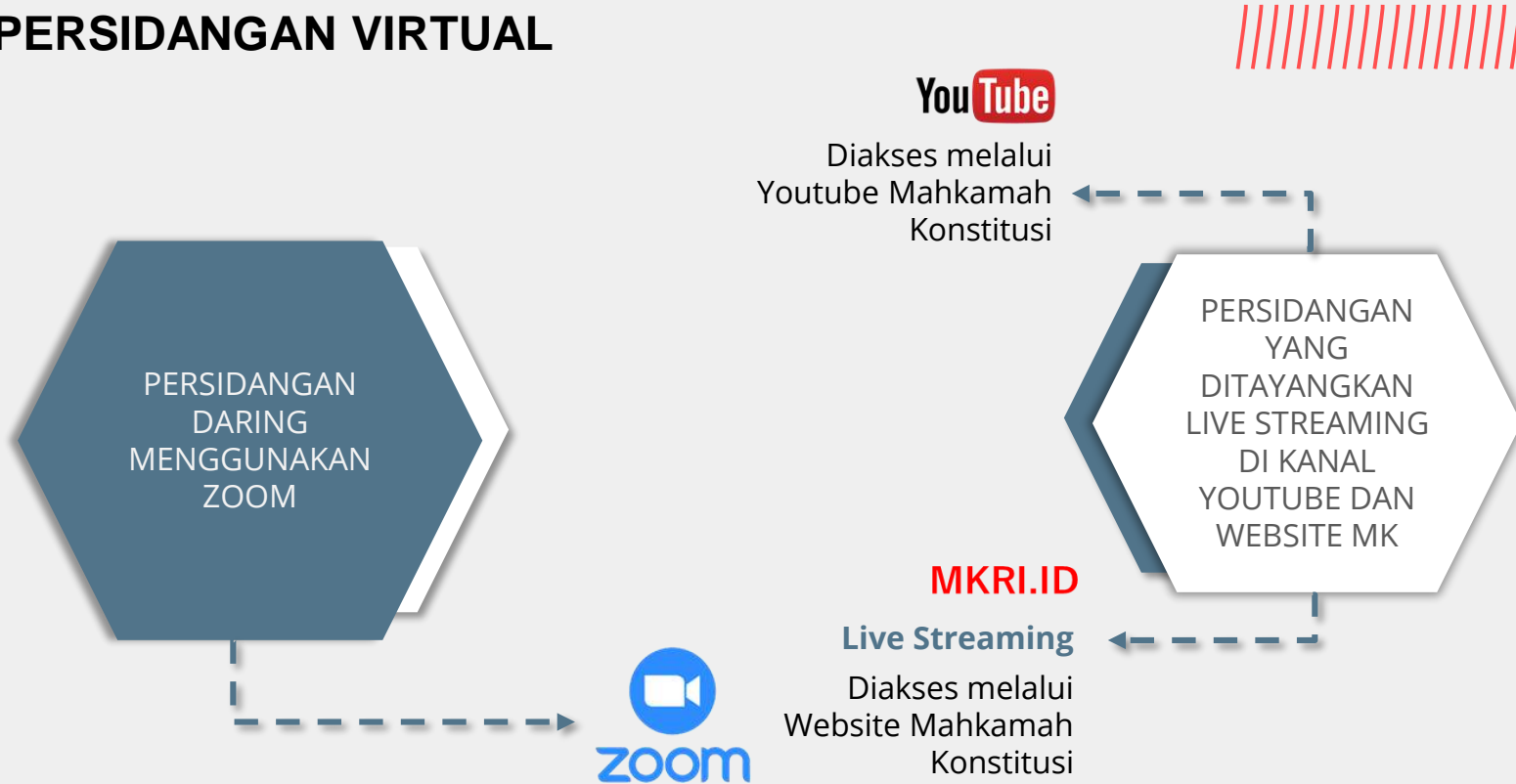
Penerapan penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh disesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.

LAIN-LAIN:

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.



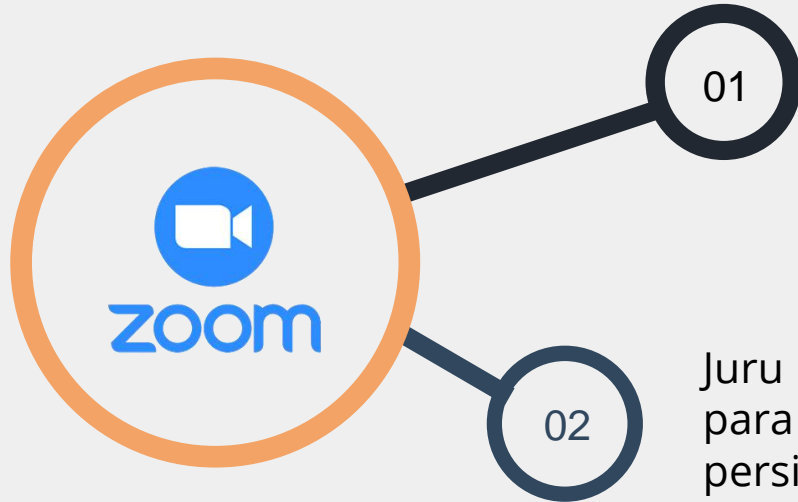
PERSIDANGAN VIRTUAL



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



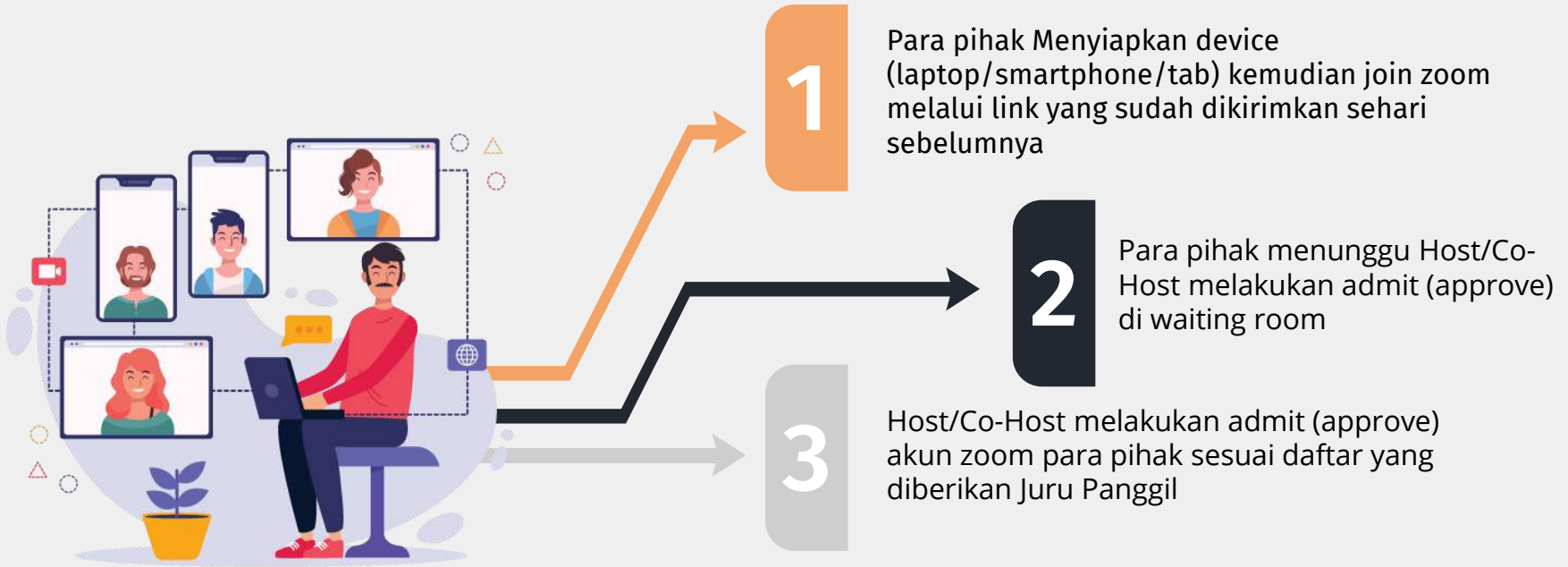
TAHAP PERSIAPAN



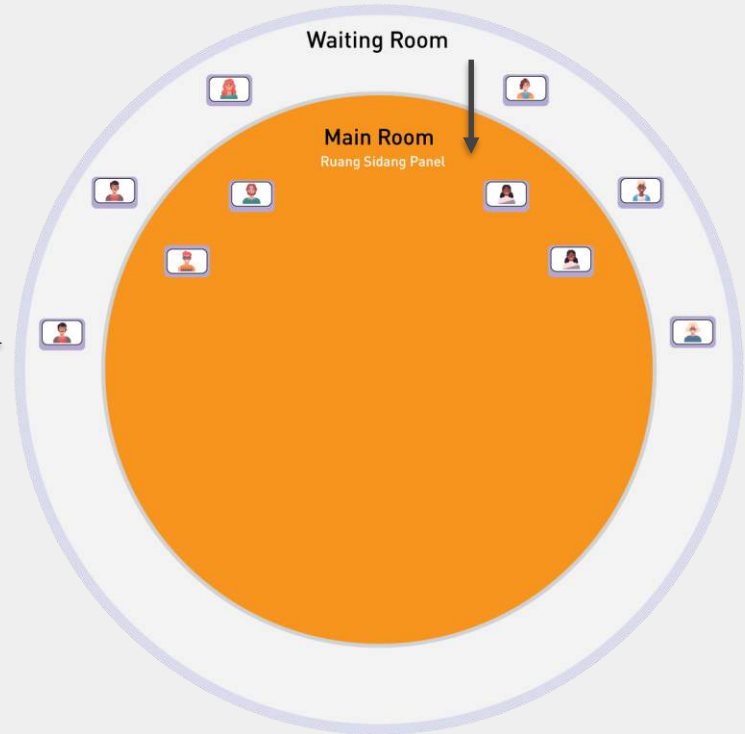
01 IT membuat link zoom sesuai jadwal persidangan dari Kepaniteraan

02 Juru Panggil mengirimkan link zoom kepada para pihak minimal satu hari sebelum persidangan

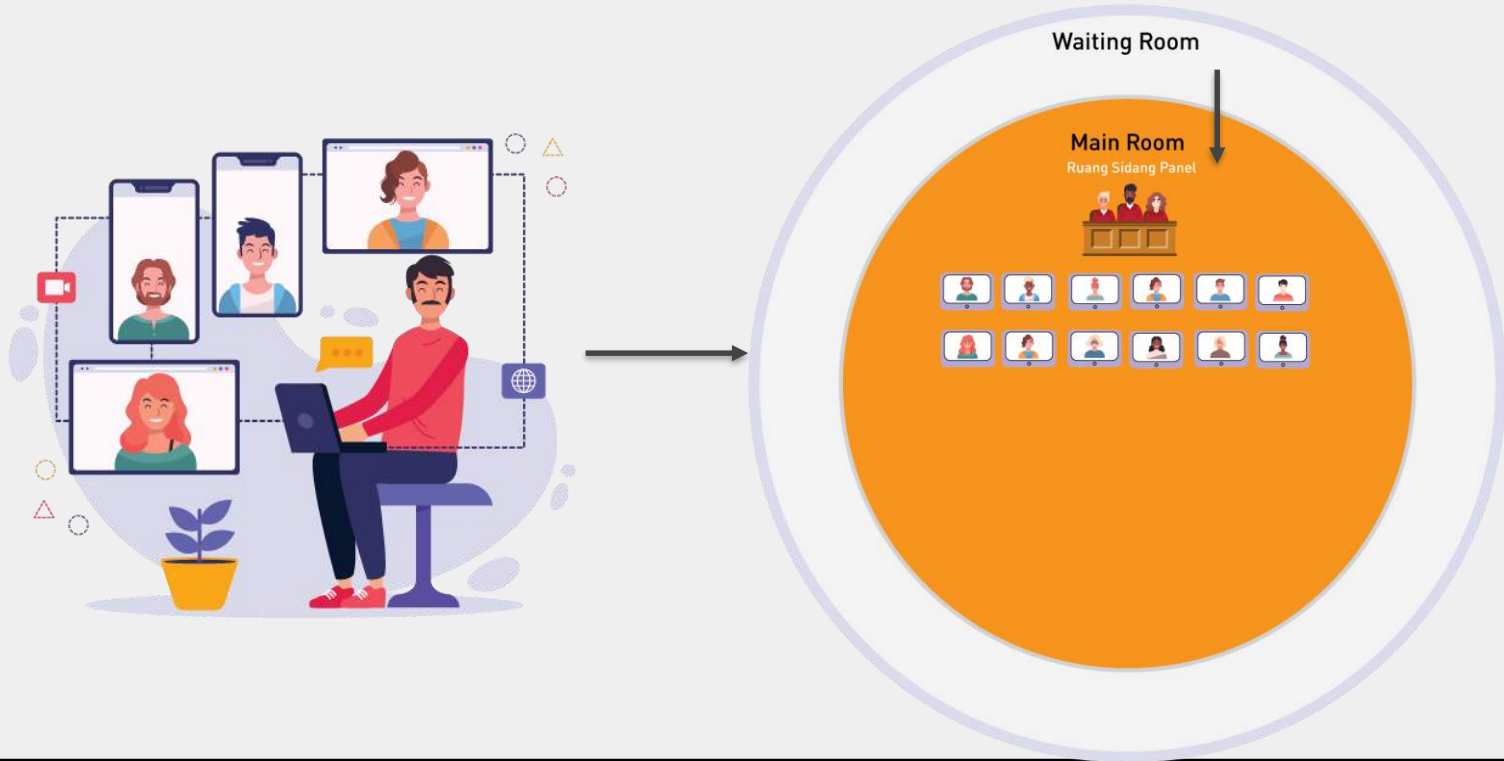
ALUR PERSIDANGAN DARING



- Setelah di admit (approve) para pihak berada pada **Main Room (Ruang Sidang)**
- Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak baik itu **Format Nama, Pakaian, dll.**



Selanjutnya di dalam **Main Room (Ruang Sidang) Majelis Hakim** melakukan proses persidangan



SMARTBOARD DI 53 LOKASI MINI COUTROOM



VIEWSONIC - IFP6550-3



VPC15-WP-3
Windows Slot-in PC for
ViewBoard®

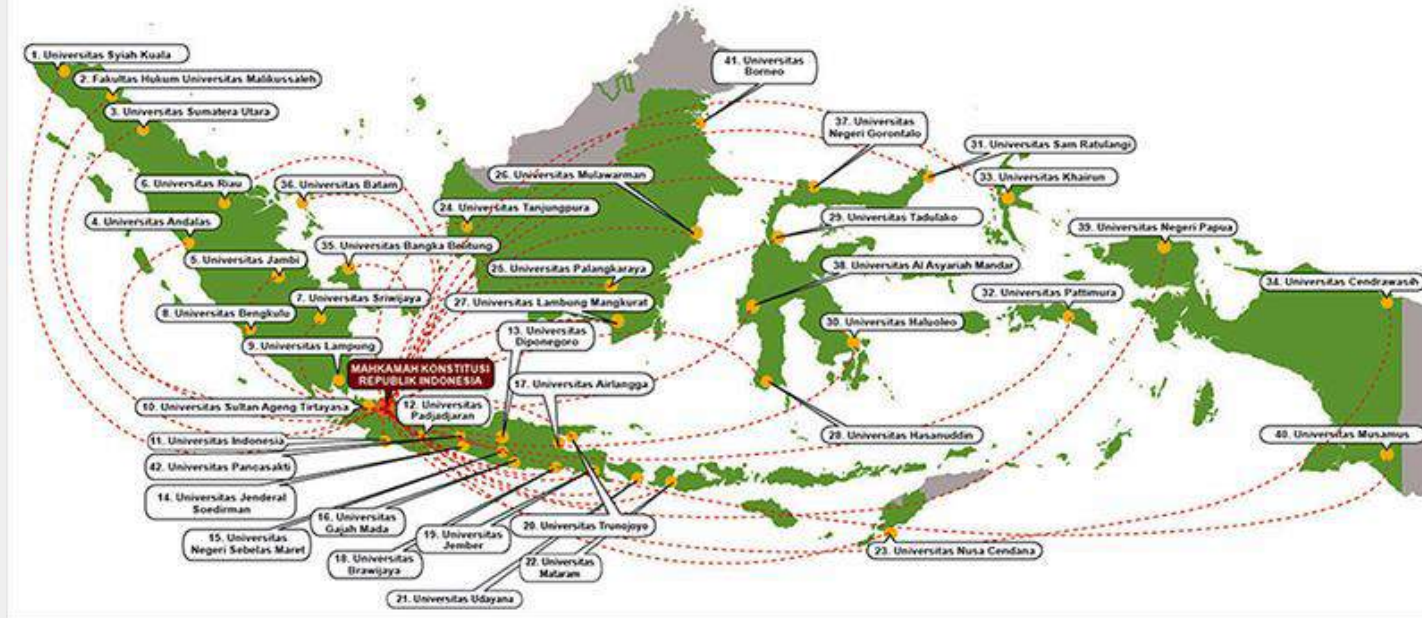


VB-STND-001
Rolling Trolley Cart Stand for
ViewSonic ViewBoard®



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI

LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA



NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
2	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat
3	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunjuk, Merawang-Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Fakultas Hukum Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
5	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
6	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	Jl. Amal Lama Nomor 1, Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan Kalimantan Utara 77123
7	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8	Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih	JL. Pendidikan II - Gedung Fakultas Hukum, Kampus Uncen Abepura
9	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214 Jawa Tengah
10	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
11	Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara 93232
12	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea
13	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat
14	Fakultas Hukum Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 36361
15	Fakultas Hukum Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
16	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
17	Fakultas Hukum Universitas Khairun	Jl. Jusuf Abdurahman Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan. Kotak Pos 53 Ternate 97719
18	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123 Kalimantan Selatan
19	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145
20	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh	Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa - Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141 - Provinsi Aceh
21	Fakultas Hukum Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat
22	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119
23	Fakultas Hukum Universitas Musamus	Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke Papua 99611
24	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur



25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur
26	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
27	Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah
28	Fakultas Hukum Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal
29	Fakultas Hukum Universitas Pattimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon
30	Fakultas Hukum Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau
31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115
32	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Ketingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
33	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	FH UNSRI Palembang, Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang
34	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)
35	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	Medan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155
36	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
37	Fakultas Hukum Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
38	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi (Jenderal Achmad Yani) 78124, Kalimantan Barat (Pontianak)
39	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
40	Fakultas Hukum Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
41	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
42	Universitas Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
43	Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung	Jl. Zainal Abidin. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142
44	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo	Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118
45	Fakultas Hukum Universitas Gorontalo	Jl. Abdul Wahab (Eks. Jln. Jend. Sudirman) No.247, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211
46	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584
47	Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana	Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711
48	Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia	Jl. Urip Sumoharjo No.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
49	Univ. Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	Jalan Ahmad Yani 10 Manggarai NTT Tenda, Watu, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Tim. 86511
50	Univ. Islam Negeri Maulana Malik	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
51	Nagari Pasie Laweh	Jl.Raya Bukittinggi-Medan KM 26 Palimbangan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos : 26151
52	Desa Balla' Barakkaka ri Galesong	Baruga Appaka Sulapa' di Komplek Kampung Adat & Budaya Balla'Barakkaka Ri Galesong (BBrG) Desa Galesong Kabupaten Takalar
53	Desa Bangbang	Banjar Bangbang, Desa Bangbang, KecamatanTembuku, Kabupaten Bangli, Bali



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM YANG AKAN BEKERJASAMA DI 10 LOKASI TAHUN 2023

NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Universitas Muhammadiyah Bima	Jl. Anggrek, Nae, Kec. Rasanae Bar., Kab. Bima, Nusa Tenggara Bar. 84111
2	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Jl. Kaligawe Raya No.Km.4, Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50112
3	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta	Jl. Timoho No.317, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225
4	Universitas Islam Kediri	Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128
5	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238
6	Universitas Balikpapan	Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114
7	Universitas Teuku Umar Meulaboh	Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681
8	Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar	Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
9	Kampung Wasur Kabupaten Merauke , Papua Selatan	Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, Indonesia
10	Desa Mekar Sari, Kubu Raya, Kalimantan Barat	Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Indonesia



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



Persidangan Daring Pengujian UU Cipta Kerja



PEMANFAATAN LAIN DARI FASILITAS *VIDEO CONFERENCE* PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI



Kuliah Umum / General Lecture dan
Symposium Nasional / International



PERSIDANGAN LIVE YOUTUBE CHANNEL MAHKAMAH KONSTITUSI RI

youtube.com/user/mahkamahkonstitusi

76TH INDONESIA TANGGUH INDONESIA TUMBUH

BERSAMA #MengawalKonstitusi NEGERI

18TH ANNIVERSARY

Mahkamah Konstitusi RI 94.5K subscribers

CUSTOMIZE CHANNEL MANAGE VIDEOS

HOME VIDEOS PLAYLISTS COMMUNITY CHANNELS ABOUT

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI

43,920 views · 7 years ago

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk pada 13 Agustus 2014 sebagai amanat dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Uploads ▶ PLAY ALL

Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor

Dr. Suharto, Sidang Pengucapan Putusan Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor

https://studio.youtube.com/channel/UCX-BUmN87LAvqkl5LFgwxw/editing/images



PERMOHONAN ELEKTRONIK

“Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (**Permohonan Elektronik / *Electronic Filing***), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi”.

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)

“Permohonan elektronik (***electronic filing***), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”

PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”



PERMOHONAN ELEKTRONIK

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang
"TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG"

Pasal 9 Ayat (1):

Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah:

- a. Secara Luring (offline) atau;
- b. Secara Daring (Online) atau melalui media elektronik lainnya.

Pasal 11 Ayat (1):

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat diajukan secara luring (offline) atau daring (online)

Pasal 12 Ayat (1):

Dalam hal pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan wajib diajukan secara daring (online).



SIMPEL.MKRI.ID (SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)



SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)

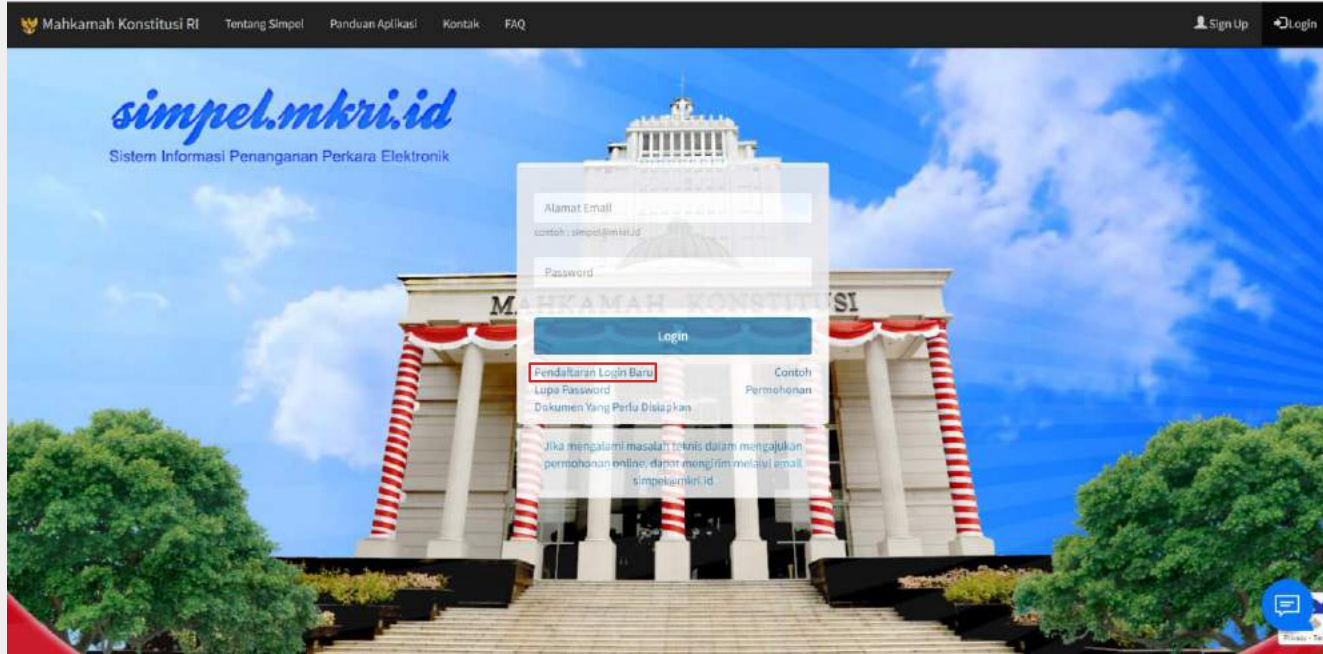
"Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik"

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



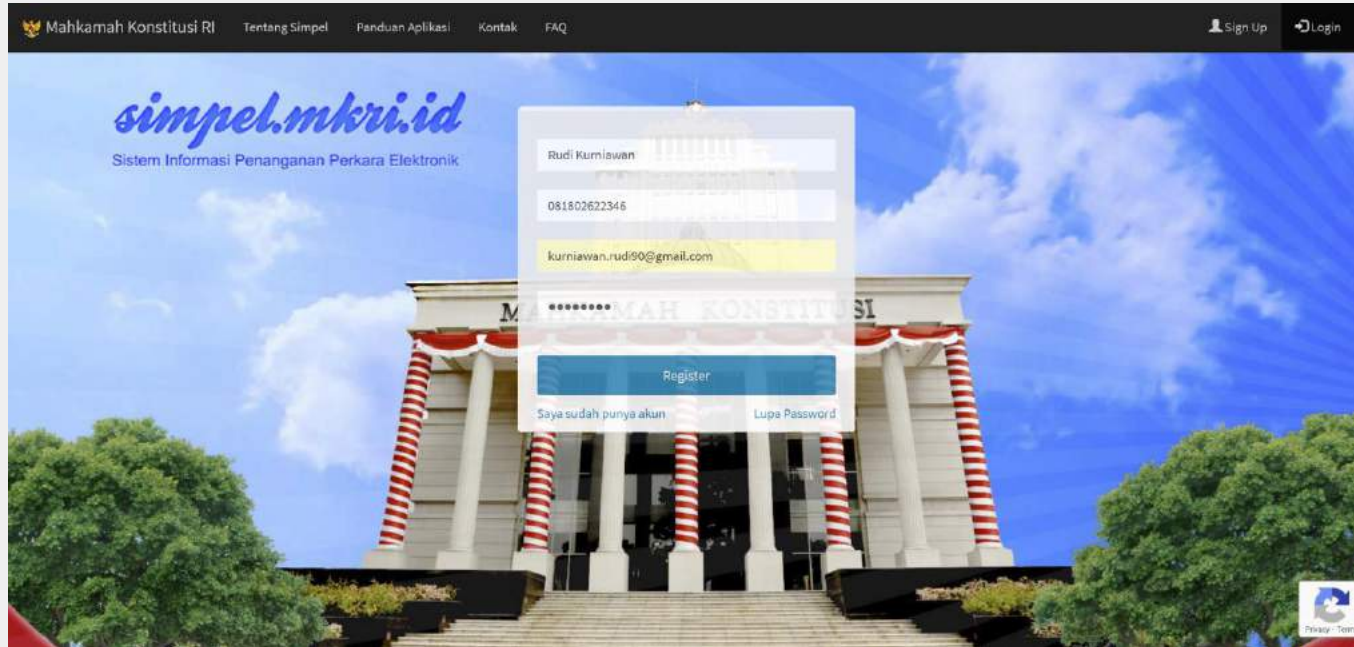
Permohonan Online (simpel.mkri.id) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real-time (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui laman simpel.mkri.id, maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



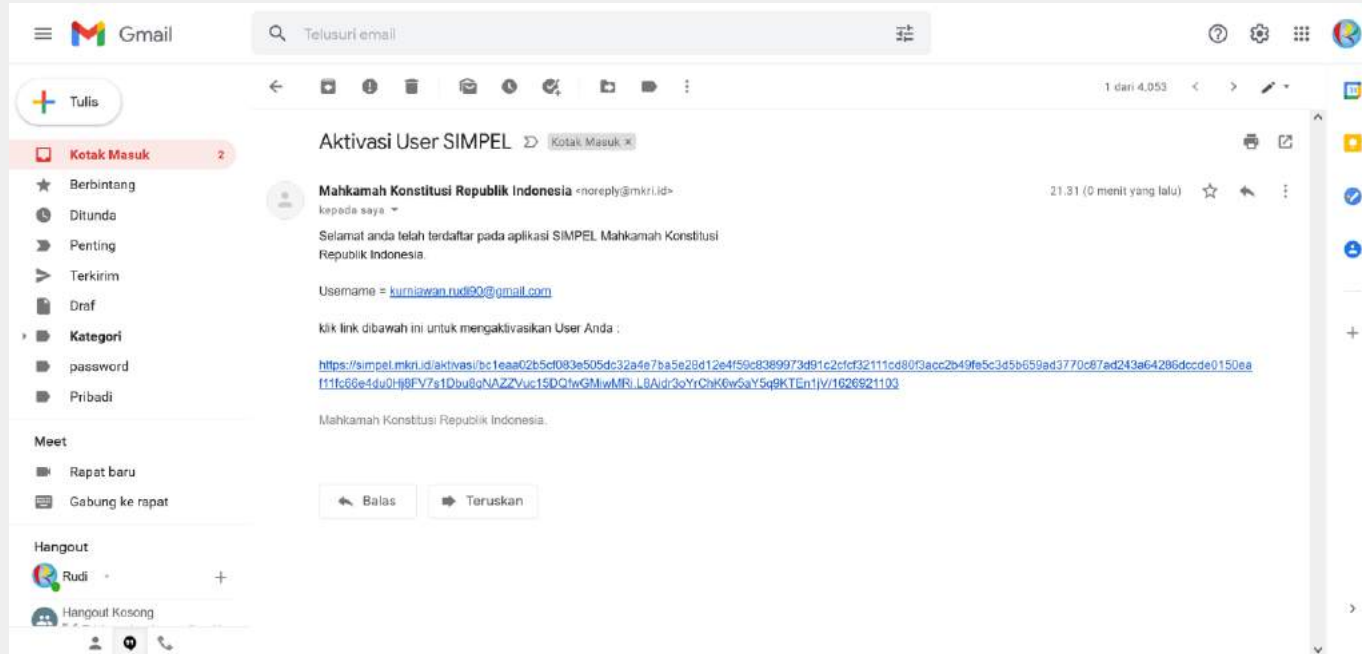
Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMPEL, terlebih dahulu membuat akun dengan meng-klik “Pendaftaran Login Baru”

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol "Register"
Kemudian cek email untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot displays the SIMPEL user interface. The top navigation bar includes the SIMPEL logo, the user's name 'Rudi Kurniawan', and a 'Dashboard' link. A left sidebar contains navigation options such as 'Dashboard', 'PUU', 'SKLN', 'PHRU', 'PHP Kepala Daerah', 'Pengajuan Bidang', 'Berkas', and 'Konsultasi'. The main content area is titled 'Profile' and 'Profile User'. It features a profile picture placeholder and the name 'Rudi Kurniawan'. Below this is a form with the following fields:

- Nama ***: Rudi Kurniawan
- Email**: kurniawan_rudi90@gmail.com
- Nomor Telepon/HP ***: 081502622316
- Nomor KTP ***: 123456789011121
- File KTP ***: Includes a 'Browse...' button, a note 'File type harus jpg or pdf or png', and a note 'Bukan ada file KTP'.
- Alamat**: Includes a 'Detail' link.

At the bottom of the form are two buttons: 'Simpan' (Save) and 'Batal' (Cancel). The footer contains the text 'Copyright © 2017-2026 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.' and 'Version 2.1'.

Setelah login untuk pertama kali user akan diarahkan ke halaman profil untuk melengkapi data akun.

Setelah data akun sudah lengkap maka langkah selanjutnya untuk pengajuan permohonan baru dapat diakses

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot displays the SIMPEL.MKRI.ID dashboard for user Rudi Kurnawan. The dashboard is organized into several sections:

- Permohonan (Applications):** A row of four cards, each with a large number and a description:
 - Card 1: '1' Pengajuan Undang-Undang (PUU) - Sidangapanya
 - Card 2: '0' Singkapa Kawatmangir Lembaga Negara (SKLN) - Sidangapanya
 - Card 3: '0' Penyalahgunaan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) (Presiden/Wakil Presiden) - Sidangapanya
 - Card 4: '0' Penyalahgunaan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif (DPR, DPRD, DPRD) - Sidangapanya
- Peredaran Hasil Pemilihan Kepala Daerah:** A section with a large '0' and the text 'PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota' - Sidangapanya.
- Kalender Sidang (Calendar):** A calendar for July 2021 showing dates with colored indicators for Sidang (green), Putusan (blue), and Kewenangan (purple). The current date is Thursday, July 22, 2021, at 21:34:19.

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Versi: 2.1

Setelah data akun atau profil selesai maka akan diarahkan ke halaman dashboard.

Kemudian klik menu PUU atau SKLN atau PHPU atau PHP Kepala Daerah untuk pengajuan permohonan sesuai jenis permohonan yang hendak diajukan.

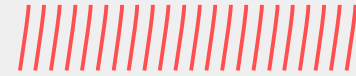
Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik) web application. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The main page is titled "Permohonan Online - PUU (Pengujian Undang-Undang)". The interface includes a sidebar menu with options like Dashboard, Info Permohonan, Permohonan PUU, SKLN, P-IPU, P-IP Kepala Daerah, Informasi, Kunjungan Sidang, Bantuan, and Konsultasi. The main content area is divided into three tabs: "Proses Pengisian Pokok Permohonan" (selected), "Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa", and "Proses Upload Dokumen". Under the selected tab, there is a form titled "Permohonan" with a text area for "Uraian Pokok Permohonan" containing the example text: "Uraian Pokok Permohonan (contoh: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945)". Below the text area is a list of required documents: "Dokumen yg harus disiapkan:" including KTP Pemohon, Email Pemohon, KTP Kuasa, Email Kuasa, Surat Kuasa, File KTABAS, Permohonan (pdf), Permohonan (doc/docx), and Daftar alat bukti. A "Keterangan:" section notes that "**" indicates the use of a proxy. At the bottom of the form are "Batal" and "Simpan" buttons. The footer contains copyright information for the Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia and the version number "Version 2.1".

Step 1 : Mengisi Pokok Permohonan

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Dashboard > Permohonan Online > Permohonan PUU

SIMPTEL

Rudi Kurniawan
Online

Dashboard

PERGAJIAN PERMOHONAN

- PUU
- Info Permohonan
- Permohonan PUU
- SKLN
- PHPU
- PHP Kepala Daerah

INFORMASI

- Kunjungan Sidang
- Bantuan
- Konsultasi

Kamis, 22 Juli 2021

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.

Version 2.1

Proses Pengisian Pokok Permohonan Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa Proses Upload Dokumen

Permohonan PUU(Pengujian Undang-Undang)

Edit Pokok permohonan :
Contoh Pengujian Materil Undang-undang No ... Tentang

Data Pemohon + Tambah Pemohon

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	#
1	Rudi Kurniawan	Depok	1234567891011121	kurniawan.rudi90@gmail.com		081802622346	

Data Kuasa + Tambah Kuasa

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	Nama Organisasi	Nomor KTA	#
1	Kuasa Hukum 1	Jakarta	1231231231231231	pengacara@mki.id	1	081818181818	-	-	

Batal (Hapus Permohonan) Simpan Sementara Lanjutkan Upload Dokumen

Step 2 : Melengkapi identitas Pemohon dan Kuasa Hukum

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL web application interface. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The main heading is "Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)". Below this, there are three tabs: "Proses Pengisian Pokok Permohonan", "Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa", and "Proses Upload Dokumen". The current view is "Berkas Permohonan", which displays a table of application documents.

NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA	AKSI
1	Permohonan (pdf)	File Permohonan (pdf) Belum di Upload Browse... No file selected.	
2	Permohonan (doc/docx)	File Permohonan (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
3	Surat Kuasa	File Surat Kuasa Belum di Upload Browse... No file selected.	
4	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	File Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
5	Alat Bukti	File Alat Bukti Belum di Upload Browse... No file selected.	

At the bottom of the table, there is a "Tambah Berkas" button. Below the table, there are four action buttons: "Kembali (Edit Permohonan)", "Batal (Hapus Permohonan)", "Simpan Sementara", and "Kirim Permohonan".

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, All rights reserved. Version 2.1

Step 3 : Melengkapi Dokumen Terkait

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110-Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN *ONLINE*

Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020

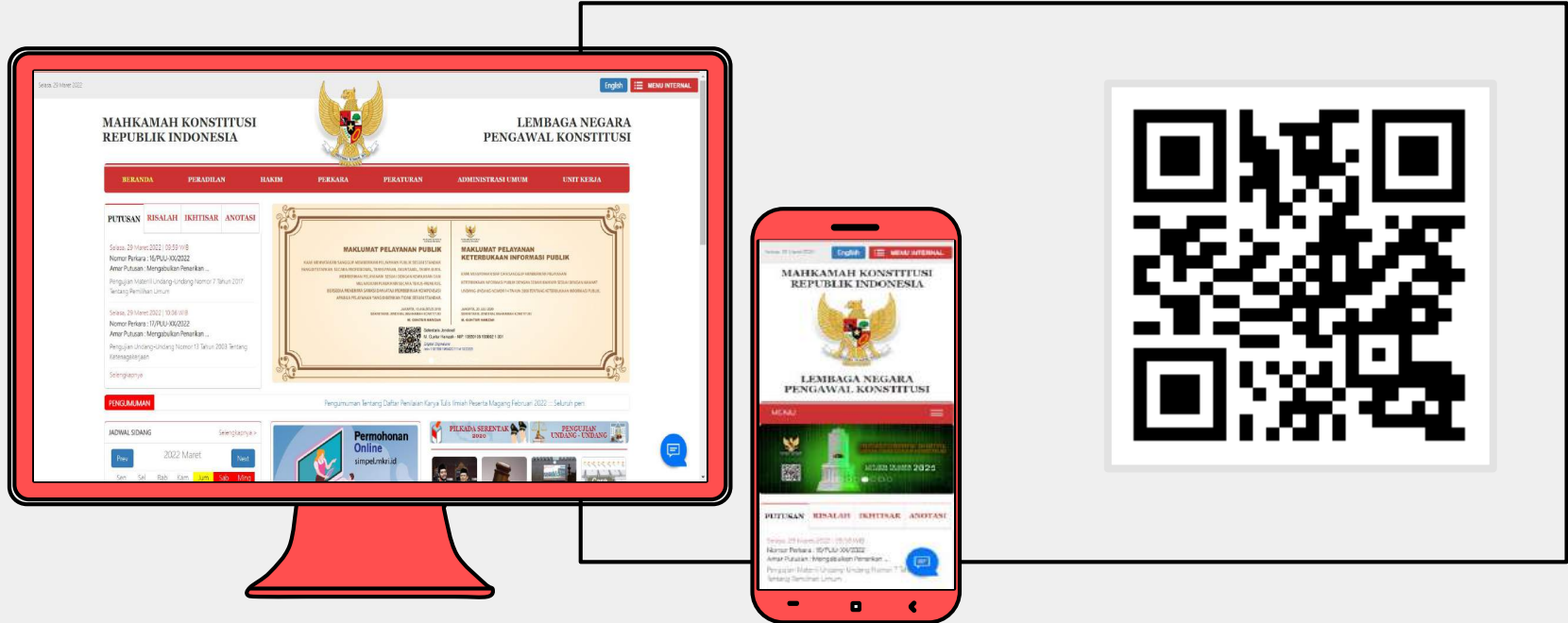
Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020
Pemohon : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.
Kuasa Pemohon : -
Tanggal : 01 Oktober 2020, Pkl 13:54



NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	ADA
3	Alat Bukti	ADA
4	SK KPU	ADA

TTPO (Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online)

WEBSITE MK (MKRI.ID)



MENU WEBSITE



Selasa, 29 Maret 2022

English MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTISAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TAMBAH BAYAR, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PUNGSIKAN SECARA TERUS-MENERUS, BERSEDIA MENEMPAH SANGGUP DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPLIKASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2019
SUHARNO, JENDEKAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HARZAH

MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TERUS-BERUSAHA SESUAI DENGAN ANAKAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 21 JULI 2020
SUHARNO, JENDEKAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HARZAH

Sekretaris Jenderal
M. Guntur Harzah - NIP. 100001051000021 001
Cipta dan Ditandatangani
021-1017081000021114102355

PENGUMUMAN Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 :: Seluruh perni.

JADWAL SIDANG Selengkapnya >
Prev 2022 Maret Next
Sen Sel Rab Kam **Jum** Sab Ming

Pemohonan Online
simplm.kri.id

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



PUTUSAN, RISALAH, IKHTSAR, ANOTASI



Selasa, 29 Maret 2022

English

MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA
PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA

PERADILAN

HAKIM

PERKARA

PERATURAN

ADMINISTRASI UMUM

UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTSAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TAMBAH BAYAR, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PANGKASAN SECARA TERUS-MENERUS, BERSEDEKA MENEMPAH SANGGUP DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPLIKASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2019
SUHARTO, JENDEKAL, MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH



Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hanzah - NIP. 100001051000021001
Cipta dan Ditandatangani
021-1017081000021114100000

**MAKLUMAT PELAYANAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TERANG BERSYARAT SESUAI DENGAN ANAKAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2019
SUHARTO, JENDEKAL, MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

PENGUMUMAN

Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 :: Seluruh perni.

JADWAL SIDANG

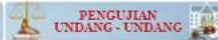
Selengkapnya >

Prev

2022 Maret

Next

Sen Sel Rab Kam **Jum** Sab MING



JADWAL SIDANG

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang ■ Putusan ■ Keluarganya ■ Tunda 🕒 Libur

Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendidriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang Siaran Pers Berlangganan
ILM Konsultasi Dewan Etik

PILKADA SERENTAK 2020 PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi Putusan Streaming dan Video Conference Penelusuran Perkara
Informasi Anggaran AACC LPSE MKRI JDIH
Pusdik MKRI Perpustakaan Pusat Siaran Konstitusi Gedung MK
Majalah Konstitusi Jurnal Konstitusi Jurnal Consvrev SP4N-LAPOR!



BERITA, INFO PUBLIK, PUBLIKASI

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang ■ Putusan ■ Keluarga ■ Tunda ⌚ Libur



simpel.mkri.id

BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas MKri - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas MKri Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas MKri Mahkamah Konstitusi (MK) Meneqaskan Pendidriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang

Siaran Pers

Berlangganan

ILM

Konsultasi

Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi

Putusan

Streaming dan Video Conference

Penelusuran Perkara

Case Tracking

INFORMASI ANGGARAN

Infomas Anggaran

AACC

LPSE MKRI

JDIH

Fusdik MKRI

Perpustakaan

Pusat Siaran Konstitusi

Gedung MK

Majalah Konstitusi

Jurnal Konstitusi

Jurnal Consvrev

SP4N-LAPOR!

PORTAL PUU DAN PILKADA 2020



JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang ■ Putusan ■ Keluarga ■ Tunda ⌚ Libur

Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA **INFO PUBLIK** **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mkri - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mkri Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mkri Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendidriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang

Siaran Pers

Berlangganan

ILM

Konsultasi

Dewan Etik

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi

Putusan

Streaming dan Video Conference

Case Tracking

Informasi Anggaran

AACC

LPSE MKRI

JDIH

Fusdik MKRI

Perpustakaan

Pusat Siaran Konstitusi

Gedung MK

Majalah Konstitusi

Jurnal Konstitusi

Jurnal Consvrev

SP4N-LAPOR!



MENU DAN PORTAL PILIHAN

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang ■ Putusan ■ Kelangka ■ Tunda ⌚ Libur

Permohonan Online
simpl.mkri.id

BERITA **INFO PUBLIK** **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendidriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang

Siaran Pers

Berlangganan

ILM

Konsultasi

Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



PILKADA SERENTAK 2020 **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

Hakim Konstitusi Putusan Streaming dan Video Conference Penelusuran Perkara

Informasi Anggaran AACC LPSE MKRI JDIH

Pusdik MKRI Perpustakaan Pusat Siaran Konstitusi Gedung MK

Majalah Konstitusi Jurnal Konstitusi Jurnal Consvri SP4N-LAPOR!







LIVE STREAMING PERSIDANGAN



 Agenda Sidang	 Siaran Pers	 Berlangganan	Selasa, 29 Maret 2022 15:35 WIB MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat Jakarta, Humas MKri Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-...	 Fusli: MKRI	 Perpustakaan	 Fuzat Sejarah Konstitusi	 Gedung MK
 ILM	 Konsultasi	 Dewan Etik	Selasa, 29 Maret 2022 15:25 WIB Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN Jakarta, Humas MKri Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Pendidriannya Bahwa Dewan Kehormatan	 Majalah Konstitusi	 Jurnal Konstitusi	 Jurnal Conserv	 SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>

 Sidang Pengucapan Putusan / Ketetapan. Sela...	 Sidang Perkara Nomor 21/PUU-XX/2022. Sela...	 Sidang Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022. Senin...	 Sidang Perkara Nomor 20/PUU-XX/2022. Senin...	 Sidang Perkara Nomor 47/PUU-XX/2021. Senin...	 Stadium General Fakultas Syariah IAIN Pekal...
---	---	--	---	--	---

 **2352-9000**
Jl. Medan Merdeka Barat No.6, Jakarta Pusat 10110
Fax: 021-3520177, Email: office@mkri.id

KIRIM SURAT



TANYA JAWAB



WHISTLEBLOWING



HUBUNGI MK



MEDIA SOSIAL



PENGUNJUNG



CASE TRACKING



JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarga (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock icon)

Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendidriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang | Siaran Pers | Berlangganan

ILM | Konsultasi | Dewan Etik

PILKADA SERENTAK 2020 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi | Putusan | Streaming dan Video Conference | Penelusuran Perkara

INFORMASI ANGGARAN | AACC | LPSE MKRI | JDIH


Fusdik MKRI | Perpustakaan | Pusat Siaran Konstitusi | Gedung MK

Majalah Konstitusi | Jurnal Konstitusi | Jurnal Consvrev | SP4N-LAPOR!



CASE TRACKING



Q Cari

CASE TRACKING

MKRI **PUU** **SKLN** **PHPU** **PHPKADA**

Jenis dokumen

- Putusan
- Anotasi
- Ikhtisar Putusan
- Risalah Persidangan

Jenis perkara

- Semua jenis perkara
- PUU
- SKLN
- PHPU
- PHPU.A
- PHPU.C
- PHPU.D
- PHRGUB

Amar putusan

- Semua amar putusan
- Tidak dapat diterima
- Dikabulkan
- Dikabulkan sebagian
- Ditolak
- Ketetapan

12/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

✦ Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
📅 Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

[Case tracking](#)

11/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

✦ Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
📅 Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

[Case tracking](#)

10/PUU-XX/2022 Putusan

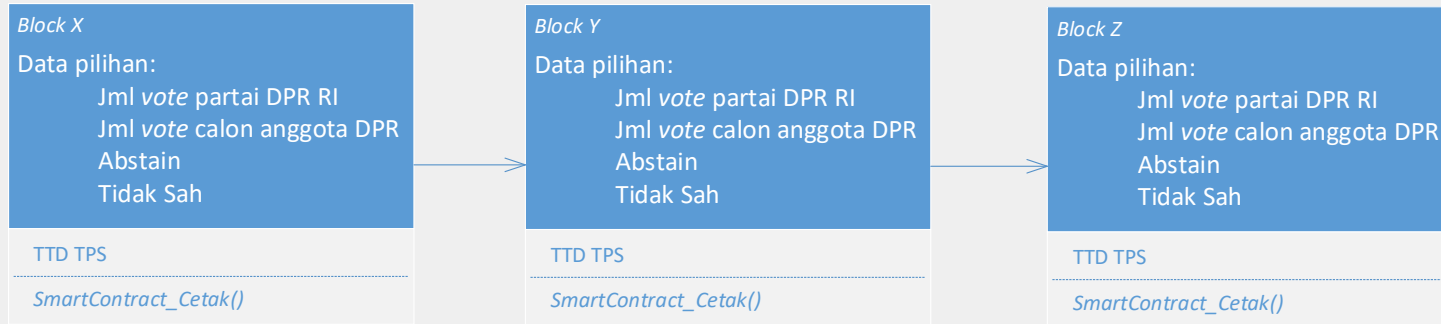
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945

✦ Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
📅 Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

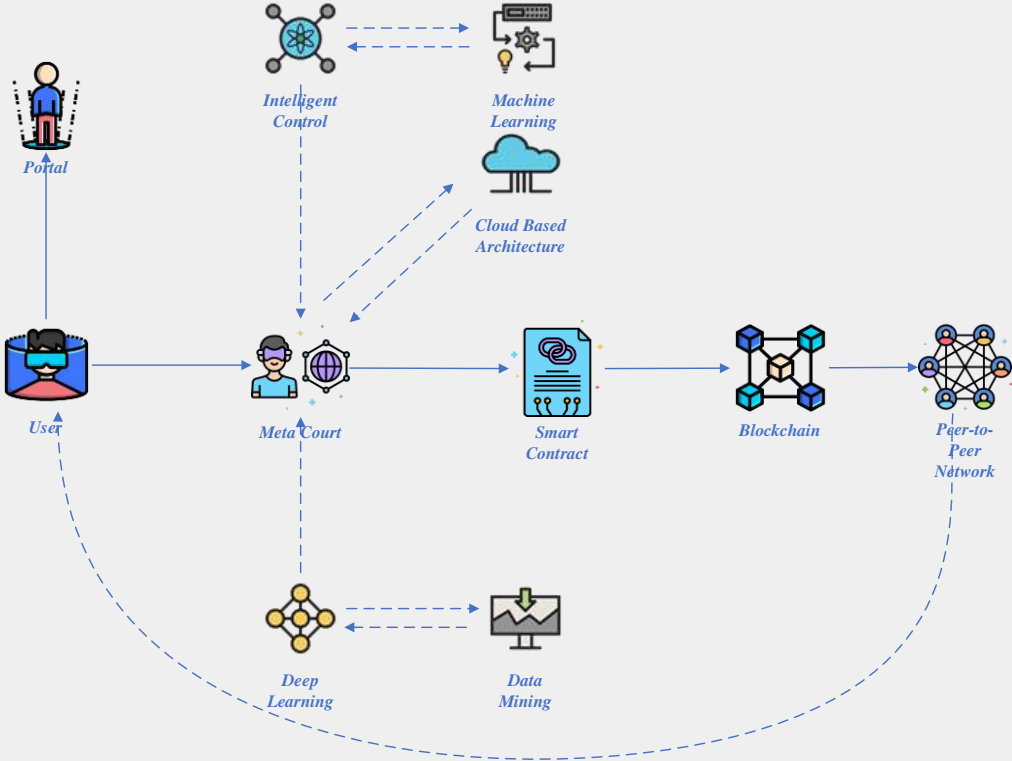
CLICK MK



BLOCKCHAIN DATA PEMILIHAN LEGISLATIF



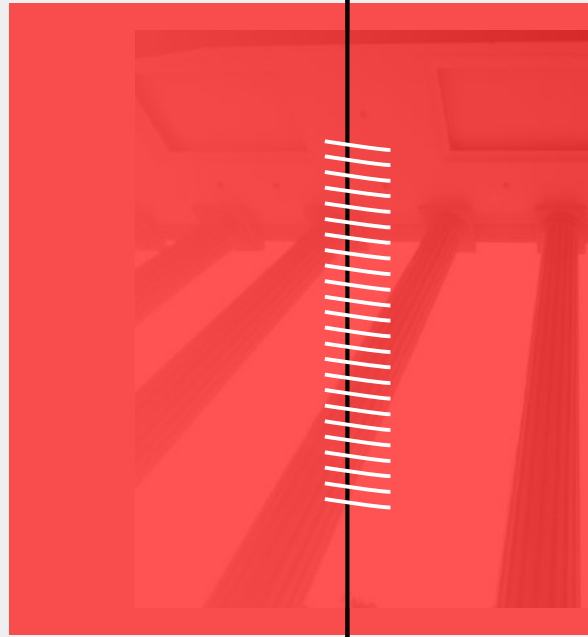
ALUR LOGIC META COURT MKRI



ISOMETRIC PROJECTION META COURT MKRI



TERIMA KASIH





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2491/DK.06.00/11/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

24 November 2023

Kepada,
YM. Hakim Mahkamah Konstitusi
Ibu Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI** yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d. 29 November 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 27 November 2023
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1541737007231124083428

Lampiran I

Nomor : 2491/DK.06.00/11/2023

Tanggal : 24 November 2023

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI ADVOKAT ANGKATAN VI**

Hari, Tanggal : Senin, 27 November 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 27 November 2023	19.00 s.d. 21.00 WIB	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: - YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum. - YM. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2379/DK.06.00/11/2023
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

15 November 2023

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI)

Bapak H. Rahmat Santoso, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI** yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d. 29 November 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **27 (dua puluh tujuh)** orang pengurus dan/atau anggota Ikatan Penasehat Hukum Indonesia sebagai peserta kegiatan dimaksud. Kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari Dewan Pimpinan Pusat untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 21 November 2023**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Biaya penyelenggaraan, termasuk akomodasi, konsumsi, bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan bimbingan teknis lainnya, menjadi beban Mahkamah Konstitusi, sedangkan biaya transportasi peserta menjadi beban masing-masing peserta. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk211305352231115083426

Lampiran I

Nomor : 2379/DK.06.00/11/2023

Tanggal : 15 November 2023

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM BAGI ADVOKAT

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta sebanyak **27 (dua puluh tujuh)** orang pengurus dan/atau anggota Ikatan Penasehat Hukum Indonesia.
- b. Membawa Surat Tugas dari DPP Ikatan Penasehat Hukum Indonesia yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. DPP Ikatan Penasehat Hukum Indonesia memberikan daftar nama peserta sebanyak **27 (dua puluh tujuh)** orang paling lambat pada tanggal **21 November 2023**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing peserta.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.



4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Lain-lain

- a. Peserta dihibau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

6. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 2379/DK.06.00/11/2023

Tanggal : 15 November 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Organisasi Advokat Angkatan VI

Hari, Tanggal : **Senin s.d. Rabu, 27 s.d. 29 November 2023**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Peradan, Perhakhi, DPP ABI, dan BPP PAI

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 27 November 2023	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Pusdik
	12.00 – 14.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	Sekjen MK YM Ketua MK	Pusdik



		<ul style="list-style-type: none"> 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa 		
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	21.00 WIB	Istirahat		Pusdik
KEDUA				
Selasa, 28 November 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik



	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik
	13.00 – 14.00 WIB	Sesi IV: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	14.00 – 16.00 WIB	Sesi V: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	16.30 – 18.00 WIB	Sesi VI: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	18.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KETIGA				
Rabu, 29 November 2023	06.00 – 08.00 WIB	Senam Pagi	Panitia	Pusdik
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VII: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 11.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	11.00 – 13.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik



	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Post-Test</i> dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	16.00 – 18.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Laporan Kapusdik 3. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Pembacaan Doa	Kapusdik Sekjen MK	Pusdik
	18.00 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 2379/DK.06.00/11/2023

Tanggal : 15 November 2023

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
BAGI ADVOKAT**

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua DPW	Jl. Konstitusi, Bogor	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
...										
27										



Lampiran IV

Nomor : 2379/DK.06.00/11/2023

Tanggal : 15 November 2023

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI) menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan VI sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
...			
27.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Rabu
27 s.d. 29 November 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
DPP Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI)
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2490/DK.06.00/11/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

24 November 2023

Kepada,
YM. Hakim Mahkamah Konstitusi
Bapak Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI** yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d. 29 November 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 27 November 2023
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1541737007231124083533

Lampiran I

Nomor : 2490/DK.06.00/11/2023

Tanggal : 24 November 2023

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI ADVOKAT ANGKATAN VI**

Hari, Tanggal : Senin, 27 November 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 27 November 2023	19.00 s.d. 21.00 WIB	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: - YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum. - YM. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2391/DK.06.00/11/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Menghadiri Pembukaan**

15 November 2023

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI)

Bapak H. Rahmat Santoso, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI** yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d. 29 November 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan pada:

Hari, tanggal : Senin, 27 November 2023

Waktu : 16.30 – 18.00 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Heru Setiawan

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk596588409231115084453

Lampiran I

Nomor : 2391/DK.06.00/11/2023

Tanggal : 15 November 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Organisasi Advokat Angkatan VI

Hari, Tanggal : **Senin, 27 November 2023**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Peradan, Perhakhi, DPP ABI, dan BPP PAI

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 27 November 2023	16.30 - 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	Sekjen MK YM Ketua MK	Pusdik
	18.00 WIB	Ishoma	Panitia	





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2472/DK.06.00/11/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

22 November 2023

Kepada Yth.

**Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan
Bapak Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.**
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI** yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d. 29 November 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 28 November 2023
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk187455884231122015416



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2378/DK.06.00/11/2023
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

15 November 2023

Kepada Yth.

Ketua Umum Serikat Pengacara Indonesia (SPI)

Bapak Trimedy Panjaitan, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI** yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d. 29 November 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **27 (dua puluh tujuh)** orang pengurus dan/atau anggota Serikat Pengacara Indonesia sebagai peserta kegiatan dimaksud. Kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari Dewan Pimpinan Pusat untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 21 November 2023**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Biaya penyelenggaraan, termasuk akomodasi, konsumsi, bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan bimbingan teknis lainnya, menjadi beban Mahkamah Konstitusi, sedangkan biaya transportasi peserta menjadi beban masing-masing peserta. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk211305352231115083716

Lampiran I

Nomor : 2378/DK.06.00/11/2023

Tanggal : 15 November 2023

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM BAGI ADVOKAT

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta sebanyak **27 (dua puluh tujuh)** orang pengurus dan/atau anggota Serikat Pengacara Indonesia.
- b. Membawa Surat Tugas dari DPP Serikat Pengacara Indonesia yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. DPP Serikat Pengacara Indonesia memberikan daftar nama peserta sebanyak **27 (dua puluh tujuh)** orang paling lambat pada tanggal **21 November 2023**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing peserta.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.



4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

6. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 2378/DK.06.00/11/2023

Tanggal : 15 November 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Organisasi Advokat Angkatan VI

Hari, Tanggal : **Senin s.d. Rabu, 27 s.d. 29 November 2023**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Peradan, Perhakhi, DPP ABI, dan BPP PAI

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 27 November 2023	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Pusdik
	12.00 – 14.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	Sekjen MK YM Ketua MK	Pusdik



		<ul style="list-style-type: none"> 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa 		
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	21.00 WIB	Istirahat		Pusdik
KEDUA				
Selasa, 28 November 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik



	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik
	13.00 – 14.00 WIB	Sesi IV: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	14.00 – 16.00 WIB	Sesi V: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	16.30 – 18.00 WIB	Sesi VI: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	18.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KETIGA				
Rabu, 29 November 2023	06.00 – 08.00 WIB	Senam Pagi	Panitia	Pusdik
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VII: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 11.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	11.00 – 13.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik



	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Post-Test</i> dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	16.00 – 18.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Laporan Kapusdik 3. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Pembacaan Doa	Kapusdik Sekjen MK	Pusdik
	18.00 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 2378/DK.06.00/11/2023

Tanggal : 15 November 2023

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
BAGI ADVOKAT**

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua DPW	Jl. Konstitusi, Bogor	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
...										
27										



Lampiran IV

Nomor : 2378/DK.06.00/11/2023

Tanggal : 15 November 2023

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Serikat Pengacara Indonesia menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan VI sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
...			
27.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Rabu
27 s.d. 29 November 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
Serikat Pengacara Indonesia
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2390/DK.06.00/11/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Menghadiri Pembukaan**

15 November 2023

Kepada Yth.

Ketua Umum Serikat Pengacara Indonesia (SPI)

Bapak Trimedya Panjaitan, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI** yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d. 29 November 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan pada:

Hari, tanggal : Senin, 27 November 2023

Waktu : 16.30 – 18.00 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Heru Setiawan

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk596588409231115084530

Lampiran I

Nomor : 2390/DK.06.00/11/2023

Tanggal : 15 November 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Organisasi Advokat Angkatan VI

Hari, Tanggal : **Senin, 27 November 2023**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Peradan, Perhakhi, DPP ABI, dan BPP PAI

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 27 November 2023	16.30 - 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	Sekjen MK YM Ketua MK	Pusdik
	18.00 WIB	Ishoma	Panitia	





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2513/DK.06.00/11/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

28 November 2023

Kepada Yth.,
Panitera Muda II
Bapak Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI** yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d. 29 November 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 28 November 2023
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I dan III.



Digital Signature
mk1398913755231128073820



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2377/DK.06.00/11/2023
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

15 November 2023

Kepada Yth.

**Ketua Umum Pimpinan Nasional Perkumpulan Advocate dan Pengacara Nusantara
(PIMNAS PERADAN)
Bapak Indranas Gaho
di Tempat**

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024** bagi **Advokat Angkatan VI** yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d. 29 November 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **27 (dua puluh tujuh)** orang pengurus dan/atau anggota Perkumpulan Advocate dan Pengacara Nusantara sebagai peserta kegiatan dimaksud. Kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari Pimpinan Nasional untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 21 November 2023**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Biaya penyelenggaraan, termasuk akomodasi, konsumsi, bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan bimbingan teknis lainnya, menjadi beban Mahkamah Konstitusi, sedangkan biaya transportasi peserta menjadi beban masing-masing peserta. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk211305352231115083822

Lampiran I

Nomor : 2377/DK.06.00/11/2023

Tanggal : 15 November 2023

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM BAGI ADVOKAT

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta sebanyak **27 (dua puluh tujuh)** orang pengurus dan/atau anggota Perkumpulan Advocate dan Pengacara Nusantara.
- b. Membawa Surat Tugas dari Pimpinan Nasional Perkumpulan Advocate dan Pengacara Nusantara yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. Pimpinan Nasional Perkumpulan Advocate dan Pengacara Nusantara memberikan daftar nama peserta sebanyak **27 (dua puluh tujuh)** orang paling lambat pada tanggal **21 November 2023**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing peserta.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.



4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

6. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 2377/DK.06.00/11/2023

Tanggal : 15 November 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Organisasi Advokat Angkatan VI

Hari, Tanggal : **Senin s.d. Rabu, 27 s.d. 29 November 2023**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Peradan, Perhakhi, DPP ABI, dan BPP PAI

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 27 November 2023	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Pusdik
	12.00 – 14.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	Sekjen MK YM Ketua MK	Pusdik



		<ul style="list-style-type: none"> 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa 		
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	21.00 WIB	Istirahat		Pusdik
KEDUA				
Selasa, 28 November 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik



	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik
	13.00 – 14.00 WIB	Sesi IV: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	14.00 – 16.00 WIB	Sesi V: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	16.30 – 18.00 WIB	Sesi VI: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	18.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KETIGA				
Rabu, 29 November 2023	06.00 – 08.00 WIB	Senam Pagi	Panitia	Pusdik
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VII: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 11.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	11.00 – 13.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik



	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Post-Test</i> dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	16.00 – 18.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Laporan Kapusdik 3. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Pembacaan Doa	Kapusdik Sekjen MK	Pusdik
	18.00 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 2377/DK.06.00/11/2023

Tanggal : 15 November 2023

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
BAGI ADVOKAT**

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua DPW	Jl. Konstitusi, Bogor	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
...										
27										



Lampiran IV

Nomor : 2377/DK.06.00/11/2023

Tanggal : 15 November 2023

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Pimpinan Nasional Perkumpulan Advocate dan Pengacara Nusantara menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan VI sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
...			
27.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Rabu
27 s.d. 29 November 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
Pimpinan Nasional Perkumpulan Advocate dan Pengacara Nusantara
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2389/DK.06.00/11/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Menghadiri Pembukaan**

15 November 2023

Kepada Yth.

**Ketua Umum Pimpinan Nasional Perkumpulan Advocate dan Pengacara Nusantara
(PIMNAS PERADAN)**

Bapak Indranas Gaho

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI** yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d. 29 November 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan pada:

Hari, tanggal : Senin, 27 November 2023

Waktu : 16.30 – 18.00 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk596588409231115084611

Lampiran I

Nomor : 2389/DK.06.00/11/2023

Tanggal : 15 November 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Organisasi Advokat Angkatan VI

Hari, Tanggal : **Senin, 27 November 2023**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Peradan, Perhakhi, DPP ABI, dan BPP PAI

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 27 November 2023	16.30 - 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	Sekjen MK YM Ketua MK	Pusdik
	18.00 WIB	Ishoma	Panitia	





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2476/DK.06.00/11/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

22 November 2023

Kepada Yth,
Saudara Rizki Amalia, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI** yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d. 29 November 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dan koordinator sesi praktik dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 28 November 2023
Waktu : 13.00 s.d. 18.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : - Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024
- Koordinator sesi Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature
mk-415058262231122015658



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2376/DK.06.00/11/2023
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

15 November 2023

Kepada Yth.

Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia (PERHAKHI)
Ibu Dr. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI** yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d. 29 November 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Ibu untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **27 (dua puluh tujuh)** orang pengurus dan/atau anggota Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia sebagai peserta kegiatan dimaksud. Kami juga mohon perkenan Ibu untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari Dewan Pimpinan Pusat untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 21 November 2023**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Biaya penyelenggaraan, termasuk akomodasi, konsumsi, bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan bimbingan teknis lainnya, menjadi beban Mahkamah Konstitusi, sedangkan biaya transportasi peserta menjadi beban masing-masing peserta. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk2113053522231115083952

Lampiran I

Nomor : 2376/DK.06.00/11/2023

Tanggal : 15 November 2023

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM BAGI ADVOKAT

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta sebanyak **27 (dua puluh tujuh)** orang pengurus dan/atau anggota Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia.
- b. Membawa Surat Tugas dari DPP Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. DPP Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia memberikan daftar nama peserta sebanyak **27 (dua puluh tujuh)** orang paling lambat pada tanggal **21 November 2023**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing peserta.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.



4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

6. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 2376/DK.06.00/11/2023

Tanggal : 15 November 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Organisasi Advokat Angkatan VI

Hari, Tanggal : **Senin s.d. Rabu, 27 s.d. 29 November 2023**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Peradan, Perhakhi, DPP ABI, dan BPP PAI

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 27 November 2023	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Pusdik
	12.00 – 14.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	Sekjen MK YM Ketua MK	Pusdik



		<ul style="list-style-type: none"> 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa 		
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	21.00 WIB	Istirahat		Pusdik
KEDUA				
Selasa, 28 November 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik



	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik
	13.00 – 14.00 WIB	Sesi IV: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	14.00 – 16.00 WIB	Sesi V: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	16.30 – 18.00 WIB	Sesi VI: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	18.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KETIGA				
Rabu, 29 November 2023	06.00 – 08.00 WIB	Senam Pagi	Panitia	Pusdik
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VII: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 11.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	11.00 – 13.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik



	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Post-Test</i> dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	16.00 – 18.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Laporan Kapusdik 3. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Pembacaan Doa	Kapusdik Sekjen MK	Pusdik
	18.00 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 2376/DK.06.00/11/2023

Tanggal : 15 November 2023

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
BAGI ADVOKAT**

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua DPW	Jl. Konstitusi, Bogor	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
...										
27										



Lampiran IV

Nomor : 2376/DK.06.00/11/2023

Tanggal : 15 November 2023

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan VI sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
...			
27.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Rabu
27 s.d. 29 November 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2388/DK.06.00/11/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Menghadiri Pembukaan**

15 November 2023

Kepada Yth.

Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia (PERHAKHI)

Ibu Dr. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI** yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d. 29 November 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Ibu untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan pada:

Hari, tanggal : Senin, 27 November 2023

Waktu : 16.30 – 18.00 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Heru Setiawan

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk596588409231115084659

Lampiran I

Nomor : 2388/DK.06.00/11/2023

Tanggal : 15 November 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Organisasi Advokat Angkatan VI

Hari, Tanggal : **Senin, 27 November 2023**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Peradan, Perhakhi, DPP ABI, dan BPP PAI

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 27 November 2023	16.30 - 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	Sekjen MK YM Ketua MK	Pusdik
	18.00 WIB	Ishoma	Panitia	





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2505/DK.06.00/11/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

27 November 2023

Kepada Ykh. Saudara/i:

- 1. Wilma Silalahi**
 - 2. Dian Chusnul Chatimah**
 - 3. Bisariyadi**
 - 4. Luthfi Widagdo Eddyono**
- di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI** yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d. 29 November 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 28 November 2023
Waktu : 13.00 s.d. 18.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature
mk878925569231127020010



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2375/DK.06.00/11/2023
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

15 November 2023

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP Advocat Bangsa Indonesia (ABI)

Ibu Sri Sudarti, S.H., S.E., M.H., M.M.

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI** yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d. 29 November 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Ibu untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **27 (dua puluh tujuh)** orang pengurus dan/atau anggota Advocat Bangsa Indonesia sebagai peserta kegiatan dimaksud. Kami juga mohon perkenan Ibu untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari Dewan Pimpinan Pusat untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 21 November 2023**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Biaya penyelenggaraan, termasuk akomodasi, konsumsi, bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan bimbingan teknis lainnya, menjadi beban Mahkamah Konstitusi, sedangkan biaya transportasi peserta menjadi beban masing-masing peserta. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk211305352231115084047

Lampiran I

Nomor : 2375/DK.06.00/11/2023

Tanggal : 15 November 2023

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM BAGI ADVOKAT

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta sebanyak **27 (dua puluh tujuh)** orang pengurus dan/atau anggota Advocat Bangsa Indonesia.
- b. Membawa Surat Tugas dari DPP Advocat Bangsa Indonesia yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. DPP Advocat Bangsa Indonesia memberikan daftar nama peserta sebanyak **27 (dua puluh tujuh)** orang paling lambat pada tanggal **21 November 2023**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing peserta.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.



4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Lain-lain

- a. Peserta dihibau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

6. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 2375/DK.06.00/11/2023

Tanggal : 15 November 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Organisasi Advokat Angkatan VI

Hari, Tanggal : **Senin s.d. Rabu, 27 s.d. 29 November 2023**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Peradan, Perhakhi, DPP ABI, dan BPP PAI

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 27 November 2023	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Pusdik
	12.00 – 14.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	Sekjen MK YM Ketua MK	Pusdik



		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa 		
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	21.00 WIB	Istirahat		Pusdik
KEDUA				
Selasa, 28 November 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik



	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik
	13.00 – 14.00 WIB	Sesi IV: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	14.00 – 16.00 WIB	Sesi V: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	16.30 – 18.00 WIB	Sesi VI: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	18.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KETIGA				
Rabu, 29 November 2023	06.00 – 08.00 WIB	Senam Pagi	Panitia	Pusdik
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VII: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 11.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	11.00 – 13.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik



	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Post-Test</i> dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	16.00 – 18.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Laporan Kapusdik 3. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Pembacaan Doa	Kapusdik Sekjen MK	Pusdik
	18.00 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 2375/DK.06.00/11/2023

Tanggal : 15 November 2023

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
BAGI ADVOKAT**

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua DPW	Jl. Konstitusi, Bogor	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
...										
27										



Lampiran IV

Nomor : 2375/DK.06.00/11/2023

Tanggal : 15 November 2023

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Advokat Bangsa Indonesia menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan VI sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
...			
27.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Rabu
27 s.d. 29 November 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
DPP Advokat Bangsa Indonesia
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2387/DK.06.00/11/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Menghadiri Pembukaan**

15 November 2023

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP Advocat Bangsa Indonesia (ABI)

Ibu Sri Sudarti, S.H., S.E., M.H., M.M.

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI** yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d. 29 November 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Ibu untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan pada:

Hari, tanggal : Senin, 27 November 2023

Waktu : 16.30 – 18.00 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Heru Setiawan

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk596588409231115084749

Lampiran I

Nomor : 2387/DK.06.00/11/2023

Tanggal : 15 November 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Organisasi Advokat Angkatan VI

Hari, Tanggal : **Senin, 27 November 2023**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Peradan, Perhakhi, DPP ABI, dan BPP PAI

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 27 November 2023	16.30 - 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	Sekjen MK YM Ketua MK	Pusdik
	18.00 WIB	Ishoma	Panitia	





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2506/DK.06.00/11/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

27 November 2023

Kepada Ykh. Saudara:

1. Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.

2. Rudi Kurniawan

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI** yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d. 29 November 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 29 November 2023

Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Materi : **Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2374/DK.06.00/11/2023
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

15 November 2023

Kepada Yth.

Ketua Umum Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advocaten Indonesia (BPP - PAI)
Bapak Sultan Junaidi, S.Sy., M.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI** yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d. 29 November 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **27 (dua puluh tujuh)** orang pengurus dan/atau anggota Perkumpulan Advocaten Indonesia sebagai peserta kegiatan dimaksud. Kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari Badan Pimpinan Pusat untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 21 November 2023**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Biaya penyelenggaraan, termasuk akomodasi, konsumsi, bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan bimbingan teknis lainnya, menjadi beban Mahkamah Konstitusi, sedangkan biaya transportasi peserta menjadi beban masing-masing peserta. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk211305352231115084136

Lampiran I

Nomor : 2374/DK.06.00/11/2023

Tanggal : 15 November 2023

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM BAGI ADVOKAT

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta sebanyak **27 (dua puluh tujuh)** orang pengurus dan/atau anggota Perkumpulan Advocaten Indonesia.
- b. Membawa Surat Tugas dari Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advocaten Indonesia yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advocaten Indonesia memberikan daftar nama peserta sebanyak **27 (dua puluh tujuh)** orang paling lambat pada tanggal **21 November 2023**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing peserta.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.



4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

6. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 2374/DK.06.00/11/2023

Tanggal : 15 November 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Organisasi Advokat Angkatan VI

Hari, Tanggal : **Senin s.d. Rabu, 27 s.d. 29 November 2023**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Peradan, Perhakhi, DPP ABI, dan BPP PAI

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 27 November 2023	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Pusdik
	12.00 – 14.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	Sekjen MK YM Ketua MK	Pusdik



		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa 		
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	21.00 WIB	Istirahat		Pusdik
KEDUA				
Selasa, 28 November 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik



	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik
	13.00 – 14.00 WIB	Sesi IV: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	14.00 – 16.00 WIB	Sesi V: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	16.30 – 18.00 WIB	Sesi VI: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	18.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KETIGA				
Rabu, 29 November 2023	06.00 – 08.00 WIB	Senam Pagi	Panitia	Pusdik
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VII: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 11.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	11.00 – 13.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik



	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Post-Test</i> dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	16.00 – 18.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Laporan Kapusdik 3. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Pembacaan Doa	Kapusdik Sekjen MK	Pusdik
	18.00 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 2374/DK.06.00/11/2023

Tanggal : 15 November 2023

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
BAGI ADVOKAT**

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua DPW	Jl. Konstitusi, Bogor	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
...										
27										



Lampiran IV

Nomor : 2374/DK.06.00/11/2023

Tanggal : 15 November 2023

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advocaten Indonesia menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan VI sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
...			
27.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Rabu
27 s.d. 29 November 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advocaten Indonesia
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2386/DK.06.00/11/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Menghadiri Pembukaan**

15 November 2023

Kepada Yth.

Ketua Umum Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advocaten Indonesia (BPP - PAI)

Bapak Sultan Junaidi, S.Sy., M.H.

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI** yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d. 29 November 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan pada:

Hari, tanggal : Senin, 27 November 2023

Waktu : 16.30 – 18.00 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Heru Setiawan

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk596588409231115084830

Lampiran I

Nomor : 2386/DK.06.00/11/2023

Tanggal : 15 November 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Organisasi Advokat Angkatan VI

Hari, Tanggal : **Senin, 27 November 2023**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Peradan, Perhakhi, DPP ABI, dan BPP PAI

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 27 November 2023	16.30 - 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	Sekjen MK YM Ketua MK	Pusdik
	18.00 WIB	Ishoma	Panitia	





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2514/DK.06.00/11/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

28 November 2023

Kepada Ykh. Saudara:

- 1. Jefri Porkonanta Tarigan**
 - 2. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa**
 - 3. Bisariyadi**
 - 4. Luthfi Widagdo Eddyono**
- di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI** yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d. 29 November 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 29 November 2023
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan
Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature
mk433317074231127084506



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2512/DK.06.00/11/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Koordinator
Evaluasi**

28 November 2023

Kepada Yth.,
Panitera Muda I
Bapak Triyono Edy Budhiarto, S.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI** yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d. 29 November 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi koordinator sesi evaluasi dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 29 November 2023
Waktu : 13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda II dan III.



Digital Signature
mk83457898231128073706



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 5105/DK.00/10/2023

30 Oktober 2023

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Koordinasi
Persiapan Kegiatan Bimbingan Teknis
PHPU

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI)

H. Rahmat Santoso, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2023 bagi organisasi advokat. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kehadiran Bapak atau staf yang terkait untuk menghadiri rapat koordinasi persiapan kegiatan bimbingan teknis dimaksud, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 2 November 2023

Waktu : 08.30 WIB s.d. Selesai

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi zoom Meeting*

Kami telah menugaskan Sdr. Bangkit Panji Anarogo yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Panitera;



Digital Signature
mk2068828230231030112907



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 5106/DK.00/10/2023

30 Oktober 2023

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Koordinasi
Persiapan Kegiatan Bimbingan Teknis
PHPU

Kepada Yth.

Ketua Umum Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advocaten Indonesia (BPP - PAI)

Bapak Sultan Junaidi, S.Sy., M.H.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2023 bagi organisasi advokat. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kehadiran Bapak atau staf yang terkait untuk menghadiri rapat koordinasi persiapan kegiatan bimbingan teknis dimaksud, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 2 November 2023

Waktu : 08.30 WIB s.d. Selesai

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi zoom Meeting*

Kami telah menugaskan Sdr. Bangkit Panji Anarogo yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Panitera;



Digital Signature
mk2068828230231030112954



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 5107/DK.00/10/2023

30 Oktober 2023

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Koordinasi
Persiapan Kegiatan Bimbingan Teknis
PHPU

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP Advocat Bangsa Indonesia (ABI)

Sri Sudarti, S.H., S.E., M.H., M.M.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2023 bagi organisasi advokat. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kehadiran Ibu atau staf yang terkait untuk menghadiri rapat koordinasi persiapan kegiatan bimbingan teknis dimaksud, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 2 November 2023

Waktu : 08.30 WIB s.d. Selesai

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi zoom Meeting*

Kami telah menugaskan Sdr. Bangkit Panji Anarogo yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Panitera;



Digital Signature
mk2068828230231030113040



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 5109/DK.00/10/2023

30 Oktober 2023

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Koordinasi
Persiapan Kegiatan Bimbingan Teknis
PHPU

Kepada Yth.

**Ketua Umum Pimpinan Nasional Perkumpulan Advocate dan Pengacara Nusantara
(PIMNAS PERADAN)**

Indranas Gaho

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2023 bagi organisasi advokat. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kehadiran Bapak atau staf yang terkait untuk menghadiri rapat koordinasi persiapan kegiatan bimbingan teknis dimaksud, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 2 November 2023

Waktu : 08.30 WIB s.d. Selesai

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi zoom Meeting*

Kami telah menugaskan Sdr. Bangkit Panji Anarogo yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Panitera;



Digital Signature
mk2068828230231030113122



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 5110/DK.00/10/2023

30 Oktober 2023

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Koordinasi
Persiapan Kegiatan Bimbingan Teknis
PHPU

Kepada Yth.

Ketua Umum Serikat Pengacara Indonesia (SPI)

Trimedya Panjaitan, S.H., M.H

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2023 bagi organisasi advokat. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kehadiran Bapak atau staf yang terkait untuk menghadiri rapat koordinasi persiapan kegiatan bimbingan teknis dimaksud, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 2 November 2023

Waktu : 08.30 WIB s.d. Selesai

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi zoom Meeting*

Kami telah menugaskan Sdr. Bangkit Panji Anarogo yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Panitera;



Digital Signature
mk2068828230231030113211



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 5111/DK.00/10/2023

30 Oktober 2023

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Koordinasi
Persiapan Kegiatan Bimbingan Teknis
PHPU

Kepada Yth.

Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia (PERHAKHI)

Dr. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2023 bagi organisasi advokat. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kehadiran Ibu atau staf yang terkait untuk menghadiri rapat koordinasi persiapan kegiatan bimbingan teknis dimaksud, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 2 November 2023

Waktu : 08.30 WIB s.d. Selesai

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi zoom Meeting*

Kami telah menugaskan Sdr. Bangkit Panji Anarogo yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Panitera;



Digital Signature
mk2068828230231030113305



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**SURAT TUGAS
NOMOR 934/ST.SPD/2000/11/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Mahkamah Konstitusi menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

Daftar Nama Terlampir

Dari : Gedung Mahkamah Konstitusi

Tempat, Kota Tujuan : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

Dalam rangka : Melaksanakan tugas sebagai Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan VI di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 27 s.d. 29 November 2023.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 27 November 2023
an. Ketua Mahkamah Konstitusi,
Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi



Digital Signature
mk-1176601299231128075922

Lampiran Surat Tugas

Nomor : 934/ST.SPD/2000/11/2023

Tanggal : 27 November 2023

**NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAGI ADVOKAT ANGKATAN VI**

NO	NAMA	PENUGASAN	TANGGAL
1	Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Narasumber	27 November 2023
2	Dr. Manahan MP Sitompul, S.H., M.H.	Narasumber	27 November 2023
3	Pan Mohammad Faiz, S.H., MCL, Ph.D.	Narasumber	28 November 2023
4	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Narasumber	28 November 2023
5	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Narasumber	28 November 2023
6	Dian Chusnul Chotimah, S.H., M.H.	Narasumber	28 November 2023
7	Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.	Narasumber	28 November 2023
8	Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.	Narasumber	28 dan 29 November 2023
9	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Narasumber	28 dan 29 November 2023
10	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.	Narasumber	29 November 2023
11	Rudi Kurniawan, S.Kom.	Narasumber	28 s.d. 29 November 2023
12	Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.	Narasumber	29 November 2023
13	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H.	Narasumber	29 November 2023
14	Triyono Edy Budhiarto, S.H.	Koordinator	29 November 2023





KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA

**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
DENGAN ORGANISASI ADVOKAT
TENTANG
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI ADVOKAT ANGKATAN VI**

NOMOR : 126/PK/2023

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Tiga** bulan **November**, tahun **Dua ribu dua puluh tiga** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Teguh Wahyudi**, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Sri Sudarti, S.H., S.E., M.H., M.M.**, Ketua Umum DPP Advokat Bangsa Indonesia, berkedudukan di Menara Anugrah, Gedung, Jl. Mega Kuningan Barat No.1, RT.1/RW.2, Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya bertindak untuk dan atas nama perwakilan 6 organisasi advokat yang terdiri dari Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Perkumpulan Advocate dan Pengacara Nusantara, Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Perkumpulan Advocaten Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI pada hari Senin s.d. Rabu, tanggal 27 s.d. 29 November 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jalan Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
 - b. Menyediakan ruangan belajar mengajar, bahan ajar, seminar kit, dan Narasumber.
 - c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.
 - d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI.



(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak kurang lebih 162 (seratus enam puluh dua) orang sebagai peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang terdiri dari:
 - 27 (dua puluh tujuh) orang pengurus dan/atau anggota Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI);
 - 27 (dua puluh tujuh) orang pengurus dan/atau anggota Serikat Pengacara Indonesia (SPI);
 - 27 (dua puluh tujuh) orang pengurus dan/atau anggota Perkumpulan Advocate dan Pengacara Nusantara;
 - 27 (dua puluh tujuh) orang pengurus dan/atau anggota Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia;
 - 27 (dua puluh tujuh) orang pengurus dan/atau anggota Advokat Bangsa Indonesia (ABI);
 - 27 (dua puluh tujuh) orang pengurus dan/atau anggota Perkumpulan Advocaten Indonesia.
- b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebelumnya.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI.
- d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **21 November 2023**.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **21 November 2023**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI.



BAB IV

BIAYA

Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing peserta.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- (5) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI

BEA MATERAI DAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

[Handwritten signature]

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 9

Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI



Teguh Wahyudi
Kepala Pusat
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

PIHAK KEDUA,
Advocat Bangsa Indonesia



Sri Sudarti, S.H., S.E., M.H., M.M.,
Ketua Umum

Penjelasan Teknis

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Jefri Haryono Nainggolan	27-11-2023 15:15:53 WIB
	Ceperianus Gea	27-11-2023 15:15:53 WIB
	Mijoto Solekan	27-11-2023 15:43:08 WIB
	Sri Sudarti	27-11-2023 15:48:35 WIB
	Elsa Ugami Suprihatin	27-11-2023 16:09:14 WIB
	Kholilul Kholik	27-11-2023 16:12:40 WIB
	Paulus Peringatan Gulo	27-11-2023 16:12:57 WIB
	F. Puspita Sari	27-11-2023 16:13:21 WIB
	Grammy Balthazar Christiano	27-11-2023 16:13:53 WIB
0	Muhammad Reza Triandi	27-11-2023 16:14:43 WIB
1	Ahmad Qodriansyah	27-11-2023 16:15:03 WIB

IO	NAME	TTD
2	Djeni Marthen	27-11-2023 16:15:41 WIB
3	Ngadimin	27-11-2023 16:16:51 WIB
4	Juliarman Gulo	27-11-2023 16:17:35 WIB
5	I Made Dwikka Surya Pratama	27-11-2023 16:19:31 WIB
6	Ridwan Abdullah	27-11-2023 16:19:56 WIB
7	Gading Satria Nainggolan	27-11-2023 16:20:52 WIB
8	Husnul Yaqin	27-11-2023 16:21:31 WIB
9	Berto Herora Harahap	27-11-2023 16:22:40 WIB
0	Wahyu Prasetyo	27-11-2023 16:23:55 WIB
1	Wahyu Prasetyo	27-11-2023 16:23:55 WIB
2	Dadang Rohendi	27-11-2023 16:24:33 WIB
3	Priyono Adi Nugroho	27-11-2023 16:24:40 WIB
4	M. Habibullah Firdaus	27-11-2023 16:26:47 WIB

IO	NAME	TTD
5	Tri Adi Soerjanto	27-11-2023 16:26:49 WIB
6	Ihsan Firmansyah	27-11-2023 16:26:58 WIB
7	Tusyana Priyatin	27-11-2023 16:27:39 WIB
8	Ade Salamah	27-11-2023 16:27:42 WIB
9	Deasy Anna Victorina	27-11-2023 16:27:48 WIB
0	Sonny Kusuma	27-11-2023 16:27:54 WIB
1	Candra Widya Wardhana	27-11-2023 16:27:59 WIB
2	Nelson Nikodemus Simamora	27-11-2023 16:28:02 WIB
3	Achmad Mariadi	27-11-2023 16:28:27 WIB
4	Michael Himan	27-11-2023 16:29:09 WIB
5	I Made Sukayasa	27-11-2023 16:29:14 WIB
6	Celvin Theys	27-11-2023 16:29:29 WIB
7	Rahmawati Sukri	27-11-2023 16:29:40 WIB

IO	NAME	TTD
8	Dicky Patadjenu	27-11-2023 16:29:52 WIB
9	Robin Riduan	27-11-2023 16:30:24 WIB
0	Richard Pratama Sumanli	27-11-2023 16:30:28 WIB
1	Ridwan Darmawan	27-11-2023 16:30:35 WIB
2	Laila Zahra	27-11-2023 16:32:05 WIB
3	Andi Bashar	27-11-2023 16:32:10 WIB
4	Panti Silaban	27-11-2023 16:33:08 WIB
5	Mujiati	27-11-2023 16:33:29 WIB
6	Budiyanto	27-11-2023 16:33:46 WIB
7	Dicky Andika Hartanto	27-11-2023 16:34:42 WIB
8	Ridwan	27-11-2023 16:35:04 WIB
9	Safril Partang	27-11-2023 16:35:39 WIB
0	Dadang Herli Saputra	27-11-2023 16:35:41 WIB

IO	NAME	TTD
1	Pitra Romadoni Nasution	27-11-2023 16:35:50 WIB
2	Ni Wayan Suryathi	27-11-2023 16:35:57 WIB
3	Siti Sari Finarsih	27-11-2023 16:35:59 WIB
4	IHYA ULUMUDIN	27-11-2023 16:36:02 WIB
5	Yudha Adhi Oetomo	27-11-2023 16:36:07 WIB
6	Muhammad Ridwan	27-11-2023 16:36:08 WIB
7	Diana Ivory	27-11-2023 16:36:13 WIB
8	I Ketut Suandika	27-11-2023 16:36:16 WIB
9	Georgian Obertha	27-11-2023 16:36:17 WIB
0	AGNES JULENDA PANGAU	27-11-2023 16:36:18 WIB
1	Evi Sundari	27-11-2023 16:36:18 WIB
2	Muslikul Tohari	27-11-2023 16:36:19 WIB
3	Ali Yusran Gea	27-11-2023 16:36:19 WIB

IO	NAME	TTD
4	Rozhi Ananda Sitepu	27-11-2023 16:36:20 WIB
5	Kristal Pamungkas	27-11-2023 16:36:21 WIB
6	Banua Sanjaya Hasibuan	27-11-2023 16:36:22 WIB
7	Dipranto Tobok Pakpahan	27-11-2023 16:36:22 WIB
8	Ubat Riadi Pasaribu	27-11-2023 16:36:23 WIB
9	Robby Dareho	27-11-2023 16:36:26 WIB
0	Lenarki Latupeirissa	27-11-2023 16:36:28 WIB
1	Wiwik Winarsih	27-11-2023 16:36:28 WIB
2	Pipit Suwito	27-11-2023 16:36:33 WIB
3	Kurnia Zakaria	27-11-2023 16:36:34 WIB
4	Francois H. Hallatu	27-11-2023 16:36:36 WIB
5	Risnandar Kobandaha	27-11-2023 16:36:37 WIB
6	Marina Mayasari	27-11-2023 16:36:39 WIB

IO	NAME	TTD
7	Yohana Fitri	27-11-2023 16:36:43 WIB
8	YULSANDI PRAMANA PUTRA	27-11-2023 16:36:45 WIB
9	Yacintha Yessica Desiana	27-11-2023 16:36:47 WIB
0	Jeffry Palijama	27-11-2023 16:36:55 WIB
1	Jumadi	27-11-2023 16:37:06 WIB
2	Agung Fatahillah	27-11-2023 16:37:12 WIB
3	Robby Yunianto Utama MS	27-11-2023 16:37:16 WIB
4	I Made Maha Atmaja	27-11-2023 16:37:21 WIB
5	Lukman Efendi	27-11-2023 16:37:32 WIB
6	Yubili Oxford George	27-11-2023 16:37:36 WIB
7	Maradona Sinuraya	27-11-2023 16:37:39 WIB
8	Noorita Rusiana Indriati	27-11-2023 16:37:43 WIB
9	Moh Mahdi	27-11-2023 16:37:59 WIB

IO	NAME	TTD
0	Sahidi	27-11-2023 16:38:21 WIB
1	JERI	27-11-2023 16:38:24 WIB
2	JERI	27-11-2023 16:38:24 WIB
3	Novensius Damai Sejahtera Duha	27-11-2023 16:38:30 WIB
4	I Wayan Baktiasa	27-11-2023 16:38:34 WIB
5	Ruben Fritson	27-11-2023 16:38:44 WIB
6	Imam Hikmat	27-11-2023 16:39:06 WIB
7	Makki Yuliawan	27-11-2023 16:39:30 WIB
8	Abdul Robin	27-11-2023 16:40:19 WIB
9	Ade Safrudin	27-11-2023 16:40:33 WIB
00	Anas Pratama	27-11-2023 16:41:33 WIB
01	Elianta Ginting	27-11-2023 16:41:43 WIB
02	Hopaldes Pirman Panaili	27-11-2023 16:42:18 WIB

IO	NAME	TTD
03	Angelieke Jeanette	27-11-2023 16:42:19 WIB
04	Irwansyah Putera	27-11-2023 16:42:22 WIB
05	Rahmat Mulyana	27-11-2023 16:48:39 WIB
06	Mista	27-11-2023 16:51:15 WIB
07	Nuryanto A. Daim	27-11-2023 16:52:04 WIB
08	Sri Widoyanti	27-11-2023 16:53:52 WIB
09	Andi Wijaya KAD	27-11-2023 16:55:53 WIB
10	Januri	27-11-2023 17:16:47 WIB
11	Barokah	27-11-2023 17:40:44 WIB
12	Tedy Subrata	27-11-2023 19:04:00 WIB
13	Sarwono	27-11-2023 19:07:41 WIB
14	Nodi Putrado	27-11-2023 19:19:30 WIB
15	Guruh Agustian	27-11-2023 19:20:07 WIB

IO	NAME	TTD
16	Dasep Rahman Hakim	27-11-2023 19:20:39 WIB
17	Sapto Wibowo Sutanto	27-11-2023 19:22:49 WIB
18	Moh Hasan Merah	27-11-2023 19:25:47 WIB
19	Martiningsih	27-11-2023 19:26:19 WIB
20	Moh Hasan Merah	27-11-2023 19:26:35 WIB
21	M.O. Saut Hamonangan Turnip	27-11-2023 19:57:35 WIB
22	Arinus Duha	27-11-2023 19:57:39 WIB
23	Karolus Ewantino	27-11-2023 20:01:30 WIB
24	Agus Sudrajat	27-11-2023 20:02:58 WIB
25	Siti Jubaidah	27-11-2023 20:07:51 WIB
26	Dede Dahlan	27-11-2023 20:11:59 WIB
27	Alzam Afika	27-11-2023 20:15:00 WIB

BELUM ABSEN

Pembukaan Kegiatan

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Nelson Nikodemus Simamora	27-11-2023 19:00:16 WIB
	Lukman Efendi	27-11-2023 19:00:34 WIB
	Jeffry Palijama	27-11-2023 19:02:15 WIB
	Muhammad Ridwan	27-11-2023 19:03:24 WIB
	Dicky Andika Hartanto	27-11-2023 19:03:24 WIB
	Maradona Sinuraya	27-11-2023 19:03:54 WIB
	Tedy Subrata	27-11-2023 19:04:11 WIB
	Evi Sundari	27-11-2023 19:04:13 WIB
	Robin Riduan	27-11-2023 19:04:24 WIB
0	Richard Pratama Sumanli	27-11-2023 19:04:41 WIB
1	Jumadi	27-11-2023 19:05:01 WIB

IO	NAME	TTD
2	Ni Wayan Suryathi	27-11-2023 19:05:05 WIB
3	Ade Safrudin	27-11-2023 19:05:06 WIB
4	Sahidi	27-11-2023 19:05:10 WIB
5	Marina Mayasari	27-11-2023 19:05:14 WIB
6	Tri Adi Soerjanto	27-11-2023 19:05:37 WIB
7	Panti Silaban	27-11-2023 19:05:47 WIB
8	I Made Sukayasa	27-11-2023 19:05:48 WIB
9	Ihsan Firmansyah	27-11-2023 19:05:49 WIB
0	Budiyanto	27-11-2023 19:05:52 WIB
1	JERI	27-11-2023 19:05:53 WIB
2	I Made Maha Atmaja	27-11-2023 19:05:58 WIB
3	Candra Widya Wardhana	27-11-2023 19:05:59 WIB
4	Safriil Partang	27-11-2023 19:06:10 WIB

IO	NAME	TTD
5	Achmad Mariadi	27-11-2023 19:06:11 WIB
6	Barokah	27-11-2023 19:06:52 WIB
7	Imam Hikmat	27-11-2023 19:07:00 WIB
8	Kholilul Kholik	27-11-2023 19:07:02 WIB
9	Tusyana Priyatin	27-11-2023 19:07:04 WIB
0	Ubat Riadi Pasaribu	27-11-2023 19:07:06 WIB
1	Djeni Marthen	27-11-2023 19:07:06 WIB
2	Mujiati	27-11-2023 19:07:10 WIB
3	Georgian Obertha	27-11-2023 19:07:14 WIB
4	Andi Wijaya KAD	27-11-2023 19:07:22 WIB
5	Nuryanto A. Daim	27-11-2023 19:07:23 WIB
6	Ridwan	27-11-2023 19:07:23 WIB
7	Yohana Fitri	27-11-2023 19:07:28 WIB

ID	NAME	TTD
8	YULSANDI PRAMANA PUTRA	27-11-2023 19:07:29 WIB
9	Rozhi Ananda Sitepu	27-11-2023 19:07:30 WIB
0	Elsa Ugami Suprihatin	27-11-2023 19:07:31 WIB
1	I Ketut Suandika	27-11-2023 19:07:34 WIB
2	Lenarki Latupeirissa	27-11-2023 19:07:37 WIB
3	Sarwono	27-11-2023 19:07:48 WIB
4	Priyono Adi Nugroho	27-11-2023 19:07:49 WIB
5	Hopaldes Pirman Panaili	27-11-2023 19:07:53 WIB
6	Novensius Damai Sejahtera Duha	27-11-2023 19:07:58 WIB
7	Ahmad Qodriansyah	27-11-2023 19:07:58 WIB
8	Ali Yusran Gea	27-11-2023 19:07:59 WIB
9	Muslikul Tohari	27-11-2023 19:08:05 WIB
0	Francois H. Hallatu	27-11-2023 19:08:08 WIB

IO	NAME	TTD
1	Elianta Ginting	27-11-2023 19:08:11 WIB
2	IHYA ULUMUDIN	27-11-2023 19:08:13 WIB
3	F. Puspita Sari	27-11-2023 19:08:20 WIB
4	Pitra Romadoni Nasution	27-11-2023 19:08:21 WIB
5	Michael Himan	27-11-2023 19:08:28 WIB
6	Celvin Theys	27-11-2023 19:08:30 WIB
7	M. Habibullah Firdaus	27-11-2023 19:08:32 WIB
8	I Wayan Baktiasa	27-11-2023 19:08:39 WIB
9	Yudha Adhi Oetomo	27-11-2023 19:08:48 WIB
0	Yudha Adhi Oetomo	27-11-2023 19:08:48 WIB
1	Januri	27-11-2023 19:09:00 WIB
2	Mijoto Solekan	27-11-2023 19:09:16 WIB
3	Diana Ivory	27-11-2023 19:09:31 WIB

IO	NAME	TTD
4	Grammy Balthazar Christiano	27-11-2023 19:09:53 WIB
5	Sri Sudarti	27-11-2023 19:10:01 WIB
6	Kurnia Zakaria	27-11-2023 19:10:03 WIB
7	Irwansyah Putera	27-11-2023 19:10:23 WIB
8	Kristal Pamungkas	27-11-2023 19:10:29 WIB
9	Jefri Haryono Nainggolan	27-11-2023 19:10:36 WIB
0	Ridwan Darmawan	27-11-2023 19:10:42 WIB
1	Paulus Peringatan Gulo	27-11-2023 19:11:10 WIB
2	Mista	27-11-2023 19:11:11 WIB
3	Dipranto Tobok Pakpahan	27-11-2023 19:11:12 WIB
4	Wahyu Prasetyo	27-11-2023 19:11:55 WIB
5	Gading Satria Nainggolan	27-11-2023 19:12:08 WIB
6	Juliarman Gulo	27-11-2023 19:13:10 WIB

IO	NAME	TTD
7	Deasy Anna Victorina	27-11-2023 19:17:14 WIB
8	I Made Dwikka Surya Pratama	27-11-2023 19:17:15 WIB
9	Agung Fatahillah	27-11-2023 19:17:19 WIB
0	Ceperianus Gea	27-11-2023 19:17:45 WIB
1	Andi Bashar	27-11-2023 19:17:46 WIB
2	Sonny Kusuma	27-11-2023 19:18:19 WIB
3	Robby Yunianto Utama MS	27-11-2023 19:18:26 WIB
4	Ade Salamah	27-11-2023 19:18:35 WIB
5	Yacintha Yessica Desiana	27-11-2023 19:19:20 WIB
6	Nodi Putrado	27-11-2023 19:19:36 WIB
7	Laila Zahra	27-11-2023 19:19:54 WIB
8	Risnandar Kobandaha	27-11-2023 19:20:01 WIB
9	Guruh Agustian	27-11-2023 19:20:10 WIB

IO	NAME	TTD
0	Angelieke Jeanette	27-11-2023 19:20:12 WIB
1	Makki Yuliawan	27-11-2023 19:20:33 WIB
2	Nodi Putrado	27-11-2023 19:20:34 WIB
3	Rahmawati Sukri	27-11-2023 19:20:36 WIB
4	Rahmat Mulyana	27-11-2023 19:20:37 WIB
5	Nodi Putrado	27-11-2023 19:20:43 WIB
6	Dasep Rahman Hakim	27-11-2023 19:20:44 WIB
7	Muhammad Reza Triandi	27-11-2023 19:21:20 WIB
8	Muhammad Reza Triandi	27-11-2023 19:21:20 WIB
9	Yubili Oxford George	27-11-2023 19:21:26 WIB
00	Dicky Patadjenu	27-11-2023 19:21:44 WIB
01	Ruben Fritson	27-11-2023 19:22:09 WIB
02	Sri Widoyanti	27-11-2023 19:22:13 WIB

IO	NAME	TTD
03	Abdul Robin	27-11-2023 19:22:21 WIB
04	Sapto Wibowo Sutanto	27-11-2023 19:22:39 WIB
05	Ridwan Abdullah	27-11-2023 19:22:43 WIB
06	Wiwik Winarsih	27-11-2023 19:22:49 WIB
07	Robby Dareho	27-11-2023 19:22:52 WIB
08	Pipit Suwito	27-11-2023 19:23:36 WIB
09	Husnul Yaqin	27-11-2023 19:23:47 WIB
10	Berto Herora Harahap	27-11-2023 19:23:48 WIB
11	Dadang Herli Saputra	27-11-2023 19:25:05 WIB
12	Moh Hasan Merah	27-11-2023 19:25:34 WIB
13	Martiningsih	27-11-2023 19:26:21 WIB
14	Nodi Putrado	27-11-2023 19:28:03 WIB
15	Anas Pratama	27-11-2023 19:29:22 WIB

IO	NAME	TTD
16	Dadang Rohendi	27-11-2023 19:50:06 WIB
17	Noorita Rusiana Indriati	27-11-2023 19:57:20 WIB
18	Moh Mahdi	27-11-2023 19:57:27 WIB
19	M.O. Saut Hamonangan Turnip	27-11-2023 19:57:40 WIB
20	Arinus Duha	27-11-2023 19:57:51 WIB
21	AGNES JULENDA PANGAU	27-11-2023 19:58:42 WIB
22	Siti Sari Finarsih	27-11-2023 19:59:06 WIB
23	Banua Sanjaya Hasibuan	27-11-2023 19:59:40 WIB
24	Karolus Ewantino	27-11-2023 20:01:34 WIB
25	Agus Sudrajat	27-11-2023 20:03:01 WIB
26	Siti Jubaidah	27-11-2023 20:07:56 WIB
27	Dede Dahlan	27-11-2023 20:12:02 WIB
28	Ngadimin	27-11-2023 21:08:15 WIB

Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Sonny Kusuma	27-11-2023 20:00:25 WIB
	Banua Sanjaya Hasibuan	27-11-2023 20:00:45 WIB
	Ridwan Darmawan	27-11-2023 20:00:59 WIB
	Rahmawati Sukri	27-11-2023 20:01:09 WIB
	Ali Yusran Gea	27-11-2023 20:01:14 WIB
	Budiyanto	27-11-2023 20:01:26 WIB
	Panti Silaban	27-11-2023 20:01:33 WIB
	Mujiati	27-11-2023 20:01:45 WIB
	Karolus Evantino	27-11-2023 20:01:46 WIB
0	I Made Maha Atmaja	27-11-2023 20:01:54 WIB
1	Ade Safrudin	27-11-2023 20:01:56 WIB

IO	NAME	TTD
2	Grammy Balthazar Christiano	27-11-2023 20:01:57 WIB
3	Elsa Ugami Suprihatin	27-11-2023 20:02:06 WIB
4	Rozhi Ananda Sitepu	27-11-2023 20:02:18 WIB
5	F. Puspita Sari	27-11-2023 20:02:29 WIB
6	I Made Sukayasa	27-11-2023 20:02:30 WIB
7	Celvin Theys	27-11-2023 20:02:41 WIB
8	Robin Riduan	27-11-2023 20:03:02 WIB
9	Agus Sudrajat	27-11-2023 20:03:12 WIB
0	Georgian Obertha	27-11-2023 20:03:23 WIB
1	Mista	27-11-2023 20:03:33 WIB
2	Yohana Fitri	27-11-2023 20:03:37 WIB
3	Richard Pratama Sumanli	27-11-2023 20:03:37 WIB
4	IHYA ULUMUDIN	27-11-2023 20:03:41 WIB

IO	NAME	TTD
5	Irwansyah Putera	27-11-2023 20:04:07 WIB
6	Irwansyah Putera	27-11-2023 20:04:08 WIB
7	Ahmad Qodriansyah	27-11-2023 20:04:08 WIB
8	Makki Yuliawan	27-11-2023 20:04:11 WIB
9	Dicky Patadjenu	27-11-2023 20:04:13 WIB
0	Muhammad Reza Triandi	27-11-2023 20:04:37 WIB
1	Imam Hikmat	27-11-2023 20:06:03 WIB
2	I Ketut Suandika	27-11-2023 20:06:31 WIB
3	Siti Jubaidah	27-11-2023 20:08:06 WIB
4	Robby Dareho	27-11-2023 20:09:10 WIB
5	Tri Adi Soerjanto	27-11-2023 20:09:28 WIB
6	Safriil Partang	27-11-2023 20:11:31 WIB
7	Sarwono	27-11-2023 20:12:05 WIB

IO	NAME	TTD
8	Dede Dahlan	27-11-2023 20:12:06 WIB
9	Ridwan	27-11-2023 20:13:20 WIB
0	Yacintha Yessica Desiana	27-11-2023 20:13:47 WIB
1	Jeffry Palijama	27-11-2023 20:14:33 WIB
2	Dadang Herli Saputra	27-11-2023 20:14:55 WIB
3	Pipit Suwito	27-11-2023 20:14:58 WIB
4	Andi Wijaya KAD	27-11-2023 20:15:55 WIB
5	Yubili Oxford George	27-11-2023 20:20:13 WIB
6	Rahmat Mulyana	27-11-2023 20:20:41 WIB
7	Muhammad Ridwan	27-11-2023 20:21:13 WIB
8	Sahidi	27-11-2023 20:23:54 WIB
9	Wahyu Prasetyo	27-11-2023 20:28:53 WIB
0	Juliarman Gulo	27-11-2023 20:29:49 WIB

IO	NAME	TTD
1	I Made Dwikka Surya Pratama	27-11-2023 20:30:29 WIB
2	Mijoto Solekan	27-11-2023 20:32:00 WIB
3	Ruben Fritson	27-11-2023 20:33:44 WIB
4	Sri Sudarti	27-11-2023 20:37:14 WIB
5	Ni Wayan Suryathi	27-11-2023 20:42:59 WIB
6	Marina Mayasari	27-11-2023 20:43:45 WIB
7	I Wayan Baktiasa	27-11-2023 20:43:48 WIB
8	Nelson Nikodemus Simamora	27-11-2023 21:01:57 WIB
9	Yudha Adhi Oetomo	27-11-2023 21:03:12 WIB
0	Pitra Romadoni Nasution	27-11-2023 21:03:36 WIB
1	Novensius Damai Sejahtera Duha	27-11-2023 21:05:45 WIB
2	Noorita Rusiana Indriati	27-11-2023 21:06:40 WIB
3	Abdul Robin	27-11-2023 21:07:00 WIB

IO	NAME	TTD
4	Anas Pratama	27-11-2023 21:07:08 WIB
5	Elianta Ginting	27-11-2023 21:07:42 WIB
6	Angelieke Jeanette	27-11-2023 21:07:43 WIB
7	Francois H. Hallatu	27-11-2023 21:07:44 WIB
8	Kurnia Zakaria	27-11-2023 21:07:58 WIB
9	Husnul Yaqin	27-11-2023 21:07:59 WIB
0	Ngadimin	27-11-2023 21:08:19 WIB
1	JERI	27-11-2023 21:09:24 WIB
2	AGNES JULENDA PANGAU	27-11-2023 21:09:24 WIB
3	Lukman Efendi	27-11-2023 21:10:23 WIB
4	Dicky Andika Hartanto	27-11-2023 21:11:59 WIB
5	Kristal Pamungkas	27-11-2023 21:12:54 WIB
6	Candra Widya Wardhana	27-11-2023 21:15:12 WIB

Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Grammy Balthazar Christiano	28-11-2023 07:31:27 WIB
	Dadang Rohendi	28-11-2023 07:34:53 WIB
	Elsa Ugami Suprihatin	28-11-2023 07:36:55 WIB
	F. Puspita Sari	28-11-2023 07:38:03 WIB
	Tedy Subrata	28-11-2023 07:38:04 WIB
	Rahmat Mulyana	28-11-2023 07:39:57 WIB
	Richard Pratama Sumanli	28-11-2023 07:40:00 WIB
	Diana Ivory	28-11-2023 07:40:20 WIB
	Maradona Sinuraya	28-11-2023 07:40:33 WIB
0	Ridwan Abdullah	28-11-2023 07:40:50 WIB
1	I Made Dwikka Surya Pratama	28-11-2023 07:41:23 WIB

IO	NAME	TTD
2	Robin Riduan	28-11-2023 07:41:40 WIB
3	Kristal Pamungkas	28-11-2023 07:41:54 WIB
4	Ridwan	28-11-2023 07:42:17 WIB
5	Siti Jubaidah	28-11-2023 07:42:24 WIB
6	Budiyanto	28-11-2023 07:42:26 WIB
7	Panti Silaban	28-11-2023 07:42:28 WIB
8	Robby Yuniarto Utama MS	28-11-2023 07:42:30 WIB
9	Rozhi Ananda Sitepu	28-11-2023 07:42:55 WIB
0	I Made Sukayasa	28-11-2023 07:42:58 WIB
1	Ade Safrudin	28-11-2023 07:43:02 WIB
2	I Made Maha Atmaja	28-11-2023 07:43:07 WIB
3	Siti Sari Finarsih	28-11-2023 07:43:26 WIB
4	Nuryanto A. Daim	28-11-2023 07:43:39 WIB

ID	NAME	TTD
5	Evi Sundari	28-11-2023 07:43:47 WIB
6	Andi Wijaya KAD	28-11-2023 07:43:56 WIB
7	Marina Mayasari	28-11-2023 07:43:57 WIB
8	Djeni Marthen	28-11-2023 07:44:05 WIB
9	Celvin Theys	28-11-2023 07:44:28 WIB
0	Priyono Adi Nugroho	28-11-2023 07:44:45 WIB
1	Mista	28-11-2023 07:44:47 WIB
2	Makki Yuliawan	28-11-2023 07:44:53 WIB
3	IHYA ULUMUDIN	28-11-2023 07:44:57 WIB
4	Dicky Andika Hartanto	28-11-2023 07:45:10 WIB
5	Ni Wayan Suryathi	28-11-2023 07:45:11 WIB
6	Ubat Riadi Pasaribu	28-11-2023 07:45:11 WIB
7	Pitra Romadoni Nasution	28-11-2023 07:45:18 WIB

ID	NAME	TTD
8	AGNES JULENDA PANGAU	28-11-2023 07:45:31 WIB
9	I Wayan Baktiasa	28-11-2023 07:45:52 WIB
0	Ahmad Qodriansyah	28-11-2023 07:46:01 WIB
1	Gading Satria Nainggolan	28-11-2023 07:46:15 WIB
2	Moh Hasan Merah	28-11-2023 07:46:18 WIB
3	JERI	28-11-2023 07:46:47 WIB
4	Imam Hikmat	28-11-2023 07:47:03 WIB
5	Husnul Yaqin	28-11-2023 07:47:11 WIB
6	Yacintha Yessica Desiana	28-11-2023 07:47:26 WIB
7	Januri	28-11-2023 07:47:45 WIB
8	Jeffry Palijama	28-11-2023 07:47:47 WIB
9	Robby Dareho	28-11-2023 07:47:50 WIB
0	Yudha Adhi Oetomo	28-11-2023 07:47:59 WIB

IO	NAME	TTD
1	Muslikul Tohari	28-11-2023 07:48:22 WIB
2	Irwansyah Putera	28-11-2023 07:48:33 WIB
3	Hopaldes Pirman Panaili	28-11-2023 07:49:01 WIB
4	Yohana Fitri	28-11-2023 07:49:13 WIB
5	Ali Yusran Gea	28-11-2023 07:49:19 WIB
6	Muhammad Reza Triandi	28-11-2023 07:49:28 WIB
7	Lenarki Latupeirissa	28-11-2023 07:49:57 WIB
8	Achmad Mariadi	28-11-2023 07:50:51 WIB
9	Dicky Patadjenu	28-11-2023 07:51:00 WIB
0	Tri Adi Soerjanto	28-11-2023 07:51:27 WIB
1	Safiril Partang	28-11-2023 07:51:28 WIB
2	Dasep Rahman Hakim	28-11-2023 07:51:45 WIB
3	Rahmawati Sukri	28-11-2023 07:51:47 WIB

IO	NAME	TTD
4	Mujiati	28-11-2023 07:51:55 WIB
5	Abdul Robin	28-11-2023 07:51:57 WIB
6	Francois H. Hallatu	28-11-2023 07:52:08 WIB
7	Elianta Ginting	28-11-2023 07:52:20 WIB
8	Yubili Oxford George	28-11-2023 07:52:29 WIB
9	Nodi Putrado	28-11-2023 07:52:39 WIB
0	Sarwono	28-11-2023 07:52:39 WIB
1	Risnandar Kobandaha	28-11-2023 07:52:44 WIB
2	Barokah	28-11-2023 07:53:13 WIB
3	Dadang Herli Saputra	28-11-2023 07:53:46 WIB
4	Muhammad Ridwan	28-11-2023 07:53:48 WIB
5	Pipit Suwito	28-11-2023 07:54:00 WIB
6	Sahidi	28-11-2023 07:54:10 WIB

IO	NAME	TTD
7	Sri Widoyanti	28-11-2023 07:54:14 WIB
8	Wiwik Winarsih	28-11-2023 07:54:38 WIB
9	Banua Sanjaya Hasibuan	28-11-2023 07:55:10 WIB
0	I Ketut Suandika	28-11-2023 07:55:28 WIB
1	Nelson Nikodemus Simamora	28-11-2023 07:55:40 WIB
2	Jefri Haryono Nainggolan	28-11-2023 07:55:50 WIB
3	George Elkel	28-11-2023 07:55:57 WIB
4	Kurnia Zakaria	28-11-2023 07:56:23 WIB
5	Sri Sudarti	28-11-2023 07:56:39 WIB
6	Angelieke Jeanette	28-11-2023 07:56:41 WIB
7	Agung Fatahillah	28-11-2023 07:57:12 WIB
8	Mijoto Solekan	28-11-2023 07:57:19 WIB
9	Deasy Anna Victorina	28-11-2023 07:58:05 WIB

IO	NAME	TTD
0	Sapto Wibowo Sutanto	28-11-2023 07:58:39 WIB
1	Michael Himan	28-11-2023 07:58:41 WIB
2	Lukman Efendi	28-11-2023 07:58:52 WIB
3	Ruben Fritson	28-11-2023 07:59:24 WIB
4	Dipranto Tobok Pakpahan	28-11-2023 07:59:57 WIB
5	Arinus Duha	28-11-2023 08:00:23 WIB
6	Laila Zahra	28-11-2023 08:00:30 WIB
7	Anas Pratama	28-11-2023 08:02:11 WIB
8	Candra Widya Wardhana	28-11-2023 08:02:32 WIB
9	M. Habibullah Firdaus	28-11-2023 08:03:13 WIB
00	Moh Mahdi	28-11-2023 08:04:18 WIB
01	Ridwan Darmawan	28-11-2023 08:04:19 WIB
02	Wahyu Prasetyo	28-11-2023 08:06:24 WIB

IO	NAME	TTD
03	Kholilul Kholik	28-11-2023 08:06:49 WIB
04	Syamsul Jahidin	28-11-2023 08:08:15 WIB
05	Paulus Peringatan Gulo	28-11-2023 08:08:17 WIB
06	Juliarman Gulo	28-11-2023 08:08:51 WIB
07	Ade Salamah	28-11-2023 08:10:09 WIB
08	Ceperianus Gea	28-11-2023 08:15:56 WIB
09	Berto Herora Harahap	28-11-2023 08:16:27 WIB
10	Guruh Agustian	28-11-2023 08:17:04 WIB
11	Alzam Afika	28-11-2023 08:18:55 WIB
12	YULSANDI PRAMANA PUTRA	28-11-2023 08:19:11 WIB
13	H. Herwan Budiah	28-11-2023 08:20:17 WIB
14	Dede Dahlan	28-11-2023 08:23:18 WIB
15	Raden Giri	28-11-2023 08:27:48 WIB

Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Moh Hasan Merah	28-11-2023 10:01:32 WIB
	Muhammad Ridwan	28-11-2023 10:01:40 WIB
	Dede Dahlan	28-11-2023 10:01:43 WIB
	Ridwan	28-11-2023 10:02:08 WIB
	Jefri Haryono Nainggolan	28-11-2023 10:02:16 WIB
	Guruh Agustian	28-11-2023 10:02:23 WIB
	H. Herwan Budiah	28-11-2023 10:03:02 WIB
	Jeffry Palijama	28-11-2023 10:03:13 WIB
	H. Herwan Budiah	28-11-2023 10:03:25 WIB
0	Tedy Subrata	28-11-2023 10:03:30 WIB

IO	NAME	TTD
1	Mujiati	28-11-2023 10:04:10 WIB
2	Maradona Sinuraya	28-11-2023 10:04:14 WIB
3	Gading Satria Nainggolan	28-11-2023 10:05:52 WIB
4	Panti Silaban	28-11-2023 10:07:44 WIB
5	I Made Maha Atmaja	28-11-2023 10:08:08 WIB
6	Rahmat Mulyana	28-11-2023 10:08:21 WIB
7	Abdul Robin	28-11-2023 10:08:36 WIB
8	Marina Mayasari	28-11-2023 10:08:42 WIB
9	Januri	28-11-2023 10:08:51 WIB
0	Grammy Balthazar Christiano	28-11-2023 10:08:55 WIB
1	Kurnia Zakaria	28-11-2023 10:08:55 WIB
2	AGNES JULENDA PANGAU	28-11-2023 10:09:22 WIB
3	Yubili Oxford George	28-11-2023 10:09:28 WIB

IO	NAME	TTD
4	Kristal Pamungkas	28-11-2023 10:09:29 WIB
5	Budiyanto	28-11-2023 10:09:46 WIB
6	Dicky Patadjenu	28-11-2023 10:09:46 WIB
7	Michael Himan	28-11-2023 10:09:50 WIB
8	F. Puspita Sari	28-11-2023 10:09:57 WIB
9	Imam Hikmat	28-11-2023 10:09:59 WIB
0	Tri Adi Soerjanto	28-11-2023 10:10:05 WIB
1	Nelson Nikodemus Simamora	28-11-2023 10:10:12 WIB
2	Ni Wayan Suryathi	28-11-2023 10:10:13 WIB
3	Rozhi Ananda Sitepu	28-11-2023 10:10:19 WIB
4	Robin Riduan	28-11-2023 10:10:24 WIB
5	Lukman Efendi	28-11-2023 10:10:28 WIB
6	Lukman Efendi	28-11-2023 10:10:29 WIB

IO	NAME	TTD
7	I Made Sukayasa	28-11-2023 10:10:47 WIB
8	Makki Yuliawan	28-11-2023 10:10:48 WIB
9	Evi Sundari	28-11-2023 10:11:19 WIB
0	Sahidi	28-11-2023 10:11:20 WIB
1	Elianta Ginting	28-11-2023 10:11:44 WIB
2	Elianta Ginting	28-11-2023 10:11:44 WIB
3	Robby Yunianto Utama MS	28-11-2023 10:11:51 WIB
4	Hopaldes Pirman Panaili	28-11-2023 10:11:53 WIB
5	Agung Fatahillah	28-11-2023 10:11:55 WIB
6	Diana Ivory	28-11-2023 10:11:57 WIB
7	Yacintha Yessica Desiana	28-11-2023 10:11:58 WIB
8	Barokah	28-11-2023 10:12:02 WIB
9	Yudha Adhi Oetomo	28-11-2023 10:12:11 WIB

IO	NAME	TTD
0	IHYA ULUMUDIN	28-11-2023 10:12:15 WIB
1	Angelieke Jeanette	28-11-2023 10:12:19 WIB
2	Jumadi	28-11-2023 10:12:24 WIB
3	Dicky Andika Hartanto	28-11-2023 10:12:32 WIB
4	Celvin Theys	28-11-2023 10:12:44 WIB
5	Deasy Anna Victorina	28-11-2023 10:13:00 WIB
6	Ridwan Darmawan	28-11-2023 10:13:08 WIB
7	Ridwan Abdullah	28-11-2023 10:13:09 WIB
8	M. Habibullah Firdaus	28-11-2023 10:13:11 WIB
9	Lenarki Latupeirissa	28-11-2023 10:13:14 WIB
0	I Wayan Baktiasa	28-11-2023 10:13:24 WIB
1	Ali Yusran Gea	28-11-2023 10:13:50 WIB
2	Muslikul Tohari	28-11-2023 10:14:02 WIB

IO	NAME	TTD
3	I Ketut Suandika	28-11-2023 10:14:05 WIB
4	Elsa Ugami Suprihatin	28-11-2023 10:14:13 WIB
5	Rahmawati Sukri	28-11-2023 10:14:25 WIB
6	Djeni Marthen	28-11-2023 10:14:31 WIB
7	Siti Jubaidah	28-11-2023 10:14:31 WIB
8	M.O. Saut Hamonangan Turnip	28-11-2023 10:15:11 WIB
9	Siti Sari Finarsih	28-11-2023 10:15:13 WIB
0	Irwansyah Putera	28-11-2023 10:15:45 WIB
1	Wiwik Winarsih	28-11-2023 10:15:54 WIB
2	Diarson Lubis	28-11-2023 10:15:55 WIB
3	Diarson Lubis	28-11-2023 10:15:56 WIB
4	Novensius Damai Sejahtera Duha	28-11-2023 10:16:09 WIB
5	Ani Sukmawati	28-11-2023 10:16:19 WIB

IO	NAME	TTD
6	Banua Sanjaya Hasibuan	28-11-2023 10:16:25 WIB
7	JERI	28-11-2023 10:16:28 WIB
8	Pitra Romadoni Nasution	28-11-2023 10:16:39 WIB
9	Sri Widoyanti	28-11-2023 10:16:47 WIB
0	Pipit Suwito	28-11-2023 10:16:47 WIB
1	Dasep Rahman Hakim	28-11-2023 10:16:57 WIB
2	Laila Zahra	28-11-2023 10:17:05 WIB
3	Robby Dareho	28-11-2023 10:17:19 WIB
4	Raden Giri	28-11-2023 10:17:26 WIB
5	I Made Dwikka Surya Pratama	28-11-2023 10:17:33 WIB
6	Dadang Rohendi	28-11-2023 10:17:45 WIB
7	Berto Herora Harahap	28-11-2023 10:18:16 WIB
8	Safiril Partang	28-11-2023 10:18:22 WIB

ID	NAME	TTD
9	Ruben Fritson	28-11-2023 10:18:25 WIB
0	Achmad Mariadi	28-11-2023 10:18:27 WIB
1	Achmad Mariadi	28-11-2023 10:18:27 WIB
2	Risnandar Kobandaha	28-11-2023 10:18:56 WIB
3	Tusyana Priyatin	28-11-2023 10:19:23 WIB
4	YULSANDI PRAMANA PUTRA	28-11-2023 10:19:30 WIB
5	Sapto Wibowo Sutanto	28-11-2023 10:19:34 WIB
6	Ade Safrudin	28-11-2023 10:19:36 WIB
7	Agus Sudrajat	28-11-2023 10:19:43 WIB
8	Candra Widya Wardhana	28-11-2023 10:20:03 WIB
9	Martiningsih	28-11-2023 10:20:35 WIB
00	Juliarman Gulo	28-11-2023 10:21:08 WIB
01	Richard Pratama Sumanli	28-11-2023 10:21:32 WIB

IO	NAME	TTD
02	Francois H. Hallatu	28-11-2023 10:21:54 WIB
03	Muhammad Reza Triandi	28-11-2023 10:21:57 WIB
04	Ubat Riadi Pasaribu	28-11-2023 10:23:08 WIB
05	Paulus Peringatan Gulo	28-11-2023 10:23:20 WIB
06	Paulus Peringatan Gulo	28-11-2023 10:23:20 WIB
07	Dadang Herli Saputra	28-11-2023 10:23:31 WIB
08	Anas Pratama	28-11-2023 10:23:47 WIB
09	Arinus Duha	28-11-2023 10:24:18 WIB
10	Sri Sudarti	28-11-2023 10:27:34 WIB
11	Yohana Fitri	28-11-2023 10:29:04 WIB
12	Mijoto Solekan	28-11-2023 10:31:19 WIB
13	Ahmad Qodriansyah	28-11-2023 10:36:16 WIB
14	Alzam Afika	28-11-2023 10:37:13 WIB

Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Tedy Subrata	28-11-2023 13:00:10 WIB
	Sahidi	28-11-2023 13:00:25 WIB
	Maradona Sinuraya	28-11-2023 13:00:33 WIB
	Guruh Agustian	28-11-2023 13:01:07 WIB
	Michael Himan	28-11-2023 13:01:13 WIB
	Moh Mahdi	28-11-2023 13:01:34 WIB
	I Made Sukayasa	28-11-2023 13:01:44 WIB
	H. Herwan Budiah	28-11-2023 13:02:04 WIB
	Ubat Riadi Pasaribu	28-11-2023 13:02:59 WIB
0	Dicky Andika Hartanto	28-11-2023 13:03:07 WIB

IO	NAME	TTD
1	Pitra Romadoni Nasution	28-11-2023 13:03:08 WIB
2	Nodi Putrado	28-11-2023 13:03:43 WIB
3	Yacintha Yessica Desiana	28-11-2023 13:03:56 WIB
4	Moh Hasan Merah	28-11-2023 13:03:59 WIB
5	Nodi Putrado	28-11-2023 13:04:14 WIB
6	Elsa Ugami Suprihatin	28-11-2023 13:04:17 WIB
7	Nodi Putrado	28-11-2023 13:04:29 WIB
8	Nodi Putrado	28-11-2023 13:04:54 WIB
9	F. Puspita Sari	28-11-2023 13:05:07 WIB
0	Georgian Obertha	28-11-2023 13:05:22 WIB
1	Abdul Robin	28-11-2023 13:06:21 WIB
2	Tri Adi Soerjanto	28-11-2023 13:06:21 WIB
3	Raden Giri	28-11-2023 13:06:41 WIB

IO	NAME	TTD
4	Robby Yunianto Utama MS	28-11-2023 13:06:49 WIB
5	Panti Silaban	28-11-2023 13:06:58 WIB
6	Robin Riduan	28-11-2023 13:07:10 WIB
7	Barokah	28-11-2023 13:07:16 WIB
8	Mista	28-11-2023 13:08:08 WIB
9	Lukman Efendi	28-11-2023 13:08:30 WIB
0	Lenarki Latupeirissa	28-11-2023 13:08:35 WIB
1	Andi Wijaya KAD	28-11-2023 13:08:45 WIB
2	Jeffry Palijama	28-11-2023 13:08:49 WIB
3	Budiyanto	28-11-2023 13:08:49 WIB
4	Djeni Marthen	28-11-2023 13:09:01 WIB
5	Berto Herora Harahap	28-11-2023 13:09:06 WIB
6	I Made Maha Atmaja	28-11-2023 13:09:09 WIB

IO	NAME	TTD
7	Grammy Balthazar Christiano	28-11-2023 13:09:15 WIB
8	Risnandar Kobandaha	28-11-2023 13:09:18 WIB
9	Kristal Pamungkas	28-11-2023 13:09:22 WIB
0	Mijoto Solekan	28-11-2023 13:09:28 WIB
1	Celvin Theys	28-11-2023 13:09:30 WIB
2	Diarson Lubis	28-11-2023 13:09:33 WIB
3	Sri Widoyanti	28-11-2023 13:09:37 WIB
4	Elianta Ginting	28-11-2023 13:09:44 WIB
5	Elianta Ginting	28-11-2023 13:09:44 WIB
6	Rozhi Ananda Sitepu	28-11-2023 13:09:59 WIB
7	Richard Pratama Sumanli	28-11-2023 13:10:01 WIB
8	Sri Sudarti	28-11-2023 13:10:12 WIB
9	YULSANDI PRAMANA PUTRA	28-11-2023 13:10:44 WIB

IO	NAME	TTD
0	Irwansyah Putera	28-11-2023 13:10:51 WIB
1	I Wayan Baktiasa	28-11-2023 13:10:59 WIB
2	Marina Mayasari	28-11-2023 13:11:11 WIB
3	I Ketut Suandika	28-11-2023 13:11:12 WIB
4	Ali Yusran Gea	28-11-2023 13:11:15 WIB
5	Dadang Rohendi	28-11-2023 13:11:25 WIB
6	Paulus Peringatan Gulo	28-11-2023 13:11:38 WIB
7	AGNES JULENDA PANGAU	28-11-2023 13:11:55 WIB
8	Ihsan Firmansyah	28-11-2023 13:12:01 WIB
9	Evi Sundari	28-11-2023 13:12:08 WIB
0	Ridwan	28-11-2023 13:12:11 WIB
1	Yubili Oxford George	28-11-2023 13:12:19 WIB
2	Angelieke Jeanette	28-11-2023 13:12:29 WIB

IO	NAME	TTD
3	Angelieke Jeanette	28-11-2023 13:12:30 WIB
4	Francois H. Hallatu	28-11-2023 13:12:40 WIB
5	Alzam Afika	28-11-2023 13:12:47 WIB
6	Nodi Putrado	28-11-2023 13:12:57 WIB
7	Dadang Herli Saputra	28-11-2023 13:13:00 WIB
8	IHYA ULUMUDIN	28-11-2023 13:13:04 WIB
9	Jefri Haryono Nainggolan	28-11-2023 13:13:09 WIB
0	Diana Ivory	28-11-2023 13:13:24 WIB
1	M. Habibullah Firdaus	28-11-2023 13:13:29 WIB
2	Ridwan Darmawan	28-11-2023 13:13:32 WIB
3	M.O. Saut Hamonangan Turnip	28-11-2023 13:13:44 WIB
4	Sapto Wibowo Sutanto	28-11-2023 13:13:49 WIB
5	Robby Dareho	28-11-2023 13:13:54 WIB

IO	NAME	TTD
6	Tusyana Priyatin	28-11-2023 13:13:57 WIB
7	Yohana Fitri	28-11-2023 13:14:06 WIB
8	Dipranto Tobok Pakpahan	28-11-2023 13:14:08 WIB
9	Muslikul Tohari	28-11-2023 13:14:12 WIB
0	JERI	28-11-2023 13:14:22 WIB
1	Ruben Fritson	28-11-2023 13:14:43 WIB
2	Wiwik Winarsih	28-11-2023 13:14:44 WIB
3	Pipit Suwito	28-11-2023 13:15:06 WIB
4	Ahmad Qodriansyah	28-11-2023 13:15:14 WIB
5	Hopaldes Pirman Panaili	28-11-2023 13:15:15 WIB
6	Ni Wayan Suryathi	28-11-2023 13:15:17 WIB
7	Rahmat Mulyana	28-11-2023 13:15:25 WIB
8	Gading Satria Nainggolan	28-11-2023 13:16:03 WIB

IO	NAME	TTD
9	Jumadi	28-11-2023 13:16:31 WIB
0	Safriil Partang	28-11-2023 13:16:35 WIB
1	Muhammad Reza Triandi	28-11-2023 13:16:42 WIB
2	Sarwono	28-11-2023 13:17:01 WIB
3	Januri	28-11-2023 13:17:21 WIB
4	Ridwan Abdullah	28-11-2023 13:17:21 WIB
5	Muhammad Ridwan	28-11-2023 13:17:37 WIB
6	Siti Jubaidah	28-11-2023 13:18:01 WIB
7	George Elkel	28-11-2023 13:19:30 WIB
8	Agus Sudrajat	28-11-2023 13:19:32 WIB
9	Ade Safrudin	28-11-2023 13:19:55 WIB
00	Husnul Yaqin	28-11-2023 13:20:16 WIB
01	Wahyu Prasetyo	28-11-2023 13:20:37 WIB

IO	NAME	TTD
02	Agung Fatahillah	28-11-2023 13:20:48 WIB
03	Dicky Patadjenu	28-11-2023 13:21:43 WIB
04	Nelson Nikodemus Simamora	28-11-2023 13:23:04 WIB
05	Yudha Adhi Oetomo	28-11-2023 13:23:57 WIB
06	Deasy Anna Victorina	28-11-2023 13:24:13 WIB
07	Candra Widya Wardhana	28-11-2023 13:24:31 WIB
08	Anas Pratama	28-11-2023 13:24:40 WIB
09	Makki Yuliawan	28-11-2023 13:28:26 WIB
10	Rahmawati Sukri	28-11-2023 13:29:06 WIB
11	Siti Sari Finarsih	28-11-2023 13:29:51 WIB
12	Laila Zahra	28-11-2023 13:30:45 WIB
13	Dasep Rahman Hakim	28-11-2023 13:30:47 WIB
14	Ani Sukmawati	28-11-2023 13:31:19 WIB

IO	NAME	TTD
15	Ngadimin	28-11-2023 13:33:26 WIB
16	Banua Sanjaya Hasibuan	28-11-2023 13:34:05 WIB
17	Noorita Rusiana Indriati	28-11-2023 13:37:54 WIB
18	Juliarman Gulo	28-11-2023 13:43:27 WIB
19	Priyono Adi Nugroho	28-11-2023 13:50:08 WIB
20	Kholilul Kholik	28-11-2023 13:52:49 WIB
21	I Made Dwikka Surya Pratama	28-11-2023 13:54:37 WIB
22	Mujiati	28-11-2023 13:54:52 WIB
23	Arinus Duha	28-11-2023 13:58:11 WIB
24	Nuryanto A. Daim	28-11-2023 14:03:20 WIB
25	Andi Bashar	28-11-2023 14:08:39 WIB
26	Kurnia Zakaria	28-11-2023 14:09:34 WIB
27	Imam Hikmat	28-11-2023 14:10:26 WIB

Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Januri	28-11-2023 14:00:51 WIB
	Ridwan Abdullah	28-11-2023 14:01:14 WIB
	Grammy Balthazar Christiano	28-11-2023 14:01:32 WIB
	Nuryanto A. Daim	28-11-2023 14:03:30 WIB
	I Made Maha Atmaja	28-11-2023 14:04:43 WIB
	Elsa Ugami Suprihatin	28-11-2023 14:06:39 WIB
	Ruben Fritson	28-11-2023 14:07:50 WIB
	F. Puspita Sari	28-11-2023 14:07:50 WIB
	Andi Bashar	28-11-2023 14:08:50 WIB
0	Berto Herora Harahap	28-11-2023 14:09:39 WIB

IO	NAME	TTD
1	Kurnia Zakaria	28-11-2023 14:09:44 WIB
2	Djeni Marthen	28-11-2023 14:09:51 WIB
3	Pipit Suwito	28-11-2023 14:09:52 WIB
4	Budiyanto	28-11-2023 14:09:59 WIB
5	Ade Safrudin	28-11-2023 14:10:00 WIB
6	Banua Sanjaya Hasibuan	28-11-2023 14:10:20 WIB
7	Yacintha Yessica Desiana	28-11-2023 14:10:23 WIB
8	Imam Hikmat	28-11-2023 14:10:39 WIB
9	M.O. Saut Hamonangan Turnip	28-11-2023 14:11:32 WIB
0	Lukman Efendi	28-11-2023 14:12:52 WIB
1	Tri Adi Soerjanto	28-11-2023 14:13:49 WIB
2	Hopaldes Pirman Panaili	28-11-2023 14:15:50 WIB
3	Candra Widya Wardhana	28-11-2023 14:16:38 WIB

IO	NAME	TTD
4	Celvin Theys	28-11-2023 14:16:47 WIB
5	Raden Giri	28-11-2023 14:16:47 WIB
6	Richard Pratama Sumanli	28-11-2023 14:16:48 WIB
7	Ali Yusran Gea	28-11-2023 14:16:57 WIB
8	Dadang Herli Saputra	28-11-2023 14:17:02 WIB
9	Paulus Peringatan Gulo	28-11-2023 14:17:03 WIB
0	Robin Riduan	28-11-2023 14:17:14 WIB
1	H. Herwan Budiah	28-11-2023 14:17:14 WIB
2	I Made Sukayasa	28-11-2023 14:17:36 WIB
3	Ahmad Qodriansyah	28-11-2023 14:17:45 WIB
4	Nelson Nikodemus Simamora	28-11-2023 14:17:48 WIB
5	Michael Himan	28-11-2023 14:17:50 WIB
6	Pitra Romadoni Nasution	28-11-2023 14:18:05 WIB

IO	NAME	TTD
7	Rozhi Ananda Sitepu	28-11-2023 14:18:06 WIB
8	Muhammad Ridwan	28-11-2023 14:18:11 WIB
9	I Ketut Suandika	28-11-2023 14:18:16 WIB
0	I Made Dwikka Surya Pratama	28-11-2023 14:18:27 WIB
1	Sahidi	28-11-2023 14:18:35 WIB
2	Yudha Adhi Oetomo	28-11-2023 14:18:41 WIB
3	Dicky Andika Hartanto	28-11-2023 14:19:00 WIB
4	Arinus Duha	28-11-2023 14:19:02 WIB
5	Gading Satria Nainggolan	28-11-2023 14:19:08 WIB
6	Marina Mayasari	28-11-2023 14:19:27 WIB
7	Panti Silaban	28-11-2023 14:19:36 WIB
8	Muslikul Tohari	28-11-2023 14:19:39 WIB
9	Barokah	28-11-2023 14:19:42 WIB

IO	NAME	TTD
0	Achmad Mariadi	28-11-2023 14:19:55 WIB
1	Novensius Damai Sejahtera Duha	28-11-2023 14:19:57 WIB
2	M. Habibullah Firdaus	28-11-2023 14:19:58 WIB
3	Jeffry Palijama	28-11-2023 14:20:12 WIB
4	Siti Jubaidah	28-11-2023 14:20:14 WIB
5	Ubat Riadi Pasaribu	28-11-2023 14:20:20 WIB
6	Evi Sundari	28-11-2023 14:20:39 WIB
7	Yohana Fitri	28-11-2023 14:20:51 WIB
8	Husnul Yaqin	28-11-2023 14:21:22 WIB
9	Safril Partang	28-11-2023 14:21:25 WIB
0	Sonny Kusuma	28-11-2023 14:21:28 WIB
1	Kholilul Kholik	28-11-2023 14:21:30 WIB
2	Abdul Robin	28-11-2023 14:21:31 WIB

IO	NAME	TTD
3	Wiwik Winarsih	28-11-2023 14:21:39 WIB
4	Sri Widoyanti	28-11-2023 14:21:39 WIB
5	Risnandar Kobandaha	28-11-2023 14:21:41 WIB
6	Agus Sudrajat	28-11-2023 14:21:48 WIB
7	I Wayan Baktiasa	28-11-2023 14:21:49 WIB
8	Anas Pratama	28-11-2023 14:21:49 WIB
9	Anas Pratama	28-11-2023 14:21:49 WIB
0	Ceperianus Gea	28-11-2023 14:22:04 WIB
1	Mujiati	28-11-2023 14:22:07 WIB
2	Ridwan	28-11-2023 14:22:14 WIB
3	Yubili Oxford George	28-11-2023 14:22:22 WIB
4	Dadang Rohendi	28-11-2023 14:22:22 WIB
5	Irwansyah Putera	28-11-2023 14:22:47 WIB

IO	NAME	TTD
6	Sarwono	28-11-2023 14:22:59 WIB
7	Deasy Anna Victorina	28-11-2023 14:23:15 WIB
8	IHYA ULUMUDIN	28-11-2023 14:23:52 WIB
9	Mijoto Solekan	28-11-2023 14:24:00 WIB
0	AGNES JULENDA PANGAU	28-11-2023 14:24:05 WIB
1	Sri Sudarti	28-11-2023 14:24:19 WIB
2	Syamsul Jahidin	28-11-2023 14:24:34 WIB
3	Muhammad Reza Triandi	28-11-2023 14:24:52 WIB
4	George Elkel	28-11-2023 14:25:01 WIB
5	Diarson Lubis	28-11-2023 14:25:41 WIB
6	Lenarki Latupeirissa	28-11-2023 14:26:00 WIB
7	Makki Yuliawan	28-11-2023 14:27:55 WIB
8	Makki Yuliawan	28-11-2023 14:27:55 WIB

IO	NAME	TTD
9	Elianta Ginting	28-11-2023 14:28:13 WIB
0	Rahmat Mulyana	28-11-2023 14:31:12 WIB
1	Dasep Rahman Hakim	28-11-2023 14:31:24 WIB
2	Agung Fatahillah	28-11-2023 14:31:38 WIB
3	Ni Wayan Suryathi	28-11-2023 14:32:19 WIB
4	Dicky Patadjenu	28-11-2023 14:32:51 WIB
5	Wahyu Prasetyo	28-11-2023 14:42:10 WIB
6	Ihsan Firmansyah	28-11-2023 14:48:04 WIB
7	Karolus Ewantino	28-11-2023 15:03:28 WIB
8	YULSANDI PRAMANA PUTRA	28-11-2023 15:06:20 WIB
9	Alzam Afika	28-11-2023 15:22:47 WIB
00	Robby Dareho	28-11-2023 15:34:42 WIB
01	Noorita Rusiana Indriati	28-11-2023 15:48:35 WIB

Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Panti Silaban	29-11-2023 07:30:38 WIB
	Grammy Balthazar Christiano	29-11-2023 07:33:11 WIB
	Priyono Adi Nugroho	29-11-2023 07:33:52 WIB
	Paulus Peringatan Gulo	29-11-2023 07:34:07 WIB
	Dadang Rohendi	29-11-2023 07:34:57 WIB
	IHYA ULUMUDIN	29-11-2023 07:35:13 WIB
	Diana Ivory	29-11-2023 07:35:38 WIB
	Moh Hasan Merah	29-11-2023 07:37:31 WIB
	Rozhi Ananda Sitepu	29-11-2023 07:38:03 WIB
0	Risnandar Kobandaha	29-11-2023 07:38:19 WIB
1	Pitra Romadoni Nasution	29-11-2023 07:38:26 WIB

IO	NAME	TTD
2	Raden Giri	29-11-2023 07:39:33 WIB
3	Ridwan	29-11-2023 07:39:44 WIB
4	Sri Widoyanti	29-11-2023 07:39:53 WIB
5	Abdul Robin	29-11-2023 07:40:33 WIB
6	Georgian Obertha	29-11-2023 07:40:42 WIB
7	Husnul Yaqin	29-11-2023 07:41:27 WIB
8	Rahmat Mulyana	29-11-2023 07:41:56 WIB
9	Ceperianus Gea	29-11-2023 07:42:40 WIB
0	Nuryanto A. Daim	29-11-2023 07:42:58 WIB
1	Marina Mayasari	29-11-2023 07:43:15 WIB
2	Hopaldes Pirman Panaili	29-11-2023 07:43:37 WIB
3	Elsa Ugami Suprihatin	29-11-2023 07:44:11 WIB
4	Budiyanto	29-11-2023 07:44:43 WIB

IO	NAME	TTD
5	Maradona Sinuraya	29-11-2023 07:45:23 WIB
6	Tedy Subrata	29-11-2023 07:45:25 WIB
7	Ihsan Firmansyah	29-11-2023 07:45:40 WIB
8	JERI	29-11-2023 07:45:47 WIB
9	Imam Hikmat	29-11-2023 07:46:10 WIB
0	Tusyana Priyatin	29-11-2023 07:46:50 WIB
1	Evi Sundari	29-11-2023 07:46:51 WIB
2	Yubili Oxford George	29-11-2023 07:46:55 WIB
3	Yacintha Yessica Desiana	29-11-2023 07:46:56 WIB
4	Ni Wayan Suryathi	29-11-2023 07:46:57 WIB
5	Muhammad Reza Triandi	29-11-2023 07:47:06 WIB
6	I Made Maha Atmaja	29-11-2023 07:48:34 WIB
7	Ubat Riadi Pasaribu	29-11-2023 07:49:22 WIB

IO	NAME	TTD
8	Elianta Ginting	29-11-2023 07:49:35 WIB
9	Ahmad Qodriansyah	29-11-2023 07:49:38 WIB
0	Sapto Wibowo Sutanto	29-11-2023 07:49:57 WIB
1	Jeffry Palijama	29-11-2023 07:50:02 WIB
2	I Made Sukayasa	29-11-2023 07:50:19 WIB
3	Ade Safrudin	29-11-2023 07:50:38 WIB
4	Muslikul Tohari	29-11-2023 07:50:49 WIB
5	Makki Yuliawan	29-11-2023 07:51:00 WIB
6	Lukman Efendi	29-11-2023 07:51:32 WIB
7	Dadang Herli Saputra	29-11-2023 07:51:39 WIB
8	Robin Riduan	29-11-2023 07:51:52 WIB
9	Kristal Pamungkas	29-11-2023 07:51:55 WIB
0	Sahidi	29-11-2023 07:51:56 WIB

IO	NAME	TTD
1	Sarwono	29-11-2023 07:51:59 WIB
2	George Elkel	29-11-2023 07:52:01 WIB
3	Angelieke Jeanette	29-11-2023 07:52:03 WIB
4	Angelieke Jeanette	29-11-2023 07:52:04 WIB
5	M.O. Saut Hamonangan Turnip	29-11-2023 07:52:35 WIB
6	Jumadi	29-11-2023 07:52:38 WIB
7	Achmad Mariadi	29-11-2023 07:52:38 WIB
8	Wiwik Winarsih	29-11-2023 07:52:39 WIB
9	Mijoto Solekan	29-11-2023 07:52:39 WIB
0	Muhammad Ridwan	29-11-2023 07:53:10 WIB
1	Mujiati	29-11-2023 07:53:22 WIB
2	I Made Dwikka Surya Pratama	29-11-2023 07:53:46 WIB
3	I Ketut Suandika	29-11-2023 07:53:48 WIB

IO	NAME	TTD
4	Moh Mahdi	29-11-2023 07:53:52 WIB
5	Mujiati	29-11-2023 07:53:54 WIB
6	Mujiati	29-11-2023 07:53:54 WIB
7	H. Herwan Budiah	29-11-2023 07:54:01 WIB
8	Noorita Rusiana Indriati	29-11-2023 07:54:08 WIB
9	Safiril Partang	29-11-2023 07:54:12 WIB
0	Yohana Fitri	29-11-2023 07:54:13 WIB
1	Celvin Theys	29-11-2023 07:54:19 WIB
2	I Wayan Baktiasa	29-11-2023 07:54:54 WIB
3	Dasep Rahman Hakim	29-11-2023 07:55:13 WIB
4	F. Puspita Sari	29-11-2023 07:55:16 WIB
5	Dipranto Tobok Pakpahan	29-11-2023 07:55:55 WIB
6	Francois H. Hallatu	29-11-2023 07:56:44 WIB

IO	NAME	TTD
7	Pipit Suwito	29-11-2023 07:56:51 WIB
8	Tri Adi Soerjanto	29-11-2023 07:56:58 WIB
9	Guruh Agustian	29-11-2023 07:57:32 WIB
0	Siti Jubaidah	29-11-2023 07:57:36 WIB
1	Robby Dareho	29-11-2023 07:57:38 WIB
2	Jefri Haryono Nainggolan	29-11-2023 07:58:21 WIB
3	Wahyu Prasetyo	29-11-2023 07:58:34 WIB
4	Dede Dahlan	29-11-2023 07:58:39 WIB
5	Novensius Damai Sejahtera Duha	29-11-2023 07:58:43 WIB
6	Dicky Andika Hartanto	29-11-2023 07:59:31 WIB
7	Arinus Duha	29-11-2023 07:59:43 WIB
8	AGNES JULENDA PANGAU	29-11-2023 07:59:45 WIB
9	Nodi Putrado	29-11-2023 07:59:48 WIB

IO	NAME	TTD
0	Kholilul Kholik	29-11-2023 07:59:49 WIB
1	Ruben Fritson	29-11-2023 07:59:56 WIB
2	Ruben Fritson	29-11-2023 07:59:56 WIB
3	Ruben Fritson	29-11-2023 07:59:56 WIB
4	Januri	29-11-2023 08:00:05 WIB
5	Berto Herora Harahap	29-11-2023 08:00:30 WIB
6	Siti Sari Finarsih	29-11-2023 08:01:00 WIB
7	YULSANDI PRAMANA PUTRA	29-11-2023 08:01:21 WIB
8	Irwansyah Putera	29-11-2023 08:01:29 WIB
9	Sri Sudarti	29-11-2023 08:01:38 WIB
00	Robby Yunianto Utama MS	29-11-2023 08:02:17 WIB
01	Candra Widya Wardhana	29-11-2023 08:02:23 WIB
02	Ridwan Abdullah	29-11-2023 08:02:32 WIB

IO	NAME	TTD
03	Deasy Anna Victorina	29-11-2023 08:02:32 WIB
04	Barokah	29-11-2023 08:02:37 WIB
05	Lenarki Latupeirissa	29-11-2023 08:03:05 WIB
06	Laila Zahra	29-11-2023 08:03:10 WIB
07	Juliarman Gulo	29-11-2023 08:04:35 WIB
08	Syamsul Jahidin	29-11-2023 08:04:43 WIB
09	M. Habibullah Firdaus	29-11-2023 08:04:44 WIB
10	Ali Yusran Gea	29-11-2023 08:05:18 WIB
11	Kurnia Zakaria	29-11-2023 08:05:34 WIB
12	Yudha Adhi Oetomo	29-11-2023 08:05:49 WIB
13	Agus Sudrajat	29-11-2023 08:08:07 WIB
14	Agung Fatahillah	29-11-2023 08:08:13 WIB
15	Anas Pratama	29-11-2023 08:11:35 WIB

IO	NAME	TTD
16	Dicky Patadjenu	29-11-2023 08:12:01 WIB
17	Richard Pratama Sumanli	29-11-2023 08:12:15 WIB
18	Nelson Nikodemus Simamora	29-11-2023 08:14:15 WIB
19	Ade Salamah	29-11-2023 08:15:48 WIB
20	Ngadimin	29-11-2023 08:17:06 WIB
21	Gading Satria Nainggolan	29-11-2023 08:17:36 WIB
22	Sonny Kusuma	29-11-2023 08:17:47 WIB
23	Banua Sanjaya Hasibuan	29-11-2023 08:18:51 WIB
24	Michael Himan	29-11-2023 08:23:36 WIB
25	Djeni Marthen	29-11-2023 08:24:19 WIB
26	Rahmawati Sukri	29-11-2023 08:25:55 WIB
27	Diarson Lubis	29-11-2023 08:34:14 WIB
28	Ridwan Darmawan	29-11-2023 08:44:01 WIB

Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Ridwan	29-11-2023 10:02:12 WIB
	Januri	29-11-2023 10:02:16 WIB
	Sri Widoyanti	29-11-2023 10:03:28 WIB
	Panti Silaban	29-11-2023 10:04:31 WIB
	Georgian Obertha	29-11-2023 10:04:55 WIB
	Sonny Kusuma	29-11-2023 10:05:34 WIB
	Yohana Fitri	29-11-2023 10:05:37 WIB
	Martiningsih	29-11-2023 10:05:51 WIB
	Elianta Ginting	29-11-2023 10:06:08 WIB
0	Yacintha Yessica Desiana	29-11-2023 10:06:53 WIB

IO	NAME	TTD
1	Pipit Suwito	29-11-2023 10:07:40 WIB
2	Risnandar Kobandaha	29-11-2023 10:07:46 WIB
3	George Elkel	29-11-2023 10:07:52 WIB
4	Abdul Robin	29-11-2023 10:08:21 WIB
5	Lukman Efendi	29-11-2023 10:08:49 WIB
6	Budiyanto	29-11-2023 10:09:00 WIB
7	Jeffry Palijama	29-11-2023 10:09:29 WIB
8	Yubili Oxford George	29-11-2023 10:09:46 WIB
9	Achmad Mariadi	29-11-2023 10:09:52 WIB
0	Dadang Herli Saputra	29-11-2023 10:09:54 WIB
1	Dicky Andika Hartanto	29-11-2023 10:10:36 WIB
2	I Made Sukayasa	29-11-2023 10:10:49 WIB
3	Ridwan Abdullah	29-11-2023 10:11:05 WIB

IO	NAME	TTD
4	I Made Maha Atmaja	29-11-2023 10:11:38 WIB
5	Celvin Theys	29-11-2023 10:11:47 WIB
6	AGNES JULENDA PANGAU	29-11-2023 10:12:00 WIB
7	Imam Hikmat	29-11-2023 10:12:08 WIB
8	Robby Yunianto Utama MS	29-11-2023 10:12:59 WIB
9	Ni Wayan Suryathi	29-11-2023 10:13:00 WIB
0	Nelson Nikodemus Simamora	29-11-2023 10:13:14 WIB
1	Muhammad Ridwan	29-11-2023 10:13:39 WIB
2	Rahmat Mulyana	29-11-2023 10:13:47 WIB
3	Grammy Balthazar Christiano	29-11-2023 10:13:47 WIB
4	Rahmawati Sukri	29-11-2023 10:13:49 WIB
5	I Ketut Suandika	29-11-2023 10:13:55 WIB
6	Sapto Wibowo Sutanto	29-11-2023 10:14:19 WIB

ID	NAME	TTD
7	Berto Herora Harahap	29-11-2023 10:14:20 WIB
8	Mujiati	29-11-2023 10:14:30 WIB
9	Ade Safrudin	29-11-2023 10:14:35 WIB
0	Djeni Marthen	29-11-2023 10:14:35 WIB
1	Kristal Pamungkas	29-11-2023 10:14:36 WIB
2	Jumadi	29-11-2023 10:14:42 WIB
3	Michael Himan	29-11-2023 10:14:56 WIB
4	Pitra Romadoni Nasution	29-11-2023 10:14:56 WIB
5	Agus Sudrajat	29-11-2023 10:14:59 WIB
6	Sahidi	29-11-2023 10:15:10 WIB
7	Ubat Riadi Pasaribu	29-11-2023 10:15:19 WIB
8	Moh Hasan Merah	29-11-2023 10:15:30 WIB
9	Kurnia Zakaria	29-11-2023 10:15:39 WIB

ID	NAME	TTD
0	Guruh Agustian	29-11-2023 10:16:05 WIB
1	I Made Dwikka Surya Pratama	29-11-2023 10:16:06 WIB
2	Diarson Lubis	29-11-2023 10:16:26 WIB
3	Elsa Ugami Suprihatin	29-11-2023 10:16:32 WIB
4	Muhammad Reza Triandi	29-11-2023 10:16:41 WIB
5	Dadang Rohendi	29-11-2023 10:16:45 WIB
6	Marina Mayasari	29-11-2023 10:16:51 WIB
7	Safri Partang	29-11-2023 10:16:54 WIB
8	I Wayan Baktiasa	29-11-2023 10:16:57 WIB
9	Angelieke Jeanette	29-11-2023 10:17:01 WIB
0	Muslikul Tohari	29-11-2023 10:17:06 WIB
1	M. Habibullah Firdaus	29-11-2023 10:17:14 WIB
2	Ali Yusran Gea	29-11-2023 10:17:18 WIB

IO	NAME	TTD
3	Dicky Patadjenu	29-11-2023 10:17:20 WIB
4	Yudha Adhi Oetomo	29-11-2023 10:17:31 WIB
5	Mijoto Solekan	29-11-2023 10:17:44 WIB
6	IHYA ULUMUDIN	29-11-2023 10:17:57 WIB
7	Anas Pratama	29-11-2023 10:18:00 WIB
8	Nodi Putrado	29-11-2023 10:18:34 WIB
9	Ruben Fritson	29-11-2023 10:18:44 WIB
0	F. Puspita Sari	29-11-2023 10:18:45 WIB
1	Maradona Sinuraya	29-11-2023 10:18:50 WIB
2	Richard Pratama Sumanli	29-11-2023 10:18:55 WIB
3	Jefri Haryono Nainggolan	29-11-2023 10:18:57 WIB
4	Rozhi Ananda Sitepu	29-11-2023 10:19:06 WIB
5	Ahmad Qodriansyah	29-11-2023 10:19:14 WIB

IO	NAME	TTD
6	Paulus Peringatan Gulo	29-11-2023 10:19:27 WIB
7	Barokah	29-11-2023 10:19:43 WIB
8	Ceperianus Gea	29-11-2023 10:19:44 WIB
9	Husnul Yaqin	29-11-2023 10:20:08 WIB
0	Irwansyah Putera	29-11-2023 10:20:09 WIB
1	Irwansyah Putera	29-11-2023 10:20:09 WIB
2	Laila Zahra	29-11-2023 10:20:31 WIB
3	Kholilul Kholik	29-11-2023 10:20:37 WIB
4	H. Herwan Budiah	29-11-2023 10:20:38 WIB
5	Sri Sudarti	29-11-2023 10:20:46 WIB
6	Dede Dahlan	29-11-2023 10:21:14 WIB
7	Wiwik Winarsih	29-11-2023 10:21:23 WIB
8	Gading Satria Nainggolan	29-11-2023 10:21:34 WIB

IO	NAME	TTD
9	Francois H. Hallatu	29-11-2023 10:23:40 WIB
0	Priyono Adi Nugroho	29-11-2023 10:24:10 WIB
1	Candra Widya Wardhana	29-11-2023 10:24:16 WIB
2	Agung Fatahillah	29-11-2023 10:24:18 WIB
3	Nuryanto A. Daim	29-11-2023 10:24:23 WIB
4	Siti Sari Finarsih	29-11-2023 10:24:46 WIB
5	Dasep Rahman Hakim	29-11-2023 10:25:12 WIB
6	Diana Ivory	29-11-2023 10:25:16 WIB
7	Tri Adi Soerjanto	29-11-2023 10:25:18 WIB
8	Ani Sukmawati	29-11-2023 10:25:32 WIB
9	Arinus Duha	29-11-2023 10:25:40 WIB
00	Ihsan Firmansyah	29-11-2023 10:25:56 WIB
01	Banua Sanjaya Hasibuan	29-11-2023 10:29:04 WIB

IO	NAME	TTD
02	Siti Jubaidah	29-11-2023 10:29:41 WIB
03	Ridwan Darmawan	29-11-2023 10:30:03 WIB
04	Robby Dareho	29-11-2023 10:30:08 WIB
05	Juliarman Gulo	29-11-2023 10:31:59 WIB
06	JERI	29-11-2023 10:33:50 WIB
07	Andi Wijaya KAD	29-11-2023 10:34:35 WIB
08	Mista	29-11-2023 10:34:37 WIB
09	Tusyana Priyatin	29-11-2023 10:35:30 WIB
10	Raden Giri	29-11-2023 10:35:52 WIB
11	Novensius Damai Sejahtera Duha	29-11-2023 10:38:58 WIB
12	Syamsul Jahidin	29-11-2023 10:41:15 WIB
13	Makki Yuliawan	29-11-2023 10:47:46 WIB
14	Lenarki Latupeirissa	29-11-2023 10:58:46 WIB

IO	NAME	TTD
15	Robin Riduan	29-11-2023 11:08:53 WIB
16	Karolus Evarianto	29-11-2023 11:14:07 WIB
17	Agus Murianto	29-11-2023 11:26:12 WIB
18	Noorita Rusiana Indriati	29-11-2023 11:31:50 WIB
19	Evi Sundari	29-11-2023 11:36:30 WIB
20	Indranas Gaho	29-11-2023 11:37:58 WIB
21	Samaigi Gaho	29-11-2023 11:40:29 WIB
22	YULSANDI PRAMANA PUTRA	29-11-2023 11:52:40 WIB
23	Hopaldes Pirman Panaili	29-11-2023 11:57:54 WIB
24	M.O. Saut Hamonangan Turnip	29-11-2023 11:58:07 WIB
25	Ngadimin	29-11-2023 12:04:24 WIB
26	Karolus Evarianto	01-12-2023 14:23:41 WIB

BELUM ABSEN

Penutupan Kegiatan

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	JERI	29-11-2023 13:00:14 WIB
	Yacintha Yessica Desiana	29-11-2023 13:00:17 WIB
	Moh Hasan Merah	29-11-2023 13:00:34 WIB
	Elianta Ginting	29-11-2023 13:00:59 WIB
	Grammy Balthazar Christiano	29-11-2023 13:01:27 WIB
	Irwansyah Putera	29-11-2023 13:01:29 WIB
	Irwansyah Putera	29-11-2023 13:01:29 WIB
	Paulus Peringatan Gulo	29-11-2023 13:01:31 WIB
	I Ketut Suandika	29-11-2023 13:01:34 WIB
0	Yudha Adhi Oetomo	29-11-2023 13:01:40 WIB
1	Rahmat Mulyana	29-11-2023 13:01:43 WIB

IO	NAME	TTD
2	Panti Silaban	29-11-2023 13:01:46 WIB
3	Kurnia Zakaria	29-11-2023 13:01:58 WIB
4	Rozhi Ananda Sitepu	29-11-2023 13:02:06 WIB
5	Ubat Riadi Pasaribu	29-11-2023 13:02:17 WIB
6	Francois H. Hallatu	29-11-2023 13:02:19 WIB
7	Kholilul Kholik	29-11-2023 13:02:33 WIB
8	Imam Hikmat	29-11-2023 13:02:38 WIB
9	Diana Ivory	29-11-2023 13:02:58 WIB
0	Syamsul Jahidin	29-11-2023 13:02:58 WIB
1	Elsa Ugami Suprihatin	29-11-2023 13:03:00 WIB
2	Sahidi	29-11-2023 13:03:03 WIB
3	Moh Mahdi	29-11-2023 13:03:08 WIB
4	H. Herwan Budiah	29-11-2023 13:03:21 WIB

IO	NAME	TTD
5	Ridwan	29-11-2023 13:03:22 WIB
6	F. Puspita Sari	29-11-2023 13:04:04 WIB
7	Barokah	29-11-2023 13:04:08 WIB
8	I Made Sukayasa	29-11-2023 13:04:12 WIB
9	I Made Maha Atmaja	29-11-2023 13:04:23 WIB
0	Mijoto Solekan	29-11-2023 13:04:23 WIB
1	Pitra Romadoni Nasution	29-11-2023 13:04:31 WIB
2	Dicky Andika Hartanto	29-11-2023 13:04:34 WIB
3	Jeffry Palijama	29-11-2023 13:04:34 WIB
4	Lenarki Latupeirissa	29-11-2023 13:04:39 WIB
5	Evi Sundari	29-11-2023 13:04:41 WIB
6	Yohana Fitri	29-11-2023 13:04:52 WIB
7	Ani Sukmawati	29-11-2023 13:04:59 WIB

IO	NAME	TTD
8	Guruh Agustian	29-11-2023 13:05:15 WIB
9	Dasep Rahman Hakim	29-11-2023 13:05:19 WIB
0	Berto Herora Harahap	29-11-2023 13:05:29 WIB
1	Agung Fatahillah	29-11-2023 13:05:44 WIB
2	Kristal Pamungkas	29-11-2023 13:06:00 WIB
3	Sapto Wibowo Sutanto	29-11-2023 13:06:23 WIB
4	Maradona Sinuraya	29-11-2023 13:06:34 WIB
5	Michael Himan	29-11-2023 13:06:39 WIB
6	Maradona Sinuraya	29-11-2023 13:06:41 WIB
7	M. Habibullah Firdaus	29-11-2023 13:06:48 WIB
8	Januri	29-11-2023 13:07:12 WIB
9	Risnandar Kobandaha	29-11-2023 13:07:17 WIB
0	Angelieke Jeanette	29-11-2023 13:07:19 WIB

IO	NAME	TTD
1	Lukman Efendi	29-11-2023 13:07:24 WIB
2	Ruben Fritson	29-11-2023 13:07:30 WIB
3	Ade Safrudin	29-11-2023 13:07:34 WIB
4	I Made Dwikka Surya Pratama	29-11-2023 13:07:54 WIB
5	Georgian Obertha	29-11-2023 13:08:03 WIB
6	Dadang Rohendi	29-11-2023 13:08:09 WIB
7	Robby Dareho	29-11-2023 13:08:28 WIB
8	Nodi Putrado	29-11-2023 13:08:29 WIB
9	Deasy Anna Victorina	29-11-2023 13:08:33 WIB
0	Makki Yuliawan	29-11-2023 13:08:37 WIB
1	Muhammad Reza Triandi	29-11-2023 13:08:42 WIB
2	Sri Widoyanti	29-11-2023 13:08:49 WIB
3	Budiyanto	29-11-2023 13:08:52 WIB

IO	NAME	TTD
4	Jumadi	29-11-2023 13:09:22 WIB
5	Juliarman Gulo	29-11-2023 13:09:31 WIB
6	Noorita Rusiana Indriati	29-11-2023 13:09:32 WIB
7	Laila Zahra	29-11-2023 13:09:37 WIB
8	Tedy Subrata	29-11-2023 13:09:40 WIB
9	Robin Riduan	29-11-2023 13:09:42 WIB
0	Tri Adi Soerjanto	29-11-2023 13:10:03 WIB
1	Wiwik Winarsih	29-11-2023 13:10:12 WIB
2	Achmad Mariadi	29-11-2023 13:10:12 WIB
3	Pipit Suwito	29-11-2023 13:10:12 WIB
4	Ridwan Abdullah	29-11-2023 13:10:34 WIB
5	Ali Yusran Gea	29-11-2023 13:10:46 WIB
6	Robby Yunianto Utama MS	29-11-2023 13:10:52 WIB

IO	NAME	TTD
7	Dadang Herli Saputra	29-11-2023 13:10:53 WIB
8	Ni Wayan Suryathi	29-11-2023 13:11:01 WIB
9	Siti Jubaidah	29-11-2023 13:11:10 WIB
0	Marina Mayasari	29-11-2023 13:11:18 WIB
1	Siti Sari Finarsih	29-11-2023 13:11:18 WIB
2	Nelson Nikodemus Simamora	29-11-2023 13:11:26 WIB
3	Safril Partang	29-11-2023 13:11:31 WIB
4	AGNES JULENDA PANGAU	29-11-2023 13:11:48 WIB
5	Yubili Oxford George	29-11-2023 13:11:59 WIB
6	Djeni Marthen	29-11-2023 13:12:18 WIB
7	George Elkel	29-11-2023 13:12:19 WIB
8	Abdul Robin	29-11-2023 13:12:31 WIB
9	Diarson Lubis	29-11-2023 13:12:34 WIB

IO	NAME	TTD
0	Anas Pratama	29-11-2023 13:12:41 WIB
1	Husnul Yaqin	29-11-2023 13:12:55 WIB
2	Nuryanto A. Daim	29-11-2023 13:13:30 WIB
3	Jefri Haryono Nainggolan	29-11-2023 13:13:40 WIB
4	Muhammad Ridwan	29-11-2023 13:14:41 WIB
5	Dicky Patadjenu	29-11-2023 13:15:54 WIB
6	Hopaldes Pirman Panaili	29-11-2023 13:16:25 WIB
7	Raden Giri	29-11-2023 13:16:33 WIB
8	Richard Pratama Sumanli	29-11-2023 13:17:12 WIB
9	Arinus Duha	29-11-2023 13:17:24 WIB
00	Gading Satria Nainggolan	29-11-2023 13:17:57 WIB
01	I Wayan Baktiasa	29-11-2023 13:18:22 WIB
02	Samaigi Gaho	29-11-2023 13:19:45 WIB

IO	NAME	TTD
03	Indranas Gaho	29-11-2023 13:21:58 WIB
04	Candra Widya Wardhana	29-11-2023 13:23:04 WIB
05	Agus Sudrajat	29-11-2023 13:23:14 WIB
06	Sri Sudarti	29-11-2023 13:26:05 WIB
07	Mujiati	29-11-2023 13:26:32 WIB
08	Ridwan Darmawan	29-11-2023 13:30:23 WIB
09	Mista	29-11-2023 13:30:52 WIB
10	Rahmawati Sukri	29-11-2023 13:31:50 WIB
11	Celvin Theys	29-11-2023 13:36:19 WIB
12	Martiningsih	29-11-2023 13:38:28 WIB
13	Dipranto Tobok Pakpahan	29-11-2023 13:38:41 WIB
14	Andi Wijaya KAD	29-11-2023 13:39:08 WIB
15	Banua Sanjaya Hasibuan	29-11-2023 13:40:05 WIB

SOAL DAN TEMPLATE PENYUSUNAN
PERMOHONAN PEMOHON DAPAT
DIUNDUH MELALUI AKUN SIMULTAN
PESERTA DENGAN *LOGIN* DI LAMAN:

pusdik.mkri.id



Username :

Pusdik_MK

password :

pusdikmk9

Username :

GK3_Pusdiklat

password :

pusdikmkri

Ketentuan Tugas Praktek

- Sesi Praktek dimulai pukul 14.00 – 16.00 WIB dan 16.30 – 18.00 WIB
- Peserta Menyusun Permohonan Pemohon berdasarkan Soal yang Ditentukan
- Mengunduh Template Permohonan dimana Peserta Mengerjakan pada Template tersebut
- Tugas Individu
- Pengerjaan dan Pengumpulan Tugas Praktik merupakan salah satu syarat peserta mendapatkan sertifikat



Tugas Praktik dikirim ke e-mail:

tugasbimtek1@gmail.com

Subject e-mail:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Jenis Tugas>

Contoh: 10_Lionel Messi_Permohonan Pemohon

Nama File Ms. Word:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Jenis Tugas>

Contoh: 10_Lionel Messi_Permohonan Pemohon



KETENTUAN KHUSUS : e-SERTIFIKAT



**Batas Waktu
Pengumpulan Tugas
Praktik Pukul 18.00
WIB Hari Selasa,
28 November 2023**

***Apabila melewati
batas waktu, kami
anggap peserta tidak
mengumpulkan**



**Tugas Praktik yg
Dikumpulkan Wajib
Orisinal
(dibuat asli oleh
Masing-Masing
Peserta) serta sesuai
dengan Soal yang
Ditentukan**



**Nilai Tugas Praktik Minimal
adalah 60, Nilai di Bawah 60
Tidak Mendapatkan Sertifikat**

***Peserta yg Tugas Praktiknya
sama (*Copy Paste*), Baik yg
Mencontek maupun yg
Dicontek, Otomatis Nilainya di
Bawah 60**

***Template Tugas Praktik
harus diisi secara lengkap,
dari Identitas sampai ke
Petitum**

Aspek yang Dinilai

- Substansi (60%)
- Sistematika Penulisan (20%)
- Teknis Penulisan: Kerapian & Typo (20%)





FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI ADVOKAT ANGKATAN VI

KELAS 1

Narasumber

: Jefri Porkonanta Tarigan

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	1	Marina Mayasari, S.H.	ABI	80	80	80	80
2	2	Robin Riduan, SH, M.Kn, CLA, CCD, CLMC, CBLC, CTLC, C.Med	ABI	90	90	85	89
3	3	I Wayan Baktiasa, S.H., M.H., CLA, CLI, CMC	ABI	85	85	85	85
4	4	Rahmat Mulyana, S.H.	ABI	80	85	80	83
5	5	Dr. Ni Wayan Suryathi, SE, SH, MM, M.Agb, C.Med, CAPG	ABI	85	85	85	85
6	6	Richard Pratama Sumanli, SH	ABI	85	85	80	84
7	7	Dr. Panti Silaban, S.Kom.,SH.,MH.	ABI	85	90	85	88
8	19	Diana Ivory, S.H.,M.H.,C.Md	PERADAN	70	70	70	70
9	21	Laila Zahra, S.H.	SPI	80	80	80	80
10	24	Ruben Fritson, S.H.	PERHAKHI	85	80	85	82
11	25	Deasy Anna Victorina, S.H.	PERHAKHI	80	80	80	80
12	26	Karolus Evariantino, S.T., C.Md.	PERADAN				0
13	27	Sapto Wibowo Sutanto, SH	PERHAKHI	75	75	75	75
14	28	Evi Sundari, S.H.	SPI	85	90	90	89
15	29	Ubat Riadi Pasaribu, S.H., M.H.	IPHI	80	75	80	77
16	30	Andi Wijaya KAD, S.H.	SPI	60	60	60	60
17	31	Mista, S.H.	SPI	60	60	60	60
18	32	Georgian Obertha, S.H.	PERHAKHI	80	85	80	83
19	33	Irwansyah Putera, S.H.	IPHI	70	60	60	62
20	34	Rozhi Ananda Sitepu, S.H., M.Kn.	PERHAKHI	85	75	80	78
21	35	Dadang Rohendi, S.H., M.H.	PERADAN	85	90	85	88
22	36	Novensius Damai Sejahtera Duha, S.H., C.Md.	PERADAN	70	75	70	73
23	42	Muhammad Ridwan, SH., MM.	IPHI	85	90	90	89
24	43	Jeffrey Palijama, S.H.	PERHAKHI	80	80	80	80
25	45	Ihsan Firmansyah, S.H.		85	80	80	81
26	48	Pitra Romadoni Nasution, S.H., M.H.	PERHAKHI	85	85	85	85
27	49	IHYA ULUMUDIN, S.H.	PERADAN	80	75	85	78
28	52	JERI, S.H.	SPI	70	65	70	67
29	54	Husnul Yaqin, S.H	PERADAN	85	85	80	84
30	97	Gading Satria Nainggolan, S.H., M.H.		80	80	80	80
31	118	Dasep Rahman Hakim, S.H., M.H.	PAI	75	70	75	72
32	119	Barokah, S.H., M.H.	PAI	80	90	75	85
33	120	Moh Hasan Merah, S.H.	PAI	80	80	75	79



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI ADVOKAT ANGKATAN VI

KELAS 2

Narasumber

: I Made Gede Widya Tanaya K.

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	8	Mujiati, S.Pd, SH, MH	ABI	75	70	75	72
2	9	Budiyanto, SH, CCD, CIRP	ABI	80	80	80	80
3	10	I Made Maha Atmaja, S.H., M.H.	ABI	70	70	70	70
4	11	I Made Sukayasa, S.H., M.H.	ABI	70	70	70	70
5	12	F. Puspita Sari, S.H., M.H.	ABI	68	68	68	68
6	13	Celvin Theys, S.H., CIRP., CMLC., CCD.	ABI	77	77	77	77
7	14	Elsa Ugami Suprihatin, S.H., CTA.	ABI	75	80	75	78
8	15	Kristal Pamungkas, SH	ABI	75	70	75	72
9	38	Tedy Subrata, SH., MH.	IPHI	70	70	70	70
10	39	Adv. Agung Fatahillah, S.H.	IPHI	70	70	70	70
11	40	ADV Jumadi, SH.	IPHI	75	70	75	72
12	50	Yudha Adhi Oetomo, SH.,MH.,CLA.	PERHAKHI	70	65	70	67
13	53	Dr. Noorita Rusiana Indriati, S.E., S.H., M.H., M.Kn.	PERHAKHI	70	65	70	67
14	55	Ahmad Qodriansyah, S.H., S.Si.,C.Md.	PERADAN	75	75	75	75
15	58	Adv. Priyono Adi Nugroho, S.Pd., S.H., M.H., M.Pd., CLMC.	PERADAN	70	70	70	70
16	59	Adv Tusyana Priyatin, S.H.	SPI				0
17	61	Juliarman Gulo, S.H	PERADAN	70	70	70	70
18	64	Wahyu Prasetyo, S.H.	PERADAN	70	70	70	70
19	65	Arinus Duha, S.H.,C.Md	PERADAN				0
20	66	YULSANDI PRAMANA PUTRA, S.H., M.Kn.	PERHAKHI				0
21	67	Dr. Ir Yacintha Yessica Desiana, S.H.,M.Th	PERADAN	75	75	75	75
22	68	Pipit Suwito, S.H.,M.H.	SPI	75	75	75	75
23	69	M. Habibullah Firdaus, S.H.		70	70	70	70
24	70	Wiwik Winarsih, S.H., M.Kn.	PERHAKHI	70	75	70	73
25	71	Dr. H. Kurnia Zakaria, S.H.,M.H.	PERHAKHI	75	80	75	78
26	72	Francois H. Hallatu, S.H., M.M.	PERHAKHI	60	60	60	60
27	76	Ridwan Abdullah, S.H	SPI	70	70	70	70
28	78	Siti Sari Finarsih, S.H.	SPI	75	70	75	72
29	80	Robby Yunianto Utama MS, S.H., M.H.	SPI	75	70	75	72
30	98	Jefri Haryono Nainggolan, S.H.		75	70	75	72
31	121	H. Herwan Budiah, S.H., M.H.	PAI	60	60	60	60
32	122	Nodi Putrado, S.H., M.H.	PAI	65	65	65	65
33	123	Ani Sukmawati, S.H.	PAI				0



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI ADVOKAT ANGKATAN VI

KELAS 3

Narasumber

: Luthfi Widagdo Eddyono

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	16	Grammy Balthazar Christiano, S.H., M.H.	ABI	85	82	85	83.2
2	17	Hopaldes Pirman Panaili, S.H., M.H.	ABI	85	82	85	83.2
3	18	Muslikul Tohari, SH	ABI	85	83	85	83.8
4	20	Dicky Andika Hartanto, SH	ABI	85	83	85	83.8
5	22	Achmad Mariadi, S.H.	ABI	85	82	85	83.2
6	23	I Made Dwikka Surya Pratama, S.H.	ABI	85	82	85	83.2
7	37	Maradona Sinuraya, S.H., M.H.	ABI	85	82	85	83.2
8	41	Sahidi, S.E., S.H.	IPHI	85	82	85	83.2
9	56	Muhammad Reza Triandi, S.H.	IPHI	85	82	85	83.2
10	57	Ngadimin, SH., MH.	IPHI	85	80	85	82
11	73	Angelieke Jeanette, S.H., M.H.	PERHAKHI	85	85	85	85
12	74	Elianta Ginting, S.H., M.H.	PERHAKHI	85	83	85	83.8
13	75	Dr. Robby Dareho, S.H., M.Th., C.NSP.	PERHAKHI	85	81	85	82.6
14	77	Moh Mahdi, S.H.	PERHAKHI	85	82	85	83.2
15	79	Banua Sanjaya Hasibuan, SH.MH	PERHAKHI	85	80	85	82
16	81	M.O. Saut Hamonangan Turnip, S.H., C.T.L.C., C.T.T	SPI	85	81	85	82.6
17	82	Drs. Makki Yuliawan, SH MSI	SPI	85	82	85	83.2
18	83	Imam Hikmat, S.H.	SPI	85	79	85	81.4
19	84	Ade Safrudin, S.H., M.H.	SPI	85	83	85	83.8
20	85	Dipranto Tobok Pakpahan, S.H.	SPI	85	81	85	82.6
21	86	Yohana Fitri, S.I.Kom., S.H.	PERADAN	85	82	85	83.2
22	87	Lenarki Latupeirissa, S.H., M.H.	PERHAKHI	85	86	85	85.6
23	88	Samaigi Gaho, C.Md	PERADAN				0
24	89	Adv Indranas Gaho, S.H.,M.Kn.,CLA., CIA.,M.Th.,C.Md.,ASP	PERADAN				0
25	91	Adv. Dicky Patadjenu, S.H.,M.H.,C.Md	PERADAN				0
26	93	Rahmawati Sukri, S.H.	PERADAN	85	84	85	84.4
27	95	Risnandar Kobandaha, S.H.	PERADAN	85	82	85	83.2
28	99	Ade Salamah, SH., MH	PERHAKHI	85	82	85	83.2
29	113	Nelson Nikodemus Simamora		85	85	85	85
30	114	Michael Himan, S.H., M.H.					0
31	124	Guruh Agustian, S.H.	PAI	85	79	85	81.4
32	126	Siti Jubaidah, S.H.	PAI				0
33	127	Dede Dahlan, Sip., S.H., M.H.	PAI				0



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI ADVOKAT ANGGKATAN VI

KELAS 4

Narasumber

: Bisariyadi

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	44	Tri Adi Soerjanto, A.Md., AF., S.H.,C.MSP.	ABI	70	70	70	70
2	46	Candra Widya Wardhana, SH, MH	ABI	70	70	70	70
3	47	I Ketut Suandika, S.H., M.H.	ABI	75	75	70	74
4	51	Lukman Efendi, SH	ABI	75	80	75	78
5	60	Dr. Januri, S.Pd., SH., MH., CPCLE., CPM., CPArb	IPHI	75	80	75	78
6	62	Mijoto Solekan, S.H., S.T., S.E., M.H., M.M.	ABI	75	80	80	79
7	63	Sri Sudarti, S.H., S.E., M.H., M.M.	ABI	70	70	70	70
8	90	Berto Herora Harahap, SH	SPI	65	65	65	65
9	92	Djeni Marthen, S.H., M.H.	SPI	65	65	65	65
10	94	AGNES JULENDA PANGAU, S.H., M.H.	IPHI	75	75	75	75
11	96	Yubili Oxford George, S.E.	PERADAN	70	70	70	70
12	100	Martiningsih, S.H., M.H.	PERHAKHI	75	70	75	72
13	101	H. Sonny Kusuma, S.H., M.H., CP., SP.	PERHAKHI	70	70	70	70
14	102	Ceperianus Gea, S.H	PERADAN	75	70	70	71
15	103	Ridwan Darmawan, S.H., M. H	SPI	75	75	75	75
16	104	Safriil Partang, SH.MH	PERHAKHI	80	80	80	80
17	105	Sarwono, S.E., S.H., M.H.	SPI	70	70	70	70
18	106	Ridwan, SH	PERHAKHI	75	70	70	71
19	107	Paulus Peringatan Gulo, S.H., M.H.	PERADAN	75	75	75	75
20	108	Kholilul Kholik, S.H.,M.H	PERADAN	75	70	70	71
21	109	Sri Widoyanti, S.H.	PERHAKHI	70	70	70	70
22	110	Andi Bashar, SH,MH	PERHAKHI				0
23	111	Dr. Ali Yusran Gea, S.H., M.Kn., M.H.	PERHAKHI	80	80	80	80
24	112	Dr. Dadang Herli Saputra, S.IP.,S.H.,S.S.,M.H.,M.Si.,M.Kn	PERADAN	75	80	80	79
25	115	Anas Pratama, S.H	PERADAN	75	70	70	71
26	116	Dr. Nuryanto A. Daim, S.H., M.H.	ABI	70	70	70	70
27	117	Abdul Robin, S.H.	PERADAN	75	70	70	71
28	125	Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.M.		75	70	75	72
29	128	Alzam Afika, S.H.	PAI				0
30	129	Agus Sudrajat, S.H., M.H.	PAI	75	70	70	71
31	130	Raden Giri, S.H.I.	PAI	75	70	70	71
32	131	George Elkel, S.Sos.,S.H	PERADAN	80	80	80	80
33	132	Diaron Lubis, SH.	SPI	75	75	75	75

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAGI ADVOKAT ANGKATAN VI

NAMA NARASUMBER : Luthfi Widagdo Eddyono

KELAS : 3

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Peserta sangat antusias dengan kegiatan.
2	Banyak pertanyaan tidak hanya terkait dengan penyusunan Keterangan, tetapi terkait dengan hukum acara

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI ADVOKAT ANGGKATAN VI

Sesi II	Dinamika Penanganan Pereselisihan Hasil Pemilihan Umum
Narasumber	Pan Mohammad Faiz, SH., MCL., Ph.D
Moderator	Bangkit Panji

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Jumadi_Banten : Bagaimana cara setelah terjadi putusan yg tidak sesuai dengan putusan sengketa Pemilu sedangkan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap?
2.	Gio_Maluku : larangan pihak pihak tertentu, tentang alat bukti apakah postingan bisa di jadikan alat bukti dlm sengketa di MK?
3.	Irwansyahputra_Sumut : menyangkut masalah 3 panel, tiga panel ini dlm pileg itu kan pihak ini harus hadir kalo diantara pihak ini tidak hadir bisa ga kita mewakili selaku penasehat hukum atau selaku pemohon yg ga bisa hadir pd saat persidangan, mohon pencerahannya?
4.	Faulus_Medan Raya : apakah selain dg C Plano itu seperti video dan foto apakah itu bisa di jadikan alat bukti? : Alasan dari pd penyelenggara kalo sudah masuk ke MK banyak alasan, Apakah ada sangsi hukum dan Administrasi terhadap kelalaian hot tersebut ?
5.	Kisnandar_Sulteng : Apakah bisa ga tim Advokat ini tanpa ada persetujuan atau legitasi dari partai pendukung itu mengajukan permohonan ke MK?

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI ADVOKAT ANGGARAN VI

Sesi III	Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Narasumber	Dr. Wiryanto, SH., M.Hum.
Moderator	Bambang Sukmadi

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Lengar_Perhaki : Tentang adanya Dis missal, apakah sama dismissal proses pd MK dan Dismissal proses pada TUN ?
2.	Ridwan_SPI Jaksel : apa jaminannya nanti di proses sengketa pileg, putusan dismissal tidak berubah di putusan ahir?
3.	Nias : apakah ada kepastian tentang perselisihan pemilu ke depan?
4.	Ridwan_Banten : mohon penjelasannya tentang pihak terkait, pd saat kita mengajukan permohonan itukan sudah menulis posita alasan alasan apa yg kita inginkan, sedangkan yg kita inginkan di petitum blm kita dapatkan keputusan apakah itu bisa dikabulkan permohonannya, yg saya maksudkan adalah bagaimana tentang posita nya itu?
5.	Supratna_PAJ Banten: gimana caranya nanti kalo kita dapet kasus ujung ujungnya tidak bisa terima oleh MK?
6.	Irwan_Sumut : masalah putusan Dismisal, jadi apa usaha kita yg kita bisa di perbuat?
7.	Peringatan Faulus_Sumut : Masalah jona hijau dan Jona Merah, Langkah apa yg sudah dilakukan MK bekerja sama dg KPU dan Bawaslu sehingga jona merah itu bisa menjadi Hijau dan disitu juga bisa memperbaiki demokrasi ini?
8.	Nasution_Perhaki : Terkait dg Putusan MK, eksekutornya itu siapa? Kalo eksekutor di TUN adalah tergugat sendiri? Sudah ada putusan MK dan di Kabulkan dan untuk melakukan pemilihan ulang akan tetapi termohon tidak mau melakukan pemilihan ulang Siapa yg melakukan eksekusi atas putusan tersebut?





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Tata Tertib Peserta


Bimbingan Teknis


Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

 Selalu memakai kartu tanda peserta (**ID Card**) selama berada di lingkungan Pusdik


 **Tepat waktu** dalam mengikuti setiap kegiatan/ sesi materi


 Mengisi **Presensi** pada akun **SIMULTAN**


 Peserta menyiapkan perangkat (HP/*Laptop*) yang terhubung dengan **koneksi internet**

 Tidak mengaktifkan nada dering selama mengikuti pembelajaran dalam aula/kelas

 Tidak merokok dalam kamar

 Tidak menerima tamu dalam kamar, dipersilakan menerima tamu di lobby max pukul 21.00 WIB

 Tidak diperkenankan keluar area pusdik di atas pukul 22.00 WIB

 Jika ada keperluan mendesak harus meninggalkan Pusdik sebelum penutupan, harus mendapatkan izin panitia DPP yang bertugas di Pusdik

 Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip **Positif dan Kolaboratif**



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN SECARA *OFFLINE* DI PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

PRA REGISTRASI

1



Pusdik melaksanakan rapat koordinasi dengan organisasi pihak ketiga secara *online*

2



Pusdik mengirimkan surat pemanggilan peserta (terlampir ketentuan peserta, jadwal kegiatan, dan draft data peserta)

3



Organisasi pihak ke-3 memberikan data peserta kepada Pusdik Pancasila dan Konstitusi

4



Pusdik menginput data peserta di laman e-pusdik

5



Peserta mendapatkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh organisasi pihak ke-3

6



Peserta datang ke kampus Pusdik (wajib membawa surat tugas)

7



- Jika **suhu tubuh normal**, maka peserta akan diarahkan menuju ruang registrasi
- Jika **suhu tubuh tidak normal** (di atas $37,5^{\circ}\text{C}$), maka peserta akan diarahkan beristirahat sejenak di Pos *Security* untuk nanti diperiksa suhu tubuh kembali

Seluruh peserta, narasumber dan pegawai akan diperiksa suhu tubuhnya sebelum memasuki kampus Pusdik Pancasila dan Konstitusi

8



Seluruh peserta wajib menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke dalam area Pusdik Pancasila dan Konstitusi

9



Seluruh tas peserta akan dibersihkan menggunakan desinfektan

REGISTRASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

10



Peserta melakukan registrasi dan diarahkan untuk tertib antri dengan jarak minimal 1-2 meter antar peserta registrasi

11



Peserta di *chek* suhu tubuh sebelum memasuki ruang aula

12



Peserta melakukan absensi melalui akun Simultan masing-masing peserta.

13



Peserta duduk di tempat yang telah ditentukan dengan jarak 1-2 meter antar peserta pendidikan

14



Peserta mengisi soal *Pre Test* di akun SIMULTAN masing-masing

15



Peserta mengikuti rangkaian kegiatan pendidikan (pembukaan dan kegiatan pembelajaran)

16



Narasumber memberikan materi kepada peserta

17



Peserta dapat langsung mengacungkan tangan jika ingin bertanya

18



Moderator mengatur jalannya diskusi

19



Narasumber selesai memberikan materi

20



Peserta mengisi kuesioner evaluasi narasumber, kuesioner evaluasi kegiatan, dan soal *Post Test* di akun SIMULTAN masing-masing

21



Peserta mengikuti acara penutupan

22



Peserta yang memenuhi syarat akan mendapatkan e-sertifikat

23



Uang transport peserta (jika ada) akan dilaksanakan dengan mekanisme transfer

24



Peserta kembali ke daerah tempat asal masing-masing

PASCA PENDIDIKAN

25



Seluruh peralatan dan lingkungan
Pusdik akan dibersihkan dengan
menggunakan disinfektan

LAPORAN KEUANGAN

**Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun
2024 Bagi Advokat Angkatan VI
(077.01.BJ 4246.QDC. 051 A)**

NO	PENERIMA	KETERANGAN	NOMINAL
1	Teguh Birawa Putra dkk	Biaya Perjalanan Dinas Narasumber dan Pendukung	Rp 16,006,023
2	Ratu Entertainment	Biaya Pentas Seni	Rp 2,500,000
4	Koperasi Konstitusi	Biaya Akomodasi	Rp 35,491,140
5	CV Pondora	Paket Pengadaan Konsumsi	Rp 111,036,000
6	Honor Narsum		Rp 8,500,000
8	Rangga Fotocopy	Biaya Penggandaan Bahan	Rp 204,000
TOTAL			Rp 173,737,163



PERKUMPULAN PENASIHAT DAN KONSULTAN HUKUM INDONESIA (PERHAKHI)

BADAN HUKUM KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR AHU-0006790.AH.01.07 TAHUN 2021

Sekretariat: Jl. Latuharhari No. 19 Menteng, Kota Jakarta Pusat, Email: dpp@perhaki.id, Website: www.perhaki.id, Telp: 021-2306134;

SURAT TUGAS

Nomor: 20/Bmtk-MK/Perhaki/XI/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Umum Dan Sekretaris Jendral Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini untuk menjadi peserta pada Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan VI Sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.	Pitra Romadoni Nasution, SH.MH	Sekjend	DPP Perhaki
2.	Georgian Obertha, SH	Wakil Sekjend	DPP Perhaki
3.	Ruben Fritson, SH	Anggota	DPD Perhaki DKI Jakarta
4.	Yudha Adhi Oetomo, SH,MH,CLA	Wakil Sekjend	DPP Perhaki
5.	Rozhi Ananda Sitepu, SH,M.Kn	Anggota	DPD Perhaki DKI Jakarta
6.	A. Jeanette Rugebregt, SH.MH	Wakil Ketua Umum	DPP Perhaki
7.	Wiwik Winarsih, SH.Mkn	Anggota	DPP Perhaki
8.	Fredi Wilianto, SH	Anggota	DPP Perhaki
9.	Ade Salamah, SH.MH	Ketua Bid. Magang	DPP Perhaki
10.	Elianta Ginting, SH.MH	Anggota Bid. PKPA	DPP Perhaki
11.	Dr. Kurnia Zakaria, SH.MH	Sekretaris Bidang Pengembangan Advokat dan Paralegal	DPP Perhaki
12.	Dr. Robby Dareho, SH	Anggota	DPP Perhaki
13.	Andi Bashar, SH.MH	Wakil Ketua Umum	DPP Perhaki
14.	Dani Septian Nugroho, SH	Anggota	DPP Perhaki
15.	Yulsandi Pramana Putra, SH. M.Kn	Anggota	DPP Perhaki
16.	Dr. Ali Yusran Gea, SH.M.Kn.MH.	Ketua DPD Perhaki Sumatera Utara	DPD Perhaki Sumatera Utara
17.	Dr. N. R. Indriati, SE.SH.MKn.MH	Ketua bid. Pengembangan Advokat dan Paralegal	DPP Perhaki
18.	Jeffry Palijama, SH	Ketua Bid. Organisasi	DPP Perhaki
19.	Sri Widoyanti.SH	Anggota.Bid. Magang	DPP Perhaki
20.	Devi Yanti, SH.MH	Anggota	DPP Perhaki
21.	Martiningsih, SH.MH	Sekretaris Bid. Magang	DPP Perhaki
22.	Banua Sanjaya Hasibuan, SH.MH	Wakil Sekjend	DPP Perhaki

23.	Zakaria, SH.MH	Wakil Sekjend	DPP Perhakhi
24.	Safri Partang, SH.MH	Wakil Sekjend	DPP Perhakhi
25.	Ridwan, SH	Sekretaris Bid. PKPA	DPP Perhakhi
26.	Moh. Mahdi, SH	Anggota	DPP Perhakhi
27.	Deasy Anna Victorina, SH	Ketua Bid. PPA Dan Disabilitas	DPP Perhakhi
28.	Sapto Wibowo Sutanto, SH	Panitia	DPP Perhakhi

Hari, Tanggal : Senin s.d Rabu

27 s.d 29 November 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

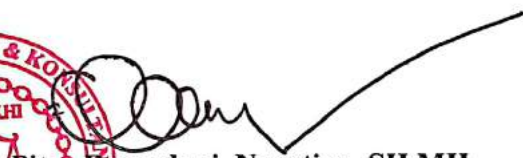
Jl. Raya Puncak KM.83, Cisarua, Bogor

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh Tanggung Jawab

**Hormat Kami,
Dewan Pimpinan Pusat
Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia
(DPP PERHAKHI)**



Prof. Dr. Hj. Elza Syarief, SH. MH
Ketua Umum

Pitra Komadoni Nasution, SH. MH
Sekretaris Jenderal



SURAT TUGAS

Nomor : 005/ST/DPP-ABI/XI/2023-rev

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal ADVOCAT BANGSA INDONESIA menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan VI sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPD/DPC
1.	Dr. Nuryanto A. Daim, SH, MH	Pengawas	DPP ABI
2.	Hopaldes Pirman Panaili, SH, MH	Kepala Departemen Organisasi	DPP ABI
3.	I Wayan Baktiasa, SH, MH,, CLA, CLI, CMC	Ketua	DPD ABI BALI
4.	I Made Maha Atmaja, SH, MH	Anggota	DPD ABI BALI
5.	Marina Mayasari, SH	Anggota	DPD ABI BALI
6.	I Made Sukayasa, SH, MH	Anggota	DPD ABI BALI
7.	I Ketut Suandika, SH, MH	Anggota	DPD ABI BALI
8.	Dr. Ni Wayan Suryathi, SE, SH, MM, M.Agb, C.Med, CAPG	Anggota	DPD ABI BALI
9.	I Made Dwikka Surya Pratama, SH	Anggota	DPD ABI BALI
10.	Mujiati, S.Pd, SH, MH	Sekretaris	DPC ABI Surabaya
11.	Lukman Efendi, SH	Anggota	DPC ABI Surabaya
12.	Candra Widya Wardhana, SH, MH	Anggota	DPC ABI Surabaya
13.	Dicky Andika Hartanto, SH	Anggota	DPC ABI Surabaya
14.	Kristal Pamungkas, SH	Ketua	DPC ABI Sidoarjo
15.	Achmad Mariadi, SH	Anggota	DPC ABI Sidoarjo
16.	Muslikul Tohari, SH	Ketua	DPC ABI Kediri
17.	Robin Riduan, SH, M.Kn, CLA, CCD, CLMC, CBLC, CTLC, C.Med	Ketua	DPD ABI Banten
18.	Budiyanto, SH, CCD, CIRP	Sekretaris	DPD ABI Banten
19.	Celvin Theys, SH, CIRP, CMLC, CCD	Anggota	DPD ABI Banten
20.	Richard Pratama Sumanli, SH	Anggota	DPD ABI Banten
21.	Grammy Balthazar Christiano, SH, MH	Anggota	DPD ABI Banten
22.	Maradona Sinuraya, SH, MH	Anggota	DPC ABI Jakarta Barat

23.	F. Puspita Sari, SH, MH	Sekretaris	DPC ABI Jakarta Selatan
24.	Elsa Ugami Suprihatin, SH, CTA	Anggota	DPD ABI Jawa Barat
25.	Dr. Panti Silaban, S.Kom, SH, MH	Anggota	DPD ABI Jawa Barat
26.	Rahmat Mulyana, SH	Anggota	DPD ABI Jawa Barat
27.	Tri Adi Soerjanto, SH, C.MSP	Anggota	DPD ABI Jawa Tengah
28.	Sri Sudarti, SH, SE, MH, MM	Ketua Umum	DPP ABI
29.	Mijoto, SH, ST, SE, MH, MM	Sekretaris Jenderal	DPP ABI

Hari, Tanggal : Senin s.d. Rabu
27 s.d. 29 November 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Surabaya, 20 November 2023

Hormat kami,

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
ADVOCAT BANGSA INDONESIA**



SRI SUBARTI, SH, SE, MH, MM
Ketua Umum




MIJOTO, SH, ST, SE, MH, MM
Sekretaris Jenderal

DEWAN PIMPINAN PUSAT**SERIKAT
PENGACARA
INDONESIA**Jl. Biak No. 5 C Jakarta Pusat 10150 Indonesia
Telp. : (021) 63861551, 6341368 Fax. : (021) 63861552

Lampiran IV

Nomor : 2378/DK.06.00/11/2023

Tanggal : 15 November 2023

**SURAT TUGAS
Nomor: 03/DPP.SPI/X/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jendral Serikat Pengacara Indonesia menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan VI sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.	Diarson Lubis, SH.	Wakil Ketua DPP SPI	DPP SPI.
2.	Djeni Marten, SH. MH.	Anggota	DPP SPI
3.	Pipit Suwito, SH, MH.	Anggota	DPC SPI Jakarta Utara
4.	Ridwan Darmawan, SH, MH.	Anggota	DPC SPI Jakarta Selatan.
5.	Berto Herora Harahap, SH.	Anggota	DPP SPI.
6.	Novie N. Kolinug, SH.	Ketua	DPC SPI Manado.
7.	Jantje Ruminpunu, SH.	Bendahara	DPC SPI Manado
8.	Edwin Wilar, SH.	Sekretaris	DPC SPI Manado
9.	M.O. Saut Hamonongan Turnip, SH	Anggota	DPC SPI Jakarta Selatan.
10.	Laila Zahra, SH.	Anggota	DPC SPI Jakarta Utara.
11.	Dipranto Tobok Pakpahan, SH	Anggota	DPC SPI Jakarta Utara.
12.	Alfond H.P. Simarmata, SH	Anggota	DPC SPI Jakarta Selatan.
13.	Drs. Makki Yuliawan, SH, MSI	Ketua DPC Kota Bandung	DPC SPI Kota Bandung.
14.	Ade Saifuddin, SH, MH.	Wakil Ketua DPC Bandung	DPC SPI Kota Bandung.
15.	Imam Hikmat, SH.	Wakil Ketua DPC Bandung	DPC SPI Kota Bandung.
16.	Tusyana Priyatin, SH.	Ketua DPC Sukabumi	DPC SPI Kota Sukabumi
17.	Asep Sutisna, SH.	Sekretaris DPC Sukabumi	DPC SPI Kota Sukabumi
18.	Fadil Muhammad Asyifa, SH	Sekretaris 1 DPC Sukabumi	DPC SPI Kota Sukabumi.
19.	Andi Wijaya KAD, SH.	Anggota DPC Bogor	DPC SPI Bogor
20.	Evi Sundari, SH.	Anggota DPC Bogor	DPC SPI Bogor
21.	Mista, SH.	Anggota DPC Bogor	DPC SPI Bogor
22.	Solihin, SH, MH.	Sekretaris DPC Bekasi	DPC SPI Bekasi

23.	Woro Kumolo Diah Ismi, SH.	Wkl Bendahara DPC Bekasi	DPC SPI Bekasi
24.	Rustam Efendi, SH.	Wkl Sekretaris DPC Bekasi	DPC SPI Bekasi
25.	Ridwan Abdullah, SH.	Anggota	DPC SPI Padang.
26.	Robby Yuniarto Utama, SH.	Anggota	DPC SPI Padang.
27.	Siti Sari Finarsih, SH.	Anggota	DPC SPI Padang.

Hari, Tanggal : Senin s.d. Rabu

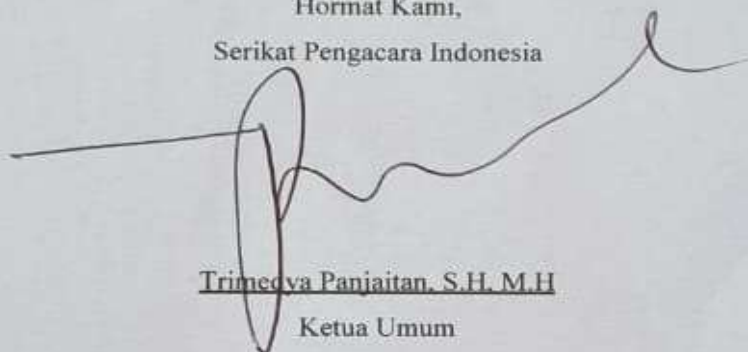
27 – 29 November 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Kontitusi,

Jl. Raya Pucak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat Kami,
Serikat Pengacara Indonesia



Trimedya Panjaitan, S.H. M.H

Ketua Umum



SURAT TUGAS

Nomor: 21.11/ST-BIMTEK/XI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini **Ketua Umum Organisasi Advokat PERADAN** menugaskan **TIM LAWYER KONSTITUSI NASIONAL PERADAN (LKN-PERADAN)** yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan VI sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Asal PIMNAS/KOORWIL/PIM WIL
1	Dadang Rohendi, S.H., M.H	Ketua	Pimpinan Wilayah Pekalongan
2	Priyono Adi Nugroho, S.H.,M.H	Ketua	Pimpinan Wilayah Kota Tangerang
3	Adv. Dicky Patadjenu,S.H.,M.H.,C.Md	Koordinator	Koordinatorat Wilayah Sulawesi Tengah
4	Paulus Peringatan Gulo,S.H.,M.H	Koordinator	Koordinatorat Wilayah Medan Raya
5	Dr. Dadang Herli Saputra,S.IP.,S.H.,S.S.,M.H.,M.Si.,M.Kn	Koordinator	Koordinatorat Wilayah Banten
6	Ihya Ulumudin,S.H	Anggota	Pimpinan Wilayah Pekalongan
7	Wahyu Prasetyo,S.H	Sekretaris	Pimpinan Wilayah Tangerang
8	Ceperianus Gea,S.H	Anggota	Pimpinan Wilayah Kota Medan
9	George Elkel,S.Sos.,S.H	Koordinator	Koordinatorat Wilayah Maluku
10	Noven Sius Damai Sejahtera Duha,S.H.,C.Md	Sekretaris	Pimpinan Wilayah Nias Selatan
11	Rahmawati Sukri,S.H	Ketua	Pimpinan Wilayah Parigi Moutong
12	Risnandar Kobandaha,S.H	Anggota	Pimpinan Wilayah Parigi Moutong
13	Abdul Robin,S.H	Anggota	Pimpinan Wilayah Parigi Moutong
14	Yubili O George	Anggota	Pimpinan Wilayah Parigi Moutong
15	Anas Pratama, S.H	Anggota	Pimpinan Wilayah Parigi Moutong
16	HI. Ekka Pontoh, S.H., M.H., C.Md	Ketua	Pimpinan Wilayah Kab.Buol
17	Kholilul Kholik,S.H.,M.H	Ketua	Pimpinan Wilayah Kota Medan
18	Husnul Yaqin, S.H	Anggota	Pimpinan Wilayah Surabaya
18	Arinus Duha, S.H., C.Md	Sekretaris Dep Non Litigasi	Pimpinan Nasional
20	Samaigi Gaho, C.Md	Kepala Dep Non Litigasi	Pimpinan Nasional
21	Dr. Ir. Yacintha Yessica Desiana,S.H.,M.Th	Fasilitator	PERADAN Semarang
22	Yohana Fitri,S.H	Anggota	PERADAN Semarang

23	Diana Ivory, S.H.,M.H.,C.Md	Anggota	Pimpinan Wilayah Palembang
24	Karolus Ewantino, C.Md	Staff Dep Non Litigasi	Pimpinan Nasional
25	Ahmad Qodriansyah, S.H., S.Si.,C.Md	Anggota	Pimpinan Wilayah DKI Jakarta
26	Juliarman Gulo, S.H	Anggota	Pimpinan Nasional
27	Adv. Indranas Gaho,S.H.,M.Kn.,CLA.,CIA.,M.Th.,C.Md.,ASP	Ketua Umum	Pimpinan Nasional

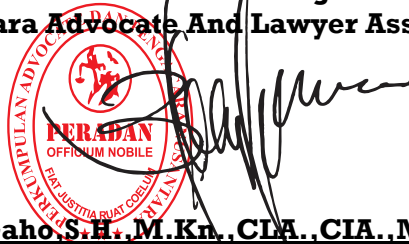
Hari, Tanggal : Senin s.d. Rabu
27 s.d. 29 November 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya
Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

serta menugaskan An. Arinus Duha, S.H., C.Md dan Juliarman Gulo, S.H merangkap sebagai **PANITIA**.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
Pimpinan Nasional
Organisasi Advokat **PERADAN**
(Perkumpulan Advokat Dan Pengacara Nusantara)
(Nusantara Advocate And Lawyer Association)



Adv. Indranas Gaho, S.H., M.Kn., CLA., CIA., M.Th., C.Md., ASP
Ketua Umum



**DEWAN PENGURUS PUSAT
IKATAN PENASIHAT HUKUM INDONESIA
(DPP - IPHI)**

Sekretariat : Rasuna Office Park Lt. I Ruang DO-01, Jl. HR. Rasuna Sald, Kuningan - Jakarta Selatan 12980 Telp. (021) 22983199 e-mail : dpp.iphi@gmail.com

SURAT TUGAS
Nomor: 011/DPP-IPHI/XI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Wakil Sekretaris Jendral Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan VI sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	Asal DPP/DPD/DPC
1.	Ngadimin, SH., MH.	Sekretaris	DPD IPHI Lampung
2.	Agung Fatahillah, S.H	Anggota	DPD IPHI Lampung
3.	Dr. Januri, S.Pd., SH., MH CPCLE., CPM., CPArb	Anggota	DPD IPHI Lampung
4.	Ubat Riadi Pasaribu, SH., MH.	Ketua	DPD IPHI Sumatera Utara
5.	Irwansyah Putera, SH.	Wakil Ketua DPD IPHI Sumatera Utara	DPD IPHI Sumatera Utara
6.	Sahidi, SE., SH	Bendahara	DPD IPHI Sumatera Utara
7.	Teddy Subrata, SH., MH.	Ketua	DPC Kota Tangerang
8.	Jumadi, SH.	Ketua	DPC Kota Serang Banten
9.	Muhammad Ridwan, SH., MM.	Ketua	DPC Kota Cilegon
10.	Andi Mallanti, SH.	Anggota	DPD IPHI Sulawesi Selatan
11.	Yulen Gat Mamongan, SH., MH.	Anggota	DPD IPHI Papua
12.	Muhammad Reza Triandi, SH.	Anggota	DPD IPHI Banten
13.	Ferry, SH., MH	Anggota	DPD IPHI DKI Jakarta
14.	Agnes Julenda Pangau, SH.	Anggota	DPD IPHI Sulawesi Utara
15.	Nivita Christine Rombot	Anggota	DPD IPHI Sulawesi Utara
16.	Zatosan Sancho G Jacob, SH.	Anggota	DPD IPHI Sulawesi Utara

**DEWAN PENGURUS PUSAT
IKATAN PENASIHAT HUKUM INDONESIA
(DPP - IPHI)**

NO	NAMA	JABATAN	Asal DPP/DPD/DPC
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Rabu. 27 s.d. 29 November 2023
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM. 83,
Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
**DEWAN PENGURUS PUSAT
IKATAN PENASIHAT HUKUM INDONESIA**



JHON JENRENG DA, S.H.
Wakil Sekretaris Jendral



**BADAN PIMPINAN PUSAT
PERKUMPULAN ADVOCATEN INDONESIA
(BPP-PAI)**

KEPMEN. KUM & HAM R.I NOMOR: AHU-0004423.AH.01.07 TAHUN 2017

Jl. Rawa Bambu Raya No. 16E, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520.

Mobile: 0812 2243 3337 – 0838 6349 7221

E-mail: junslawfirm.jl@gmail.com Website: www.advokat-pai.or.id

SURAT TUGAS

Nomor : 0023/ST-BPP.PAI/XI/2023

**Hal : Surat Tugas Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis
Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.**

Dengan ini kami selaku Pengurus Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advocaten Indonesia (BPP.PAI) memberikan tugas kepada yang bernama di bawah ini :

Nama : Dr. Sultan Junaidi, S.Sy., M.H., Ph.D.
**Jabatan : Ketua Umum Badan Pimpinan Pusat
Perkumpulan Advocaten Indonesia (PAI)**

Untuk menghadiri dan mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI dari Perkumpulan Advocaten Indonesia, yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d 29 November 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. Maka kami berikan Surat Tugas ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya guna kepentingan yang bersangkutan.

Dikeluarkan di: Jakarta
Pada tanggal: 24 November 2023

**BADAN PIMPINAN PUSAT
PERKUMPULAN ADVOCATEN INDONESIA
(BPP-PAI)**


Dr. SULTAN JUNAIDI, S.Sy., M.H., Ph.D. **TOMMY TRI YUNANTO, S.T., S.H., M.H.**
Ketua Umum **Sekretaris Jenderal**



**BADAN PIMPINAN PUSAT
PERKUMPULAN ADVOCATEN INDONESIA
(BPP-PAI)**

KEPMEN. KUM & HAM R.I NOMOR: AHU-0004423.AH.01.07 TAHUN 2017

Jl. Rawa Bambu Raya No. 16E, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520.

Mobile: 0812 2243 3337 – 0838 6349 7221

E-mail: junslawfirm.jl@gmail.com Website: www.advokat-pai.or.id

SURAT TUGAS

Nomor : 0024/ST-BPP.PAI/XI/2023

**Hal : Surat Tugas Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis
Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.**


Dengan ini kami selaku Pengurus Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advocaten Indonesia (BPP.PAI) memberikan tugas kepada yang bernama di bawah ini :

Nama : H. Herwan Budiah, S.H., M.H.
**Jabatan : Ketua Badan Pimpinan Wilayah Jawa Barat
Perkumpulan Advocaten Indonesia (PAI)**

Untuk menghadiri dan mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI dari Perkumpulan Advocaten Indonesia, yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d 29 November 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. Maka kami berikan Surat Tugas ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya guna kepentingan yang bersangkutan.

Dikeluarkan di: Jakarta
Pada tanggal: 24 November 2023

**BADAN PIMPINAN PUSAT
PERKUMPULAN ADVOCATEN INDONESIA
(BPP-PAI)**


Dr. SULTAN JUNAIDI, S.Sy, M.H., Ph.D **TOMMY TRI YUNANTO, S.T, S.H, M.H**
Ketua Umum **Sekretaris Jenderal**



BADAN PIMPINAN PUSAT
PERKUMPULAN ADVOCATEN INDONESIA
(BPP-PAI)

KEPMEN. KUM & HAM R.I NOMOR: AHU-0004423.AH.01.07 TAHUN 2017

Jl. Rawa Bambu Raya No. 16E, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520.

Mobile: 0812 2243 3337 – 0838 6349 7221

E-mail: junslawfirm.jl@gmail.com Website: www.advokat-pai.or.id

SURAT TUGAS

Nomor : 0025/ST-BPP.PAI/XI/2023

**Hal : Surat Tugas Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis
Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.**

Dengan ini kami selaku Pengurus Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advocaten Indonesia (BPP.PAI) memberikan tugas kepada yang bernama di bawah ini :

Nama : Moh Hasan Merah, S.H.
Jabatan : Sekretaris Badan Pimpinan Wilayah Jawa Barat
Perkumpulan Advocaten Indonesia (PAI)

Untuk menghadiri dan mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI dari Perkumpulan Advocaten Indonesia, yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d 29 November 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. Maka kami berikan Surat Tugas ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya guna kepentingan yang bersangkutan.

Dikeluarkan di: Jakarta
Pada tanggal: 24 November 2023

BADAN PIMPINAN PUSAT
PERKUMPULAN ADVOCATEN INDONESIA
(BPP-PAI)


Dr. SULTAN JUNAIDI, S.Sy, M.H, Ph.D **TOMMY TRI YUNANTO, S.T, S.H, M.H**
Ketua Umum **Sekretaris Jenderal**



**BADAN PIMPINAN PUSAT
PERKUMPULAN ADVOCATEN INDONESIA
(BPP-PAI)**

KEPMEN. KUM & HAM R.I NOMOR: AHU-0004423.AH.01.07 TAHUN 2017

Jl. Rawa Bambu Raya No. 16E, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520.

Mobile: 0812 2243 3337 – 0838 6349 7221

E-mail: junslawfirm.jl@gmail.com Website: www.advokat-pai.or.id

SURAT TUGAS

Nomor : 0026/ST-BPP.PAI/XI/2023

**Hal : Surat Tugas Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis
Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.**

Dengan ini kami selaku Pengurus Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advocaten Indonesia (BPP.PAI) memberikan tugas kepada yang bernama di bawah ini :

Nama : Alzam Afika, S.H.

Jabatan : Anggota Perkumpulan Advocaten Indonesia (PAI)

Untuk menghadiri dan mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI dari Perkumpulan Advocaten Indonesia, yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d 29 November 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. Maka kami berikan Surat Tugas ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya guna kepentingan yang bersangkutan.

Dikeluarkan di: Jakarta
Pada tanggal: 24 November 2023

**BADAN PIMPINAN PUSAT
PERKUMPULAN ADVOCATEN INDONESIA
(BPP-PAI)**


Dr. SULTAN JUNAIDI, S.Sy, M.H, Ph.D ***** **TOMMY TRI YUNANTO, S.T, S.H, M.H**
Ketua Umum Sekretaris Jenderal



**BADAN PIMPINAN PUSAT
PERKUMPULAN ADVOCATEN INDONESIA
(BPP-PAI)**

KEPMEN. KUM & HAM R.I NOMOR: AHU-0004423.AH.01.07 TAHUN 2017

Jl. Rawa Bambu Raya No. 16E, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520.

Mobile: 0812 2243 3337 – 0838 6349 7221

E-mail: junslawfirm.jl@gmail.com Website: www.advokat-pai.or.id

SURAT TUGAS

Nomor : 0027/ST-BPP.PAI/XI/2023

**Hal : Surat Tugas Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis
Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.**

Dengan ini kami selaku Pengurus Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advocaten Indonesia (BPP.PAI) memberikan tugas kepada yang bernama di bawah ini :

Nama : Dasep Rahman Hakim, S.H., M.H.

Jabatan : Anggota Perkumpulan Advocaten Indonesia (PAI)

Untuk menghadiri dan mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI dari Perkumpulan Advocaten Indonesia, yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d 29 November 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. Maka kami berikan Surat Tugas ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya guna kepentingan yang bersangkutan.

Dikeluarkan di: Jakarta
Pada tanggal: 24 November 2023

**BADAN PIMPINAN PUSAT
PERKUMPULAN ADVOCATEN INDONESIA
(BPP-PAI)**


Dr. SULTAN JUNAIDI, S.Sy, M.H, Ph.D *** TOMMY TRI YUNANTO, S.T, S.H, M.H**
Ketua Umum Sekretaris Jenderal



**BADAN PIMPINAN PUSAT
PERKUMPULAN ADVOCATEN INDONESIA
(BPP-PAI)**

KEPMEN. KUM & HAM R.I NOMOR: AHU-0004423.AH.01.07 TAHUN 2017

Jl. Rawa Bambu Raya No. 16E, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520.

Mobile: 0812 2243 3337 – 0838 6349 7221

E-mail: junslawfirm.jl@gmail.com Website: www.advokat-pai.or.id

SURAT TUGAS

Nomor : 0028/ST-BPP.PAI/XI/2023

**Hal : Surat Tugas Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis
Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.**

Dengan ini kami selaku Pengurus Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advocaten Indonesia (BPP.PAI) memberikan tugas kepada yang bernama di bawah ini :

Nama : Dede Dahlan, Sip., S.H., M.H.

Jabatan : Anggota Perkumpulan Advocaten Indonesia (PAI)

Untuk menghadiri dan mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI dari Perkumpulan Advocaten Indonesia, yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d 29 November 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. Maka kami berikan Surat Tugas ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya guna kepentingan yang bersangkutan.

Dikeluarkan di: Jakarta
Pada tanggal: 24 November 2023

**BADAN PIMPINAN PUSAT
PERKUMPULAN ADVOCATEN INDONESIA
(BPP-PAI)**


Dr. SULTAN JUNAIDI, S.Sy, M.H., Ph.D *** TOMMY TRI YUNANTO, S.T, S.H., M.H**
Ketua Umum Sekretaris Jenderal



**BADAN PIMPINAN PUSAT
PERKUMPULAN ADVOCATEN INDONESIA
(BPP-PAI)**

KEPMEN. KUM & HAM R.I NOMOR: AHU-0004423.AH.01.07 TAHUN 2017

Jl. Rawa Bambu Raya No. 16E, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520.

Mobile: 0812 2243 3337 – 0838 6349 7221

E-mail: junslawfirm.jl@gmail.com Website: www.advokat-pai.or.id

SURAT TUGAS

Nomor : 0029/ST-BPP.PAI/XI/2023

**Hal : Surat Tugas Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis
Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.**

Dengan ini kami selaku Pengurus Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advocaten Indonesia (BPP.PAI) memberikan tugas kepada yang bernama di bawah ini :

Nama : Siti Jubaidah, S.H.

Jabatan : Anggota Perkumpulan Advocaten Indonesia (PAI)

Untuk menghadiri dan mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI dari Perkumpulan Advocaten Indonesia, yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d 29 November 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. Maka kami berikan Surat Tugas ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya guna kepentingan yang bersangkutan.

Dikeluarkan di: Jakarta
Pada tanggal: 24 November 2023

**BADAN PIMPINAN PUSAT
PERKUMPULAN ADVOCATEN INDONESIA
(BPP-PAI)**


Dr. SULTAN JUNAIDI, S.Sy, M.H, Ph.D ***** **TOMMY TRI YUNANTO, S.T, S.H, M.H**
Ketua Umum Sekretaris Jenderal



**BADAN PIMPINAN PUSAT
PERKUMPULAN ADVOCATEN INDONESIA
(BPP-PAI)**

KEPMEN. KUM & HAM R.I NOMOR: AHU-0004423.AH.01.07 TAHUN 2017

Jl. Rawa Bambu Raya No. 16E, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520.

Mobile: 0812 2243 3337 – 0838 6349 7221

E-mail: junslawfirm.jl@gmail.com Website: www.advokat-pai.or.id

SURAT TUGAS

Nomor : 0030/ST-BPP.PAI/XI/2023

**Hal : Surat Tugas Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis
Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.**

Dengan ini kami selaku Pengurus Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advocaten Indonesia (BPP.PAI) memberikan tugas kepada yang bernama di bawah ini :

Nama : Raden Giri, S.H.I.
Jabatan : Ketua Badan Pimpinan Cabang Bekasi
Perkumpulan Advocaten Indonesia (PAI)

Untuk menghadiri dan mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI dari Perkumpulan Advocaten Indonesia, yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d 29 November 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. Maka kami berikan Surat Tugas ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya guna kepentingan yang bersangkutan.

Dikeluarkan di: Jakarta
Pada tanggal: 24 November 2023

**BADAN PIMPINAN PUSAT
PERKUMPULAN ADVOCATEN INDONESIA
(BPP-PAI)**


Dr. SULTAN JUNAIDI, S.Sy, M.H., Ph.D *** TOMMY TRI YUNANTO, S.T, S.H, M.H**
Ketua Umum Sekretaris Jenderal



**BADAN PIMPINAN PUSAT
PERKUMPULAN ADVOCATEN INDONESIA
(BPP-PAI)**

KEPMEN. KUM & HAM R.I NOMOR: AHU-0004423.AH.01.07 TAHUN 2017

Jl. Rawa Bambu Raya No. 16E, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520.

Mobile: 0812 2243 3337 – 0838 6349 7221

E-mail: junslawfirm.jl@gmail.com Website: www.advokat-pai.or.id

SURAT TUGAS

Nomor : 0031/ST-BPP.PAI/XI/2023

**Hal : Surat Tugas Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis
Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.**

Dengan ini kami selaku Pengurus Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advocaten Indonesia (BPP.PAI) memberikan tugas kepada yang bernama di bawah ini :

Nama : Guruh Agustian, S.H.

Jabatan : Anggota Perkumpulan Advocaten Indonesia (PAI)

Untuk menghadiri dan mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI dari Perkumpulan Advocaten Indonesia, yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d 29 November 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. Maka kami berikan Surat Tugas ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya guna kepentingan yang bersangkutan.

Dikeluarkan di: Jakarta
Pada tanggal: 24 November 2023

**BADAN PIMPINAN PUSAT
PERKUMPULAN ADVOCATEN INDONESIA
(BPP-PAI)**


Dr. SULTAN JUNAIDI, S.Sy, M.H, Ph.D *** TOMMY TRI YUNANTO, S.T, S.H, M.H**
Ketua Umum Sekretaris Jenderal



**BADAN PIMPINAN PUSAT
PERKUMPULAN ADVOCATEN INDONESIA
(BPP-PAI)**

KEPMEN. KUM & HAM R.I NOMOR: AHU-0004423.AH.01.07 TAHUN 2017

Jl. Rawa Bambu Raya No. 16E, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520.

Mobile: 0812 2243 3337 – 0838 6349 7221

E-mail: junslawfirm.jl@gmail.com Website: www.advokat-pai.or.id

SURAT TUGAS

Nomor : 0032/ST-BPP.PAI/XI/2023

**Hal : Surat Tugas Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis
Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.**

Dengan ini kami selaku Pengurus Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advocaten Indonesia (BPP.PAI) memberikan tugas kepada yang bernama di bawah ini :

Nama : Andri Meirdyan Syarif, S.E., S.H., M.M.

**Jabatan : Sekretaris Badan Pimpinan Wilayah Lampung
Perkumpulan Advocaten Indonesia (PAI)**

Untuk menghadiri dan mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI dari Perkumpulan Advocaten Indonesia, yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d 29 November 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. Maka kami berikan Surat Tugas ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya guna kepentingan yang bersangkutan.

Dikeluarkan di: Jakarta
Pada tanggal: 24 November 2023

**BADAN PIMPINAN PUSAT
PERKUMPULAN ADVOCATEN INDONESIA
(BPP-PAI)**


Dr. SULTAN JUNAIDI, S.Sy, M.H, Ph.D **TOMMY TRI YUNANTO, S.T, S.H, M.H**
Ketua Umum **Sekretaris Jenderal**



**BADAN PIMPINAN PUSAT
PERKUMPULAN ADVOCATEN INDONESIA
(BPP-PAI)**

KEPMEN. KUM & HAM R.I NOMOR: AHU-0004423.AH.01.07 TAHUN 2017

Jl. Rawa Bambu Raya No. 16E, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520.

Mobile: 0812 2243 3337 – 0838 6349 7221

E-mail: junslawfirm.jl@gmail.com Website: www.advokat-pai.or.id

SURAT TUGAS

Nomor : 0033/ST-BPP.PAI/XI/2023

**Hal : Surat Tugas Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis
Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.**

Dengan ini kami selaku Pengurus Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advocaten Indonesia (BPP.PAI) memberikan tugas kepada yang bernama di bawah ini :

Nama : Barokah, S.H., M.H.

Jabatan : Anggota Perkumpulan Advocaten Indonesia (PAI)

Untuk menghadiri dan mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI dari Perkumpulan Advocaten Indonesia, yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d 29 November 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. Maka kami berikan Surat Tugas ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya guna kepentingan yang bersangkutan.

Dikeluarkan di: Jakarta
Pada tanggal: 24 November 2023

**BADAN PIMPINAN PUSAT
PERKUMPULAN ADVOCATEN INDONESIA
(BPP-PAI)**


Dr. SULTAN JUNAIDI, S.Sy, M.H., Ph.D

Ketua Umum


TOMMY TRI YUNANTO, S.T, S.H, M.H

Sekretaris Jenderal



**BADAN PIMPINAN PUSAT
PERKUMPULAN ADVOCATEN INDONESIA
(BPP-PAI)**

KEPMEN. KUM & HAM R.I NOMOR: AHU-0004423.AH.01.07 TAHUN 2017

Jl. Rawa Bambu Raya No. 16E, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520.

Mobile: 0812 2243 3337 – 0838 6349 7221

E-mail: junslawfirm.jl@gmail.com Website: www.advokat-pai.or.id

SURAT TUGAS

Nomor : 0034/ST-BPP.PAI/XI/2023

**Hal : Surat Tugas Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis
Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.**

Dengan ini kami selaku Pengurus Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advocaten Indonesia (BPP.PAI) memberikan tugas kepada yang bernama di bawah ini :

Nama : Agus Sudrajat, S.H., M.H.

Jabatan : Anggota Perkumpulan Advocaten Indonesia (PAI)

Untuk menghadiri dan mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI dari Perkumpulan Advocaten Indonesia, yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d 29 November 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. Maka kami berikan Surat Tugas ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya guna kepentingan yang bersangkutan.

Dikeluarkan di: Jakarta
Pada tanggal: 24 November 2023

**BADAN PIMPINAN PUSAT
PERKUMPULAN ADVOCATEN INDONESIA
(BPP-PAI)**


Dr. SULTAN JUNAIDI, S.Sy, M.H., Ph.D

Ketua Umum




TOMMY TRI YUNANTO, S.T, S.H, M.H

Sekretaris Jenderal



**BADAN PIMPINAN PUSAT
PERKUMPULAN ADVOCATEN INDONESIA
(BPP-PAI)**

KEPMEN. KUM & HAM R.I NOMOR: AHU-0004423.AH.01.07 TAHUN 2017

Jl. Rawa Bambu Raya No. 16E, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520.

Mobile: 0812 2243 3337 – 0838 6349 7221

E-mail: junslawfirm.jl@gmail.com Website: www.advokat-pai.or.id

SURAT TUGAS

Nomor : 0035/ST-BPP.PAI/XI/2023

**Hal : Surat Tugas Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis
Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.**

Dengan ini kami selaku Pengurus Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advocaten Indonesia (BPP.PAI) memberikan tugas kepada yang bernama di bawah ini :

Nama : Nodi Putrado, S.H., M.H.

Jabatan : Anggota Perkumpulan Advocaten Indonesia (PAI)

Untuk menghadiri dan mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI dari Perkumpulan Advocaten Indonesia, yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d 29 November 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. Maka kami berikan Surat Tugas ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya guna kepentingan yang bersangkutan.

Dikeluarkan di: Jakarta
Pada tanggal: 24 November 2023

**BADAN PIMPINAN PUSAT
PERKUMPULAN ADVOCATEN INDONESIA
(BPP-PAI)**


Dr. SULTAN JUNAIDI, S.Sy, M.H., Ph.D

Ketua Umum




TOMMY TRI YUNANTO, S.T, S.H, M.H

Sekretaris Jenderal



**BADAN PIMPINAN PUSAT
PERKUMPULAN ADVOCATEN INDONESIA
(BPP-PAI)**

KEPMEN. KUM & HAM R.I NOMOR: AHU-0004423.AH.01.07 TAHUN 2017

Jl. Rawa Bambu Raya No. 16E, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520.

Mobile: 0812 2243 3337 – 0838 6349 7221

E-mail: junslawfirm.jl@gmail.com Website: www.advokat-pai.or.id

SURAT TUGAS

Nomor : 0036/ST-BPP.PAI/XI/2023

**Hal : Surat Tugas Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis
Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.**

Dengan ini kami selaku Pengurus Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advocaten Indonesia (BPP.PAI) memberikan tugas kepada yang bernama di bawah ini :

Nama : Ani Sukmawati, S.H.

Jabatan : Anggota Perkumpulan Advocaten Indonesia (PAI)

Untuk menghadiri dan mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI dari Perkumpulan Advocaten Indonesia, yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d 29 November 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. Maka kami berikan Surat Tugas ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya guna kepentingan yang bersangkutan.

Dikeluarkan di: Jakarta
Pada tanggal: 24 November 2023

**BADAN PIMPINAN PUSAT
PERKUMPULAN ADVOCATEN INDONESIA
(BPP-PAI)**


Dr. SULTAN JUNAIDI, S.Sy, M.H, Ph.D

Ketua Umum


TOMMY TRI YUNANTO, S.T, S.H, M.H

Sekretaris Jenderal

Data Peserta Registrasi
Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	INSTANSI	Pendidikan	Jabatan
1	Marina Mayasari, S.H.	Perempuan	DPD ABI Bali	S1	Anggota
2	Robin Riduan, SH, M.Kn, CLA, CCD, CLMC, CBLC, CTLC, C.Med	Laki-laki	DPD ABI Banten	S2	Ketua
3	I Wayan Baktiasa, S.H., M.H., CLA, CLI, CMC	Laki-laki	DPD ABI Bali	S2	Ketua
4	Rahmat Mulyana, S.H.	Laki-laki	DPD ABI Jawa Barat	S1	Ketua
5	Dr. Ni Wayan Suryathi, SE, SH, MM, M.Agb, C.Med, CAPG	Perempuan	DPD ABI Bali	S3	Anggota
6	Richard Pratama Sumanli, SH	Laki-laki	DPD ABI Banten	S1	Anggota
7	Dr. Panti Silaban, S.Kom.,SH.,MH.	Laki-laki	DPD ABI Jawa Barat	S3	Anggota
8	Mujiati, S.Pd, SH, MH	Perempuan	DPC ABI Surabaya	S2	Sekretaris
9	Budiyanto, SH, CCD, CIRP	Laki-laki	DPD ABI Banten	S1	Bendahara
10	I Made Maha Atmaja, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD ABI Bali	S2	Anggota
11	I Made Sukayasa, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD ABI Bali	S2	Anggota
12	F. Puspita Sari, S.H., M.H.	Perempuan	DPC ABI Jakarta Selatan	S2	Sekretaris
13	Celvin Theys, S.H., CIRP., CMLC., CCD.	Laki-laki	DPD ABI Banten	S1	Anggota
14	Elsa Ugami Suprihatin, S.H., CTA.	Perempuan	DPD ABI Jawa Barat	S1	Anggota
15	Kristal Pamungkas, SH	Laki-laki	DPC ABI Sidoarjo	S1	Ketua
16	Grammy Balthazar Christiano, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD ABI Banten	S2	Anggota
17	Hopaldes Pirman Panaili, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP ABI	S2	Ka Dept. Organisasi
18	Muslikul Tohari, SH	Laki-laki	DPC ABI Kediri	S1	Ketua
19	Diana Ivory, S.H.,M.H.,C.Md	Perempuan	PERADAN	S2	Anggota
20	Dicky Andika Hartanto, SH	Laki-laki	DPC ABI Surabaya	S1	Anggota
21	Laila Zahra, S.H.	Perempuan	Serikat Pengacara Indonesia	S1	Anggota
22	Achmad Mariadi, S.H.	Laki-laki	DPC ABI Sidoarjo	S1	Anggota
23	I Made Dwikka Surya Pratama, S.H.	Laki-laki	DPD ABI Bali	S1	Anggota
24	Ruben Fritson, S.H.	Laki-laki	PERHAKHI	S1	Anggota
25	Deasy Anna Victorina, S.H.	Perempuan	PERHAKHI	S1	Ketua Bidang PPA & Disabilitas
26	Karolus Ewantino, S.T., C.Md.	Laki-laki	PERADAN	S1	Staff Dep Non Litigasi
27	Sapto Wibowo Sutanto, SH	Laki-laki	PERHAKHI	S1	Ketua DPD PERHAKI DKI/PANITIA

28	Evi Sundari, S.H.	Perempuan	Serikat Pengacara Indonesia	S1	Anggota DPC Bogor
29	Ubat Riadi Pasaribu, S.H., M.H.	Laki-laki	IPHI	S2	Ketua DPD IPHI Sumatera Utara
30	Andi Wijaya KAD, S.H.	Laki-laki	Serikat Pengacara Indonesia	S1	Anggota DPC Bogor
31	Mista, S.H.	Laki-laki	Serikat Pengacara Indonesia	S1	Anggota DPC Bogor
32	Georgian Obertha, S.H.	Laki-laki	PERHAKHI	S1	Wakil Sekjend
33	Irwansyah Putera, S.H.	Laki-laki	IPHI	S1	Wakil Ketua DPD IPHI Sumatera Utara
34	Rozhi Ananda Sitepu, S.H., M.Kn.	Laki-laki	PERHAKHI	S2	Anggota
35	Dadang Rohendi, S.H., M.H.	Laki-laki	PERADAN	S2	Ketua PERADAN Pekalongan
36	Novensius Damai Sejahtera Duha, S.H., C.Md.	Laki-laki	PERADAN	S1	Sekretaris PERADAN Nias Selatan
37	Maradona Sinuraya, S.H., M.H.	Laki-laki	DPC ABI Jakarta Barat	S2	Anggota
38	Tedy Subrata, SH., MH.	Laki-laki	IPHI	S2	Ketua DPC Kota Tangerang
39	Adv. Agung Fatahillah, S.H.	Laki-laki	Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI)	S1	Anggota DPD IPHI Lampung
40	ADV Jumadi, SH.	Laki-laki	IPHI	S1	Ketua DPC Kota Serang Banten
41	Sahidi, S.E., S.H.M Hum.	Laki-laki	IPHI	S2	Bendahara IPHI DPD Sumatra utara
42	Muhammad Ridwan, SH., MM.	Laki-laki	IPHI	S2	Ketua DPC Kota Cilegon
43	Jeffry Palijama, S.H.	Laki-laki	PERHAKHI	S1	Ketua Bid. Organisasi
44	Tri Adi Soerjanto, A.Md. AF., S.H., C.MSP.	Laki-laki	DPD ABI Jawa Tengah	S1	Anggota
45	Ihsan Firmansyah, S.H.	Laki-laki	Organisasi Advokat DPN Indonesia	S1	Direktur Perdata
46	Candra Widya Wardhana, SH, MH	Laki-laki	DPC ABI Surabaya	S2	Anggota
47	I Ketut Suandika, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD ABI Bali	S2	Anggota
48	Pitira Romadoni Nasution, S.H., M.H.	Laki-laki	PERKUMPULAN PENASIHAT DAN KONSULTAN HUKUM INDONESIA (PERHAKHI)	S2	SEKRETARIS JENDRAL
49	IHYA ULUMUDIN, S.H.	Laki-laki	PERADAN	S1	Anggota
50	Yudha Adhi Oetomo, SH.,MH.,CLA.	Laki-laki	PERHAKHI	S2	Wakil Sekjend
51	Lukman Efendi, SH	Laki-laki	DPC ABI Surabaya	S1	Anggota
52	JERI, S.H.	Laki-laki	Serikat Pengacara Indonesia	S1	Advokat

53	Dr. Noorita Rusiana Indriati, S.E., S.H., M.H., M.Kn.	Perempuan	PERHAKHI	S3	Ketua Bid. Pengembangan Kualitas Anggota Dan Pelatihan Para Legal
54	Husnul Yaqin, S.H	Laki-laki	PERADAN	S1	Anggota
55	Ahmad Qodriansyah, S.H., S.Si.,C.Md.	Laki-laki	PERADAN	S1	Anggota
56	Muhammad Reza Triandi, S.H.	Laki-laki	IPHI	S1	Anggota
57	Ngadimin, SH., MH.	Laki-laki	IPHI	S2	Sekretaris DPD IPHI Lampung
58	Adv. Priyono Adi Nugroho, S.Pd., S.H., M.H., M.Pd., CLMC.	Laki-laki	PERADAN	S2	Ketua PERADAN Kota Tangerang
59	Adv Tusyana Priyatin, S.H.	Laki-laki	Serikat Pengacara Indonesia	S1	Ketua DPC Sukabumi
60	Dr. Januri, S.Pd., SH., MH., CPCLE., CPM., CPArb	Laki-laki	IPHI	S3	Anggota DPD IPHI Lampung
61	Juliarman Gulo, S.H	Laki-laki	PERADAN	S1	Anggota
62	Mijoto Solekan, S.H., S.T., S.E., M.H., M.M.	Laki-laki	DPP ABI	S2	Sekretaris Jenderal
63	Sri Sudarti, S.H., S.E., M.H., M.M.	Perempuan	DPP ABI	S2	Ketua Umum
64	Wahyu Prasetyo, S.H.	Laki-laki	PERADAN	S1	Sekretaris PERADAN Tangerang
65	Arinus Duha, S.H.,C.Md	Laki-laki	PERADAN	S1	Sekretaris Dep Non Litigasi
66	YULSANDI PRAMANA PUTRA, S.H., M.Kn.	Laki-laki	PERHAKHI	S2	Anggota
67	Dr. Ir Yacintha Yessica Desiana, S.H.,M.Th	Perempuan	PERADAN	S3	Fasilitator PERADAN Semarang
68	Pipit Suwito, S.H.,M.H.	Laki-laki	Serikat Pengacara Indonesia	S2	Anggota
69	M. Habibullah Firdaus, S.H.	Laki-laki	PERADI	S1	
70	Wiwik Winarsih, S.H., M.Kn.	Perempuan	PERHAKHI	S2	Anggota
71	Dr. H. Kurnia Zakaria, S.H.,M.H.	Laki-laki	PERHAKHI	S3	Sekretaris Paralegal
72	Francois H. Hallatu, S.H., M.M.	Laki-laki	PERHAKHI	S2	Anggota
73	Angelieke Jeanette, S.H., M.H.	Perempuan	PERHAKHI	S2	Waketum II
74	Elianta Ginting, S.H., M.H.	Perempuan	PERHAKHI	S2	PKPA
75	Dr. Robby Dareho, S.H., M.Th., C.NSP.	Laki-laki	PERHAKHI	S3	Dewan Pakar
76	Ridwan Abdullah, S.H	Laki-laki	Serikat Pengacara Indonesia	S1	anggota
77	Moh Mahdi, S.H.	Laki-laki	PERHAKHI	S1	Anggota
78	Siti Sari Finarsih, S.H.	Perempuan	Serikat Pengacara Indonesia	S1	Anggota

79	Banua Sanjaya Hasibuan, SH.MH	Laki-laki	PERHAKHI	S2	Wakil Sekjend
80	Robby Yudianto Utama MS, S.H., M.H.	Laki-laki	Serikat Pengacara Indonesia	S2	anggota
81	M.O. Saut Hamonangan Turnip, S.H., C.T.L.C., C.T.T	Laki-laki	Serikat Pengacara Indonesia	S1	Anggota
82	Drs. Makki Yulianwan, SH MSi	Laki-laki	Serikat Pengacara Indonesia	S2	Ketua DPC Kota Bandung
83	Imam Hikmat, S.H.	Laki-laki	Serikat Pengacara Indonesia	S1	Wakil Ketua DPC Bandung
84	Ade Safrudin, S.H., M.H.	Laki-laki	Serikat Pengacara Indonesia	S2	Wakil Ketua DPC Bandung
85	Dipranto Tobok Pakpahan, S.H.	Laki-laki	Serikat Pengacara Indonesia	S1	Anggota
86	Yohana Fitri, S.I.Kom., S.H.	Perempuan	PERADAN	S1	Anggota
87	Lenarki Latupeirissa, S.H., M.H.	Laki-laki	PERHAKHI	S2	
88	Samaigi Gaho, C.Md	Laki-laki	PERADAN	S1	Kepala Dep Non Litigasi
89	Adv Indranas Gaho, S.H.,M.Kn.,CLA.,CIA.,M.Th.,C.Md.,ASP	Laki-laki	PERADAN	S2	Ketua Umum PERADAN
90	Berto Herora Harahap, SH	Laki-laki	Serikat Pengacara Indonesia	S1	Anggota
91	Adv. Dicky Patadjenu, S.H.,M.H.,C.Md	Laki-laki	PERADAN	S2	Koorwil PERADAN Sulawesi Tengah
92	Djeni Marthen, S.H., M.H.	Perempuan	Serikat Pengacara Indonesia	S2	Anggota
93	Rahmawati Sukri, S.H.	Perempuan	PERADAN	S1	Ketua PERADAN Parigi Moutong
94	AGNES JULENDA PANGAU, S.H., M.H.	Perempuan	IPHI	S2	Anggota
95	Risnandar Kobandaha, S.H.	Laki-laki	PERADAN	S1	Anggota
96	Yubili Oxford George, S.E.	Laki-laki	PERADAN	S1	Anggota / Sekretaris Komando Bantuan Hukum PERADAN Sulawesi Tengah
97	Gading Satria Nainggolan, S.H., M.H.	Laki-laki	Organisasi Advokat	S2	Advokat
98	Jefri Haryono Nainggolan, S.H.	Laki-laki	Organisasi Advokat	S1	Advokat PERADI
99	Ade Salamah, SH., MH	Perempuan	PERHAKHI	S2	Anggota
100	Martiningsih, S.H., M.H.	Perempuan	PERHAKHI	S2	Sekretaris Penempatan Magang dan Pengangkatan Advokat
101	H. Sonny Kusuma, S.H., M.H., CP., SP.	Laki-laki	PERHAKHI	S2	
102	Ceperianus Gea, S.H	Laki-laki	PERADAN	S1	Anggota

103	Ridwan Darmawan, S.H., M.H	Laki-laki	Serikat Pengacara Indonesia	S1	DPC SPI Jakarta Selatan
104	Safiril Partang, SH.MH	Laki-laki	PERHAKHI	S2	Wakil Sekjend
105	Sarwono, S.E., S.H., M.H.	Laki-laki	Serikat Pengacara Indonesia	S2	Advokat
106	Ridwan, SH	Laki-laki	PERHAKHI	S1	Anggota
107	Paulus Peringatan Gulo, S.H., M.H.	Laki-laki	PERADAN	S2	Koorwil PERADAN Medan Raya
108	Kholilul Kholik, S.H.,M.H	Laki-laki	PERADAN	S2	Ketua PERADAN Kota Medan
109	Sri Widoyanti, S.H.	Perempuan	PERHAKHI	S1	Anggota
110	Andi Bashar, SH,MH	Laki-laki	PERHAKHI	S2	Wakil Ketua Umum
111	Dr. Ali Yusran Gea, S.H., M.Kn., M.H.	Laki-laki	PERHAKHI	S3	Ketua DPD PERHAKI Sumatera Utara
112	Dr. Dadang Herli Saputra, S.IP.,S.H.,S.S.,M.H.,M.Si.,M.Kn	Laki-laki	PERADAN	S3	Koorwil PERADAN Banten
113	Nelson Nikodemus Simamora, S.H.	Laki-laki	IKA Permahi	S1	Anggota
114	Michael Himan, S.H., M.H.	Laki-laki	Organisasi Advokat	S2	IKA PERMAHI
115	Anas Pratama, S.H	Laki-laki	PERADAN	S1	Anggota
116	Dr. Nuryanto A. Daim, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP ABI	S3	Pengawas
117	Abdul Robin, S.H.	Laki-laki	PERADAN	S1	Anggota
118	Dasep Rahman Hakim, S.H., M.H.	Laki-laki	Perkumpulan Advocaten Indonesia (PAI)	S2	Anggota
119	Barokah, S.H., M.H.	Laki-laki	Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)	S2	Anggota
120	Moh Hasan Merah, S.H.	Laki-laki	Perkumpulan Advocaten Indonesia (PAI)	S1	Sekretaris Wilayah Jabar
121	H. Herwan Budiah, S.H., M.H.	Laki-laki	Perkumpulan Advocaten Indonesia (PAI)	S2	Ketua Bpw Jabar
122	Nodi Putrado, S.H., M.H.	Laki-laki	Perkumpulan Advocaten Indonesia (PAI)	S2	Anggota
123	Ani Sukmawati, S.H.	Perempuan	Perkumpulan Advocaten Indonesia (PAI)	S1	Anggota
124	Guruh Agustian, S.H.	Laki-laki	Perkumpulan Advocaten Indonesia (PAI)	S1	Anggota
125	Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.M.	Laki-laki	Organisasi Advokat	S2	Managing Director
126	Siti Jubaidah, S.H.	Perempuan	Perkumpulan Advocaten Indonesia (PAI)	S1	Anggota

127	Dede Dahlan, Sip., S.H., M.H.	Laki-laki	Perkumpulan Advocaten Indonesia (PAI)	S2	Anggota
128	Alzam Afika, S.H.	Laki-laki	Perkumpulan Advocaten Indonesia (PAI)	S1	Anggota
129	Agus Sudrajat, S.H., M.H.	Laki-laki	Perkumpulan Advocaten Indonesia (PAI)	S2	Anggota
130	Raden Giri, S.H.I.	Laki-laki	Perkumpulan Advocaten Indonesia (PAI)	S1	Ketua Bpc Bekasi Raya.
131	George Elkel, S.Sos.,S.H	Laki-laki	PERADAN	S1	Koorwil PERADAN Maluku
132	Diarson Lubis, SH.	Laki-laki	Serikat Pengacara Indonesia	S1	Wakil Ketua DPP SPI
133	Agus Murianto, S.H.	Laki-laki	Serikat Pengacara Indonesia	S1	
134	Yohan Bayu Afiyanto, S.H.	Laki-laki	Serikat Pengacara Indonesia	S1	Sekretaris DPC Sukabumi